



LAPORAN KINERJA PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
MARET 2026**



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua ini dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pencapaian Kinerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 kepada seluruh stakeholders.

Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu pada

Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026.

Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2025 ini lebih diarahkan pada terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Realisasi Kinerja dalam Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Materi LKj mengandung analisis pencapaian indikator sasaran dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk tahun yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LKj) juga memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Pemerintah Provinsi Papua dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan, juga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Provinsi Papua pada masa mendatang.

Capaian Sasaran Pemerintah Provinsi Papua yang diukur melalui indikator target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 adalah predikat **“Sangat Berhasil”**. Pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 kami sampaikan, kiranya dapat menjadi bahan dalam rangka pengambilan kebijakan dan evaluasi terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa, negara dan masyarakat.

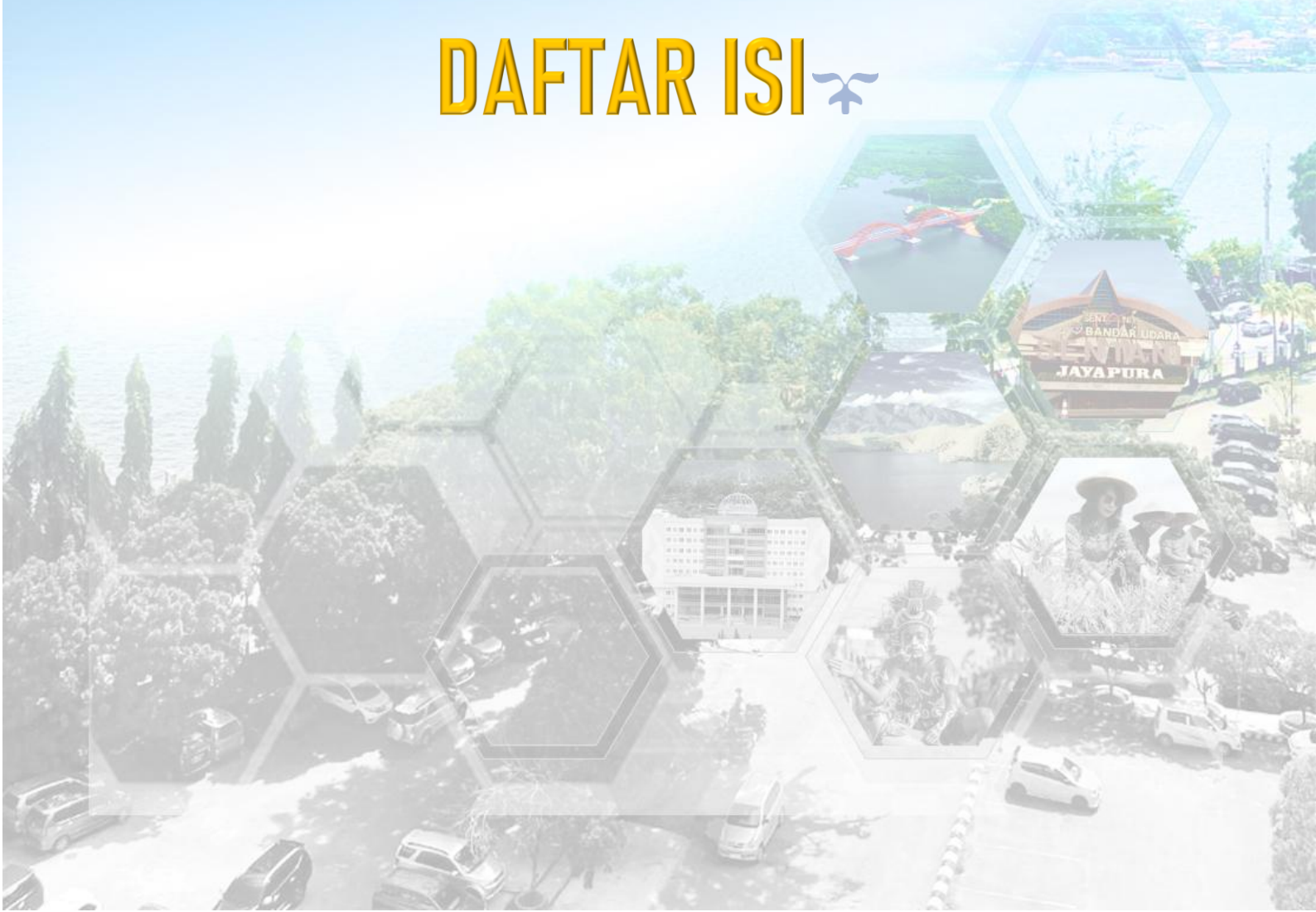
Jayapura, 6 Maret 2026

GUBERNUR PAPUA

MATTUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H
KOMJEN POL (Purn)



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA.....	1
1.1.1. Kondisi Geografis	1
1.1.2. Kondisi Demografis	2
1.1.3. Kondisi Pemerintahan.....	4
1.1.4. Kondisi Perekonomian.....	7
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	10
BAB II	
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	13
2.1. RENCANA STRATEGIS	13
2.1.1. Pernyataan Visi dan Misi.....	13
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	23
2.1.3. Strategi Pembangunan Daerah.....	26
2.1.4. Strategi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025.....	30
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	34
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	42
3.1. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA.....	42
3.2. CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA.....	45
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	148

BAB
IV

PENUTUP227

A. SIMPULAN.....227

B. UPAYA PERBAIKAN231

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026;
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) GUBERNUR PAPUA TAHUN 2025;
3. REVIU LAPORAN KINERJA (LKj) PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 OLEH INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA;
4. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DI TAHUN 2025.



RINGKASAN EKSEKUTIF


Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua selama tahun 2025. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 dapat dilihat dari keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran dari Target Indikator berdasarkan Rencana Kinerja 2025 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Dari hasil Pengukuran Kinerja pada 26 (Dua Puluh Enam) Sasaran, dapat disimpulkan Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua "**Sangat Berhasil**", hal ini dapat dilihat pada Capaian Kinerja pelaksanaan masing-masing Sasaran sebagai berikut :

- ❖ 18 Sasaran termasuk dalam kategori "Sangat Berhasil".
- ❖ 2 Sasaran termasuk dalam kategori "Berhasil".
- ❖ 3 Sasaran termasuk dalam kategori "Cukup Berhasil".
- ❖ 1 Sasaran termasuk dalam kategori "Kurang Berhasil".
- ❖ 2 Sasaran termasuk dalam kategori "Tidak Berhasil".

Secara umum masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:

1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target Kinerja, pengukuran dan evaluasi IKU yang belum dilaksanakan secara baik.
2. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
 - 1) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2025.
 - 2) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.
3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.



Dari segi Akuntabilitas Keuangan, total anggaran Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.000.847.324.387,94 dan anggaran yang diperuntukkan melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 26 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp614.740.469.378,37 atau 30,72 Persen. Realisasi belanja prioritas IKU adalah Rp590.910.432.246,76 atau 30,56 Persen dari anggaran untuk melaksanakan prioritas Indikator Kinerja Utama (IKU).

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2025 adalah Rp2.933.406.487.182,23 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp932.559.162.794,29 dan Belanja Langsung Rp2.000.847.324.387,94. Dari anggaran Belanja Langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai Prioritas IKU adalah sebesar Rp614.740.469.378,37 atau 30,72 persen dari anggaran Belanja Langsung. Realisasi dari Anggaran yang digunakan untuk mencapai Prioritas IKU adalah sebesar Rp590.910.432.246,76 dari Realisasi Belanja Langsung atau 30,56 persen. Persentase Realisasi Anggaran untuk mencapai Prioritas IKU dibandingkan dengan Anggaran untuk melaksanakan Prioritas IKU adalah 20,14 persen. Penyerapan Anggaran untuk melaksanakan Prioritas IKU sebesar 20,14 persen tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan Program Prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.



BAB I





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM PROVINSI PAPUA

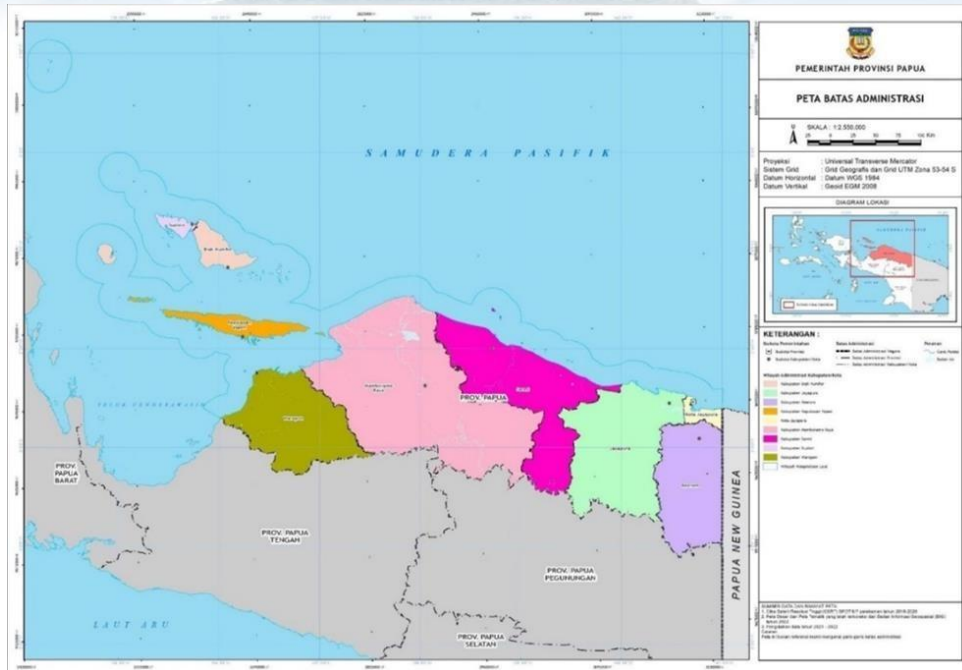
Provinsi Papua secara geografis berada di antara garis koordinat $1^{\circ} 8' 20.8752''$ LU - $4^{\circ} 6' 58.626''$ LS dan $134^{\circ} 5' 58.8444''$ - $141^{\circ} 0' 37.5912''$ BT. Batas wilayah Provinsi Papua secara administratif meliputi:

- a. Sebelah Utara : Samudra Pasifik;
- b. Sebelah Selatan : Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
- c. Sebelah Barat : Provinsi Papua Barat;
- d. Sebelah Timur : Negara Papua New Guinea.

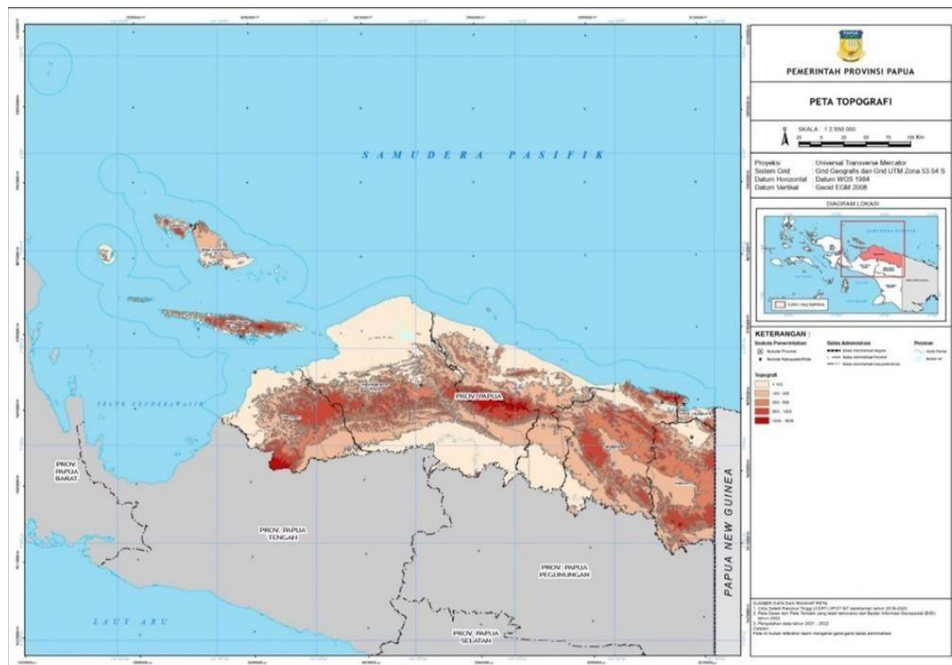
Provinsi Papua memiliki luas wilayah kurang lebih 13.158.285,28 hektar dengan batasan wilayah terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut seluas kurang lebih 13.158.285,38 hektar. Adapun wilayah darat memiliki luas kurang lebih 8.268.837,32 hektar dengan 8 kabupaten dan 1 kota di dalamnya yang dapat dilihat pada gambar peta. Kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu:

- a. Kota Jayapura;
- b. Kabupaten Jayapura;
- c. Kabupaten Keerom;
- d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
- e. Kabupaten Mamberamo Raya;
- f. Kabupaten Sarmi;
- g. Kabupaten Supiori;
- h. Kabupaten Biak Numfor; dan
- i. Kabupaten Waropen.

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Provinsi Papua

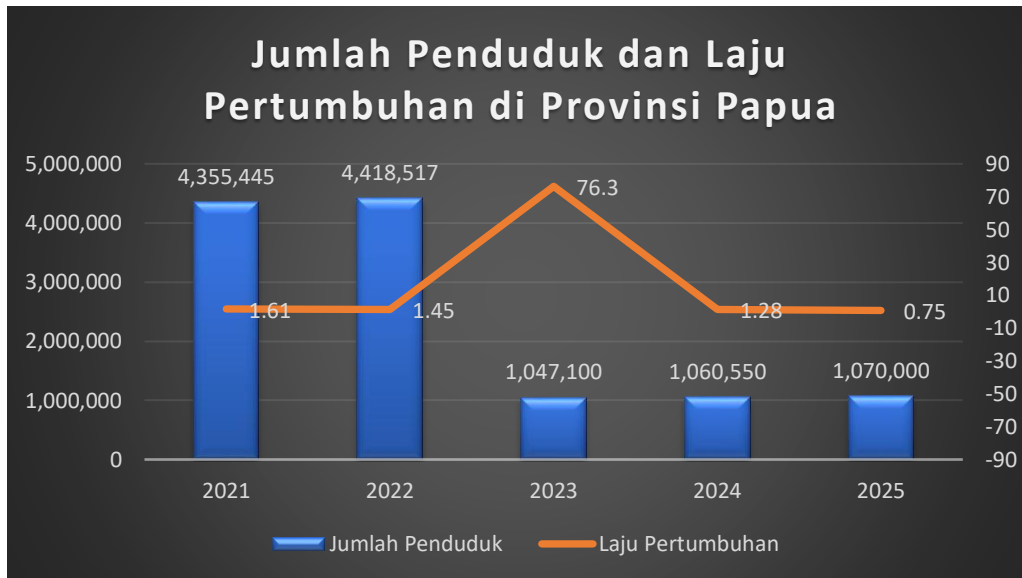


Gambar. 1.2 Peta Ketinggian Provinsi Papua



Jumlah penduduk Papua tahun 2025 adalah 1.070.000 jiwa yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar mendiami Kota Jayapura sebesar 426.110 jiwa. Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk Perempuan, mencerminkan pola demografi yang serupa dengan tahun-tahun sebelumnya.

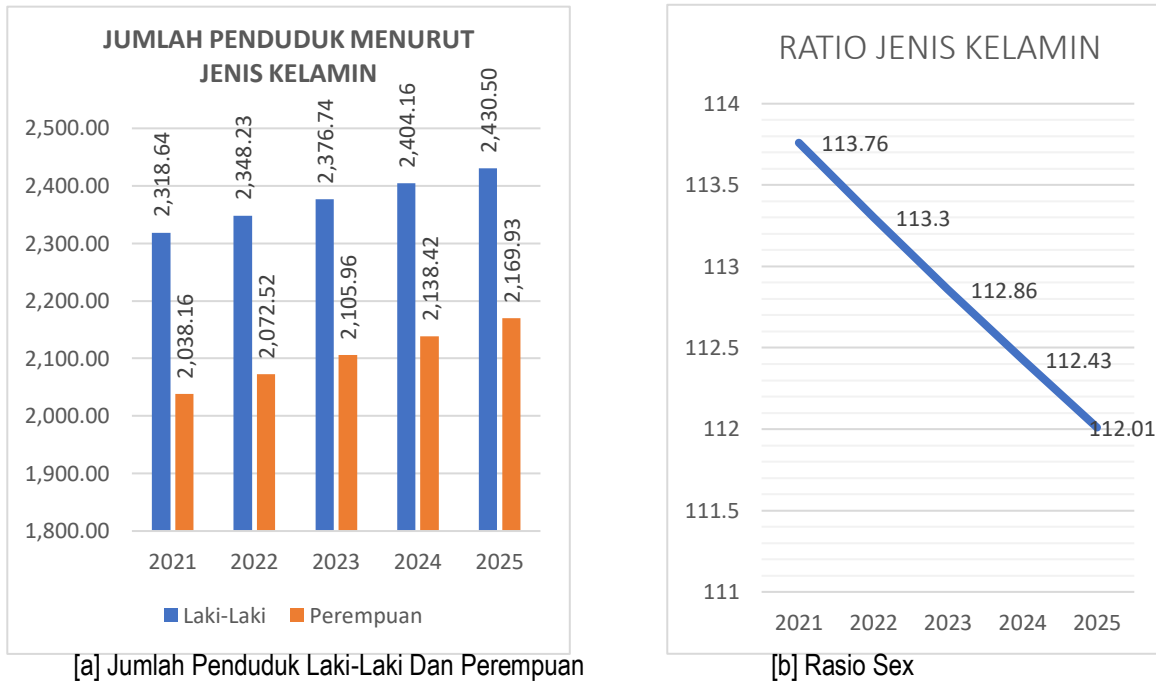
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Papua Tahun 2021 – 2025



Sumber : BPS, 2025

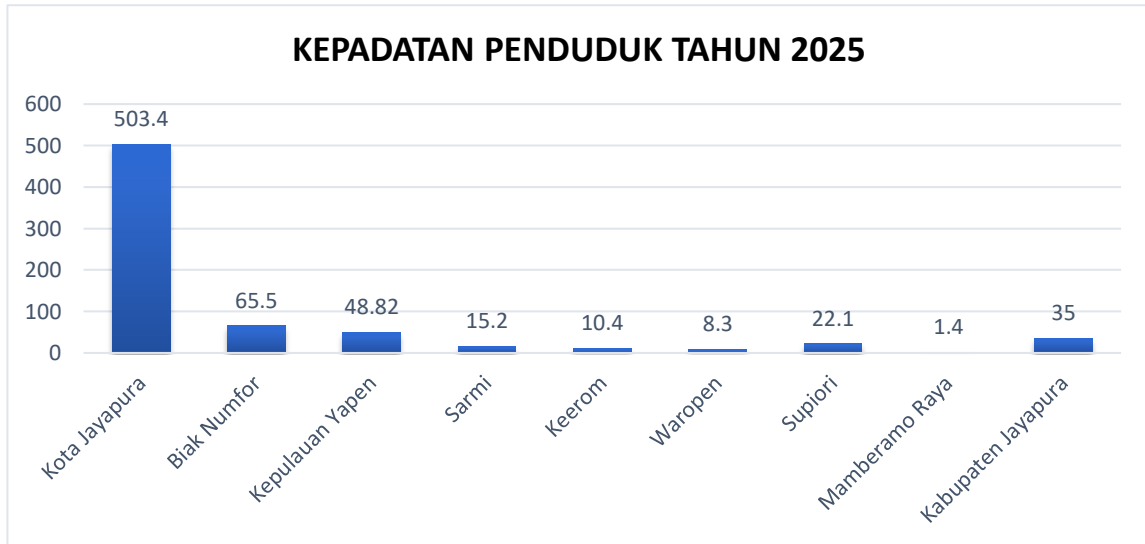
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex di Provinsi Papua

Tahun 2021-2025



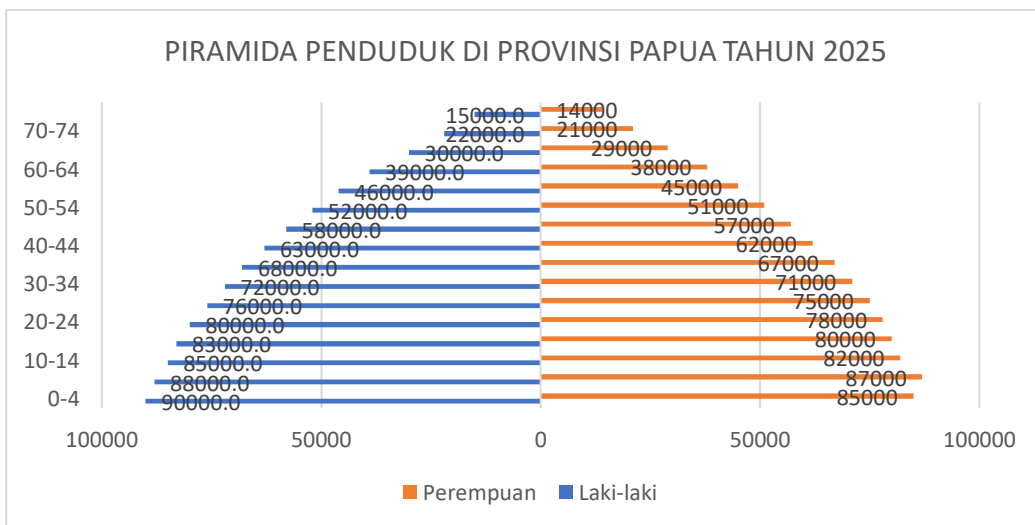
Dengan luas wilayah 82.680,95 km², kepadatan penduduk Provinsi Papua pada tahun 2025 tercatat sebesar 14,33 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Jayapura yaitu sebesar 503,40 jiwa per km², diikuti oleh Kabupaten Biak Numfor sebesar 65,50 jiwa per km² dan Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 48,82 jiwa per km². Sementara itu, kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mamberamo Raya dengan tingkat kepadatan kurang dari 1,40 jiwa per km².

Grafik 1.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2025



Penduduk Papua tahun 2025 berdasarkan kelompok umur masih didominasi oleh kelompok usia muda, yaitu kelompok usia 0–4 tahun pada laki-laki dan 5–9 tahun pada perempuan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (75 tahun ke atas) relatif kecil. Komposisi penduduk yang didominasi usia muda tersebut menyebabkan rasio ketergantungan di Papua pada tahun 2025 tergolong cukup tinggi, yaitu sebesar 59,77 persen.

Grafik 1.4 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2025



1.1.1 Kondisi Pemerintahan

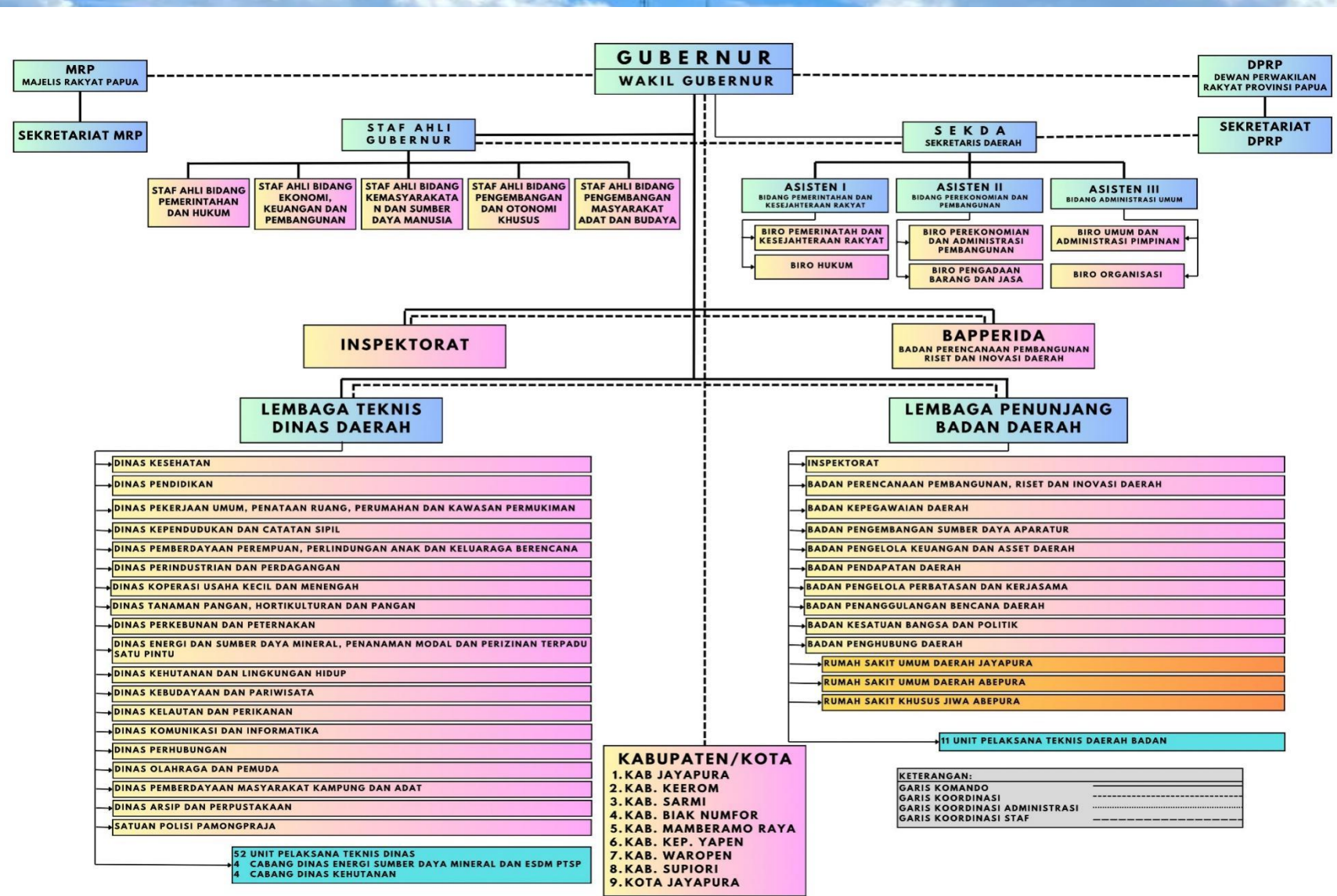
Provinsi Papua terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Secara lebih lanjut, Pada tahun 2025 Provinsi Papua tercatat memiliki 115 distrik dengan 1.032 kampung/kelurahan. Kabupaten Biak Numfor menjadi kabupaten dengan jumlah wilayah administratif distrik terbanyak di Provinsi Papua yaitu 19 distrik dan 268 kampung/kelurahan. Selanjutnya, Kabupaten Supiori menjadi wilayah administratif dengan jumlah kampung terbanyak yaitu 38 kampung yang tersebar di 5 distrik.

Tabel 1.1 Jumlah Distrik, Desa dan luas wilayah menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Papua Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan
Jayapura	144	19
Kepulauan Yapen	165	16
Biak Numfor	268	19
Sarmi	111	19
Keerom	91	11
Waropen	117	12
Supiori	38	5
Mamberamo Raya	59	9
Kota Jayapura	39	5
Provinsi Papua	1.032	115

Sumber: BPS (Papua Dalam Angka 2025)

Gambar 1.3 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025



1.1.2 Kondisi Perekonomian

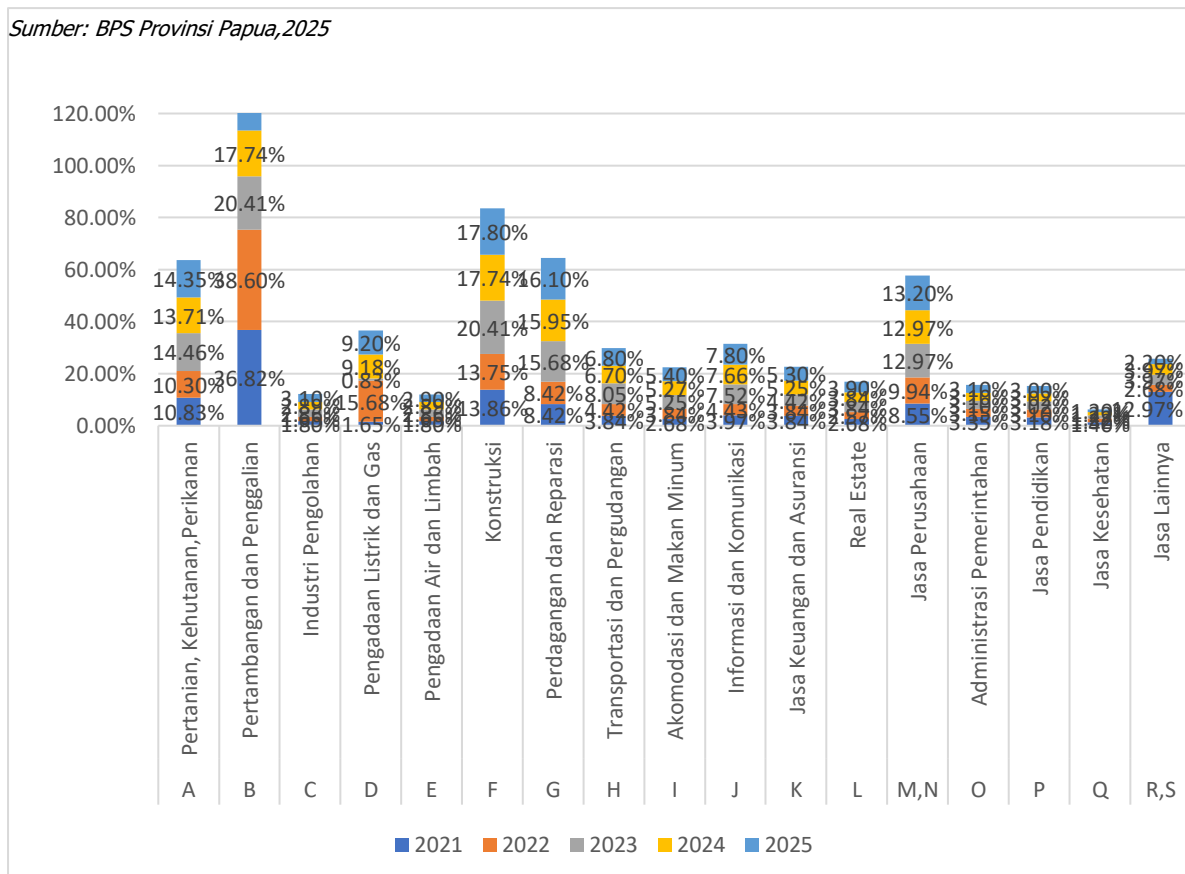
A. Struktur Ekonomi

Distribusi persentase PDRB ADHB terbesar menurut lapangan usaha tahun 2025 di Provinsi Papua pada kategori konstruksi 17,74 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,95 persen, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan 13,71 persen.

Grafik 1.5 Distribusi PDRB ADHB

Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Papua (%) tahun 2025

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2025



B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua atas dasar harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah masing-masing 189.510,70 miliar rupiah (2019), 199.186,57 miliar rupiah (2020), 235.486,12

miliar rupiah (2021), 262.515,82 miliar rupiah (2022), 81.737,92 miliar rupiah (2023) dan 85.914,33(2024). Data tahun 2024 merupakan data PDRB ADHB Provinsi Papua.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan

Tahun 2019 - 2025

TAHUN	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN
2019	189.510,70	134.565,89
2020	199.186,57	137.787,29
2021	235.487,47	158.675,15
2022*	262.519,79	172.907,29
2023*	81.737,92	49.549,83
2024**	85.914,33	51.587,16
2025*	23.821.100	13.580.500

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Provinsi Papua.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), adalah :

1. Merupakan sarana bagi Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerjadan Penetapan Kinerja

Pada bab ini diuraikan diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerjатаhun yang bersangkutan.


Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi.

3.2 Capaian, Analisis, dan Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran sasaran dan program yang mendukung sasaran, yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024-2026

Perjanjian Kinerja (PK) 2025

Penghargaan-Penghargaan di Tahun 2025



BAB II





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2024-2026

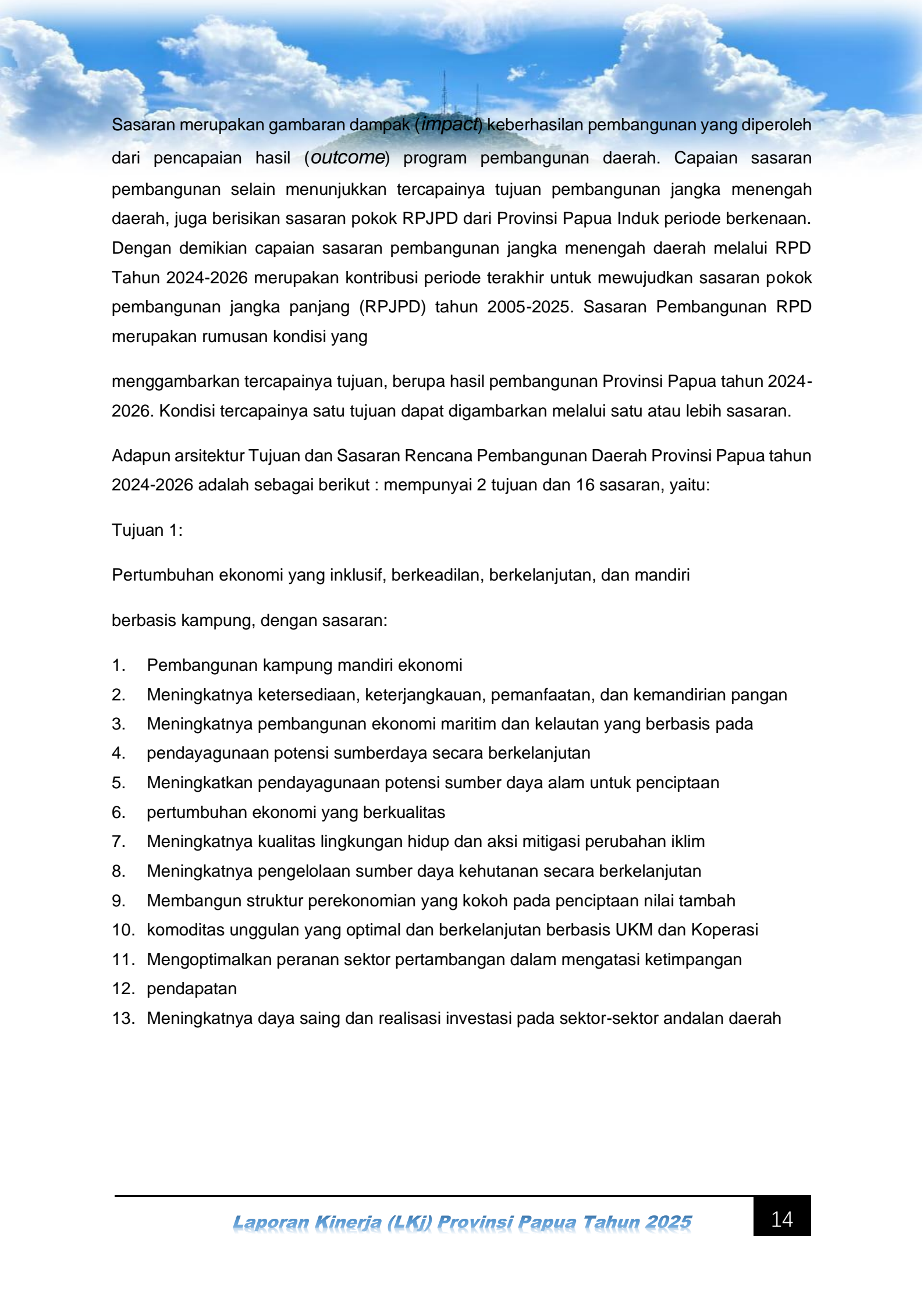
Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan melalui pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi dalam perencanaan pembangunan

jangka menengah daerah, dan selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dan Sasaran dalam RPD Provinsi Papua juga disusun dengan memperhatikan pokok masalah dan permasalahan, serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab (IV) empat sebelumnya.

Tabel Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Papua, Agenda Pembangunan RPJMN dan Isu Strategis Provinsi Papua terhadap Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026

Misi RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025	Agenda Pembangunan RPJMN	Isu Strategis Provinsi Papua Tahun 2023-2026	Tujuan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026
Mewujudkan Kemandirian Sosial	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya Saing	Peningkatan Sumber Daya Manusia (Pendidikan, Kesehatan dan Gizi)	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang mandiri, sejahtera dan

Mewujudkan Kemandirian Budaya	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		berdaya saing
Mewujudkan Kemandirian Politik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
		Pemantapan rasa aman dan suasana demokrasi yang kondusif sbg landasan utama pembangunan	
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pengembangan Wilayah	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pengurangan kesenjangan, peningkatan pemerataan pembangunan dan konektivitas antar wilayah dan Kabupaten	Percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada Layanan Dasar dan Pasar
	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan klim	
	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan berbasis komoditas dan karakteristik Lokal di dukung oleh Pembangunan Infrastuktur	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan mandiri berbasis kampung
Mewujudkan Kemandirian Masyarakat Asli Papua	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		



Sasaran merupakan gambaran dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program pembangunan daerah. Capaian sasaran pembangunan selain menunjukkan tercapainya tujuan pembangunan jangka menengah daerah, juga berisikan sasaran pokok RPJPD dari Provinsi Papua Induk periode berkenaan. Dengan demikian capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah melalui RPD Tahun 2024-2026 merupakan kontribusi periode terakhir untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang (RPJPD) tahun 2005-2025. Sasaran Pembangunan RPD merupakan rumusan kondisi yang

menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026. Kondisi tercapainya satu tujuan dapat digambarkan melalui satu atau lebih sasaran.

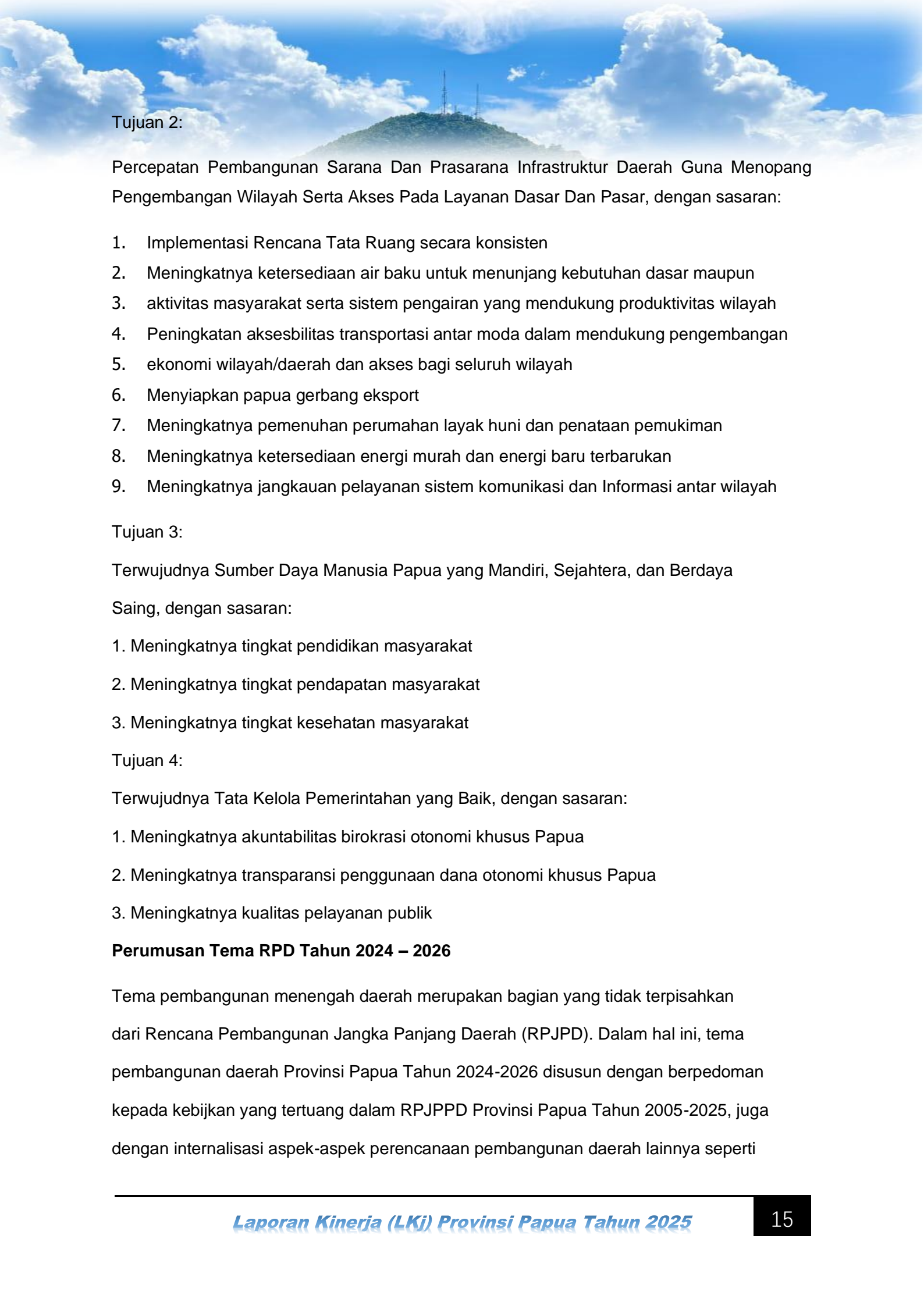
Adapun arsitektur Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut : mempunyai 2 tujuan dan 16 sasaran, yaitu:

Tujuan 1:

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri

berbasis kampung, dengan sasaran:

1. Pembangunan kampung mandiri ekonomi
2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan
3. Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada
4. pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
5. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan
6. pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
8. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
9. Membangun struktur perekonomian yang kokoh pada penciptaan nilai tambah
10. komoditas unggulan yang optimal dan berkelanjutan berbasis UKM dan Koperasi
11. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan
12. pendapatan
13. Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah



Tujuan 2:

Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar Dan Pasar, dengan sasaran:

1. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
2. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk menunjang kebutuhan dasar maupun aktivitas masyarakat serta sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
3. Peningkatan aksesibilitas transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
4. Menyiapkan papua gerbang ekspor
5. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
6. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
7. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Tujuan 3:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Papua yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya tingkat pendapatan masyarakat
3. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat

Tujuan 4:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas birokrasi otonomi khusus Papua
2. Meningkatnya transparansi penggunaan dana otonomi khusus Papua
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti

Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua. Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap IV (tahun 2022 – 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua. Adapun visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

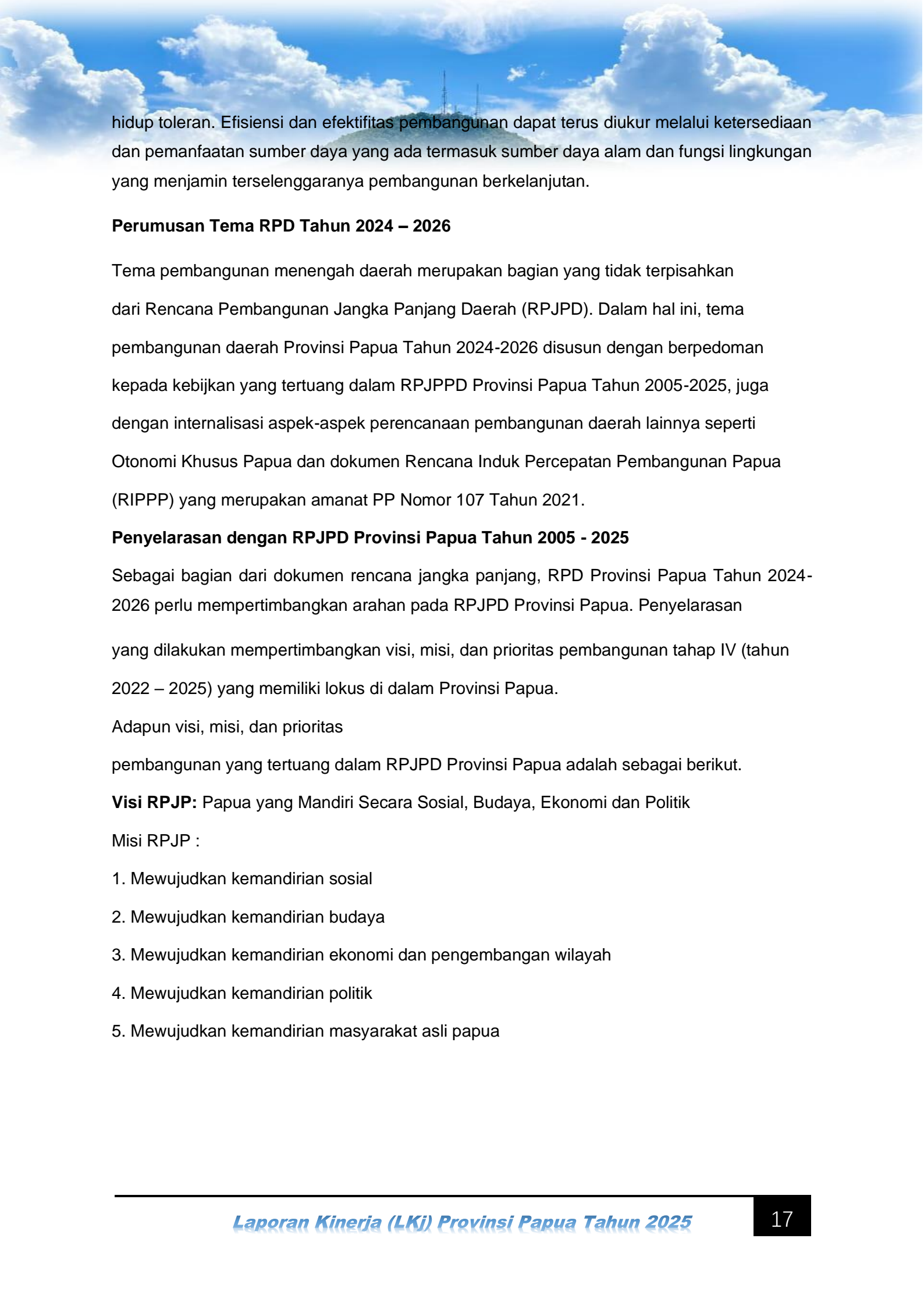
Visi RPJP: Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Misi RPJP :

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua

Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri, profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing.

Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemapaman ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, sistem penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbaharui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemapaman pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap



hidup toleran. Efisiensi dan efektifitas pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Perumusan Tema RPD Tahun 2024 – 2026

Tema pembangunan menengah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam hal ini, tema pembangunan daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 disusun dengan berpedoman kepada kebijakan yang tertuang dalam RPJPPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025, juga dengan internalisasi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah lainnya seperti Otonomi Khusus Papua dan dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang merupakan amanat PP Nomor 107 Tahun 2021.

Penyelarasan dengan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025

Sebagai bagian dari dokumen rencana jangka panjang, RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 perlu mempertimbangkan arahan pada RPJPD Provinsi Papua. Penyelarasan yang dilakukan mempertimbangkan visi, misi, dan prioritas pembangunan tahap IV (tahun 2022 – 2025) yang memiliki lokus di dalam Provinsi Papua.

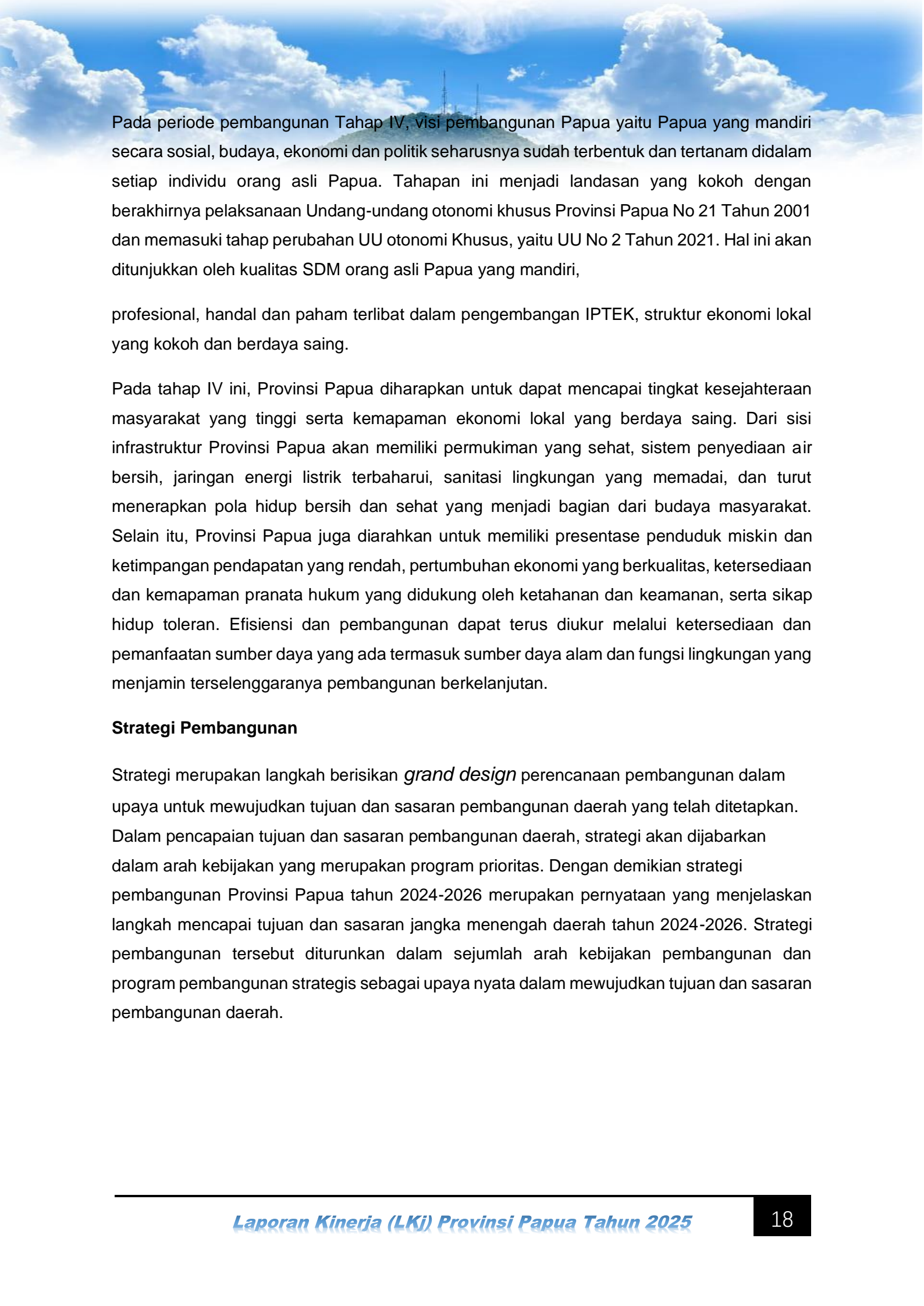
Adapun visi, misi, dan prioritas

pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

Visi RPJP: Papua yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik

Misi RPJP :

1. Mewujudkan kemandirian sosial
2. Mewujudkan kemandirian budaya
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pengembangan wilayah
4. Mewujudkan kemandirian politik
5. Mewujudkan kemandirian masyarakat asli papua



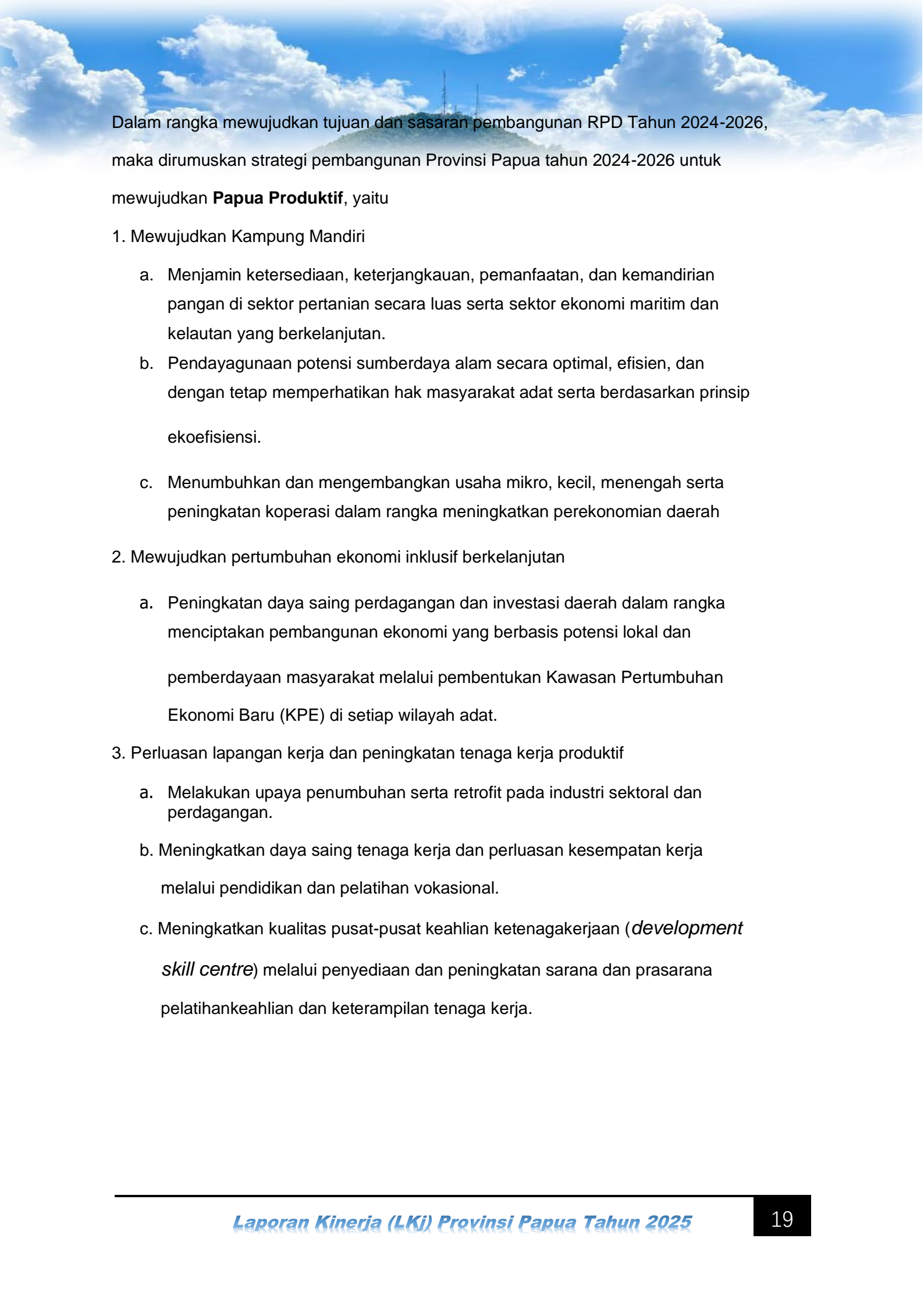
Pada periode pembangunan Tahap IV, visi pembangunan Papua yaitu Papua yang mandiri secara sosial, budaya, ekonomi dan politik seharusnya sudah terbentuk dan tertanam didalam setiap individu orang asli Papua. Tahapan ini menjadi landasan yang kokoh dengan berakhirnya pelaksanaan Undang-undang otonomi khusus Provinsi Papua No 21 Tahun 2001 dan memasuki tahap perubahan UU otonomi Khusus, yaitu UU No 2 Tahun 2021. Hal ini akan ditunjukkan oleh kualitas SDM orang asli Papua yang mandiri,

profesional, handal dan paham terlibat dalam pengembangan IPTEK, struktur ekonomi lokal yang kokoh dan berdaya saing.

Pada tahap IV ini, Provinsi Papua diharapkan untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi serta kemampuan ekonomi lokal yang berdaya saing. Dari sisi infrastruktur Provinsi Papua akan memiliki permukiman yang sehat, sistem penyediaan air bersih, jaringan energi listrik terbaharui, sanitasi lingkungan yang memadai, dan turut menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang menjadi bagian dari budaya masyarakat. Selain itu, Provinsi Papua juga diarahkan untuk memiliki presentase penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ketersediaan dan kemampuan pranata hukum yang didukung oleh ketahanan dan keamanan, serta sikap hidup toleran. Efisiensi dan pembangunan dapat terus diukur melalui ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam dan fungsi lingkungan yang menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Strategi Pembangunan

Strategi merupakan langkah berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas. Dengan demikian strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2024-2026. Strategi pembangunan tersebut diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan strategis sebagai upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.



Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi pembangunan Provinsi Papua tahun 2024-2026 untuk mewujudkan **Papua Produktif**, yaitu

1. Mewujudkan Kampung Mandiri

- a. Menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kemandirian pangan di sektor pertanian secara luas serta sektor ekonomi maritim dan kelautan yang berkelanjutan.
- b. Pendayagunaan potensi sumberdaya alam secara optimal, efisien, dan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat adat serta berdasarkan prinsip keefisiensi.
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah serta peningkatan koperasi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah

2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan

- a. Peningkatan daya saing perdagangan dan investasi daerah dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru (KPE) di setiap wilayah adat.

3. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja produktif

- a. Melakukan upaya penumbuhan serta retrofit pada industri sektoral dan perdagangan.
- b. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional.
- c. Meningkatkan kualitas pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (*development skill centre*) melalui penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja.

VI.2 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (*cluster*) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. s

Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2025 yang sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 77 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2025 maka Tema Pembangunan di Tahun 2025 adalah :

“Penguatan Modal Dasar Pembangunan untuk Papua Maju dan berkelanjutan berbasis Ekonomi Biru, Agroindustri dan Ekonomi Kreatif”,

maka dirumuskan 4 (Empat) Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan

Fokus pada peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi, dan peningkatan tata kelola pemerintahan

2. Basis Ekonomi

Ekonomi Biru (kelautan), agroindustri, dan ekonomi kreatif;

3. Tujuan

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan serta memperkuat kapasitas SDM Orang Asli Papua (OAP);

4. Konektivitas

Selaras dengan program prioritas nasional, RPD 2024-2026, dan penggunaan dana otonomi khusus

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja (PK) pada dasarnya adalah pernyataan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada antara Gubernur yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja dalam hal ini masyarakat. Dengan demikian, Penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Penyusunan PK 2025 dilakukan dengan mengacu kepada RPD dan IKU, RKPD Tahun 2025, serta APBD Provinsi Papua tahun 2025. Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Provinsi Papua Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.63
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.48
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	81.06
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71.02
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30.00
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	77.04

5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7620
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	79.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.96
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.00
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.00
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	100.00
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	BB
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	95.00
		10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPD	Persen	95.0
		10.2	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	Persen	95.0
		10.3	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	Persen	95.0

11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15.24
		11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.02
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	6.0
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	7.0
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	7.0
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95.0
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80.0
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85.0
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupiah	33.50
		14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	12.02
		14,2	Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (SIL) terhadap pertumbuhan ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)	STC/ Tahun	
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91.07

	dan perluasan kesempatan kerja				
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	65.00
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	50.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	82.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	42.00
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	45.75
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	indeks	52.05
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	74.00
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	12.01
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	68.08
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.02

24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan Warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	ribu orang per tahun	70.00
			Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	70.00
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Rendah
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	80.03
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	65.03

Tabel 2.3 Belanja Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025

(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	932.559.162.794.29	0,25
2	Belanja Langsung	2.000.847.324.387.94	0,75
JUMLAH		2.933.406.487.182,23	100

Sumber: BPKAD Provinsi Papua

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Tahun 2025


No	Sasaran Strategis	Anggaran	Persen
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	37,477,281,909.37	0.060964397
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	53,077,012,298.00	0.086340521
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	5,783,323,400.00	0.009407748
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	11,936,373,686.00	0.019416932
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	11,697,446,686.00	0.019028268
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	9,101,934,740.00	0.014806142
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	121,797,638,709.00	0.198128551
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	9,133,526,275.00	0.014857532
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8,918,059,000.00	0.014507031
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	65,039,884,218.00	0.105800557
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	48,224,873,000.00	0.078447533

12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	8,761,128,805.00	0.014251752
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	9,791,651,992.00	0.015928107
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	11,368,913,200.00	0.018493842
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	5,298,890,285.00	0.008619719
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	2,475,215,030.00	0.004026439
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	78,941,910,476.00	0.128415021
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	0	0
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	6,021,592,900.00	0.009795342
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	0	0
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	5,313,565,000.00	0.008643591

22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1,155,585,000.00	0.001879793
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	11,588,018,079.00	0.018850261
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	2,949,294,098.00	0.004797625
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	85,808,387,143.00	0.139584738
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	3,078,963,449.00	0.005008558
Anggaran Prioritas IKU		614,740,469,378,37	
Belanja Langsung		2,000,847,324,387,94	30.72

Pada tabel di atas, pada pos belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang **Utama** dan anggaran untuk Belanja Langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran untuk program/kegiatan Utama sebesar Rp. **614,740,469,378.37** atau sebesar **30.72** persen dari total Belanja Langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan **Pendukung** sebesar Rp. **2.000.847.324.387.94** dari total anggaran Belanja Langsung.

Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran 5 pembangunan dengan anggaran paling besar adalah Sasaran 7 yaitu Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi, dengan besaran anggaran 0.198128551 persen dari total belanja langsung. Sasaran lain dengan anggaran yang relative besar yang kedua adalah Sasaran 25 yaitu Meningkatkan Kapasitas Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana melalui Upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana yaitu sebesar 0.139584738 persen kemudian Sasaran



terbesar Ketiga adalah Sasaran 17 yaitu Meningkatnya Akses Transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah yaitu sebesar 0.128415021 persen. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil sebesar 0.001879793 persen dari total anggaran belanja langsung adalah yaitu Sasaran 22 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP, juga Sasaran 24 yaitu Meningkatnya bantuan sosial PMKS dengan anggaran 0.004797625 persen juga Sasaran 26 Meningkatnya pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Anak dengan anggaran 0.005008558 persen.



BAB III





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan landasan utama proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah pemerintah daerah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Papua melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana kinerja dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

Karena itu Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen membangun akuntabilitas melalui pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan, dan berorientasi pada pencapaian kinerja serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.63	10.01	115.99
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.48	13.94	96.27
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	81.60	99.19	121.56
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71.2	70.77	99.39
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olahraga nasional	Atlet	30	50	166.67
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	77.4	86.75	113.37
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0	9	128.6
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7.620	11.342	148.84
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	79.68	95.20	119.47
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.96	63.43	66.10
		7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.0	60.97	121.9
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0	44.49	74.15
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Persen	100	98.50	98.50
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	66.95
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masukan e-planning dll ke program)	Persen	95.00	95.00	100.00

10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPD	Persen	95.00	95.60	100.63
		10.2	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	Persen	95.00	100.00	105.26
		10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RAP	Persen	95.00	100.00	105.26

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100.00
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15.24	23.89	156.76
		11.3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.2	98.66	149.00
12	Meningkatnya pendayagunaan	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	6.0	1.29	21.05
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	7.0	1.57	22.42
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	7.0	0.88	12.57
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95.0	95.17	100.17
		13.2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80.0	52.5	65.62
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85.0	100	117.64
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/rupee	3.350	0.299	8.925
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	Persen	12.2	8.32	98.00
		14.2	Kontribusi SAIL Teluk Cenderawasih (SIL) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)	STC/Tahun	20	42.91	214.55
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91.7	97.20	105.99
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93	10.44	16.07

17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	65.00	30.23	56.51
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	50.00	97.74	195.48

No	Sasaran Strategis	No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	82.00	75.00	91.46
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	42.00	64.00	152.38
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	45.75	92.33	201.81
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	Indeks	52.05	38.60	72.52
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	74.00	97.74	132.08
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	12.1	10.43	86.19
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	68.6	71.32	103.96
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.2	12.816	90.25
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	ribu orang per tahun	70.00	33.43	47.75
		24.2	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	70.00	70.22	100.31
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Rendah	Sedang	Sedang

26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	80.3	90.03	112.11
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65.3	65.70	101.61

3.2 CAPAIAN DAN ANALISA KINERJA

Kesepakatan skala ordinal penilaian untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Ordinal

NOMOR	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	91 ≥	Sangat berhasil
2.	76 ≥ 90	Berhasil
3.	66 ≥ 75	Cukup berhasil
4.	51 ≥ 65	Kurang berhasil
5.	0 ≥ 50	Tidak berhasil

Pengukuran Kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana program, namun digunakan untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran guna meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka perwujudan visi Papua Bangkit Mandiri, Sejahtera yang berkeadilan.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena Pemerintah Provinsi Papua memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategik tidak dapat dilepaskan dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Pencapaian sasaran - sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 oleh Pemerintah Provinsi Papua adalah sebanyak 26 Sasaran Strategis, dan Capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Sasaran adalah sebagai berikut :

Penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting. Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan yaitu Akses, Mutu dan Tata Kelola. Secara makro akses pendidikan dapat diindikasikan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara untuk Mutu pendidikan salah satunya dapat digambarkan melalui kecenderungan indikator angka melek huruf serta Tata Kelola pendidikan dapat dilihat dari sisi manajemen pengelolaan pendidikan secara kotinyu dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan”** sebesar **111.27** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu :

- 1). Rata-rata Lama Sekolah;
- 2). Harapan Lama Sekolah;
- 3). Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf.

Berikut Target Indikator Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.63	10,01	115,99
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.48	13,94	96,27
3	Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf	Persen	81.60	99,19	121,56
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					111.27

Dari gambaran data di atas, dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan sebagai Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2025 khususnya pada sasaran kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) pencapaiannya 111.27 persen. Artinya pencapaian target sasaran strategis pada indikator kinerja sebagaimana dalam Indikator Kinerja Utama Provinsi Papua tahun 2025 telah menunjukkan prestasi **“sangat berhasil”**.


Berikut tabel perbandingan dari Sasaran Strategis **“Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan”** dari tahun 2024-2025 sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 1 untuk Tahun 2024 - 2025

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun					
		2024			2025		
		T	A	R	E	C	A
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,42	10,70	127,07	8,63	10,01	115,99
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,23	13,72	103,70	14,48	13,94	96,27
Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf	Persen	80,8	98,37	121,75	81,60	99,19	121,56
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja				117,51			111,27

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Angka **Rata-Rata Lama Sekolah** (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas (di Provinsi Papua) untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini




dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat Pendidikan yang sedang dijalankan. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua tahun 2025 adalah 10,01. Target yang ditetapkan sebesar 8,63. Dengan demikian tingkat capaiannya yaitu 115,99 persen.

Pencapaian angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tersebut menunjukkan komitmen kuat Kepala Daerah dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang kesemuanya bermuara pada perbaikan pendidikan di Provinsi Papua.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Papua tahun 2025 adalah 13,94 dari target yang direncanakan sebesar 14,48 atau capaian kinerja 96,27 persen. Walaupun tidak mencapai target namun pencapaian 96,27 persen sudah termasuk pencapaian yang sangat berhasil dan ke depan akan terus ditingkatkan.

Penduduk yang berusia > 15 Tahun Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang ditulisnya/dibacanya. AMH digunakan untuk mengetahui pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Pencapaian Angka Melek Huruf di Provinsi Papua tahun 2025 sebesar 99,19 dari yang ditargetkan sebesar 81,60 atau pencapaiannya sebesar 121,56 persen. Ini menunjukkan capaian kinerja indikator sangat berhasil. Pencapaian kinerja Angka Melek Huruf Tahun 2025 menunjukkan angka yang baik dan menggembirakan. Pencapaian ini tentu didasari oleh adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan pendidikan diseluruh pelosok Papua guna meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Papua melalui berbagai program dan kegiatan.



Secara keseluruhan rata-rata pencapaian target sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama Gubernur Papua Tahun 2025 yaitu **“Meningkatnya Aksesibilitas Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan”** yang meliputi **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**, **Harapan Lama Sekolah (HLS)**, dan **Angka Melek Huruf (AMH)** capaiannya sebesar **111,27** persen. Dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 117,51 persen, atau terdapat penurunan pencapaian target sebesar 6,24persen. Walaupun mengalami penurunan tetapi berdasarkan skala ordinal pencapaian tersebut masih tergolong dalam pencapaian **sangat berhasil**. Pencapaian atas target tersebut antara lain karena komitmen Gubernur Papua yang secara konsisten mendukung terhadap setiap program peningkatan mutu dan penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Papua. Demikian halnya hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendidikan di Provinsi Papua misalnya program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua selaku lembaga yang secara teknis mendukung pencapaian IKU Gubernur melalui berbagai program dalam DPA Tahun 2025 meliputi program penyelenggaraan pendidikan, program pengembangan kurikulum, program pendidik dan tenaga kependidikan, serta program-program penunjang lainnya.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pendidikan di Provinsi Papua ke arah yang lebih baik antara lain ketersediaan dan pemerataan guru-guru baik di tingkat Sekolah Dasar (SD) atau yang setara, Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang setara maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang setara, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, tingkat kemahalan barang yang sangat tinggi serta sulitnya aksesibilitas pada beberapa daerah tertentu.

Sasaran 2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat merupakan sebuah konsep yang menurut Handrik L. Blum dalam Effendi(1) dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu : lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik. Derajat kesehatan individu atau kelompok (masyarakat) digambarkan sebagai profil kesehatan masyarakat di suatu daerah, dimaksudkan dalam sasaran 2 ini adalah Derejat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Papua.

Rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”** sebesar **99,39** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu **Angka Harapan Hidup**. Target Indikator Kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Angka Harapan Hidup	tahun	71,2	70,77	99,39
Capaian Kinerja Sasaran					99,39

Capaian ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebesar 97.71 persen atau naik sebesar 1.68 persen. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama 2 (Dua) tahun sejak Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel berikut ini :

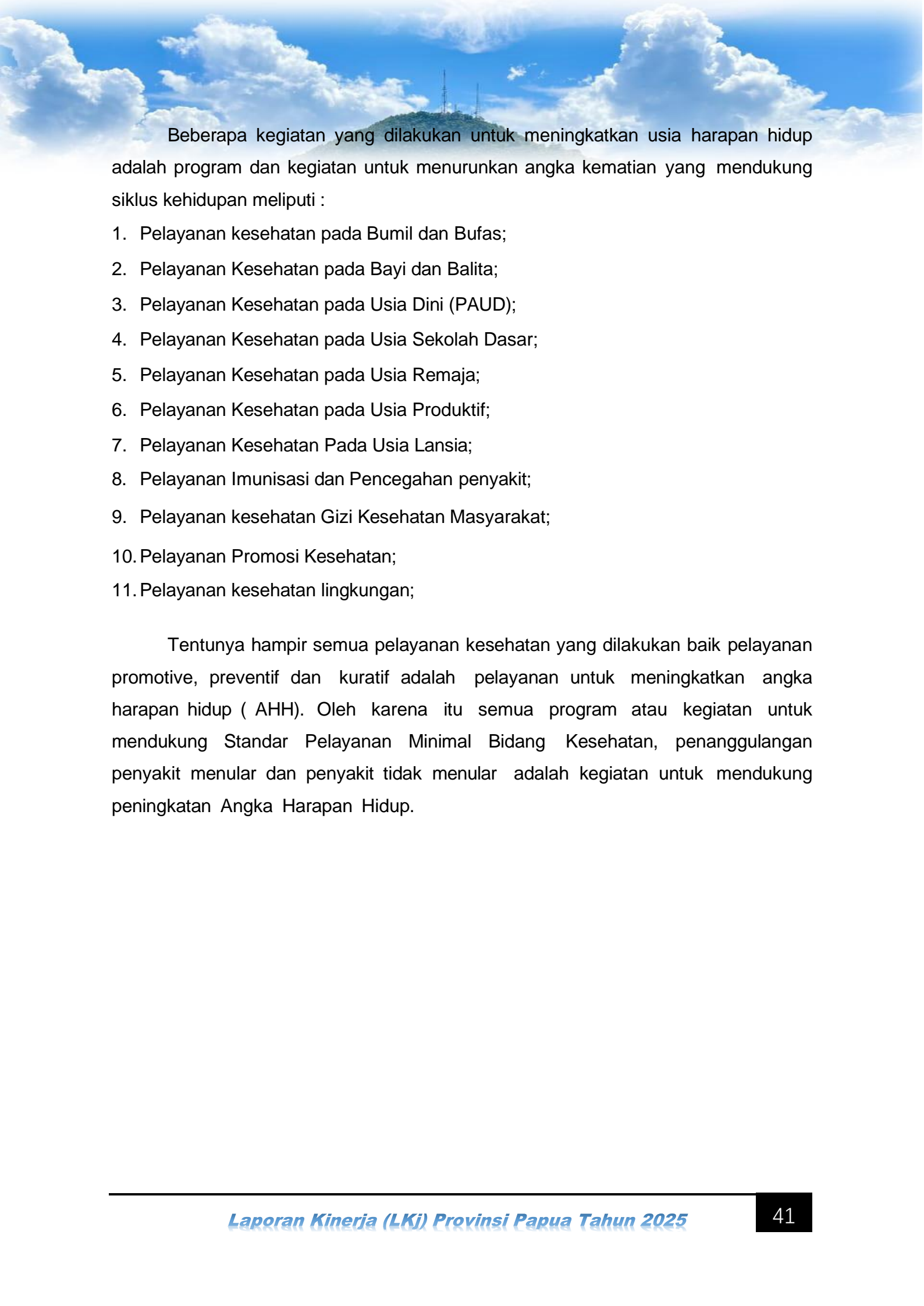
Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 2 untuk Tahun 2024 - 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN					
			2024			2025		
			TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN
1.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,4	68,79	97,71	71,2	70,77	99,39

Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Sesuai Data BPS Provinsi Papua dalam dokumen “Papua Dalam Angka Tahun 2025” adalah 70,77, sedangkan Target dari Perjanjian Kinerja (PK) Gubernur adalah 71,2 sehingga Capaian Kinerja mencapai 99.39% atau kinerja masuk dalam kategori Baik. Jika dilihat dengan Capaian Angka Harapan Hidup tahun 2024 yaitu 68,79 Tahun, maka terdapat kenaikan sebesar 1,98 persen, sehingga dapat dikategorikan ada perubahan atau kenaikan Angka Harapan Hidup.

Angka harapan hidup pada dasarnya merupakan gambaran kondisi suatu wilayah secara garis besar. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu wilayah menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

Secara umum Angka Harapan Hidup dipengaruhi oleh adalah angka kematian dari berbagai penyebab, baik penyebab penyakit menular, penyakit tidak menular, maupun penyebab kematian yang lainnya. Dalam kaitannya dengan kesehatan yang dipengaruhi kematian diantaranya adalah : Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian anak balita dan angka kematian penyakit menular.



Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan usia harapan hidup adalah program dan kegiatan untuk menurunkan angka kematian yang mendukung siklus kehidupan meliputi :

1. Pelayanan kesehatan pada Bumil dan Bufas;
2. Pelayanan Kesehatan pada Bayi dan Balita;
3. Pelayanan Kesehatan pada Usia Dini (PAUD);
4. Pelayanan Kesehatan pada Usia Sekolah Dasar;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Remaja;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lansia;
8. Pelayanan Imunisasi dan Pencegahan penyakit;
9. Pelayanan kesehatan Gizi Kesehatan Masyarakat;
10. Pelayanan Promosi Kesehatan;
11. Pelayanan kesehatan lingkungan;

Tentunya hampir semua pelayanan kesehatan yang dilakukan baik pelayanan promotive, preventif dan kuratif adalah pelayanan untuk meningkatkan angka harapan hidup (AHH). Oleh karena itu semua program atau kegiatan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular adalah kegiatan untuk mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup.

Sasaran 3

Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga

Olahraga merupakan salah satu kebanggaan daerah. Setiap daerah memiliki potensi untuk mengidentifikasi dan menginventarisir bakat-bakat alami olahraga yang dimiliki oleh masyarakat. Analisis sasaran ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya perencanaan pembinaan olahraga secara sistematis dan manajemen yang baik dalam mencapai prestasi olahraga yang optimal. Keberhasilan prestasi olahraga tidak hanya bergantung pada bakat atlet, tetapi juga didukung oleh sarana prasarana yang memadai, latihan berkelanjutan, serta dukungan ilmu pengetahuan olahraga. Kami menyadari bahwa keberhasilan penyelesaian analisis sasaran ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Akhir kata semoga analisis sasaran ini bermanfaat bagi pengembangan prestasi olahraga bagi Papua secara khusus dan Indonesia secara umum di masa mendatang.

Secara keseluruhan rata-rata Capaian kinerja sasaran **“Sukses Pelaksanaan dan Prestasi Olahraga”** sebesar **166.67 Persen** dengan predikat **“ Sangat Berhasil”**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) Indikator Kinerja Sasaran. Target Indikator Kinerja, Realisasi dan Capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 3 Tahun 2025


Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Atlet yang berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Persen	30	50	166.67
Capaian Kinerja Sasaran					166.67

Capaian Kinerja ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 573.33 persen dan di Tahun 2025 sebesar 166.67 persen atau selisih 406.66 point. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama tahun anggaran 2024 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 3 Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2024			2025		
			Tar get	Reali sasi	Capaian	Tar get	Reali sasi	Capaian
1.	Indikator Jumlah Atlet yang berprestasi pada Event Olahraga Nasional	Atlit	15	86	573.33	30	50	166.67

Indikator Jumlah Atlet yang berprestasi pada Event Olahraga Nasional dengan **Target 30 Atlet** terealisasi **50 Atlet** dengan **capaian kinerja 166.67 Persen** dengan kategori “ **Sangat Berhasil**” Jika dilihat dari indikator jumlah Atlet yang berprestasi pada Olahraga Nasional mengalami penurunan di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 penurunan ini disebabkan karena terjadinya efisiensi anggaran sehingga Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua



hanya memprioritaskan Atlet yang berpeluang untuk meraih medali efisiensi anggaran juga menyebabkan minimnya persiapan atlet yang diturunkan untuk mengikuti Kejuaran Daerah (KeJurDa) maupun Kejuaraan Nasional (KeJurNas) efisiensi anggaran juga menyebabkan sehingga kurangnya iven olahraga yang diselenggarakan oleh pemerintah baik Kejuaran Daerah (kejurda) maupun Kejuaran Nasional (kejurnas) sehingga mempengaruhi target yang di usun oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua. Ini bisa di lihat dari presentase jumlah atlet di tahun 2025 yang dikirim untuk mengikuti kejuaran tingkat nasional sebanyak 50 atlet dari 86 atlet yang dibina dengan mempertandingkan 10 (Sepuluh) cabang olahraga namun atlet yang berhasil mempersembahkan medali bagi kontingen PPLP/PPLPD provinsi papua sebanyak 18 orang atau 18,25 persen dan atlet yang belum mempersembahkan medali sebanyak 32 atlet atau sebesar 32,23 persen namun jika dilihat dari jumlah club yang di bina dari 10 Cabang Olahraga (Cabor) yang dipertandingkan maka atlet yang berhasil mempersembahkan medali ditingkat nasional sebanyak 3 cabang olahraga (Cabor) ini dilihat dari jumlah perolehan medali yang diperoleh oleh kontingan PPLP/PPLPD Provinsi Papua pada tahun 2025 dengan mempersembahkan 6 emas, 8 Perak dan 4 perunggu, sehingga jumlah keseluruhan medali yang diperoleh kontingen Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar/Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLP/PPLPD) Provinsi Papua sebesar 18 medali dari 16 provinsi yang mengikuti kejuaran..

Dari hasil keikutsertaan PPLP/PPLPD provinsi papua pada kejuaran tingkat nasional maka berhasil mempersembahkan 20 medali dari beberapa cabang olahraga ini bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kejuaran Tingkat Nasional Tahun 2025 oleh Atlet Provinsi Papua

No	Cabang Olahraga	Perolehan Medali	
.1.	Atletik	6 5 2	Emas Perak Perunggu
2.	Angkat Besi	3	Perak
3.	Tenis Meja	2	Perunggu
	Jumlah	18 Medali	

DAFTAR PARTISIPASI SISWA ATLET PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR DAERAH (PPLPD) DAN PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN PELAJAR (PPLP) PROVINSI PAPUA BINAAN DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PADA SETIAP IVENT OLAHRAGA DAN HASIL YANG DIPEROLEH SELAMA TAHUN 2025

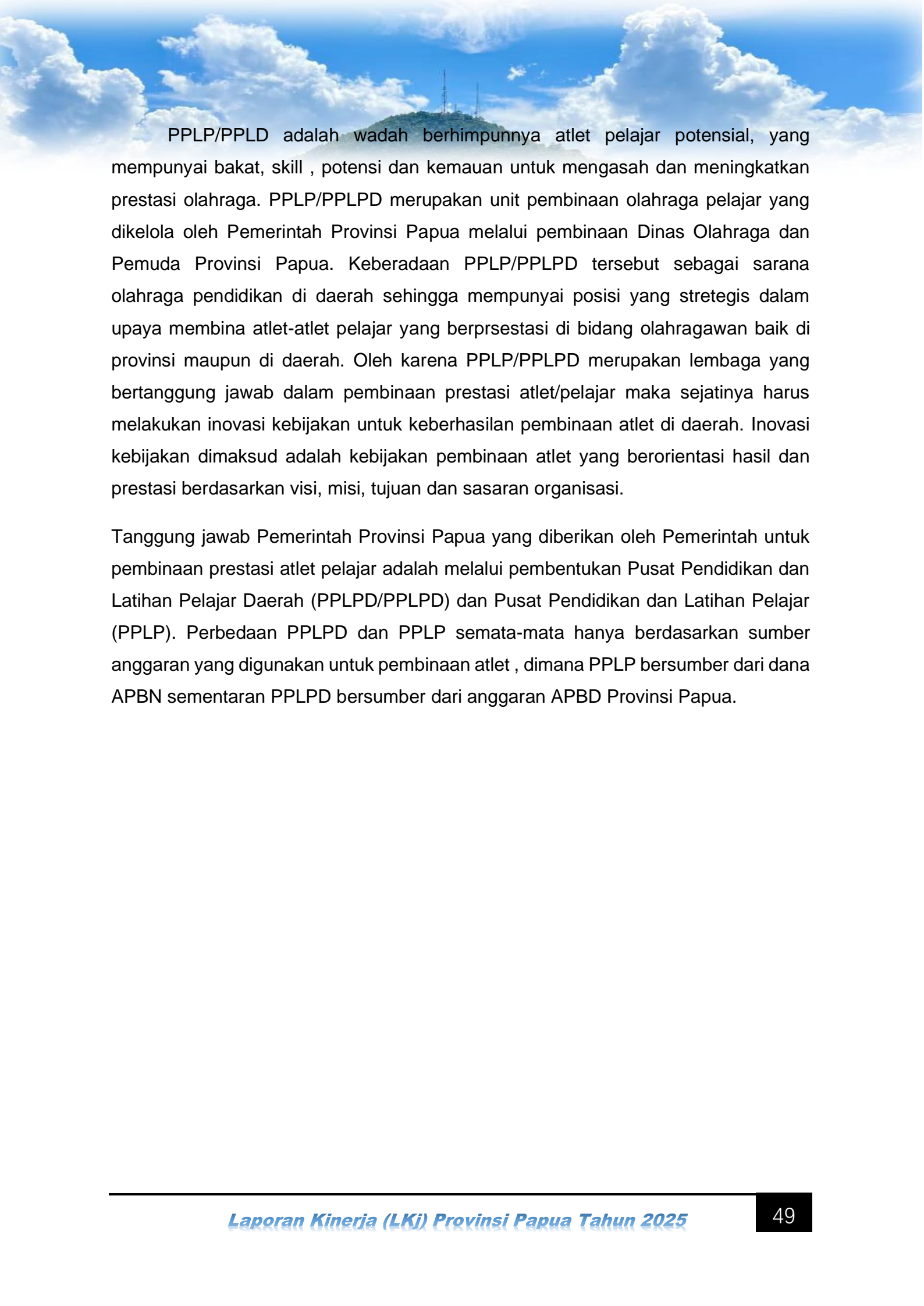
DATA ATLET PPLP/D PROVINSI PAPUA TAHUN 2025										
No	Cab or	Jumlah	Nama Atlet Yang	Tempat	Nomor	Hasil Kejurnas			Nama Pelatih	Ketera ngan
						Atlet	Ikut Kejurnas/ Popnas	Kejurnas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dayu ng	10 Orang	1. Orpa N. Oyaitauw	Palemba Ng	Rowing 2	-	-	-	- Septinus Osleky	Semi Final
			2. Regina Daimoi	Kejurna S	Rowing 1, 2	-	-	-	- Maryam Daimoi	Semi Final
			3. Karlewis Kambu		Rowing, 1, 2	-	-	-	- Delvian Tuhumury	Final
			4. Yoshua Makapuan		Rowing 2	-	-	-		FINAL
			5. Meilin Daimoi		Kayak 1	-	-	-		-
			6. Gerson Kromsian		Cano 1	-	-	-		-
			7. Samuel Norman Daimoe		Kayak 1	-	-	-		-

2	Atletik	16 Orang	1. Theresia Y. Kaiwai	Kab. Bogor	4 X 100 M	Ema s	-	-	-	Prasetyo Utomo	
				Jabar	200 M	-	-	-	-	Sandi	Final
			2. Dancelina W. Tauruy		4 X 100 M	Ema s	-	-	-	Monika Adadikam	
					400 M	Ema s	-	-	-	Alfon Ayeri	
			3. Gresya A. Aronggear		4 X 100 M	Ema s	-	-	-		
					100 M		-	-			Final
			4. Monika Yunita Gebze		4 X 100 M	Ema s	-	-	-		
					L. LEMBING	-	Perak	-			
			5. Yance Eqman Kafiar		400 M	Ema s	-	-	-		
					4 X 400 M	-	Perak	-			
				Palemba Ng	400 M	-	Perak				POP NAS
			6. Josua Awairaro		4 X 400 M	-	Perak	-			
					800 M	-	-	-			FINAL
			7. Victor Natalicho Ohee		4 X 400 M	-	Perak	-			
					200 M	-	-	-			FINAL
			8. Mozardt A. Manufandu		4 X 400 M	-	Perak	-			
					100 M	-	-	-			FINAL
			9. Lina Hisage		TOLAK PELURU	-	-	Perunggu			
			10. VANI TABUNI		150 M	-	-	-			FINAL
					5000 M	-	-	-			FINAL
3	Sepak Bola	22 Orang	1. Tonci Shouter Ramandei	Riau - Pekan	Center Bek	-	-	-	-	Yance Rumbino	Perdela Pan
			2. Edward D. Runggewari	Baru	Kiri Luar	-	-	-	-	Penias Fakdawer	Final
			3. Jack Evan Q. Marani		Kanan Luar	-	-	-	-		

			4. M. Irgi Khatabena		C. Bek Kanan	-	-	-		
			5. Joel S. Randongkir		C. Bek Kanan	-	-	-		
			6. Moris D. Yarangga		Bek Kiri	-	-	-		
			7. Rodaskus S. Wowa		Striker	-	-	-		
			8. Silas Edwin Wikari		Bek Kanan	-	-	-		
			9. Seblum Zaved Wopari		Kiper	-	-	-		
			10. Dirk Lukas Auri		Center Bek Kiri	-	-	-		
			11. Richardo Y.K.M. Gebze		Striker	-	-	-		
			13. Bawas Nabyal		Gelanda Ng	-	-	-		
			14. Adrian Sheva Malibela		Gelanda Ng	-	-	-		
			15. Doki F. Uropkulin		Gelanda Ng	-	-	-		
			16. Jezreel Delvio Geroda		Gelanda Ng	-	-	-		
			17. Dava Dwi Pratama		Kiper	-	-	-		
			18. Adriano S. Malibela		Gelanda Ng	-	-	-		
4	Angkat Besi	5 Orang	Erni Wuka	Yogyakarta	Kelas +64 Kg	-	Perak	-	- Marlin Suabey	- Kejurناس
									- ALFRED RUMBELWAN	Junior
				Palemba Ng	Kelas +64 Kg	-	Perak	-		- Popnas
5	Renang	5 Orang	Radtya Pedro	Jakarta		-	-	-	- Ibrahim	O2sn
									- Ester Anokio	
6	Sepe da	5 Orang	Deminson Enembe	Palemba Ng	- ltt 10 Km	-	-	-	- Wawan Saefuloh	- 10 Besar

				Popnas	- Rod Ris 150 Km				- Toni	- 10 Besar
					- IP 1KM					Popn as
7	Tenis	6 Orang	Eurene Wenda Murib	- Palemba	Tunggal	-	-	-	- Izak R. Betaubu n	-
	Lapan gan			- Bali	Ganda	-	-	Perunggu	- Ice A. Muheimi n	Bali Open

Olahraga merupakan salah satu pilar menuju kejayaan suatu bangsa, salah satu cara menuju kejayaan di bidang olahraga yaitu dengan cara melakukan pembinaan sedini mungkin, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) yang mengamanatkan bahwa pembinaan dapat dilimpahkan ke daerah-daerah sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah yang bersangkutan. PPLP merupakan salah satu tempat untuk pembibitan dan pembinaan anak usia dini yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Dan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga di provinsi papua dan mendukung program pemerintah di bidang olahraga maka perlu adanya PPLP/PPLD di daerah sehingga mengakomodir semua atlet berprestasi yang kemudian dibina dan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan baik kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional yang di selenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Pencapaian prestasi olahraga di Provinsi Papua dimulai dari pembinaan prestasi Kabupaten dan Kota. Hal ini dilakukan untuk menggali potensi bibit-bibit unggul yang ada di daerah agar terus dikembangkan untuk menopang prestasi olahraga di level Provinsi dan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005, pasal 33 menyebutkan: *“Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan keolahragaan, perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, penggalangan sumber daya dan pengawasan.”* Hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan prestasi olahraga secara nasional melalui pengembangan dan pembinaan olahraga di provinsi, termasuk di Provinsi Papua.



PPLP/PPLD adalah wadah berhimpunnya atlet pelajar potensial, yang mempunyai bakat, skill, potensi dan kemauan untuk mengasah dan meningkatkan prestasi olahraga. PPLP/PPLPD merupakan unit pembinaan olahraga pelajar yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua melalui pembinaan Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Keberadaan PPLP/PPLPD tersebut sebagai sarana olahraga pendidikan di daerah sehingga mempunyai posisi yang strategis dalam upaya membina atlet-atlet pelajar yang berprestasi di bidang olahragawan baik di provinsi maupun di daerah. Oleh karena PPLP/PPLPD merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan prestasi atlet/pelajar maka sejatinya harus melakukan inovasi kebijakan untuk keberhasilan pembinaan atlet di daerah. Inovasi kebijakan dimaksud adalah kebijakan pembinaan atlet yang berorientasi hasil dan prestasi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua yang diberikan oleh Pemerintah untuk pembinaan prestasi atlet pelajar adalah melalui pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD/PPLPD) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Perbedaan PPLPD dan PPLP semata-mata hanya berdasarkan sumber anggaran yang digunakan untuk pembinaan atlet, dimana PPLP bersumber dari dana APBN sementara PPLPD bersumber dari anggaran APBD Provinsi Papua.

Sasaran 4

Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Pemuda merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa dan negara. Pemuda memiliki peran strategis sebagai penggerak perubahan pembangunan bangsa. Sebagai generasi penerus pemuda memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan, menjaga persatuan, serta mendorong kemajuan di berbagai aspek Pembangunan. Pemuda diharapkan mampu berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari sosial, politik, hingga ekonomi.. Pemuda juga sebagai kekuatan moral dan kontrol sosial, serta mampu menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan yang mendukung proses pembangunan bangsa dan negara dengan pendekatan yang terstruktur dan kolaboratif organisasi pemuda juga bertujuan menciptakan generasi muda yang kreatif, inovatif, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan bangsa telah lama diakui sebagai salah satu faktor kunci kemajuan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Indonesia pemuda tidak hanya dipandang sebagai penerus generasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi di berbagai bidang kehidupan. Pemuda merupakan pilar utama pembangunan dan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong kemajuan bangsa. Semangat kepemudaan yang telah tertanam sejak era Sumpah Pemuda 1928 terus dihidupkan melalui berbagai organisasi, salah satunya adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), yang menjadi wadah koordinasi dan pemberdayaan pemuda di tingkat nasional maupun daerah. Organisasi kepemudaan didirikan dengan tujuan menyatukan berbagai kelompok pemuda agar dapat berperan aktif serta membantu pemerintah untuk mensukseskan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “ meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Daerah” mencapai **113.37** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”** keberhasilan sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator sasaran. Target indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

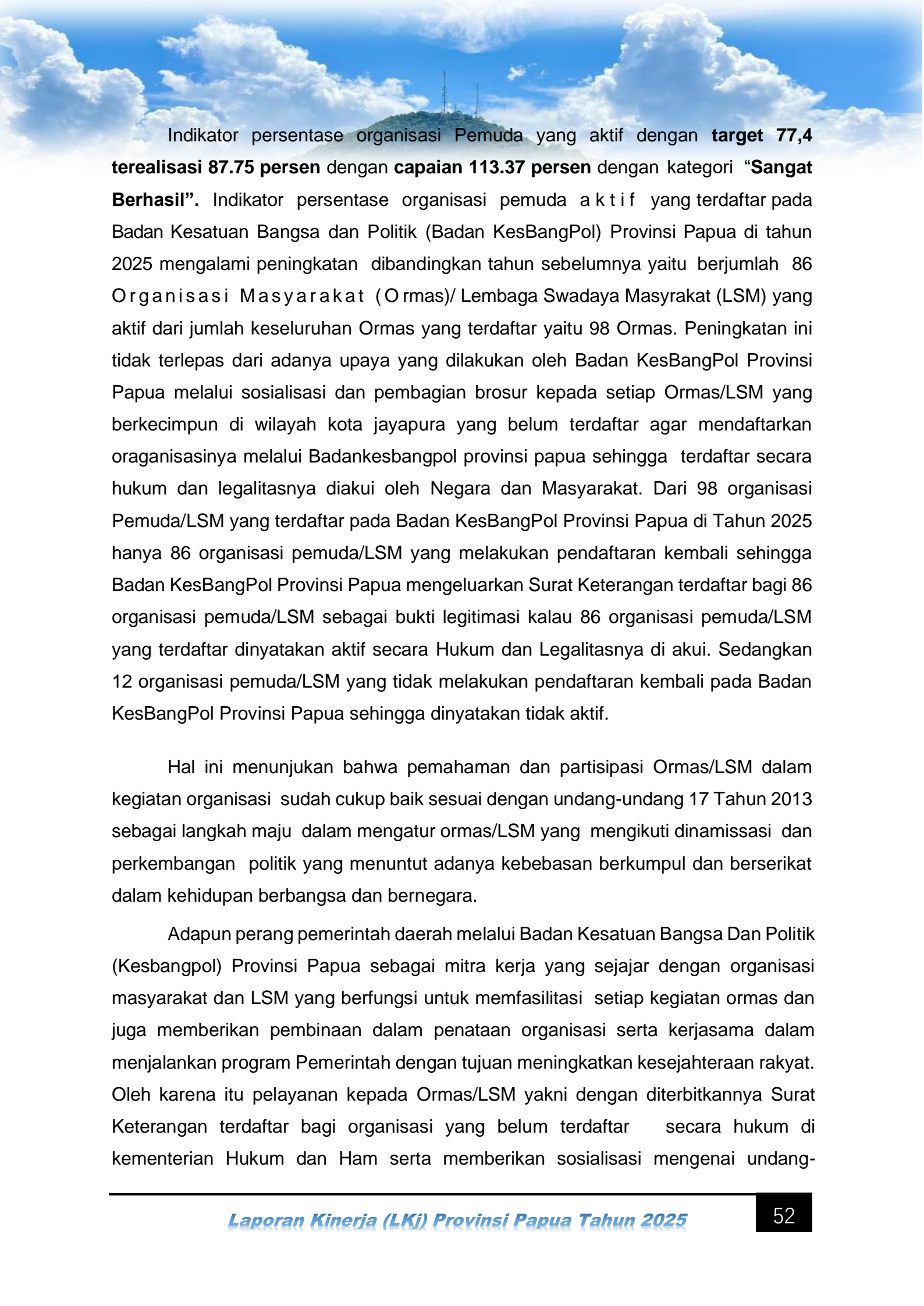
Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 4 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	77.4	86.75	113.37
Capaian Kinerja Sasaran					113.37

Capaian Kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2024 sebesar 78.74 persen dan di Tahun 2025 sebesar 113.37 persen atau selisih 34.63 point. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama tahun anggaran 2024 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 4 Tahun 2024-2025

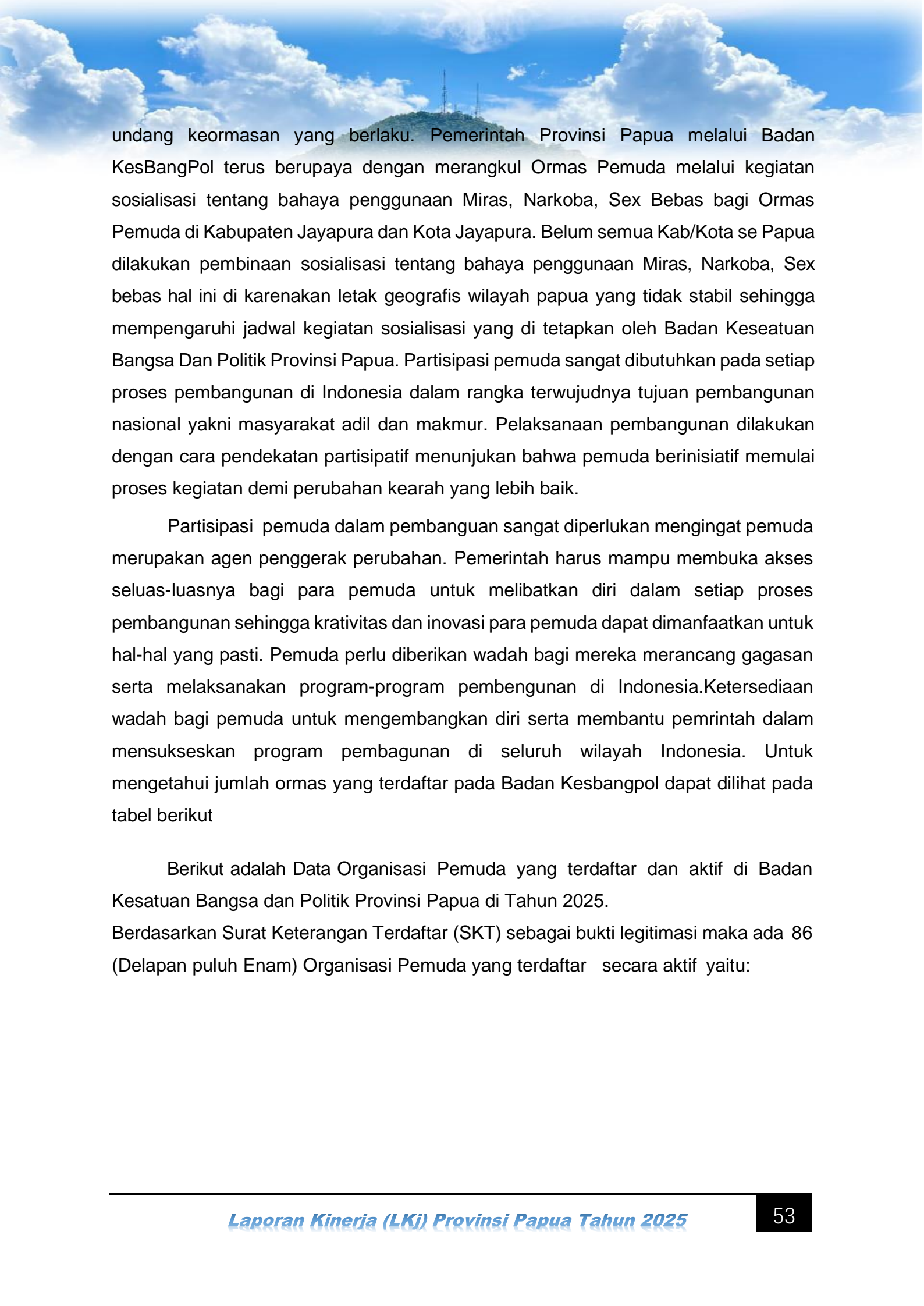
N o	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase Organisasi Pemuda Aktif	Persen	76.2	60	78.74	77.4	87.75	113.37



Indikator persentase organisasi Pemuda yang aktif dengan **target 77,4 terealisasi 87.75 persen** dengan **capaian 113.37 persen** dengan kategori **“Sangat Berhasil”**. Indikator persentase organisasi pemuda aktif yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan KesBangPol) Provinsi Papua di tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 86 Organisasi Masyarakat (Ormas)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dari jumlah keseluruhan Ormas yang terdaftar yaitu 98 Ormas. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya upaya yang dilakukan oleh Badan KesBangPol Provinsi Papua melalui sosialisasi dan pembagian brosur kepada setiap Ormas/LSM yang berkecimpun di wilayah kota jayapura yang belum terdaftar agar mendaftarkan organisasinya melalui Badan kesbangpol provinsi papua sehingga terdaftar secara hukum dan legalitasnya diakui oleh Negara dan Masyarakat. Dari 98 organisasi Pemuda/LSM yang terdaftar pada Badan KesBangPol Provinsi Papua di Tahun 2025 hanya 86 organisasi pemuda/LSM yang melakukan pendaftaran kembali sehingga Badan KesBangPol Provinsi Papua mengeluarkan Surat Keterangan terdaftar bagi 86 organisasi pemuda/LSM sebagai bukti legitimasi kalau 86 organisasi pemuda/LSM yang terdaftar dinyatakan aktif secara Hukum dan Legalitasnya diakui. Sedangkan 12 organisasi pemuda/LSM yang tidak melakukan pendaftaran kembali pada Badan KesBangPol Provinsi Papua sehingga dinyatakan tidak aktif.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan partisipasi Ormas/LSM dalam kegiatan organisasi sudah cukup baik sesuai dengan undang-undang 17 Tahun 2013 sebagai langkah maju dalam mengatur ormas/LSM yang mengikuti dinamisasi dan perkembangan politik yang menuntut adanya kebebasan berkumpul dan berserikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun peran pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua sebagai mitra kerja yang sejajar dengan organisasi masyarakat dan LSM yang berfungsi untuk memfasilitasi setiap kegiatan ormas dan juga memberikan pembinaan dalam penataan organisasi serta kerjasama dalam menjalankan program Pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pelayanan kepada Ormas/LSM yakni dengan diterbitkannya Surat Keterangan terdaftar bagi organisasi yang belum terdaftar secara hukum di kementerian Hukum dan Ham serta memberikan sosialisasi mengenai undang-



undang keormasan yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan KesBangPol terus berupaya dengan merangkul Ormas Pemuda melalui kegiatan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Miras, Narkoba, Sex Bebas bagi Ormas Pemuda di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Belum semua Kab/Kota se Papua dilakukan pembinaan sosialisasi tentang bahaya penggunaan Miras, Narkoba, Sex bebas hal ini di karenakan letak geografis wilayah papua yang tidak stabil sehingga mempengaruhi jadwal kegiatan sosialisasi yang di tetapkan oleh Badan Keseatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Papua. Partisipasi pemuda sangat dibutuhkan pada setiap proses pembangunan di Indonesia dalam rangka terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan makmur. Pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif menunjukkan bahwa pemuda berinisiatif memulai proses kegiatan demi perubahan kearah yang lebih baik.

Partisipasi pemuda dalam pembangunan sangat diperlukan mengingat pemuda merupakan agen penggerak perubahan. Pemerintah harus mampu membuka akses seluas-luasnya bagi para pemuda untuk melibatkan diri dalam setiap proses pembangunan sehingga kreativitas dan inovasi para pemuda dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang pasti. Pemuda perlu diberikan wadah bagi mereka merancang gagasan serta melaksanakan program-program pembangunan di Indonesia. Ketersediaan wadah bagi pemuda untuk mengembangkan diri serta membantu pemerintah dalam mensukseskan program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengetahui jumlah ormas yang terdaftar pada Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel berikut

Berikut adalah Data Organisasi Pemuda yang terdaftar dan aktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua di Tahun 2025. Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legitimasi maka ada 86 (Delapan puluh Enam) Organisasi Pemuda yang terdaftar secara aktif yaitu:

DATA YAYASAN YANG TERDAFTAR DI KESBANGPOL PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

No.	NAMA YAYASAN YANG TERDAFTAR	jumlah	Keterangan
1.	Yayasan Betlehem Efrata	25 Orang	Masih Aktif
2.	Yayasan Tze Va Ot Papua	15 Orang	Masih Aktif
3.	Yayasan Diaspora Kota Raja	23 ORANG	Masih Aktif
4.	Yayasan Pergerakan Anti Napza Nusantara Amarththa (PANNA	31 ORANG	Masih Aktif
5.	Yayasan Mega Edukasi Papua	21 Orang	Masih Aktif
6.	Yayasan Syallom Center Papua	21 Orang	Masih Aktif
7.	Yayasan Mikluho Maklay	35 orang	Masih Aktif
8.	Yaysan Air Mata Doa Mama	15 Orang	Masih Aktif
9.	Yayasan Anu Beta Tubat Papua (YABTP)	35 Orang	Masih Aktif
10.	Yayasan Gapai Harapan Papua	15 Orang	Masih Aktif
11.	Yayasan Panti Asuhan Tunas Bangsa Imanuel	17 Orang	Masih Aktif
12.	Yaysan Papua Siap Manddiri	27 Orang	Masih Aktif
13.	Yayasan Surya Papua	15 Orang	Masih Aktif
14.	Yayasan Penanbulu	15 Orang	Masih Aktif
15.	Yayasan Pembinaan Muslim AL-Ansor Papua	38 Orang	Masih Aktif
16.	Yayasan Global Amanah Dony Pedro (YGAD)	36 Orang	Masih Aktif
17.	Yayasan Mili Nataka Papua	17 Orang	Masih Aktif
18.	Yayasan Surya Nusantara	15 Orang	Masih Aktif
19.	Yayasan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Kristen Izak Samuel Kinje Jayapura	31 Orang	Masih Aktif
20.	Yayasan Sihan Firdaus Asso	31 Orang	Masih Aktif
21.	Yayasan Pendidikan Provinsi Papua (YAPEN 45)	41 Orang	Masih Aktif
22.	Yayasan Dunia Nies Papua	15 Orang	Masih Aktif
23.	Yayasan Bina Hasanah AL- Fitrah	45 Orang	Masih Aktif
24.	Yayasan Vita Papua Mandiri	31 Orang	Masih Aktif
25.	Yayasan AL-Barakah Abepura	31 Orang	Masih Aktif
26.	Yayasan Nasareth Abepura	17 Orang	Masih Aktif
27.	Yayasan Sinergi Timur Mas (SITIMAS)	15 Orang	Masih Aktif
28.	Yayasan Kebugaran Lansia Indonesia (KLPI)	23 orang	Masih Aktif
29.	Yaysan Pelayanan Injili (YAPELIN)-GIDI	18 Orang	Masih Aktif
30.	Yayasan RAJAWALI Citra Papua		Masih Aktif
31.	Yayasan Bengkel Kerja Papua		Masih Aktif
32.	Yayasan Khouw Bersatu Papua		Masih Aktif
33.	Yaysan Jantung Indonesia (YII) Cabang Provinsi Papua		Masih Aktif

Sumber Data : Badan KESBANGPOL Prov.Papua, Tahun 2025

**NAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) YANG TERDAFTAR DI
KESBANGPOL PROVINSI PAPUA TAHUN 2025**

No.	NAMA-NAMA LEMBAGA YANG TERDAFTAR	Jumlah Anggota	Keterangan
1.	Lembaga Penyelidikan Pemantauan dan Pemberantas Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI)	25 Orang	Masih Aktif
2.	Lembaga Percepatan Pembangunan Masyarakat Perbatasan Papua (LSM_PPMP)	41 Orang	Masih Aktif
3.	Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP-HAM)	25 Orang	Masih Aktif
4.	Lembaga Penataan Penelitian dan Pemberdayaan Orang Asli Papua (LP3-OAP)	51 Orang	Masih Aktif
5.	Lembaga Peduli Papua Membangun Sejahtera Provinsi Papua (LPPMS)	65 Orang	Masih Aktif
6.	Lembaga Komunikasi Pengusaha Papua	17 Orang	Masih Aktif
7.	Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI PUSAT)	36 Orang	Masih Aktif
8.	Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua	25 Orang	Masih Aktif
9.	Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice dan Peace (LBH-PJ dan P)	25 Orang	Masih Aktif
10.	Lembaga Tifa Foundation Papua	15 Orang	Masih Aktif
11.	Lembaga Kajian Pengawasan Pembangunan Papua	15 Orang	Masih Aktif
12.	Lembaga Komunkasi Masyarakat Papua bersatu	25 Orang	Masih Aktif
13.	Lembaga Musyawarah Adat Suku Komoro (LEMASKO)	45 Orang	Masih Aktif
14.	Lembaga Pemberdayaan Perempuan Asli Papua	25 Orang	Masih Aktif
15.	Lembaga Sahabat Alam Papua (SAPA)	15 Orang	Masih Aktif
16.	Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia (LBH-TI) Provinsi Papua	35 Orang	Masih Aktif
17.	Lembaga Swadaya Masyarakat Rumah Aspirasi Perempuan Tabi Nasional (RAPIN) Provinsi Papua	45 Orang	Masih Aktif
18.	Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Papua (LPPBDP)	35 Orang	Masih Aktif
19.	Lembaga Masyarakat Adat Ugimba Paniai (LAMUP)	25 Orang	Masih Aktif
20.	Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) LPPD Provinsi Papua	85 Orang	Masih Aktif
21.	Lembaga Masyarakat Adat Bontenka Wogee Mee Selatan (LEMABWOES)	25 Orang	Masih Aktif
22.	Lembaga Swadaya Masyarakat Pijar Keadilan Demokrasi	30 Orang	Masih Aktif
23.	Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Nawacita Rakyat Indonesia	23 Orang	Masih Aktif
24.	Lembaga Pemberdayaan Pengusaha Papua CeraH (LP3C)		Masih Aktif
25.	Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas (LEKAT)		Masih Aktif
26.	Lembaga Investigasi Negara Provinsi Papua		Masih Aktif

Sumber Data : Badan KESBANGPOL Prov.Papua, Tahun 2025

**NAMA ORGANISASI ATAU PAGUYUBAN YANG TERDAFTAR DI KESBANGPOL
TAHUN 2025**

No.	NAMA ORGANISASI, TANGGAL NOMOR PENDAFTARAN DI KESBANGPOL	NOMOR SURAT PERMOHONAN, AHU DAN TANGGAL DI TERBITKAN	TAHUN
1.	Asosiasi Pendeta Indonesia (Indonesia Pastors Association)	AHU.200.1.4.4/117, 24 Feb 2025	2025
2.	DPW Pro Garda Indonesia Bersatu Provinsi Papua	AHU,200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
3.	Yayasan Oridek Anak Papua	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
4.	Perkumpulan Teknisi Ponsel Indonesia	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
5.	Yayasan Shalom Centre Papua	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
6.	Perkumpulan Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (PERTANI HKTI)	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
7.	Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (Indonesia Society Of Respiriology)	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
8.	Lembaga Pengembangan Generasi Papua (LEMPENG PAPUA)	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
9.	DPW, Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia Provinsi Papua	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
10.	Yayasan Pendidikan Kristen Baptis Jayapura	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
11.	Yayasan Prabu Centre Kosong Delapan	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
12.	Perkumpulan Senior Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (SENIOR GMKI)	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
13.	Yayasan Kasih Iman Samuel papua	AHU .200.1.4.4/117 24 Feb 2025	2025
14.	Persatuan Guru Republik Indonesia Pengurus Provinsi Papua	AHU .200.1.4.4/239 25 April 2025	2025
15.	Perkumpulan Kerukunan Kawanua Papua	AHU 200.1.4.4/241 25 Mei 2025	2025
16.	Perkumpulan Keluarga Besar Pinia Pintok Nurap Samongkat (PKB-PPNS) Prov Papua	AHU 200.1.4.4/240. 25 Mei 2025	2025
17.	Perkumpulan Kerukunan Kawanua Papua	AHU 0004/64.AH.01.07.29 Mei 2025	2025
18.	Sinode Gereja Melanesia GOLD	C-1804 HT.03.01 08 November 2025	2025
19.	Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua	AHU .200.1.4.4/919 23 Okt 2025	2025
20.	Ikatan Keluarga Kepulauan Tanimbar (IKKT) Provinsi Papua	AHU.200.1.4.4/920 23 Oktober 2025	2025
21.	DPP Himpunan Kerukunan Jawa Sunda Madura (HKISM) Di Tanah Papua	AHU.200.1.4.4/921 23 Oktober 2025	2025
22.	Lembaga Pemberdayaan Pengusaha Papua Cerah (LP3C)	AHU 200.1.4.4/922 23 Oktober 2025	2025
23.	Pimpinan Wilayah Aisiyyah Papua	AHU 200.1.4.4/923 23 Oktober 2025	2025
24.	Lembaga Pengkajian dan Penguatan Kapasitas (LEKAT)	AHU 200.1.4.4/924 23 Oktober 2025	2025

25.	Pesrsatuan Purnawirawan Angkatan Laut	AHU 200.1.4.4/925 23 Oktober 2025	2025
26.	Lasker Merah Putih Provinsi Papua	AHU 200.1.4.4/926 23 Oktober 2025	2025
27.	Dewan Pimpinan Daerah Organda Papua	AHU 200.1.4.4/927 23 Oktober 2025	2025

Sumber Data : Badan KESBANGPOL Prov.Papua, Tahun 2025

Berikut adalah Data Organisasi Pemuda yang terdaftar dan aktif di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua di Tahun 2024.

Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti legitimasi maka ada 80 (Delapanpuluh) Organisasi Pemuda yang terdaftar secara aktif yaitu :

No.	Nama Organisasi Pemuda
1.	Brigade 571 Trisula Putih provinsi papua
2.	Angkatan muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)
3.	Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII)
4.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BAKO PRMI)
5.	Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan (FKPPI)
6.	Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua
7.	Forum Kebangsaan Generasi Muda Papua (FKGMP)
8.	Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Intelektual Masirei (FPPMIM)
9.	Forum Komunikasi Mahasiswa Papua (FKMP)
10.	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
11.	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
12.	Yayasan Generasi Muda Papua (GMP)
13.	Generasi Muda Karyawan Inti Antar Rakyat (GM KIARA)
14.	Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (GPPI)
15.	Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI)
16.	Gerakan Pemuda Islam (GPI)
17.	Generasi Muda Trikora (GEMA TRIKORA)
18.	Generasi Muda Gabungan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
19.	Gerakan Muda Ansor (GP ANSOR)
20.	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
21.	Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara (HIPMA SULTRA)
22.	Ikatan Pelajar Mahasiswa Flambamora (IPM) Flambamora

23.	Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Wayer di Jayapura
24.	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IRM)
25.	Ikatan Putra Nahdatul Ulama (IPNU)
26.	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
27.	Komite Nasional Banteng Muda Indonesia (KNBMI)
28.	Mahasiswa Pancasila (MAPANCAS)
29.	Pemuda Pancasila (PP)
30.	Pemuda Panca Marga (PPM)
31.	Pemuda Katolik (PK)
32.	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
33.	Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PPHI)
34.	Pelajar Islam Indonesia
35.	Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PH)
36.	Yayasan Generasi Muda Papua (YGMP)
37.	Forum Komunitas Intelektual Mahasiswa Moni Papua (FORKIM)
38.	Angkatan Muda kemah Injil Papua (AMKI)
39.	Forum Kebangsaan Generasi Muda Papua (FKGMP)
40.	Himpunan Pengusaha Anak Asli Papua (HIPMAS PAPUA)
41.	Majelis Pimpinan ICMI Muda (PM-ICMI Muda) Provinsi Papua
42.	Lembaga Perlindungan dan Pengembangan Bahasa Daerah Provinsi Papua
43.	Yayasan Vita Papua Mandiri Provinsi Papua
44.	Forum Komunikasi Mahasiswa Papua Provinsi Papua
45.	DWP Komando Pasukan Khusus (KPK) Tipikor Provinsi Papua
46.	Lembaga Adat Masyarakat Ugimba Paniai Papua Serikat Provinsi Papua
47.	Pemerintah Kerajaan Ibunda Sahye Kukumen Papua Serikat Provinsi Papua
48.	Kelompok Kotak Tani Nelayan Andalan (KTNA)

Sumber Data : Badan KESBANGPOL Prov.Papua, Tahun 2025

Sasaran 5

Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan

Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Papua dalam memperkuat ketahanan pangan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan terpenuhinya ketersediaan pangan yang cukup, aman, merata, dan terjangkau, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui indikator yang merepresentasikan kondisi kerentanan wilayah terhadap rawan pangan serta kemampuan ekonomi masyarakat, yaitu Cakupan Daerah Rawan Pangan dan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan. Kedua indikator tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan efektivitas intervensi kebijakan di bidang ketahanan pangan dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat. Evaluasi capaian Tahun 2025 dilakukan melalui analisis perbandingan target dan realisasi, serta tren perkembangan kinerja dibandingkan Tahun 2024. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan hasil pemetaan prioritas wilayah berdasarkan Analisis Komposit FSVA sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi tindak lanjut. Uraian berikut menyajikan capaian kinerja Sasaran 5 secara kuantitatif, perbandingan antar tahun, distribusi prioritas wilayah rawan pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian, serta implikasi kebijakan dalam rangka penguatan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkelanjutan**” sebesar **138.705 % (persen)** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Sasaran ini diukur melalui dua (2) indikator kinerja. Target, realisasi, dan capaian masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut :

Tabel.Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 5 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	7	9	128.6
2	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7.620	11.342	148.84
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					138.72

Berdasarkan tabel tersebut, indikator **Cakupan Daerah Rawan Pangan** pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 7 kabupaten/kota dan terealisasi 9 kabupaten/kota atau mencapai 128.6%. Sementara itu, indikator **Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan** ditargetkan sebesar Rp7.620 ribu per kapita dengan realisasi sebesar Rp11.342 ribu per kapita atau mencapai 148.84%

Capaian indikator **cakupan daerah rawan pangan** pada Tahun 2025 tidak mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024 kondisi tetap sama. Pada Tahun 2024, dari target 7 kabupaten/kota, realisasi mencapai 9 kabupaten/kota atau sebesar 128,6% (persen), sehingga melampaui target. Sedangkan pada Tahun 2025, target ditetapkan sebanyak 7 kabupaten/kota dengan realisasi tetap 9 kabupaten/kota atau sebesar 128.6% (persen), sehingga tidak menunjukkan peningkatan capaian dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, indikator **pengeluaran per kapita yang disesuaikan** pada Tahun 2024 mencapai 145% (persen) dari target yang ditetapkan, dan pada Tahun 2025 meningkat menjadi 148.84% (persen), sehingga menunjukkan adanya peningkatan kinerja.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian indikator kinerja pada Tahun 2024 sebesar 136.8%, sedangkan pada Tahun 2025 sebesar 138.72%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan target, realisasi, dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 5 Tahun 2024 - 2025

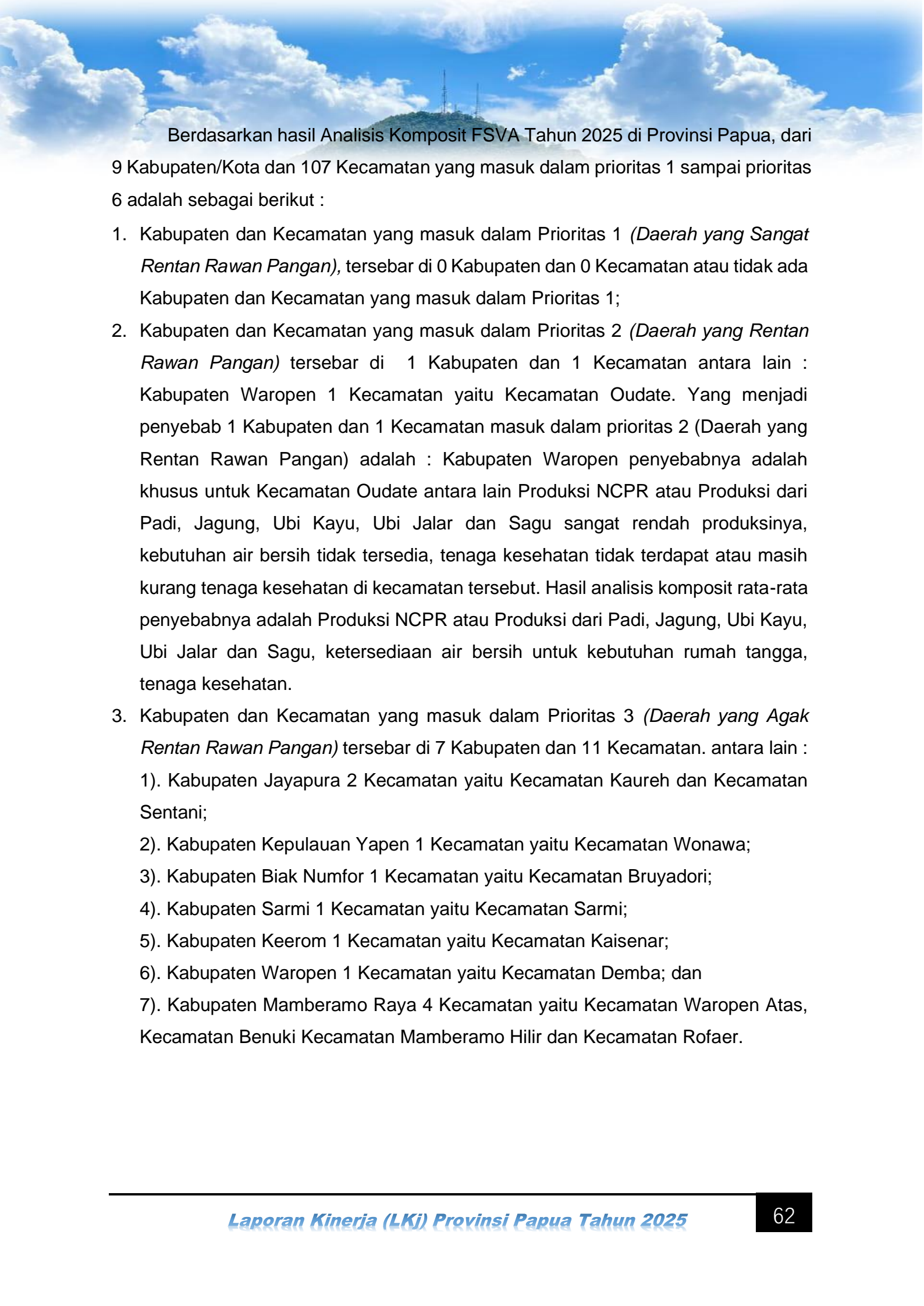
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
.1	Cakupan daerah rawan pangan	Jml. kab/Kota	7	9	128,6	7	9	128.6
2.	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp. Ribu per kapita	7610	11.037	145	7620	11.342	148.84
Capaian Indikator kinerja					136,8			138.72

Pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024–2025, khususnya pada indikator **Cakupan Daerah Rawan Pangan** dan **Pengeluaran Per Kapita** yang Disesuaikan. Kedua indikator tersebut menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kondisi ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Analisis capaian dilakukan melalui perbandingan antara target dan realisasi sebagaimana tersaji pada **Tabel 5.2** Matriks Perbandingan Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran. Hasil pengukuran ini memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja, efektivitas intervensi kebijakan, serta dasar penetapan langkah tindak lanjut pada wilayah prioritas berdasarkan hasil Analisis Komposit FSVA Tahun 2025.

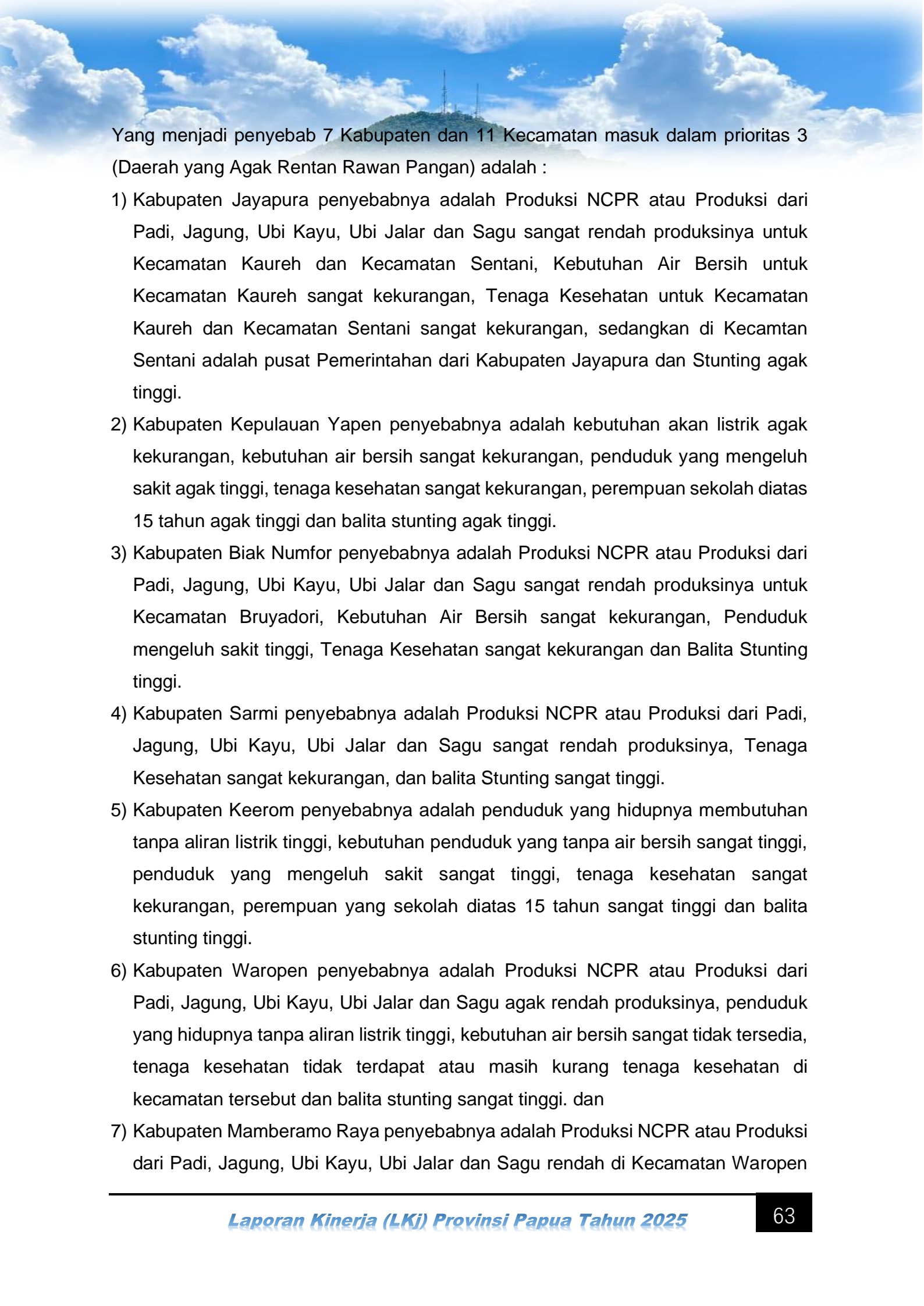
Uraian selanjutnya menjelaskan distribusi prioritas daerah rawan pangan, faktor penyebab kerentanan, serta implikasi kebijakan yang diperlukan dalam rangka penguatan ketahanan pangan daerah. Kecamatan/distrik yang masuk dalam Prioritas memiliki 6 aspek kategori ketahanan pangan diantaranya adalah :

1. Daerah yang sangat rentan.
2. Daerah yang rentan.
3. Daerah yang agak rentan.
4. Daerah yang agak tahan
5. Daerah yang tahan, dan
6. Daerah yang sangat Tahan



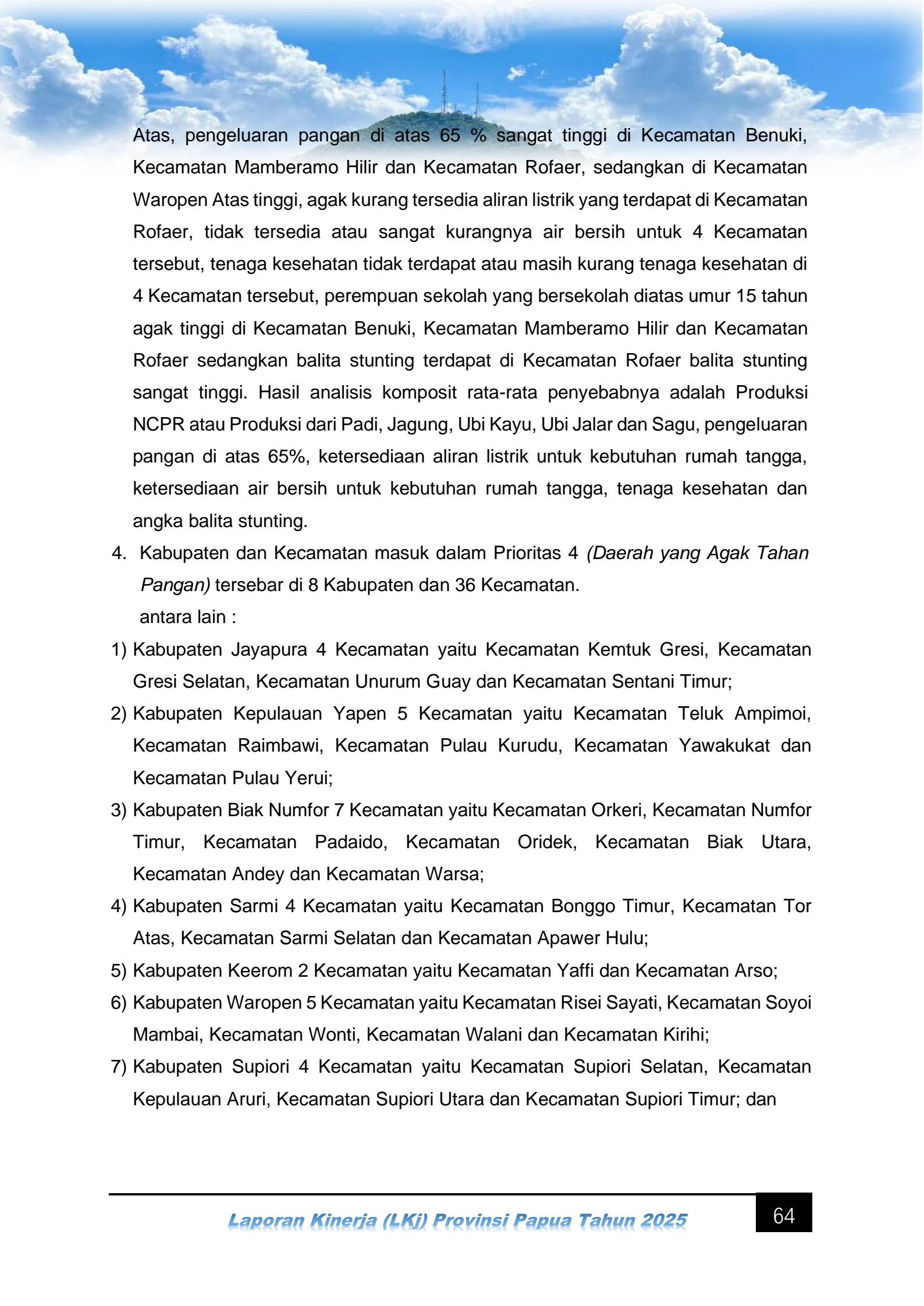
Berdasarkan hasil Analisis Komposit FSVA Tahun 2025 di Provinsi Papua, dari 9 Kabupaten/Kota dan 107 Kecamatan yang masuk dalam prioritas 1 sampai prioritas 6 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten dan Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 1 (*Daerah yang Sangat Rentan Rawan Pangan*), tersebar di 0 Kabupaten dan 0 Kecamatan atau tidak ada Kabupaten dan Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 1;
2. Kabupaten dan Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 2 (*Daerah yang Rentan Rawan Pangan*) tersebar di 1 Kabupaten dan 1 Kecamatan antara lain : Kabupaten Waropen 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Oudate. Yang menjadi penyebab 1 Kabupaten dan 1 Kecamatan masuk dalam prioritas 2 (*Daerah yang Rentan Rawan Pangan*) adalah : Kabupaten Waropen penyebabnya adalah khusus untuk Kecamatan Oudate antara lain Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah produksinya, kebutuhan air bersih tidak tersedia, tenaga kesehatan tidak terdapat atau masih kurang tenaga kesehatan di kecamatan tersebut. Hasil analisis komposit rata-rata penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, tenaga kesehatan.
3. Kabupaten dan Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 3 (*Daerah yang Agak Rentan Rawan Pangan*) tersebar di 7 Kabupaten dan 11 Kecamatan. antara lain :
 - 1). Kabupaten Jayapura 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaureh dan Kecamatan Sentani;
 - 2). Kabupaten Kepulauan Yapen 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Wonawa;
 - 3). Kabupaten Biak Numfor 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Bruyadori;
 - 4). Kabupaten Sarmi 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Sarmi;
 - 5). Kabupaten Keerom 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Kaisenar;
 - 6). Kabupaten Waropen 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Demba; dan
 - 7). Kabupaten Mamberamo Raya 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Waropen Atas, Kecamatan Benuki Kecamatan Mamberamo Hilir dan Kecamatan Rofaer.



Yang menjadi penyebab 7 Kabupaten dan 11 Kecamatan masuk dalam prioritas 3 (Daerah yang Agak Rentan Rawan Pangan) adalah :

- 1) Kabupaten Jayapura penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah produksinya untuk Kecamatan Kaureh dan Kecamatan Sentani, Kebutuhan Air Bersih untuk Kecamatan Kaureh sangat kekurangan, Tenaga Kesehatan untuk Kecamatan Kaureh dan Kecamatan Sentani sangat kekurangan, sedangkan di Kecamatan Sentani adalah pusat Pemerintahan dari Kabupaten Jayapura dan Stunting agak tinggi.
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen penyebabnya adalah kebutuhan akan listrik agak kekurangan, kebutuhan air bersih sangat kekurangan, penduduk yang mengeluh sakit agak tinggi, tenaga kesehatan sangat kekurangan, perempuan sekolah diatas 15 tahun agak tinggi dan balita stunting agak tinggi.
- 3) Kabupaten Biak Numfor penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah produksinya untuk Kecamatan Bruyadori, Kebutuhan Air Bersih sangat kekurangan, Penduduk mengeluh sakit tinggi, Tenaga Kesehatan sangat kekurangan dan Balita Stunting tinggi.
- 4) Kabupaten Sarmi penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah produksinya, Tenaga Kesehatan sangat kekurangan, dan balita Stunting sangat tinggi.
- 5) Kabupaten Keerom penyebabnya adalah penduduk yang hidupnya membutuhkan tanpa aliran listrik tinggi, kebutuhan penduduk yang tanpa air bersih sangat tinggi, penduduk yang mengeluh sakit sangat tinggi, tenaga kesehatan sangat kekurangan, perempuan yang sekolah diatas 15 tahun sangat tinggi dan balita stunting tinggi.
- 6) Kabupaten Waropen penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu agak rendah produksinya, penduduk yang hidupnya tanpa aliran listrik tinggi, kebutuhan air bersih sangat tidak tersedia, tenaga kesehatan tidak terdapat atau masih kurang tenaga kesehatan di kecamatan tersebut dan balita stunting sangat tinggi. dan
- 7) Kabupaten Mamberamo Raya penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu rendah di Kecamatan Waropen

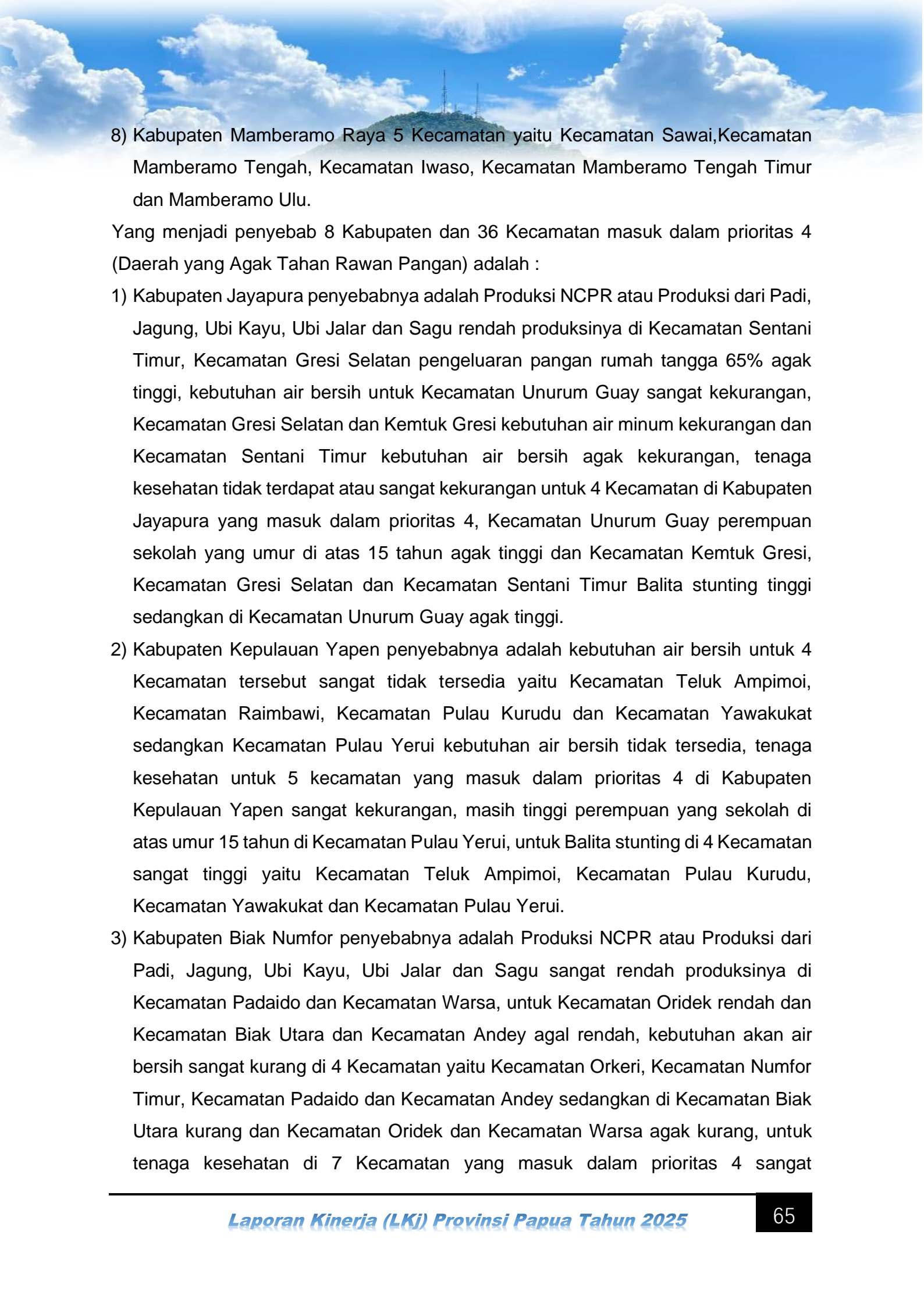


Atas, pengeluaran pangan di atas 65 % sangat tinggi di Kecamatan Benuki, Kecamatan Mamberamo Hilir dan Kecamatan Rofaer, sedangkan di Kecamatan Waropen Atas tinggi, agak kurang tersedia aliran listrik yang terdapat di Kecamatan Rofaer, tidak tersedia atau sangat kurangnya air bersih untuk 4 Kecamatan tersebut, tenaga kesehatan tidak terdapat atau masih kurang tenaga kesehatan di 4 Kecamatan tersebut, perempuan sekolah yang bersekolah diatas umur 15 tahun agak tinggi di Kecamatan Benuki, Kecamatan Mamberamo Hilir dan Kecamatan Rofaer sedangkan balita stunting terdapat di Kecamatan Rofaer balita stunting sangat tinggi. Hasil analisis komposit rata-rata penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu, pengeluaran pangan di atas 65%, ketersediaan aliran listrik untuk kebutuhan rumah tangga, ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, tenaga kesehatan dan angka balita stunting.

4. Kabupaten dan Kecamatan masuk dalam Prioritas 4 (*Daerah yang Agak Tahan Pangan*) tersebar di 8 Kabupaten dan 36 Kecamatan.

antara lain :

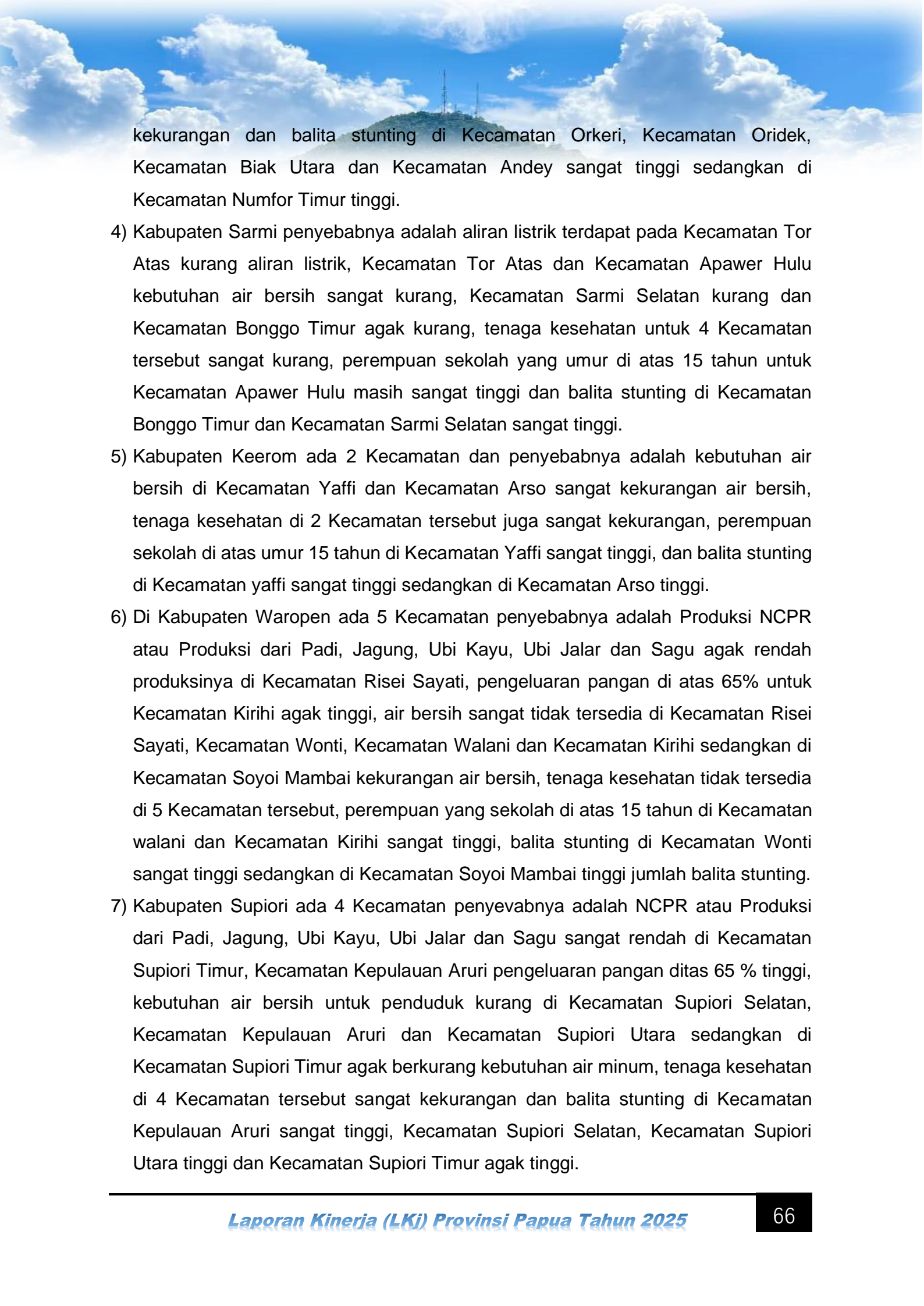
- 1) Kabupaten Jayapura 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Kemtuk Gresi, Kecamatan Gresi Selatan, Kecamatan Unurum Guay dan Kecamatan Sentani Timur;
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Ampimoi, Kecamatan Raimbawi, Kecamatan Pulau Kurudu, Kecamatan Yawakukat dan Kecamatan Pulau Yerui;
- 3) Kabupaten Biak Numfor 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Orkeri, Kecamatan Numfor Timur, Kecamatan Padaido, Kecamatan Oridek, Kecamatan Biak Utara, Kecamatan Andey dan Kecamatan Warsa;
- 4) Kabupaten Sarmi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Bonggo Timur, Kecamatan Tor Atas, Kecamatan Sarmi Selatan dan Kecamatan Apawer Hulu;
- 5) Kabupaten Keerom 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Yaffi dan Kecamatan Arso;
- 6) Kabupaten Waropen 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Risei Sayati, Kecamatan Soyoi Mambai, Kecamatan Wonti, Kecamatan Walani dan Kecamatan Kirihi;
- 7) Kabupaten Supiori 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Supiori Selatan, Kecamatan Kepulauan Aruri, Kecamatan Supiori Utara dan Kecamatan Supiori Timur; dan



8) Kabupaten Mamberamo Raya 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Sawai, Kecamatan Mamberamo Tengah, Kecamatan Iwaso, Kecamatan Mamberamo Tengah Timur dan Mamberamo Ulu.


Yang menjadi penyebab 8 Kabupaten dan 36 Kecamatan masuk dalam prioritas 4 (Daerah yang Agak Tahan Rawan Pangan) adalah :

- 1) Kabupaten Jayapura penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu rendah produksinya di Kecamatan Sentani Timur, Kecamatan Gresi Selatan pengeluaran pangan rumah tangga 65% agak tinggi, kebutuhan air bersih untuk Kecamatan Unurum Guay sangat kekurangan, Kecamatan Gresi Selatan dan Kemtuk Gresi kebutuhan air minum kekurangan dan Kecamatan Sentani Timur kebutuhan air bersih agak kekurangan, tenaga kesehatan tidak terdapat atau sangat kekurangan untuk 4 Kecamatan di Kabupaten Jayapura yang masuk dalam prioritas 4, Kecamatan Unurum Guay perempuan sekolah yang umur di atas 15 tahun agak tinggi dan Kecamatan Kemtuk Gresi, Kecamatan Gresi Selatan dan Kecamatan Sentani Timur Balita stunting tinggi sedangkan di Kecamatan Unurum Guay agak tinggi.
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen penyebabnya adalah kebutuhan air bersih untuk 4 Kecamatan tersebut sangat tidak tersedia yaitu Kecamatan Teluk Ampimoi, Kecamatan Raimbawi, Kecamatan Pulau Kurudu dan Kecamatan Yawakukat sedangkan Kecamatan Pulau Yerui kebutuhan air bersih tidak tersedia, tenaga kesehatan untuk 5 kecamatan yang masuk dalam prioritas 4 di Kabupaten Kepulauan Yapen sangat kekurangan, masih tinggi perempuan yang sekolah di atas umur 15 tahun di Kecamatan Pulau Yerui, untuk Balita stunting di 4 Kecamatan sangat tinggi yaitu Kecamatan Teluk Ampimoi, Kecamatan Pulau Kurudu, Kecamatan Yawakukat dan Kecamatan Pulau Yerui.
- 3) Kabupaten Biak Numfor penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah produksinya di Kecamatan Padaido dan Kecamatan Warsa, untuk Kecamatan Oridek rendah dan Kecamatan Biak Utara dan Kecamatan Andey agak rendah, kebutuhan akan air bersih sangat kurang di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Orkeri, Kecamatan Numfor Timur, Kecamatan Padaido dan Kecamatan Andey sedangkan di Kecamatan Biak Utara kurang dan Kecamatan Oridek dan Kecamatan Warsa agak kurang, untuk tenaga kesehatan di 7 Kecamatan yang masuk dalam prioritas 4 sangat



kekurangan dan balita stunting di Kecamatan Orkeri, Kecamatan Oridek, Kecamatan Biak Utara dan Kecamatan Andey sangat tinggi sedangkan di Kecamatan Numfor Timur tinggi.

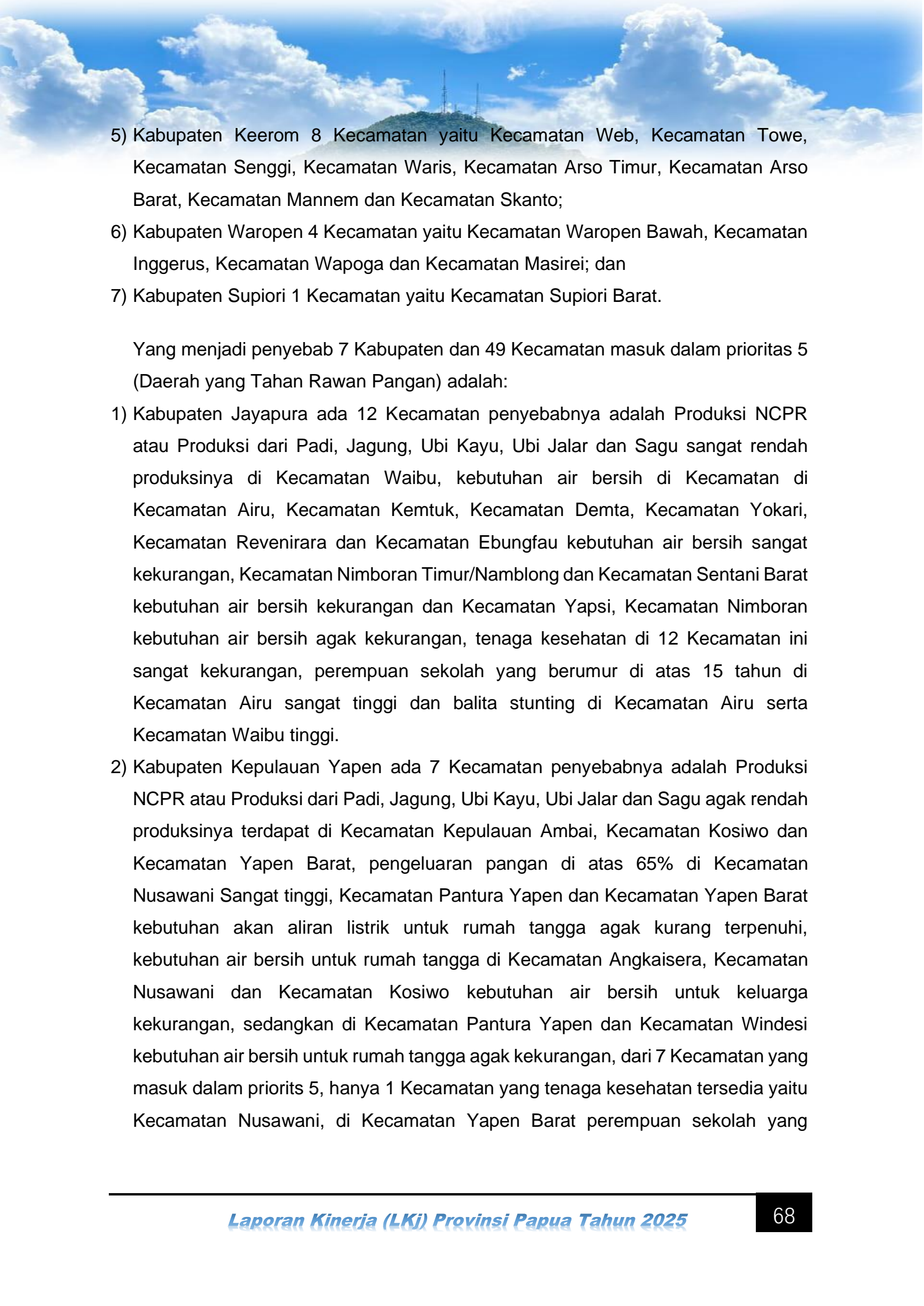
- 4) Kabupaten Sarmi penyebabnya adalah aliran listrik terdapat pada Kecamatan Tor Atas kurang aliran listrik, Kecamatan Tor Atas dan Kecamatan Apawer Hulu kebutuhan air bersih sangat kurang, Kecamatan Sarmi Selatan kurang dan Kecamatan Bonggo Timur agak kurang, tenaga kesehatan untuk 4 Kecamatan tersebut sangat kurang, perempuan sekolah yang umur di atas 15 tahun untuk Kecamatan Apawer Hulu masih sangat tinggi dan balita stunting di Kecamatan Bonggo Timur dan Kecamatan Sarmi Selatan sangat tinggi.
- 5) Kabupaten Keerom ada 2 Kecamatan dan penyebabnya adalah kebutuhan air bersih di Kecamatan Yaffi dan Kecamatan Arso sangat kekurangan air bersih, tenaga kesehatan di 2 Kecamatan tersebut juga sangat kekurangan, perempuan sekolah di atas umur 15 tahun di Kecamatan Yaffi sangat tinggi, dan balita stunting di Kecamatan yaffi sangat tinggi sedangkan di Kecamatan Arso tinggi.
- 6) Di Kabupaten Waropen ada 5 Kecamatan penyebabnya adalah Produksi NCPN atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu agak rendah produksinya di Kecamatan Risei Sayati, pengeluaran pangan di atas 65% untuk Kecamatan Kirihi agak tinggi, air bersih sangat tidak tersedia di Kecamatan Risei Sayati, Kecamatan Wonti, Kecamatan Walani dan Kecamatan Kirihi sedangkan di Kecamatan Soyoi Mambai kekurangan air bersih, tenaga kesehatan tidak tersedia di 5 Kecamatan tersebut, perempuan yang sekolah di atas 15 tahun di Kecamatan walani dan Kecamatan Kirihi sangat tinggi, balita stunting di Kecamatan Wonti sangat tinggi sedangkan di Kecamatan Soyoi Mambai tinggi jumlah balita stunting.
- 7) Kabupaten Supiori ada 4 Kecamatan penyebabnya adalah NCPN atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah di Kecamatan Supiori Timur, Kecamatan Kepulauan Aruri pengeluaran pangan diatas 65 % tinggi, kebutuhan air bersih untuk penduduk kurang di Kecamatan Supiori Selatan, Kecamatan Kepulauan Aruri dan Kecamatan Supiori Utara sedangkan di Kecamatan Supiori Timur agak berkurang kebutuhan air minum, tenaga kesehatan di 4 Kecamatan tersebut sangat kekurangan dan balita stunting di Kecamatan Kepulauan Aruri sangat tinggi, Kecamatan Supiori Selatan, Kecamatan Supiori Utara tinggi dan Kecamatan Supiori Timur agak tinggi.



8) Kabupaten Mamberamo Raya ada 5 Kecamatan penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu rendah di Kecamatan Mamberamo Tengah dan agak rendah di Kecamatan Sawai, di 5 Kecamatan tersebut pengeluaran pangan di atas 65 % sangat tinggi, kebutuhan air bersih di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sawai, Kecamatan Iwaso dan Kecamatan Mamberamo Tengah Timur sangat kekurangan sedangkan di Kecamatan Mamberamo Tengah dan Kecamatan Mamberamo Hulu kebutuhan air bersih kurang, tenaga kesehatan di 5 kecamatan tersebut tidak tersedia atau sangat kekurangan tenaga kesehatan, perempuan sekolah di atas 15 tahun di Kecamatan Mamberamo Hulu agak tinggi dan angka balita stunting di Kecamatan Mamberamo tengah Timur sangat tinggi sedangkan di Kecamatan Mamberamo tengah dan kecamatan Iwaso tinggi. Hasil analisis komposit rata-rata penyebabnya adalah ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, ketersediaan tenaga kesehatan dan angka balita stunting.

5. Kabupaten dan Kecamatan masuk dalam Prioritas 5 (*Daerah yang Tahan Pangan*) tersebar di 7 Kabupaten dan 47 Kecamatan. Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 5 antara lain :

- 1) Kabupaten Jayapura 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Airu, Kecamatan Yapsi, Kecamatan Kemtuk, Kecamatan Nimboran, Kecamatan Nimboran Timur/Namblong, Kecamatan Nimbokrang, Kecamatan Demta, Kecamatan Yokari, Kecamatan Revenirara, Kecamatan Sentani Barat, Kecamatan Waibu dan Kecamatan Ebungfau;
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Pantura Yapen, Kecamatanp Angkaisera, Kecamatan Kepulauan Ambai, Kecamatan Nusawani, Kecamatan Kosiwo, Kecamatan Yapen Barat dan Kecamatan Windesi;
- 3) Kabupaten Biak Numfor 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Numfor Barat, Kecamatan Poiru, Kecamatan Aimando Padaido, Kecamatan Biak Timur, Kecamatan Samofa, Kecamatan Yendidori, Kecamatan Yawosi, Kecamatan Bondifuar, Kecamatan Biak Barat dan Kecamatan Swandiwe;
- 4) Kabupaten Sarmi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kecamatan Pantai Timur, Kecamatan Bonggo, Kecamatan Sarmi Timur dan Kecamatan Pantai Barat;

- 
- 5) Kabupaten Keerom 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Web, Kecamatan Towe, Kecamatan Senggi, Kecamatan Waris, Kecamatan Arso Timur, Kecamatan Arso Barat, Kecamatan Mannem dan Kecamatan Skanto;
 - 6) Kabupaten Waropen 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Waropen Bawah, Kecamatan Ingerus, Kecamatan Wapoga dan Kecamatan Masirei; dan
 - 7) Kabupaten Supiori 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Supiori Barat.

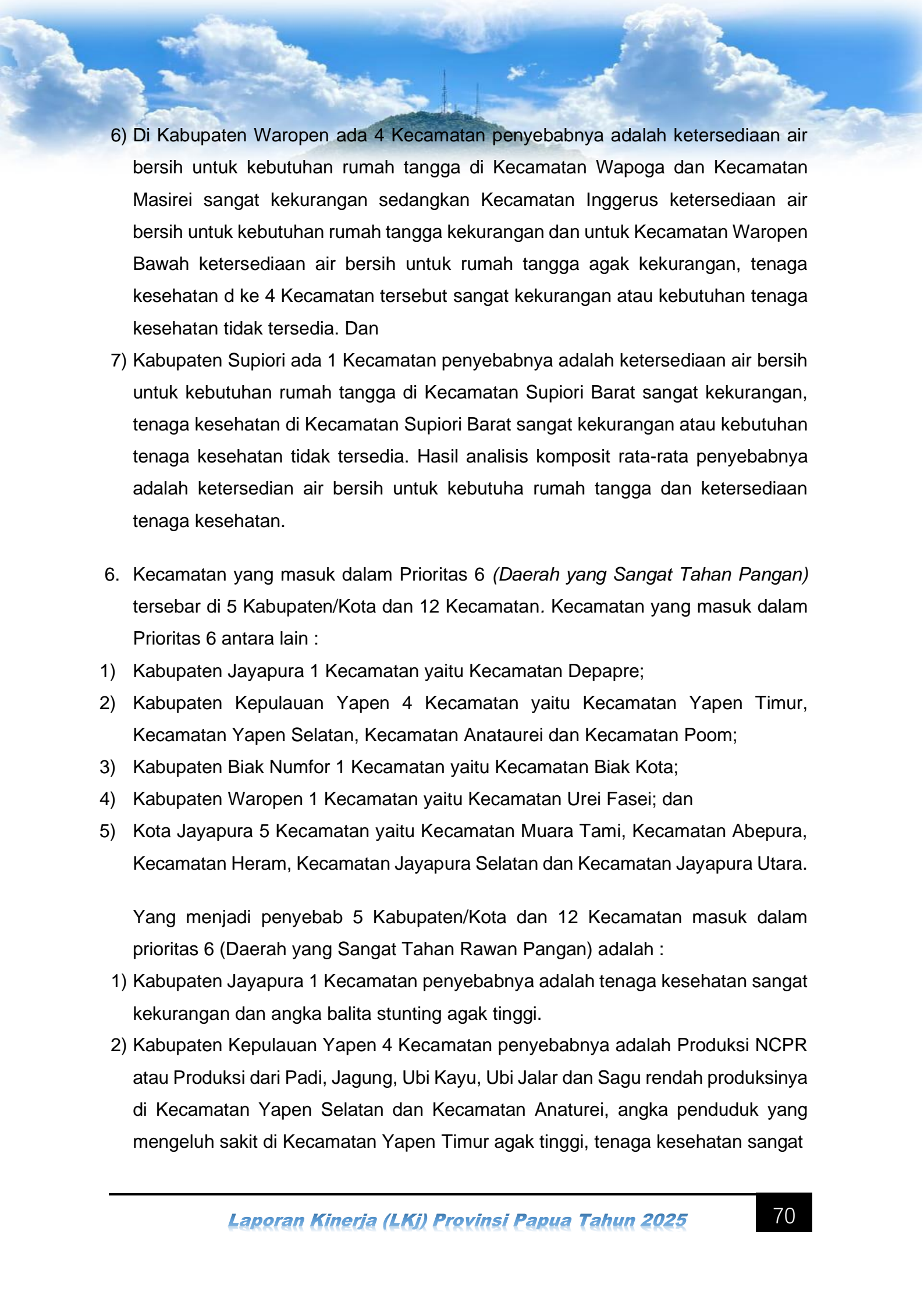
Yang menjadi penyebab 7 Kabupaten dan 49 Kecamatan masuk dalam prioritas 5 (Daerah yang Tahan Rawan Pangan) adalah:

- 1) Kabupaten Jayapura ada 12 Kecamatan penyebabnya adalah Produksi NCPN atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah produksinya di Kecamatan Waibu, kebutuhan air bersih di Kecamatan di Kecamatan Airu, Kecamatan Kemtuk, Kecamatan Demta, Kecamatan Yokari, Kecamatan Revenirara dan Kecamatan Ebungfau kebutuhan air bersih sangat kekurangan, Kecamatan Nimboran Timur/Namblong dan Kecamatan Sentani Barat kebutuhan air bersih kekurangan dan Kecamatan Yapsi, Kecamatan Nimboran kebutuhan air bersih agak kekurangan, tenaga kesehatan di 12 Kecamatan ini sangat kekurangan, perempuan sekolah yang berumur di atas 15 tahun di Kecamatan Airu sangat tinggi dan balita stunting di Kecamatan Airu serta Kecamatan Waibu tinggi.
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen ada 7 Kecamatan penyebabnya adalah Produksi NCPN atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu agak rendah produksinya terdapat di Kecamatan Kepulauan Ambai, Kecamatan Kosiwo dan Kecamatan Yapen Barat, pengeluaran pangan di atas 65% di Kecamatan Nusawani Sangat tinggi, Kecamatan Pantura Yapen dan Kecamatan Yapen Barat kebutuhan akan aliran listrik untuk rumah tangga agak kurang terpenuhi, kebutuhan air bersih untuk rumah tangga di Kecamatan Angkaisera, Kecamatan Nusawani dan Kecamatan Kosiwo kebutuhan air bersih untuk keluarga kekurangan, sedangkan di Kecamatan Pantura Yapen dan Kecamatan Windesi kebutuhan air bersih untuk rumah tangga agak kekurangan, dari 7 Kecamatan yang masuk dalam prioritas 5, hanya 1 Kecamatan yang tenaga kesehatan tersedia yaitu Kecamatan Nusawani, di Kecamatan Yapen Barat perempuan sekolah yang



berumur di atas 15 tahun agak tinggi dan angka balita stunting di Kecamatan Yapen Barat tinggi.

- 3) Kabupaten Biak Numfor ada 10 Kecamatan penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu sangat rendah produksinya di Kecamatan Samofa, untuk Kecamatan Aimando Padaido rendah dan Kecamatan Yendidori agak rendah, dari 10 Kecamatan yang masuk dalam prioritas 5 ada 3 Kecamatan yang sangat kekurangan untuk kebutuhan air bersih antara lain Kecamatan Poiru, Kecamatan Aimando Padaido dan Kecamatan Bondifuar, dan ada 5 Kecamatan yang kurang yaitu Kecamatan Numfor Barat, Kecamatan Yendidori, Kecamatan Yawosi, Kecamatan Biak Barat dan Kecamatan Swandiwe, 10 Kecamatan yang masuk dalam prioritas 5 untuk tenaga kesehatan sangat kekurangan, untuk balita stunting di Kecamatan Biak Timur agak tinggi.
- 4) Kabupaten Sarmi ada 5 Kecamatan penyebabnya adalah pengeluaran pangan 65 % agak tinggi di Kecamatan Pantai Timur, kebutuhan air bersih di Kecamatan Pantai Barat kekurangan dan di Kecamatan Pantai Timur Bagian Barat, Kecamatan Pantai Timur dan Kecamatan Sarmi Timur agak kekurangan kebutuhan air bersih, tenaga kesehatan di 5 Kecamatan tersebut sangat kekurangan dan di Kecamatan Pantai Barat perempuan sekolah yang berumur di atas 15 tahun agak tinggi.
- 5) Kabupaten Keerom ada 8 Kecamatan penyebabnya adalah pengeluaran pangan 65 % di Kecamatan Waris sangat tinggi, Kecamatan Web dan Kecamatan Towe agak tinggi pengeluaran pangan 65%, Kecamatan Towe ketersediaan rumah tangga tanpa aliran listrik sangat rendah, sedangkan Kecamatan Web dan Kecamatan Waris Ketersediaan aliran listrik untuk rumah tangga tanpa listrik agak rendah, Kecamatan Senggi, Kecamatan Arso Timur, Kecamatan Arso Barat, Kecamatan Mannem dan Kecamatan Skamto ketersediaan air bersih untuk rumah tangga sangat kekurangan, tenaga kesehatan untuk 8 Kecamatan sangat kekurangan, perempuan sekolah yang berumur di atas 15 tahun di Kecamatan Towe sangat tinggi sedangkan di Kecamatan Web agak tinggi dan untuk angka balita stunting di Kecamatan Web dan kecamatan Waris sangat tinggi sedangkan di Kecamatan Towe tinggi.



6) Di Kabupaten Waropen ada 4 Kecamatan penyebabnya adalah ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Wapoga dan Kecamatan Masirei sangat kekurangan sedangkan Kecamatan Inggerus ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga kekurangan dan untuk Kecamatan Waropen Bawah ketersediaan air bersih untuk rumah tangga agak kekurangan, tenaga kesehatan di ke 4 Kecamatan tersebut sangat kekurangan atau kebutuhan tenaga kesehatan tidak tersedia. Dan

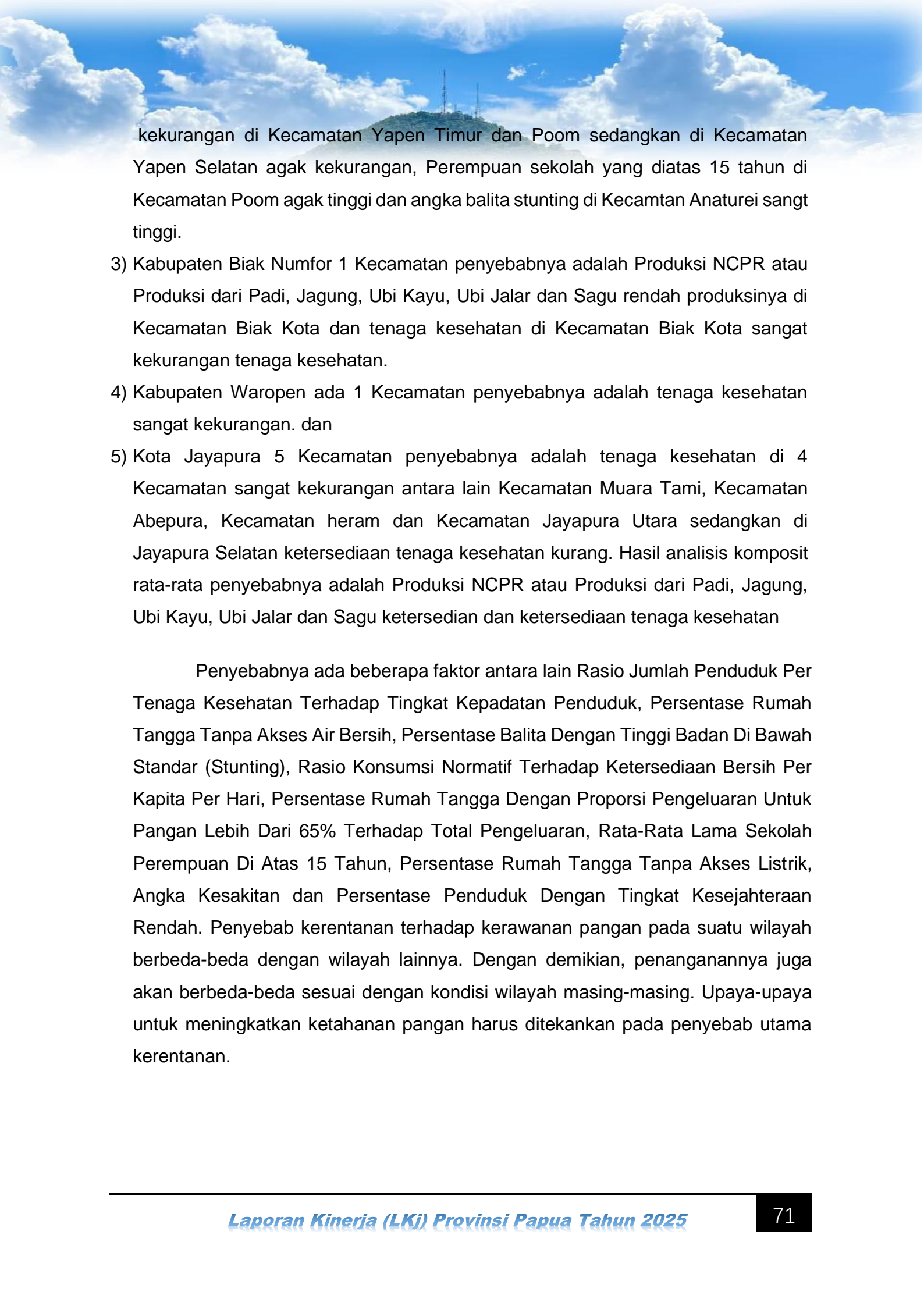
7) Kabupaten Supiori ada 1 Kecamatan penyebabnya adalah ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Supiori Barat sangat kekurangan, tenaga kesehatan di Kecamatan Supiori Barat sangat kekurangan atau kebutuhan tenaga kesehatan tidak tersedia. Hasil analisis komposit rata-rata penyebabnya adalah ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan ketersediaan tenaga kesehatan.

6. Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 6 (*Daerah yang Sangat Tahan Pangan*) tersebar di 5 Kabupaten/Kota dan 12 Kecamatan. Kecamatan yang masuk dalam Prioritas 6 antara lain :

- 1) Kabupaten Jayapura 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Depapre;
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Yapen Timur, Kecamatan Yapen Selatan, Kecamatan Anataurei dan Kecamatan Poom;
- 3) Kabupaten Biak Numfor 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Biak Kota;
- 4) Kabupaten Waropen 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Urei Fasei; dan
- 5) Kota Jayapura 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Muara Tami, Kecamatan Abepura, Kecamatan Heram, Kecamatan Jayapura Selatan dan Kecamatan Jayapura Utara.

Yang menjadi penyebab 5 Kabupaten/Kota dan 12 Kecamatan masuk dalam prioritas 6 (*Daerah yang Sangat Tahan Rawan Pangan*) adalah :


- 1) Kabupaten Jayapura 1 Kecamatan penyebabnya adalah tenaga kesehatan sangat kekurangan dan angka balita stunting agak tinggi.
- 2) Kabupaten Kepulauan Yapen 4 Kecamatan penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu rendah produksinya di Kecamatan Yapen Selatan dan Kecamatan Anaturei, angka penduduk yang mengeluh sakit di Kecamatan Yapen Timur agak tinggi, tenaga kesehatan sangat



kekurangan di Kecamatan Yapen Timur dan Poom sedangkan di Kecamatan Yapen Selatan agak kekurangan, Perempuan sekolah yang diatas 15 tahun di Kecamatan Poom agak tinggi dan angka balita stunting di Kecamatan Anaturei sangat tinggi.

- 3) Kabupaten Biak Numfor 1 Kecamatan penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu rendah produksinya di Kecamatan Biak Kota dan tenaga kesehatan di Kecamatan Biak Kota sangat kekurangan tenaga kesehatan.
- 4) Kabupaten Waropen ada 1 Kecamatan penyebabnya adalah tenaga kesehatan sangat kekurangan. dan
- 5) Kota Jayapura 5 Kecamatan penyebabnya adalah tenaga kesehatan di 4 Kecamatan sangat kekurangan antara lain Kecamatan Muara Tami, Kecamatan Abepura, Kecamatan heram dan Kecamatan Jayapura Utara sedangkan di Jayapura Selatan ketersediaan tenaga kesehatan kurang. Hasil analisis komposit rata-rata penyebabnya adalah Produksi NCPR atau Produksi dari Padi, Jagung, Ubi Kayu, Ubi Jalar dan Sagu ketersediaan dan ketersediaan tenaga kesehatan

Penyebabnya ada beberapa faktor antara lain Rasio Jumlah Penduduk Per Tenaga Kesehatan Terhadap Tingkat Kepadatan Penduduk, Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Air Bersih, Persentase Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Standar (Stunting), Rasio Konsumsi Normatif Terhadap Ketersediaan Bersih Per Kapita Per Hari, Persentase Rumah Tangga Dengan Proporsi Pengeluaran Untuk Pangan Lebih Dari 65% Terhadap Total Pengeluaran, Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Di Atas 15 Tahun, Persentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik, Angka Kesakitan dan Persentase Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah. Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda-beda dengan wilayah lainnya. Dengan demikian, penanganannya juga akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan harus ditekankan pada penyebab utama kerentanan.



Meskipun demikian, perlu diingat bahwa jika suatu Kabupaten/Kota masuk pada prioritas 1 maka tidak semua penduduknya berada dalam kondisi rentan terhadap kerawanan pangan, begitu juga sebaliknya tidak semua penduduk di Kabupaten/Kota prioritas 6 tahan pangan. Berdasarkan data tersebut di atas, bahwa capaian kinerja cakupan penanganan daerah rawan pangan tahun 2025 mencapai 9 kabupaten/ kota dari target 9 kabupaten/kota atau sebesar 100%.

Pada Tahun 2025, indikator kinerja **pengeluaran per kapita yang disesuaikan** ditetapkan dengan target sebesar Rp7.620 ribu per kapita, meningkat sebesar **0,13%** dibandingkan target Tahun 2024 sebesar Rp7.610 ribu per kapita. Realisasi pada Tahun 2025 mencapai Rp11.342 ribu per kapita dengan capaian sebesar 148% dari target. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp11.037 ribu per kapita, terjadi kenaikan sebesar Rp305 ribu per kapita atau sekitar **2,76%**. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan daya beli masyarakat serta perbaikan kondisi ekonomi, sehingga target indikator kinerja

Perkembangan indikator **Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan** menunjukkan dinamika kondisi daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua selama periode 2024–2025. Berdasarkan data realisasi, terjadi tren peningkatan yang cukup signifikan, khususnya pada Tahun 2024, serta pertumbuhan yang berlanjut pada Tahun 2025. Perbandingan perkembangan nilai dan laju pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan selama tiga tahun terakhir disajikan pada berikut :

Tabel. Perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan di Provinsi Papua Tahun 2024 – 2025

No	Tahun	Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (Rp.000)	Laju Pengeluaran Per Kapita disesuaikan (%)	Keterangan
1.	2024	11.037	41.50	Kenaikan angka Pengeluaran Per Kapita dari Tahun 2023 sebesar 41,50% pada Tahun 2024
2.	2025	11.342	2.76	Kenaikan angka Pengeluaran Per Kapita dari Tahun 2024 sebesar 2,76% pada Tahun 2025

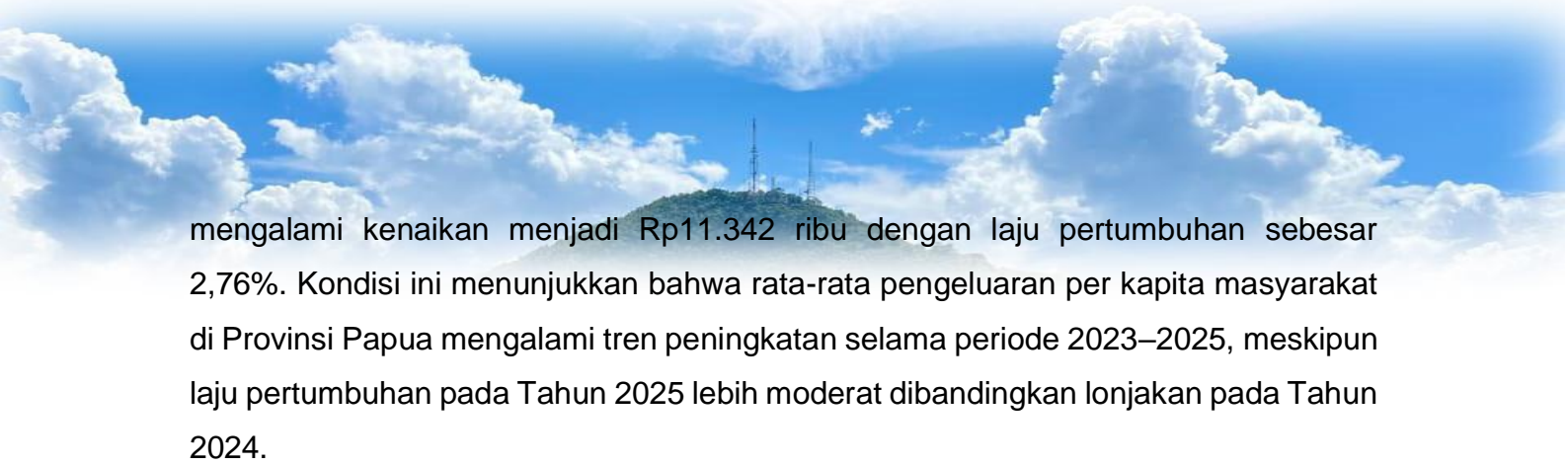
Sumber : Data Diolah

Target indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp7.620 ribu per kapita. Realisasi Tahun 2025 tercatat sebesar Rp11.342 ribu per kapita. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target mencapai :

$$\frac{11.342}{7.620} \times 100\% = 148.84\% \text{ atau sebesar } \mathbf{148,84\%}.$$

Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pengeluaran per kapita melampaui target sebesar Rp3.722 ribu per kapita atau sekitar 48,84% di atas target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan peningkatan daya beli masyarakat yang lebih tinggi dari proyeksi awal serta mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, indikator kinerja Tahun 2025 tidak hanya tercapai, tetapi terlampaui secara signifikan.


Berdasarkan data perkembangan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan, pada Tahun 2023 tercatat sebesar Rp7.800 ribu dengan laju pertumbuhan 8,49%. Pada Tahun 2024 meningkat signifikan menjadi Rp11.037 ribu atau tumbuh sebesar 41,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada Tahun 2025 kembali



mengalami kenaikan menjadi Rp11.342 ribu dengan laju pertumbuhan sebesar 2,76%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat di Provinsi Papua mengalami tren peningkatan selama periode 2023–2025, meskipun laju pertumbuhan pada Tahun 2025 lebih moderat dibandingkan lonjakan pada Tahun 2024.

Capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa indikator Cakupan Daerah Rawan Pangan dan Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan secara umum berada pada kategori sangat berhasil. Meskipun indikator Cakupan Daerah Rawan Pangan tidak mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, realisasi tetap mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan kembali melampaui target dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian tersebut antara lain:

1. Berdasarkan Undang-Undang 14,15,dan 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, sehingga terjadi Pemisahan daerah administrasi pada Pemerintah Provinsi Papua. Dimana Provinsi Papua yang terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota, kini mengalami pemisahan kabupaten/kota.
2. Pada Tahun 2024, indikator Cakupan Daerah Rawan Pangan dari target 7 kabupaten/kota terealisasi sebanyak 9 kabupaten/kota atau mencapai 128,6%. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebanyak 9 kabupaten/kota dan terealisasi 9 kabupaten/kota atau 100%, yang menunjukkan konsistensi dalam mempertahankan cakupan penanganan wilayah prioritas.
3. Indikator Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan pada Tahun 2024 dari target Rp7.610 ribu per kapita terealisasi sebesar Rp11.037 ribu per kapita dengan capaian 145%. Pada Tahun 2025, target sebesar Rp7.620 ribu per kapita terealisasi sebesar Rp11.342 ribu per kapita dengan capaian 148,84%, serta tumbuh 2,76% dibandingkan realisasi Tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik;
4. Adanya program dukungan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka percepatan pembangunan dan pemulihan sosial ekonomi, khususnya pasca penyesuaian wilayah administrasi.

- 
5. Dukungan kebijakan dan penganggaran dari Pemerintah Provinsi Papua kepada Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua dalam pengendalian daerah rawan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran 6

Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat


Secara keseluruhan, pada Tahun 2025 terlihat adanya konsolidasi capaian yang lebih stabil dibandingkan Tahun 2024, dimana indikator ketahanan pangan tetap terjaga sesuai target dan indikator ekonomi menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan dalam mendukung ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Provinsi Papua.

Sasaran ini bertujuan meningkatkan keharmonisan dan kohesifitas dalam menyikapi perbedaan kehidupan masyarakat yang majemuk di era globalisasi dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Keharmonisan dan Kohesifitas Masyarakat**” mencapai **119.47** persen dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Kerukunan Umat	Indeks	79,68	95,20	119,47
Capaian Kinerja Sasaran					119.47



Indikator Kinerja Indeks kerukunan umat beragama yang diukur dengan indikator penunjangnya berupa toleransi dalam kehidupan beragama, kesetaraan dan kerjasama.

Pada tahun anggaran 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua sesuai dengan fungsinya dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri telah melaksanakan pembinaan di bidang kerukunan umat beragama dengan bekerja sama dengan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh perempuan dalam menjaga dan meningkatkan kerukunan, kesetaraan dan kerjasama yang baik dan harmonis antar sesama anggota masyarakat dari berbagai suku, agama, dan ras di provinsi Papua. Dengan terjalannya kerjasama yang baik dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah maka keharmonisan dan kohesifitas masyarakat di Provinsi Papua selalu terjaga sehingga terhindar dari adanya konflik. Untuk Indikator Kinerja Indeks Kerukunan Umat Beragama Adapun Target yang ingin di capai sebesar 79,68 % dengan Realisasi sebesar 95,20 %. Indikator pendukung pendukung lainnya seperti indeks Ormas/LSM yang terdaftar yang diukur dengan indikator berupa jumlah Ormas/LSM yang terdaftar dan berbadan hukum pada Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

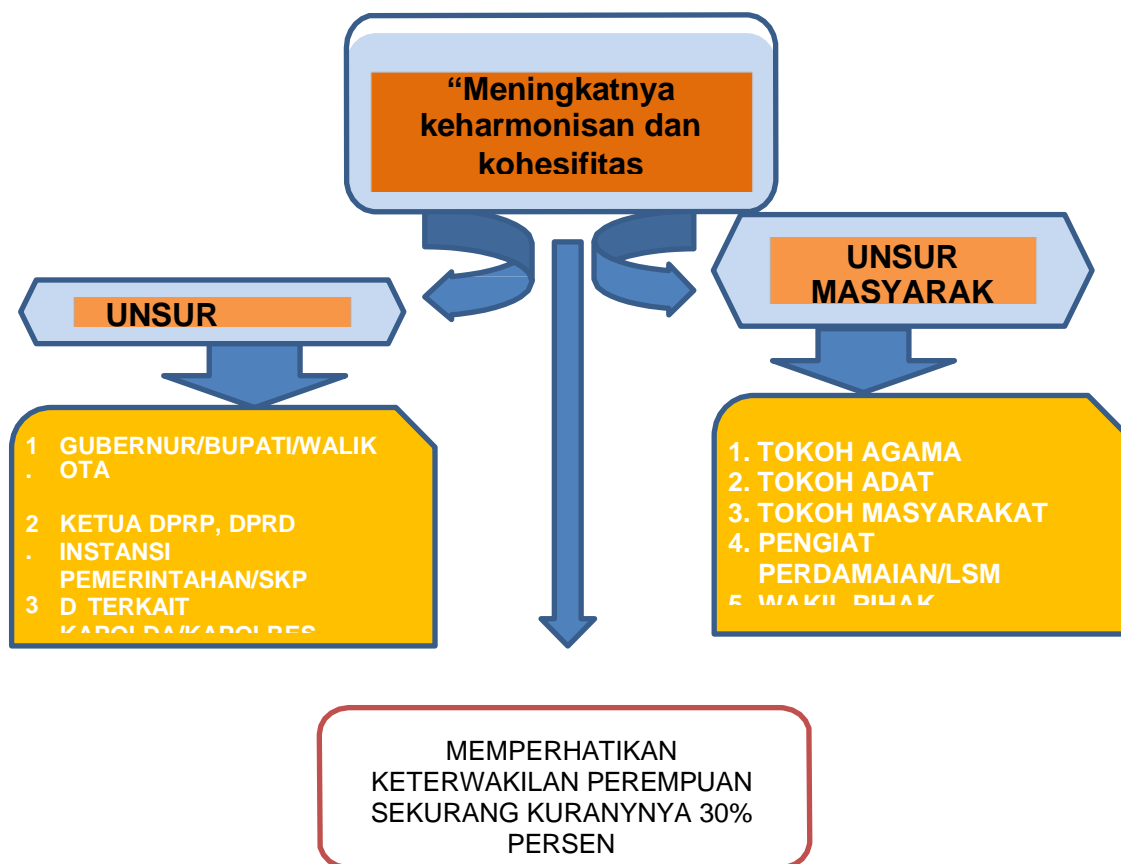
Hak untuk berkumpul dan berserikat diatur oleh UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

Sesuai data Jumlah Organisasi Masyarakat yang terdaftar di Provinsi Papua pada tahun 2025 jumlah Ormas terdaftar sebanyak 43 ORMAS terdaftar, data Yayasan yang terdaftar 33 yayasan, serta LSM yang terdaftar sebanyak dari tahun 2019 – 2025 sebanyak 26 LSM dan mulai tahun 2024 Badan Kesbangpol tidak lagi mengeluarkan surat tanda terdaftar, hal ini disebabkan karna ORMAS yang bersangkutan sudah terdaftar di Notaris dan untuk tahun 2025 Badan Kesbangpol akan mengeluarkan Surat Keterangan Melapor atas ORMAS yang sudah terdaftar.

Adapun peran Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua sebagai mitra sejajar bagi organisasi sosial masyarakat dan LSM yakni memberikan fasilitasi dalam bentuk kegiatan bersama, pembinaan dalam penataan organisasi dan kerjasama dalam program pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pelayanan kepada ormas/LSM yakni dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar bagi organisasi yang belum terdaftar dan berbadan hukum di kementerian Hukum dan HAM serta memberikan sosialisasi mengenai undang – undang keormasan yang berlaku.

Dibawah ini terdapat Tabel yang menggambarkan tahap penyelesaian konflik di daerah, sebagai berikut:

Gambar 3.1



Sumber Data : Badan KESBANGPOL , 2019

Dibawah ini adalah matriks capaian sasaran meningkatnya keharmonisan dan kohesitas masyarakat Tahun 2024-2025 sebagai berikut :

Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 6

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Kerukunan Umat berAgama	Indeks	78,68	100	127,9	79,68	95.20	119.47
Capaian Kinerja Sasaran				127,9			119.47

Rata-rata Capaian Kinerja **Indeks Kerukunan Umat berAgama** Tahun 2025 mengalami Penurunan **119,47%** persen dibanding Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yaitu 127.9 persen, walaupun capaian kinerja turun namun demikian rata-rata capaian kinerja sasaran diatas 100 persen dengan predikat “ **Sangat berhasil**”. data ini menunjukkan adanya keharmonisan dan kohesitas masyarakat di Provinsi Papua selalu terjaga sehingga terhindar dari adanya konflik.

Sasaran 7

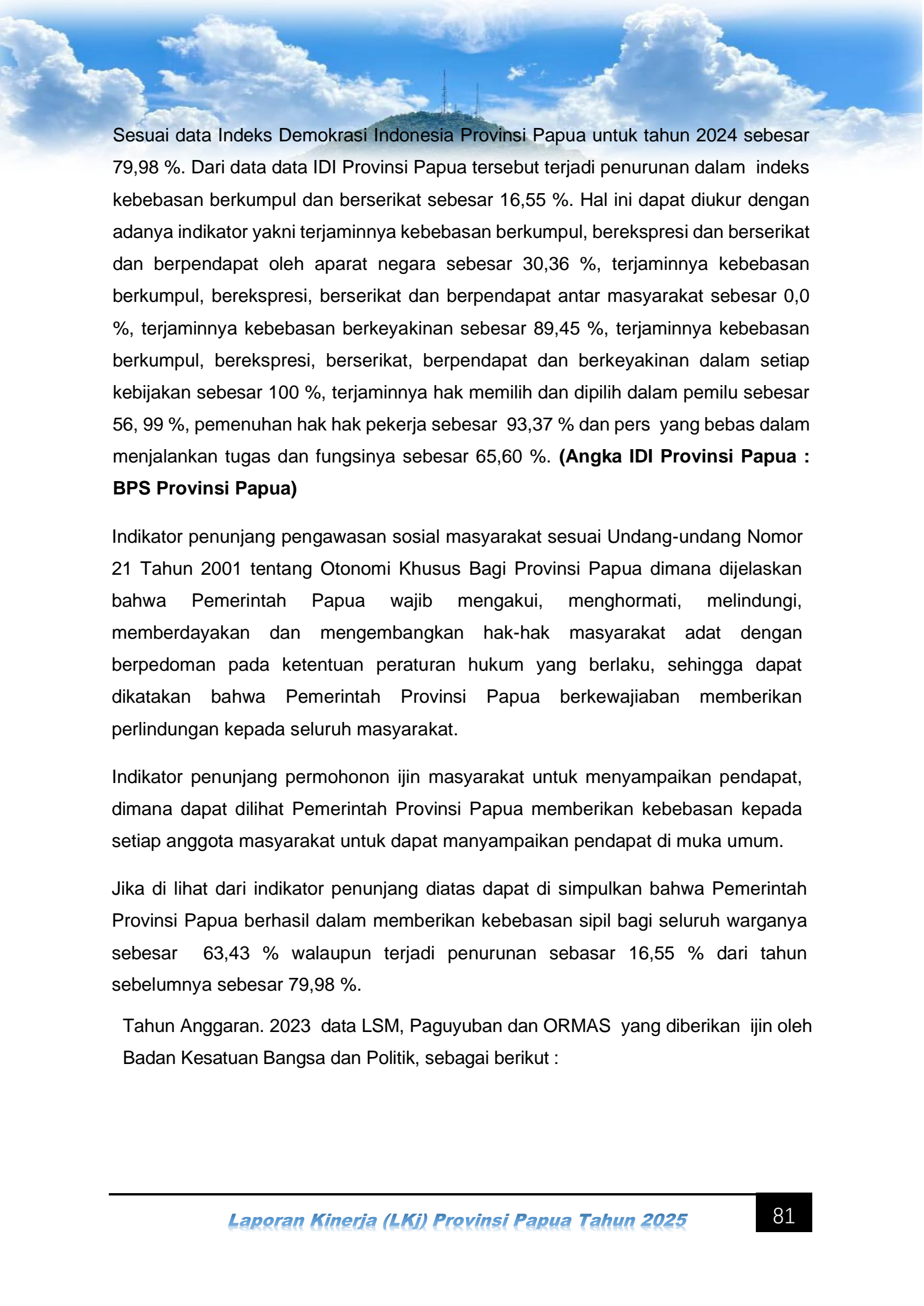
Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi

Pengukuran pencapaian sasaran 7 (ketujuh) yaitu **“Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi”** diukur melalui pencapaian 3 (Tiga) indikator sasaran dengan capaian kinerja **87,38** persen dengan kategori **“Berhasil”**, Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3(Tiga) indikator sasaran, sebagai berikut :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 7 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Nilai Skor aspek kebebasan sipil	Skor	95,96	63,43	66,10
2.	Nilai skor aspek hak- hak politik	Skor	50,0	60,97	121,9
3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60,0	44,49	74,15
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					87,38

Indikator Kinerja I yaitu nilai skor aspek kebebasan sipil. Sesuai dengan Wikipedia kebebasan sipil adalah kebebasan yang pemerintah tidak dapat ikut campur, baik oleh hukum atau oleh tafsiran yudisial tanpa suatu alasan tertentu. Dalam indikator sasaran nilai skor aspek kebebasan sipil didukung oleh beberapa indikator penunjang seperti kebebasan berkumpul, berpendapat dan berserikat, pengawasan sosial masyarakat dan permohonan ijin masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Indikator penunjang kebebasan berkumpul dan berserikat memberikan keleluasan kepada masyarakat untuk dapat berkumpul dan berserikat. Sesuai data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua untuk tahun 2024 indeks kebebasan berkumpul dan berserikat sebesar 63,45 % sementara untuk tahun 2023



Sesuai data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua untuk tahun 2024 sebesar 79,98 %. Dari data data IDI Provinsi Papua tersebut terjadi penurunan dalam indeks kebebasan berkumpul dan berserikat sebesar 16,55 %. Hal ini dapat diukur dengan adanya indikator yakni terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi dan berserikat dan berpendapat oleh aparat negara sebesar 30,36 %, terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat sebesar 0,0 %, terjaminnya kebebasan berkeyakinan sebesar 89,45 %, terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan sebesar 100 %, terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu sebesar 56,99 %, pemenuhan hak hak pekerja sebesar 93,37 % dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebesar 65,60 %. **(Angka IDI Provinsi Papua : BPS Provinsi Papua)**

Indikator penunjang pengawasan sosial masyarakat sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimana dijelaskan bahwa Pemerintah Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat.

Indikator penunjang permohonan ijin masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dimana dapat dilihat Pemerintah Provinsi Papua memberikan kebebasan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat menyampaikan pendapat di muka umum.

Jika di lihat dari indikator penunjang diatas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berhasil dalam memberikan kebebasan sipil bagi seluruh warganya sebesar 63,43 % walaupun terjadi penurunan sebesar 16,55 % dari tahun sebelumnya sebesar 79,98 %.

Tahun Anggaran. 2023 data LSM, Paguyuban dan ORMAS yang diberikan ijin oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

Tabel. Data Organisasi Masyarakat Sipil Tahun 2023

NO	NAMA ORGANISASI, TGL, NOMOR PENDAFTARAN DI BAKESBANG	NOMOR SURAT PERMOHONAN ,AHU & TGL DITERBIT	TAHUN	ALAMAT
1.	DPW KERUKUNAN KELUARGA MALUKU UTARA (KKMU) PROVINSI PAPUA	AHU-0002537.AH.01.07, TAHUN 2022; TGL 15 MARET 2022 220/051, 13 FEBRUARI 2023	2023	JL. AMPHIBI NO.17 JAYAPURA SELATAN
2.	IMAJI PAPUA	AHU-781.AH.02.01 TAHUN 2010; TGL 26 MARET 2010 220/829	2023	PERUMAHAN PEMDA II, BLOK.L-1 CIKOMBONG KOTARAJA DALAM; KEL. VIM KOTARAJA ABEPURA
3.	YAYASAN RAJAWALI CITRA PAPUA (RAJAWALI CITRA PAPUA FOUNDATION)	AHU-0002879.AH.01.04 TAHUN 2017, TGL 13 FEBRUARI 2017 220/091,	2023	JL. JERUK NIPIS VURIA KOTARAJA
4.	YAYASAN BENGKEL KERJA PAPUA	AHU-0023691.AH.01.12 TAHUN 2012, TGL 27 JULI 2021 220/090, 15 MARET 2023	2023	JL. RAMBUTAN NO. 3 ARDIPURA KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
5.	DPP KELUARGA BESAR PUTRA – PUTRI PEJUANG PEMBEBASAN IRIAN BARAT	01/SK/P31B/2023, TGL 03 MARET 2023	2023	JL. RI MACAN TUTUL NO. 13 DOK.V ATAS JAYAPURA UTARA
6.	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) GERAKAN WANACITA RAKYAT INDONESIA	AHU-0001210..AH.01.08 , TAHUN 2021, TGL 1 SEPTEMBER 2021 220/212, 11 APRIL 2023	2023	GANG MERPATI –III YOTEFA KOTA JAYAPURA
7.	IKATAN KAUM PEREMPUAN YAHUKIMO(IKPY)	AHU-202.AH.02.01 TAHUN 2013, TGL 19 JUNI 2013 220/21, 11 APRIL 2023	2023	JL. RAYA SENTANI HAWAI DUNLOP NO.178 KABUPATEN JAYAPURA
8.	KOMUNITAS BRIONESIA CHAPTE JAYAPURA	AHU-00657.AH.02.01 TAHUN 2014, TGL 24 OKTOBER 2014 220/214, 11 APRIL 2023	2023	JL. KELAPA DUA ENTROP BELAKANG TERMINAL (LOS PASAR NO. A.210) JAYAPURA
9.	DEWAN ADAT SUKU WILAYAH TABI (DASWIL TABI) PROVINSI PAPUA	AHU 337AH.02.01, TAHUN 2011, TGL 06 MEI 2011 220/213, 11 APRIL 2023	2023	JL. PASIR 6 KAMPUNG ORMO KABUPATEN JAYAPURA
10.	GEREJA BETHEL (GEREJA PENTAKHOSTA) DI TANAH PAPUA. BADAN PENGHUBUNG PUSAT (BPP)	01/SP/BPP.GBGP/III/2023, TGL 13 MARET 2023 220/156, 06 MEI 2023	2023	JL KOYA TIMUR PERUMAHAN GREEN ROLLO, RT.04/RW.02 BLOK F NO. 27 KOYA TENGAH MUARA TAMI KOTA JAYAPURA
11.	DEWAN PRESEDIUM PUSAT MASYARAKAT ADAT TABI (DEOTAMA) PAPUA.	AHU-781.AH.0201 TAHUN 1010, TGL 26 MARET 2010 220/239, 06 JUNI 2023	2023	JL. KOYA DISTRIK WAENA JAYAPURA
12.	GEMA PERJUANGAN MAHARANI NUSANTARA (GPMN) PROVINSI PAPUA	AHU. 04.02.02 TAHUN 2010, TGL 25 JANUARI 2010, 220/554, 24 AGUSTUS 2023	2023	JL. KALI ABEPURA JAYAPURA
13.	DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN PARMUWISA INDONESIA (INDONESIA)	AHU.0001489, AH.01.08 TAHUN 2022, TGL 05 AGUSTUS 2023, 220/555,	2023	JL. KOMBO YABASO, SAMPING GEREJA ADVEN SENTANI

14.	IKATAN PERSAUDARAAN INDONESIA (IPHI)	AHU-0000881.AH.01.08 TAHUN 2021 TGL 15 JUNI 2021, 220/556, 24 AGUSTUS 2023	2023	JL ARDIPURA RUKO ASRI NO.248 POLIMAK JAYAPURA
15.	DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PIJAR Keadilan DEMOKRASI	AHU-OO12839.AH.01.07 TAHUN 2020, 03 JANUARI 2012 220/557, 24 AGUSTUS 2023	2023	JL. PERIKANAN HAMADI, JAYAPURA SELATAN
16.	KOMUNITAS PENGUSAHA ORANG ASLI PAPUA	AHU-C-77.HT.03.01 TAHUN 2006; TGL 20 APRIL 2022 220/444, 21 JULI 2023	2023	PERUM. ORGANDA PADANG BULAN BLOK. D-15 HEDAM KOTA JAYAPURA – PAPUA
17.	PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH PAPUA	AHU-um.01.01-63; TGL 01 JULI 2016 220/227, 07 AGUSTUS 2023	2023	JL. SERUI NO. 3 KOMPLEKS SD. MUHAMMADIYAH LT.2 ABEPURA KOTA JAYAPURA
18.	YAYASAN KINGMI ZAITUN	AHU-0007399.AH.01.04, TAHUN 2023, TGL 08 JUNI 2023, 220/238, 11 SEPTEMBER 2023	2023	JL. KABUPATEN II NO.01, KOTA JAYAPURA
19.	WAHANA PEMBINAAN GENERASI MUDA TOLI (WAGEMULI)	AHU-0004607.AH.01.07, TAHUN 2023, TGL 08 JUNI 2023, 220/328, 11 SEPTEMBER 2023	2023	JL BUPER WAENA KOMPLEKS IMANUEL, RT.013/RW.003 KELUARAHAN WAENA – DIDTRIK HERAM KOTA
20.	GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA (GPI-PAPUA)	M-53-HT.03.05 – TH.19, TGL 30 DESEMBER 1992. TGL 19 SEPTEMBER 2023 (mendaftar)	2023	KANTOR PERWAKILAN JAYAPURA JL. RAYA SENTANI-BAEPURA, RT.002/RW.004 KELURAHAN KOTA BARU,
21.	DPP HIMPUANAN PEMUDA PAPUA PAROVINSI PAPUA (HPP)	NO. SURAT; 035/eks/DPP-HPP/PAPUA/X/2023, TGL 09 OKTOBER 2023 220/375, TGL 10	2023	JL RAYA SENTANI KOTA BARU, ABEPURA - KEL. WAIMHOROK – KOTA HAYAPURA
22.	PERKUMPULAN KELUARGA BESAR FATEGOMI SE-TANAH PAPUA (FKBF)	AHU-0015319.AH.0107 TAHUN 2021, TGL 15 JANUARI 2022 TGL 15 AGUATUS 2023 (mendaftar)	2023	JL. WOROT. PERUM UNCEN NO. A1 – KALIACAI RT.007/RW.012 KEL. VIM DISTRIK ABEPURA – KOTA JAYAPURA
23.	PERKUMPULAN PEREMPUAN KAWANUA PAPUA	AHU-0207.AH.02.01 TAHUN 2010, TAHUN 2010; TGL 23 JANUARI 2010 220/367,	2023	JL. AMPHIBI HAMADI SAMPING LAPANGAN AL. DISTRIK JAYAPURA SELATAN.

Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TA.2023

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 jumlah permohonan ijin yang diberikan, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. Data Organisasi Masyarakat Sipil yang mendapat Ijin

NO.	BIDANG KEGIATAN ORMAS	2019	2020	2021	2022	2023
1.	jumlah permohonan ijin yang diberikan	20	431	54	43	23
Jumlah		20	431	54	43	23

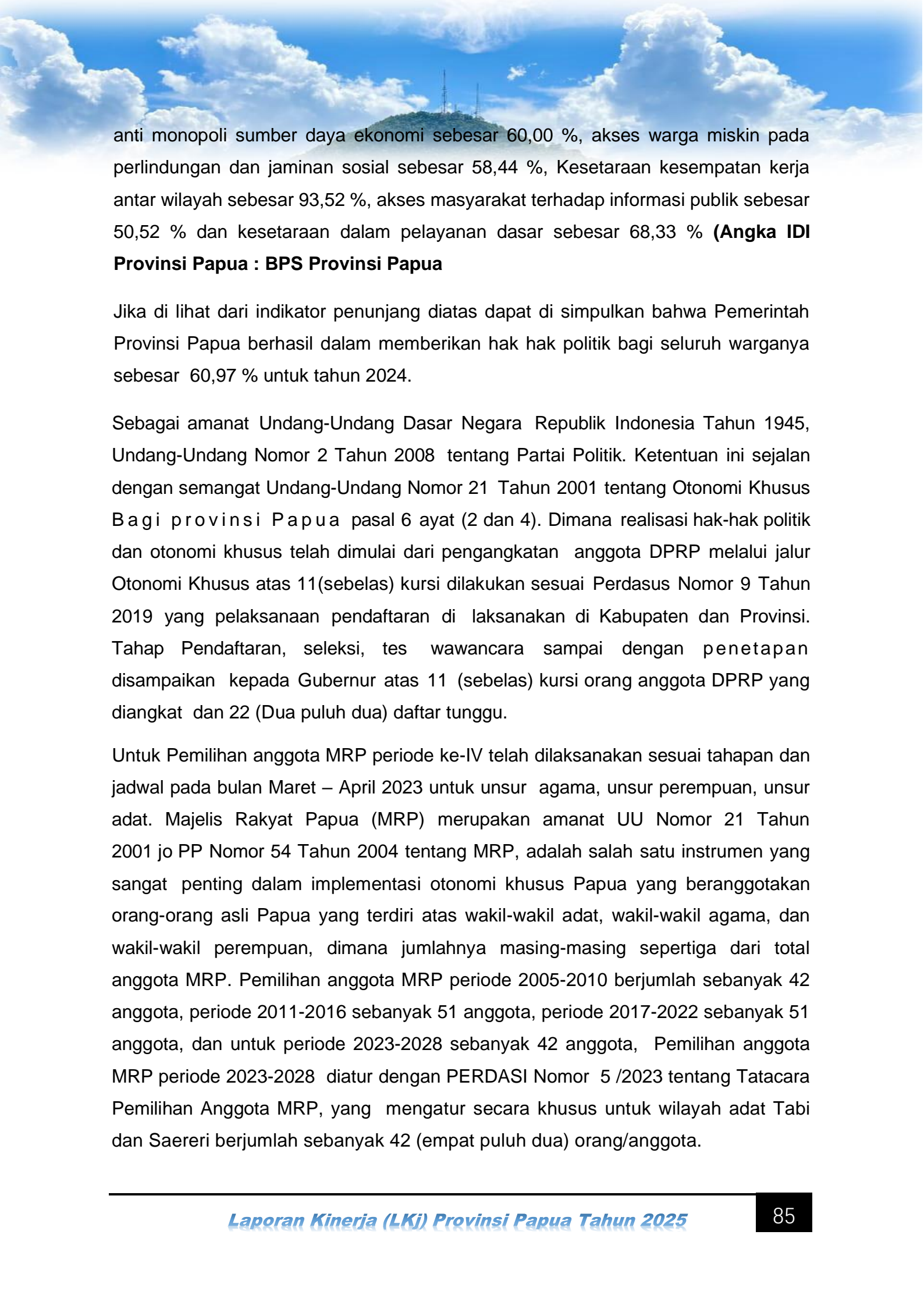
Sumber data: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2019-2021

Berdasarkan data jumlah permohonan ijin yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kepada LSM dan ORMAS yang mengajukan pendaftaran dari Tahun 2019 sd 2023 terbanyak pada Tahun 2020 dengan jumlah 431 ijin yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diikuti 54 ijin pada Tahun 2021, 43 ijin pada Tahun 2022, 23 ijin Tahun 2023 dan 20 ijin Tahun 2019 yang yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Indikator Kinerja II yaitu nilai skor aspek hak-hak politik. Untuk indikator nilai aspek hak-hak politik didukung dengan indikator penunjang berupa defenisi hak politik sesuai ketentuan; kesempatan untuk berpolitik dipilih dan memilih; kebebasan berorganisasi dan hak politik secara general atau otsus.

Dari indikator penunjang tersebut Pemerintah Provinsi Papua senantiasa memberikan dukungan hak politik kepada seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali dan Pemerintah juga memberikan kesempatan berpolitik kepada seluruh anggota masyarakat untuk dapat dipilih dan memilih sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga memberikan kebebasan berorganisasi kepada setiap warga masyarakat.

Sesuai dengan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tahun 2024 di mana nilai skor aspek hak-hak politik sebesar 60,97 % mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0,87 % hal ini dapat diukur dengan indikator seperti kesetaraan gender sebesar 94,39 %, partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan sebesar 5,80 %,



anti monopoli sumber daya ekonomi sebesar 60,00 %, akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial sebesar 58,44 %, Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah sebesar 93,52 %, akses masyarakat terhadap informasi publik sebesar 50,52 % dan kesetaraan dalam pelayanan dasar sebesar 68,33 % (**Angka IDI Provinsi Papua : BPS Provinsi Papua**)

Jika di lihat dari indikator penunjang diatas dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berhasil dalam memberikan hak hak politik bagi seluruh warganya sebesar 60,97 % untuk tahun 2024.

Sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketentuan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi provinsi Papua pasal 6 ayat (2 dan 4). Dimana realisasi hak-hak politik dan otonomi khusus telah dimulai dari pengangkatan anggota DPRD melalui jalur Otonomi Khusus atas 11(sebelas) kursi dilakukan sesuai Perdasus Nomor 9 Tahun 2019 yang pelaksanaan pendaftaran di laksanakan di Kabupaten dan Provinsi. Tahap Pendaftaran, seleksi, tes wawancara sampai dengan penetapan disampaikan kepada Gubernur atas 11 (sebelas) kursi orang anggota DPRD yang diangkat dan 22 (Dua puluh dua) daftar tunggu.

Untuk Pemilihan anggota DPRD periode ke-IV telah dilaksanakan sesuai tahapan dan jadwal pada bulan Maret – April 2023 untuk unsur agama, unsur perempuan, unsur adat. Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001 jo PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, adalah salah satu instrumen yang sangat penting dalam implementasi otonomi khusus Papua yang beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan, dimana jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Pemilihan anggota DPRD periode 2005-2010 berjumlah sebanyak 42 anggota, periode 2011-2016 sebanyak 51 anggota, periode 2017-2022 sebanyak 51 anggota, dan untuk periode 2023-2028 sebanyak 42 anggota, Pemilihan anggota DPRD periode 2023-2028 diatur dengan PERDASI Nomor 5 /2023 tentang Tatacara Pemilihan Anggota DPRD, yang mengatur secara khusus untuk wilayah adat Tabi dan Saereri berjumlah sebanyak 42 (empat puluh dua) orang/anggota.

Jumlah anggota DPRP periode 2024-2029 hasil pemilu 2024 sebanyak 45(empat puluh lima) kursi dan 11 (sebelas) kursi yang diangkat, jumlah total keanggotaan DPRP 56, saat ini masih berlangsung prosesnya sehingga belum Nampak berapa jumlah keterwakilan perempuan dan laki-laki ataupun berapa jumlah OAP dan Non OAP yang terpilih.

Adapun Keterlibatan perempuan dalam partai politik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa aspek kebijakan negara telah mengatur keterlibatan perempuan dalam Partai Politik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang memposisikan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk dapat duduk dalam lembaga legislatif, diatur kembali dalam dalam PP 106/2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, mulai dari pasal 32 sd pasal 84 mengatur tentang pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP termasuk dalam komposisi sekurang-kurangnya 30 persen adalah keterwakilan perempuan.

Tabel
PEMILIHAN ANGGOTA MRP PERIODE 2023-2028

NO.	DAERAH WILAYAH ADAT DI PAPUA	KUOTA	Keterangan
A.	Wilayah Adat Tabi terdiri atas 2 wilayah Pemilihan, yaitu :		
1.	Wilayah Pemilihan I	8 Kursi	4 (empat) kursi untuk Wakil Adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil perempuan
	1). Kota Jayapura		
	2). Kabupaten Jayapura		
	3) Kabupaten Keerom		
2	Wilayah Pemilihan II	7 Kursi	4 (empat) kursi untuk Wakil Adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil perempuan
	1).Kabupaten Sarmi		
	2). Kabupaten Mambero Raya		
B	Wilayah Adat Saereri, terdiri atas 2 Wilayah Pemilihan, yaitu		
1.	Wilayah Pemilihan III	6 Kursi	3 (tiga) kursi untuk Wakil Adat dan 3 (tiga) kursi untuk wakil Perempuan
	1). Kabupaten Biak Numfor		
	2). Kabupaten Supiori		
2	Wilayah Pemilihan IV	7 Kursi	3 (tiga) kursi untuk Wakil Adat dan 4 (empat) kursi untuk wakil Perempuan
	1). Kabupaten Kepulauan Yapen		
	2).Kabupaten Waropen		

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2023



Berdasarkan data tersebut keterwakilan perempuan dalam organisasi telah setara gender dengan laki-laki.

Indikator Kinerja III yaitu nilai skor aspek lembaga demokrasi sesuai dengan data Indeks Demokrasi Provinsi Papua Tahun 2024 di mana nilai skor aspek lembaga demokrasi sebesar 44,49 % mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 20,01 % dimana nilai skor aspek lembaga demokrasi pada tahun 2023 sebesar 60,10%.

Adapun nilai skor aspek lembaga demokrasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja lembaga legislatif sebesar 19,05 %, kinerja lembaga yudikatif sebesar 85,28 %, netralitas penyelenggaraan pemilu sebesar 18,33 %, putusan PTUN terkait kebijakan pejabat pemerintah sebesar 91,67 %, jaminan pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat sebesar 80,32 %, transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBD/N oleh pemerintah sebesar 42,86 %, kinerja birokrasi dalam pelayanan publik sebesar 42,86 % dan pendidikan politik pada kader partai politik sebesar 26,15 %. **(Angka IDI Provinsi Papua : BPS Provinsi Papua)**

Jumlah partai peserta pemilu periode 2024-2029 sebanyak 18 (delapan belas) partai dan di Provinsi Papua tidak ada partai politik lokal sebagaimana di Aceh, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak mengatur adanya pembentukan partai lokal di Provinsi Papua.

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022, Jumlah Partai politik dapat berubah jumlahnya pada masa menjelang Pemilu Pelaksanaan Pilkada diatur dengan aturan yang berlaku secara nasional dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan Pilkada tidak diatur dalam Undang-undang OTSUS Papua, sehingga setiap Parpol yang mengusung pasangan calonnya bersifat umum kepada OAP dan non OAP. Sedangkan hak politik yang diatur dalam UU Otsus yang terkait dengan Pilkada hanya kekhususan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua setelah mendapatkan persetujuan keasliannya dari MRP.


Di bawah ini Tabel Partai peserta dari pemilu ke pemilu, sebagai berikut :

Tabel . Pemilu Dalam Angka di Indonesia

NO	PEMILU	JUMLAH PESERTA
1.	1955	172 peserta
2.	1971	10 partai
3.	1977, 1982, 1987, 1992, 1997	3 partai
4.	1999	48 partal
5.	2004	24 partai
6.	2009	38 partai + 6 parpol lokal di Aceh
7.	2014	12 parpol + 3 parpol lokal di Aceh
8.	2019	16 parpol + 4 parpol lokal di Aceh
9.	2024	18 Partai Politik+ 4 parpol lokal di Aceh

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Tahun 2020





Partai Ummat mendapat nomor urut ke 24 setelah lolos verifikasi Nomor Urut Partai Lokal dari Aceh terdiri atas :

18. Partai Nangroe Aceh (PNA)
19. Partai Generasi Aceh Beusaboh Thaath dan Taqwa (Gabthat)
20. Partai Darul Aceh (PDA)
21. Partai Aceh
22. Partai Adil Sejahtera Aceh (PAS Aceh)
23. Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (SIRA)

Pendaftaran partai politik untuk Pemilu 2024 dilaksanakan pada Bulan Agustus 2022, Jumlah Partai politik dapat berubah jumlahnya pada masa menjelang Pemilu Pelaksanaan Pilkada diatur dengan aturan yang berlaku secara nasional dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan Pilkada tidak diatur dalam Undang-undang OTSUS Papua, sehingga setiap Parpol yang mengusung pasangan calonnya bersifat umum kepada OAP dan non OAP. Sedangkan hak politik yang diatur dalam UU Otsus yang terkait dengan Pilkada hanya kekhususan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua setelah mendapatkan persetujuan keasliannya dari MRP.

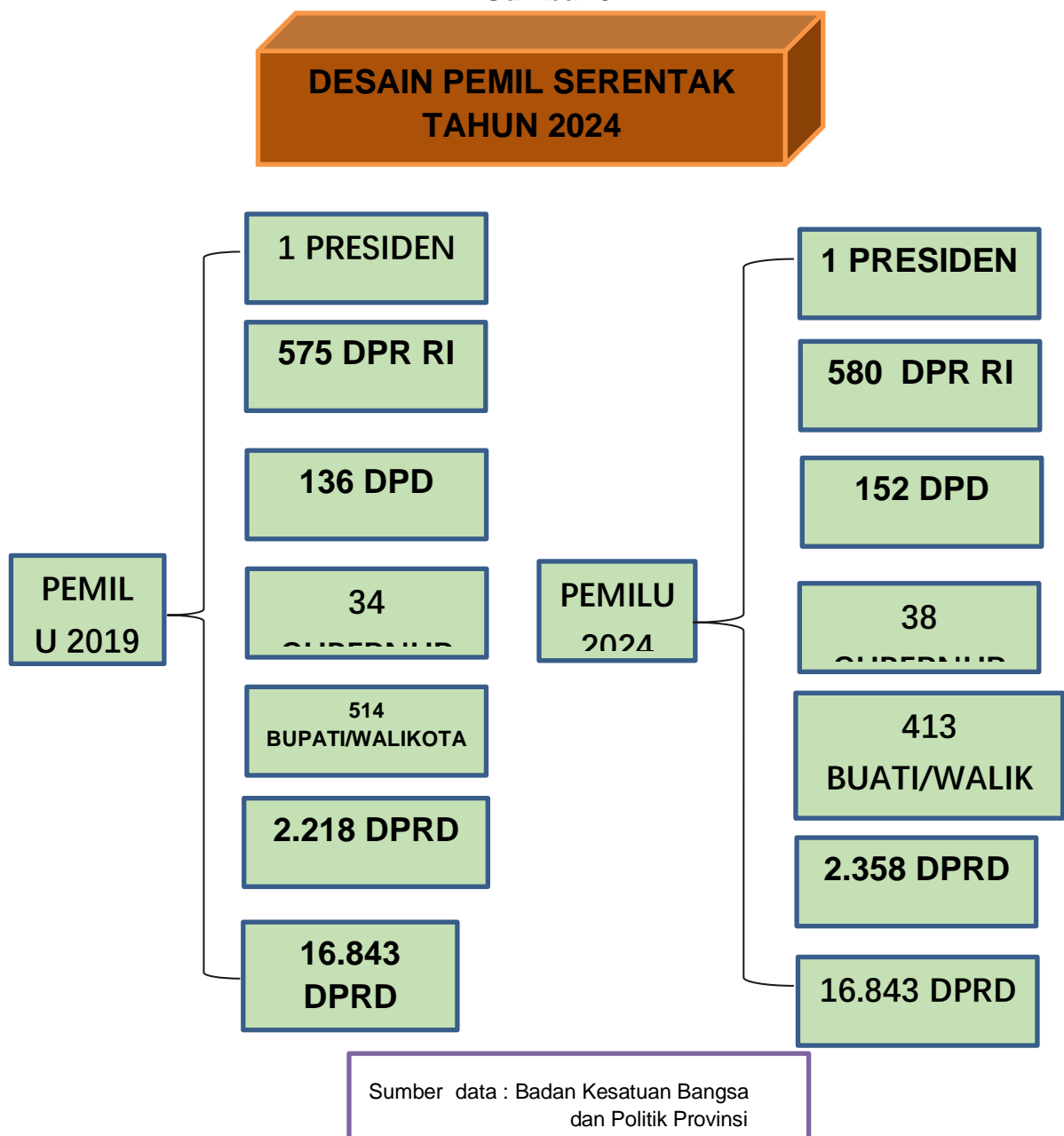
Berikut rincian perolehan suara 18 partai politik yang ditetapkan oleh KPU:

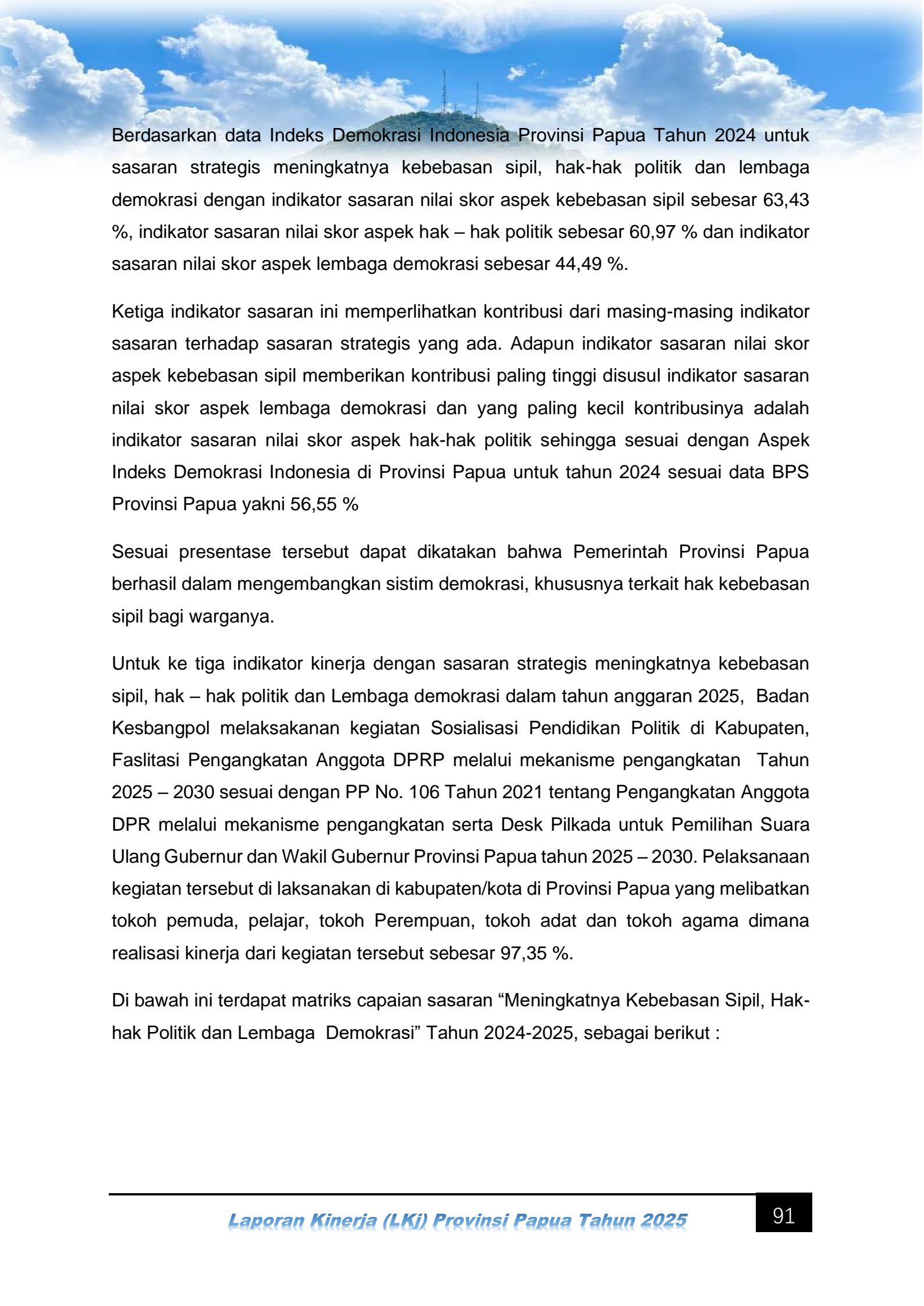
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 16.115.655 suara
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra): 20.071.708 suara
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan: 25.387.279 suara
4. Partai Golkar: 23.208.654 suara
5. Partai Nasdem: 14.660.516 suara
6. Partai Buruh: 972.910 suara
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora): 1.281.991 suara
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 12.781.353 suara
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN): 326.800 suara
10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura): 1.094.588 suara
11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda): 406.883 suara
12. Partai Amanat Nasional (PAN): 10.984.003 suara

- 13. Partai Bulan Bintang (PBB): 484.486 suara
- 14. Partai Demokrat: 11.283.160 suara
- 15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI): 4.260.169 suara
- 16. Partai Perindo: 1.955.154 suara
- 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 5.878.777 suara
- 24. Partai Ummat: 642.545 suara

Data : Artikel dari [Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/22231361/hasil-pemilu-2024-pdi-p-menang-25387279-suara) dengan judul "Hasil Pemilu 2024: PDI-P Menang 25.387.279 Suara", baca <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/22231361/hasil-pemilu-2024-pdi-p-menang-25387279-suara>.

Gambar 3.1





Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Tahun 2024 untuk sasaran strategis meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi dengan indikator sasaran nilai skor aspek kebebasan sipil sebesar 63,43 %, indikator sasaran nilai skor aspek hak – hak politik sebesar 60,97 % dan indikator sasaran nilai skor aspek lembaga demokrasi sebesar 44,49 %.

Ketiga indikator sasaran ini memperlihatkan kontribusi dari masing-masing indikator sasaran terhadap sasaran strategis yang ada. Adapun indikator sasaran nilai skor aspek kebebasan sipil memberikan kontribusi paling tinggi disusul indikator sasaran nilai skor aspek lembaga demokrasi dan yang paling kecil kontribusinya adalah indikator sasaran nilai skor aspek hak-hak politik sehingga sesuai dengan Aspek Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Papua untuk tahun 2024 sesuai data BPS Provinsi Papua yakni 56,55 %

Sesuai presentase tersebut dapat dikatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua berhasil dalam mengembangkan sistim demokrasi, khususnya terkait hak kebebasan sipil bagi warganya.

Untuk ke tiga indikator kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya kebebasan sipil, hak – hak politik dan Lembaga demokrasi dalam tahun anggaran 2025, Badan Kesbangpol melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik di Kabupaten, Faslitasi Pengangkatan Anggota DPRD melalui mekanisme pengangkatan Tahun 2025 – 2030 sesuai dengan PP No. 106 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Anggota DPR melalui mekanisme pengangkatan serta Desk Pilkada untuk Pemilihan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2025 – 2030. Pelaksanaan kegiatan tersebut di laksanakan di kabupaten/kota di Provinsi Papua yang melibatkan tokoh pemuda, pelajar, tokoh Perempuan, tokoh adat dan tokoh agama dimana realisasi kinerja dari kegiatan tersebut sebesar 97,35 %.

Di bawah ini terdapat matriks capaian sasaran “Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi” Tahun 2024-2025, sebagai berikut :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 7 untuk Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
		2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Nilai Skor Aspek Kebebasan Sipil	Skor	95,0	100	105,3	95,96	63.43	66.10
Nilai Skor Aspek Hak-Hak Politik	Skor	50,0	60,10	120,2	50,0	60,97	121,9
Nilai Skor Aspek Lembaga Demokrasi	Skor	60,0	100	166,7	60,0	100	74.15
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja				130,7			87,38

Berdasarkan Data pada Tabel diatas maka diperlukan langkah-langkah perbaikan tata kelola menjadi bahan evaluasi lintas perangkat daerah dan memerlukan penanganan serius dan terukur dikarenakan terjadi penurunan capaian kinerja di tahun 2025 sebesar 6 persen atau capaian kinerja sebesar 87,38 persen dibandingkan tahun 2024, 130,7 persen.

Dengan penurunan tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada penilaian kualitas demokrasi di daerah.

Penurunan mencerminkan masih adanya pekerjaan rumah pada aspek kebebasan sipil, hak politik, serta kapasitas lembaga demokrasi. Sejumlah indikator yang menjadi sorotan antara lain kinerja lembaga demokrasi, kualitas produk peraturan daerah, dan pelaksanaan pendidikan politik oleh partai.

Pendidikan politik harus diwujudkan dalam kegiatan nyata seperti sosialisasi pemilu dan pembekalan bakal calon, bukan sekadar rapat koordinasi.

Dukungan anggaran hibah partai politik yang berpengaruh terhadap efektivitas Pendidikan politik. Selain itu, indikator kesetaraan dan kualitas pelayanan publik dinilai perlu diperkuat melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

Sasaran 8

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus (OTSUS) Papua

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus (Otsus) Papua diarahkan untuk mempercepat Pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui tata Kelola yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Rencana Induks Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, fokus utama saat ini meliputi tiga pilar yakni : Papua Sehat, papua Cerdas dan Papua Produktif.

Berikut adalah indikator Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan dan realisasi kinerja utama berdasarkan dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2025 :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 8 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan	Persen	100	98,50	98,50
Capaian Indikator Kinerja					98,50

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas Indikator kinerja **tingkat capaian realisasi program-program OTSUS yang direncanakan** adalah sebesar **100%** dengan **realisasi** sebesar **98,50%** dan capaian kinerja sebesar **98,50%** dengan predikat **Sangat Berhasil** merupakan manifestasi dari terciptanya harmonisasi anatara perencanaan ditingkat hulu dan penganggaran di tingkat hilir. Hal ini menunjukkan bahwa setiap program-program yang bersumber dari dana otsus yang dianggarkan telah memiliki landasan perencanaan yang kuat, terukur dan berorientasi pada hasil sehingga mampu meminimalisir deviasi antara target kebijakan dengan realisasi lapangan

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 8 Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat capaian realisasi program-program otsus yang direncanakan	Per sen	100	96.64	96.64	100	98.50	98.50

Dilihat dari Perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan pada tabel diatas, secara keseluruhan terdapat tren positif dalam eektivitas pelaksanaan program Otsus. Realisasi tahun 2024 sebesar 96,64% menunjukkan penyerapan dan pencapaian target program yang sudah sangat tinggi, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 98,50% mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 1,46% dari tahun sebelumnya. Ini menandakan adanya perbaikan pada sistem tata Kelola dan percepatan penyaluran dana yang lebih tepat waktu.

Peningkatan realisasi kinerja dari angka 96,64 % ke 98,50% dipicu oleh beberapa faktor dalam kebijakan Otsus, antara lain:

1. Perbaikan administrasi dengan menggunakan sistem informasi sudah terintegrasi dari SIKD Otsus SIPD yang mendorong transparansi dan akuntabilitas
2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam Menyusun Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang lebih realitis dan terukur
3. Evaluasi berkala yang dilakukan oleh tim pusat (Kemendagri dan Kemenkeu) yang meminimalisit kendala teknis di lapangan

Peningkatan sebesar 1,46% poin ini mencerminkan adanya keberlanjutan perbaikan yang lebih baik, dengan berpedoman pada regulasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dalam rangka Otonomi Khusus

Sasaran 9

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tata Kelola Pemerintahan di era globalisasi saat ini lebih di fokuskan pada sektor layanan publik karena sejatinya Pemerintah hadir sebagai Pemberi Layanan kepada Masyarakat/Publik selaku Penerima Layanan. Dalam Tata Kelola Pemerintahan ada indikator-indikator yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemerintahan mulai dari Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelayanan Publik (YanLik), Sistem Pemerintahan berBasis Elektronik (SPBE), Kelembagaan Perangkat Daerah, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (AnJab ABK) dan lain sebagainya yang mana Manajemen Kinerja dikelola untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa yang berdampak pada Pelayanan Publik yang Prima.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**” sebesar **83,475** persen dengan capaian **Berhasil** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (Dua) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Penilaian Komponen SAKIP

Komponen yang dinilai		2023		2024		2025	
		Bobot	Nilail	Bobot	Nilail	Bobot	Nilail
a	Perencanaan Kinerja	30	21,26	30	21,30	30	21,38
b	Pengukuran Kinerja	30	16,96	30	17,50	30	17,50
c	Pelaporan Kinerja	15	10,25	15	10,29	15	10,31
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,76	25	17,76	25	17,76
Jumlah		100	66,26	100	66,85	100	66,95
			B		B		B
Kenaikan Nilai AKIP					0.59		0.1

Target AKIP Provinsi Papua di Tahun 2025 adalah BB hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 juga sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Papua Tahun 2024-2026 serta juga sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025.

Berikut penjelasan penilaian AKIP Tahun 2025 yang mengalami perubahan bobot penilaian sebagaimana terlampir dalam Surat MENPANRB RI RI kepada Sekda Provinsi Papua, dengan Nomor : B/8/AA.05/2026 tertanggal 7 Januari 2026 sebagaimana terlampir.

Berikut Penjelasan Detail Laporan Hasil Evaluasi-Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP) Provinsi Papua yang dikeluarkan pada Portal RB Nasional adalah sebagai berikut :


etail Ringkasan

Laporan Hasil Evaluasi –Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-AKIP)
Provinsi Papua Tahun 2025

Nilai Evaluasi	Tahun Lalu 2024	Tahun ini 2025
Nilai Komponen		
Perencanaan Kinerja	21.30	21.38
Catatan :		
RPJMD dan Renstra periode 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan, sehingga belum bisa dinilai kualitasnya Rekomendasi :		
1. Pemerintah provinsi Papua agar melakukan pembaruan dokumen periode terbaru (RPJMD dan Renstra 2025-209) apabila seluruh tahapannya telah selesai pada website resmi maupun portal E-SAKIP Reviu sebagai bentuk komitmen instansi dalam pelaksanaan Implementasi SAKIP yang lebih baik;		
2. Pemerintah Provinsi Papua agar memastikan seluruh penetapan tujuan sasaran strategis berikut dengan indikator kinerja agar berorientasi hasil sesuai dengan levelnya dan memenuhi kriteria SMART.		
Pengukuran Kinerja	71.50	17.50
Catatan :		
1. Kualitas IKU 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan, sehingga belum bisa dinilai kualitasnya;		
2. Budaya pengukuran kinerja berkala belum dilakukan secara optimal, dan belum memfaatkan hasil pengukuran tersebut sebagai salah satu dasar dalam pemberian reward and punishment.		

Rekomendasi :		
1. Memastikan keselarasan antara dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dokumen RPJMD maupun Renstra 2025-2029;		
2. Meningkatkan kembali pengukuran kinerja berkala terhadap seluruh PD, dan selanjutnya memanfaatkan hasil pengukuran kinerja berkala tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemberian reward and punishment.		
Pelaporan Kinerja	10.29	10.31
Catatan :		
1. Kualitas laporan kinerja PD masih terdapat perhitungan data capaian kinerja yang belum andal, sebagai contoh pada laporan kinerja dinas kesehatan pada indikator kinerja angka kematian ibu, dengan target 135 realisasinya 253, seharusnya capaiannya dibawah 100% karena indikator tersebut merupakan indikator negatif, sehingga semakin rendah semakin baik tetapi di laporan kinerja dinas kesehatan capaiannya tertulis 187,56%;		
2. Pemanfaatan laporan kinerja pada sebagian perangkat daerah (PD) sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja ke depan belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari penetapan target kinerja tahun berjalan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.		

Rekomendasi :		
1. Menyempurnakan kembali kualitas laporan kinerja PD dengan menyampaikan data realisasi dan capaian yang perhitungannya andal;		
2. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya telah mempertimbangkan data capaian kinerja sebelumnya.		
Evaluasi Internal	17.76	17.76
Catatan : Laporan hasil evaluasi internal PD belum memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik terhadap implementasi AKIP PD		
Rekomendasi :		
1. Meningkatkan kembali kualitas hasil evaluasi internal PD dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik untuk di tindaklanjuti oleh PD		
2. Meningkatkan kembali kualitas hasil evaluasi internal PD dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang spesifik untuk di tindaklanjuti oleh PD.		
Nilai Total Evaluasi AKIP Final	66.85	66.95



Berikutnya adalah **Indikator Kinerja “Capaian implementasi e-government terintegrasi”** dengan **Target 95 persen** dan **Realisasi 95 persen** dengan **Capaian Kinerja sebesar 100 Persen**.

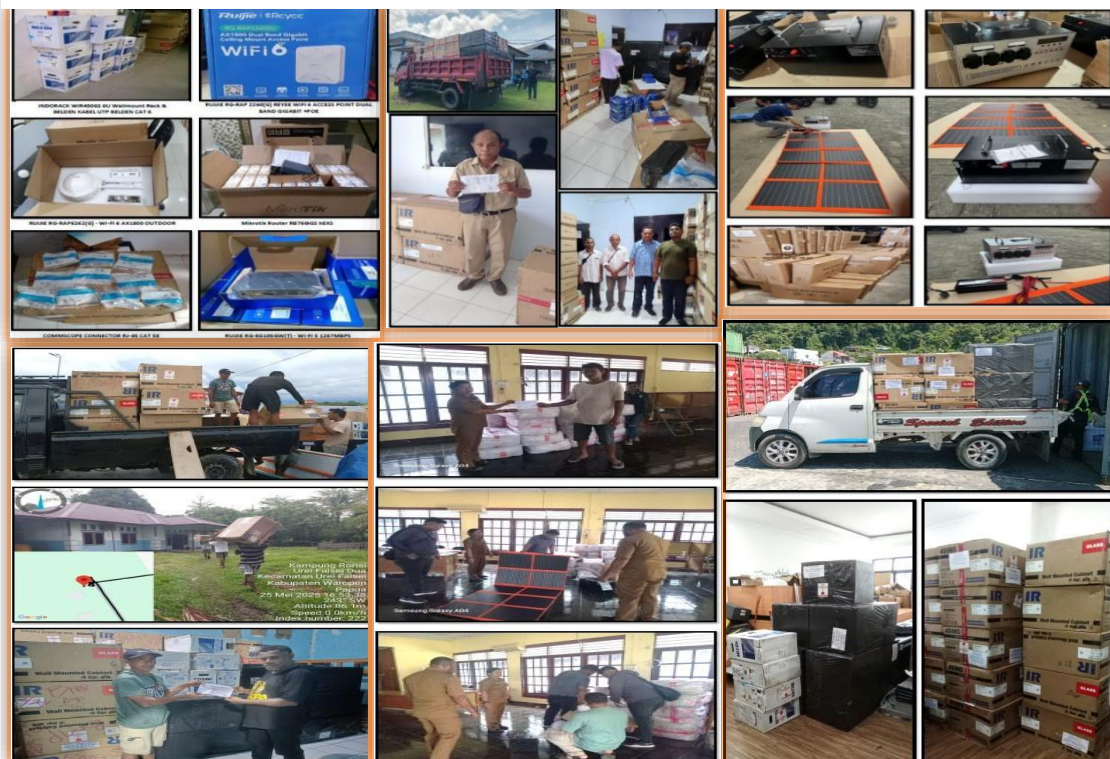
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dalam tahun anggaran 2025 melakukan Pemeliharaan aplikasi, monitoring Website, dukungan infrastruktur e-Government dan Optimalisasi PPID untuk meningkatkan pelayanan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.a Pemanfaatan Informasi untuk Mendukung e-Government, Pengembangan Masyarakat, Pengamanan Informasi, dan Layanan Media.

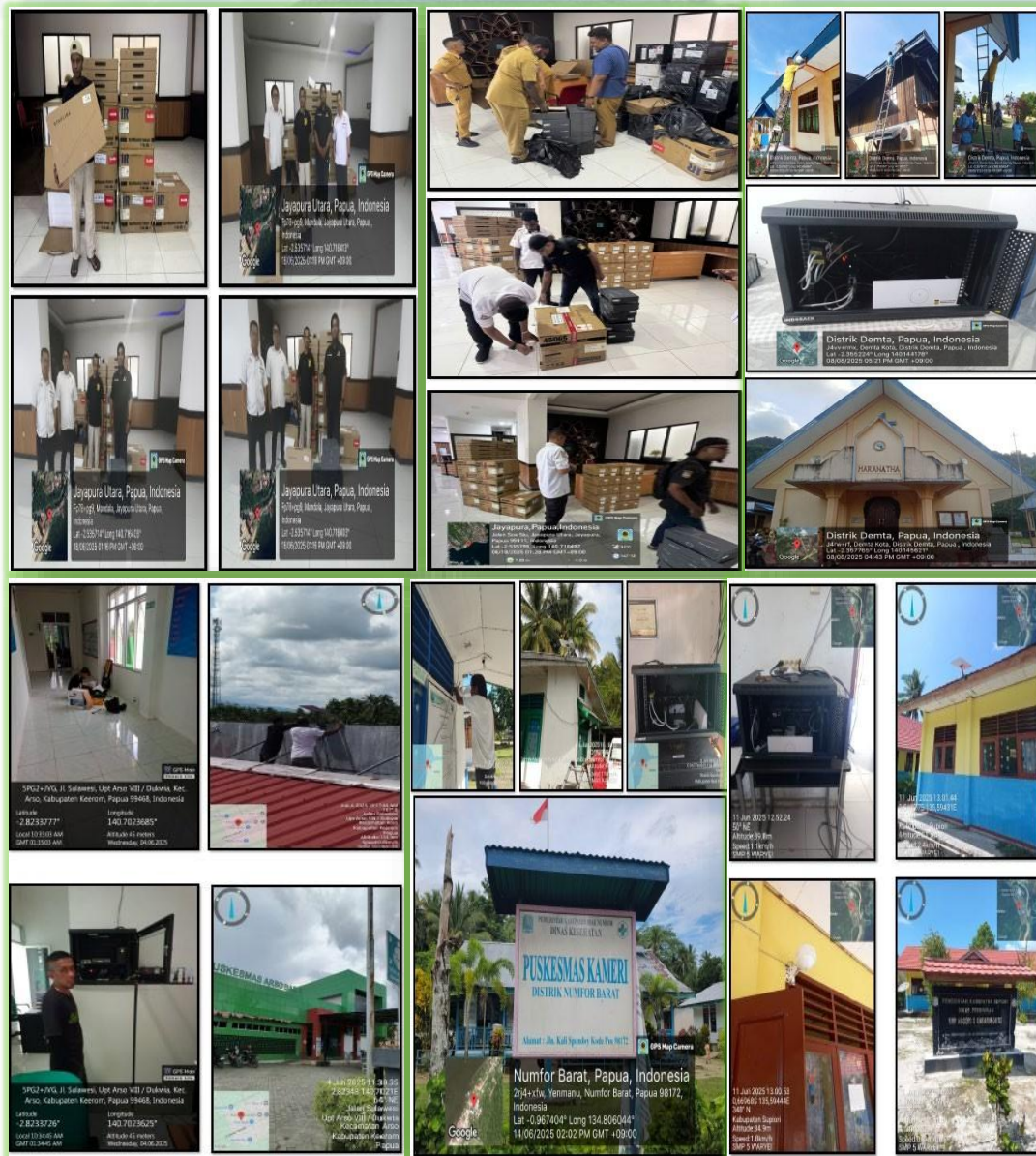
Sasaran strategis yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Kegiatan Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Pelaksanaan sasaran strategis tersebut didukung oleh 10 (sepuluh) indikator kinerja yang pada Tahun 2025 seluruhnya telah tercapai sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain melalui pengadaan multimedia, revitalisasi ruang server, penambahan perangkat streaming, serta peningkatan jumlah lokasi layanan akses internet publik yang mencakup kampung, rumah ibadah, dan sarana publik lainnya. Berikut disajikan dokumentasi pendukung sebagai bukti pencapaian sasaran strategis dimaksud.



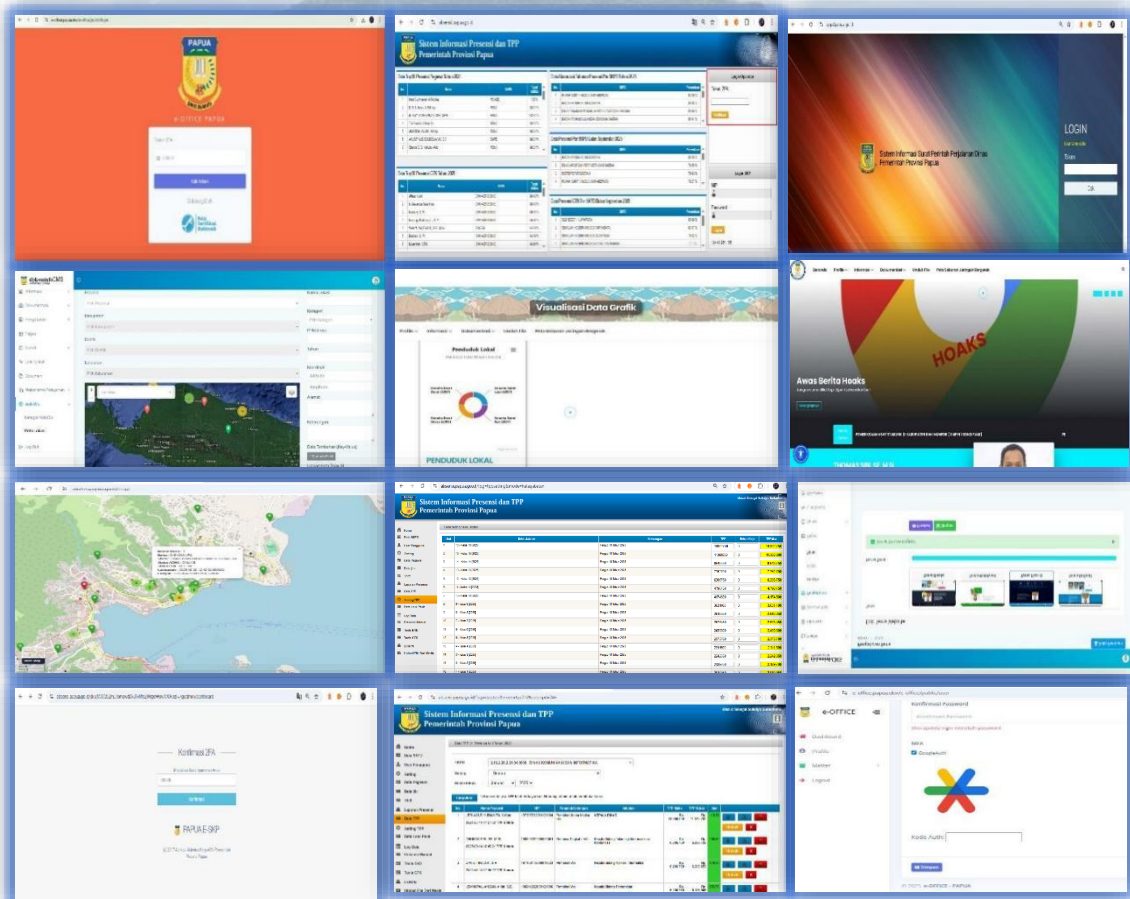
Gambar 1.a.1 Documentasi Pekerjaan Videotron Outdoor pada Dinas Kesehatan dan MRP Provinsi Papua



Gambar 1.a.2 Dokumentasi Pekerjaan Peralatan Pendukung VSAT dan Solar Panel pada 6 Kabupaten



Gambar 1.a.3 Dokumentasi Pekerjaan Pengadaan VSAT Satelit LEO



Gambar 1.a.4 Dokumentasi Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi

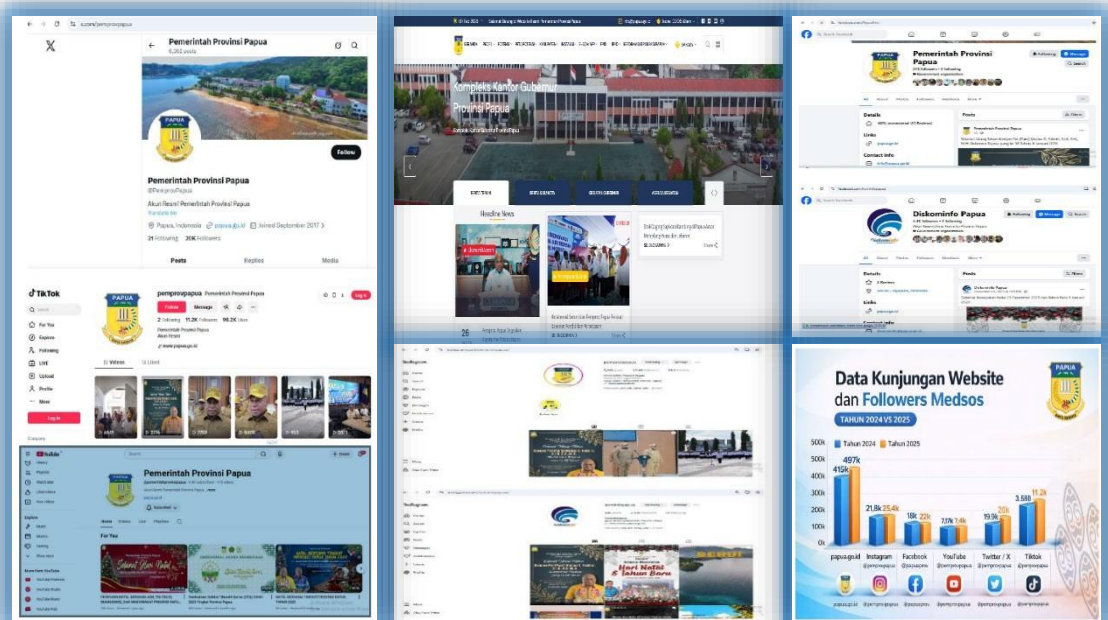


Gambar 1.a.5 Dokumentasi Pemeliharaan Layanan dan Sosialisasi Aplikasi

1.b Peningkatan Kerjasama Media Lokal dan Media Online Nasional serta Penyediaan Data dan Informasi bagi Pemerintah dan Masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran strategis Peningkatan Kerjasama Media Lokal dan Media Online Nasional serta Penyediaan Data dan Informasi bagi Pemerintah dan Masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan melalui Progran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Media Publik dan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan

17 Indikator Kinerja tercapai 100% dan ada beberapa peningkatan dari Tahun 2025 pada indikator jumlah Media yang bekerja sama, serta masifnya sosialisasi /literasi yang merambah pada semua sagmen masyarakat / pelajar dan juga adanya layanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam bentuk Podcas TOBBI dan Penyampaian Informasi melalui berita visual pendek KK'IFO yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berikut beberapa dokumentasi



(www.papua.go.id dan <https://diskominfo.papua.go.id/>) pendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud seperti yang tertera dalam Gambar dibawah ini :



Gambar 1.b.1 Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Media Lokal dan Media Online Nasional, Sosialisasi, Baliho, serta Pemanfaatan E-Wali Data Statistik Sektorial dalam Penyediaan Data dan Informasi bagi Pemerintah dan Masyarakat terkait

Keterbukaan Informasi Publik.




Gambar 1.b.2 Dokumentasi Kerja Sama Media Cetak dan Online berjejaring nasional / Lokal serta Sosialisasi E-Monev Keterbukaan Informasi dan Sosialisasi para Awak Media di Kota Jayapura.

1.c Peningkatan Pengamanan Informasi di Ruang Kerja Pemerintah Provinsi Papua serta SDM Persandian yang terampil.

Sasaran strategis Peningkatan Pengamanan Informasi di Ruang Kerja Pemerintah Provinsi Papua serta SDM Persandian yang terampil yang dilaksanakan melalui Progran Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi dan Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dengan 4 Indikator Kinerja tercapai 100 % dan ada beberapa peningkatan dari Tahun 2025 pada indikator banyaknya sosialisasi Kontra Pengindraan, Koordinasi dengan Lembaga pembina dan Kab/Kota khususnya pada penyiapan tanda tangan secara elektronik serta hasil assesment kematangan Pengelolaan Keamanan Informasi. Berikut beberapa dokumentesai pendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud:



Gambar 1.c.1 Dokumentasi Sosialisasi Peningkatan Keamanan Aplikasi.



1.d Pemanfaatan Informasi untuk Mendukung e-Government, Pengembangan Masyarakat, Pengamanan Informasi, dan Layanan Media.

Sasaran strategis yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika pada Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Kegiatan Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Pelaksanaan sasaran strategis tersebut didukung oleh 10 (sepuluh) indikator kinerja yang pada Tahun 2025 seluruhnya telah tercapai sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, antara lain melalui pengadaan multimedia, revitalisasi ruang server, penambahan perangkat streaming, serta peningkatan jumlah lokasi layanan akses internet publik yang mencakup kampung, rumah ibadah, dan sarana publik lainnya. Berikut disajikan dokumentasi pendukung sebagai bukti pencapaian sasaran strategis dimaksud.

1.e Peningkatan Kerjasama Media Lokal dan Media Online Nasional serta Penyediaan Data dan Informasi bagi Pemerintah dan Masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik

Sasaran strategis Peningkatan Kerjasama Media Lokal dan Media Online Nasional serta Penyediaan Data dan Informasi bagi Pemerintah dan Masyarakat terkait Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Kegiatan Pengelolaan Media Publik dan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan

17 Indikator Kinerja tercapai 100% dan ada beberapa peningkatan dari Tahun 2025 pada indikator jumlah Media yang bekerja sama, serta masifnya sosialisasi /literasi yang merambah pada semua sagmen masyarakat / pelajar dan juga adanya layanan Informasi dan Komunikasi Publik dalam bentuk Podcas TOBBI dan Penyampaian Informasi melalui berita visual pendek KK'IFO yang dikelola langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.f Peningkatan Pengamanan Informasi di Ruang Kerja Pemerintah Provinsi Papua serta SDM Persandian yang terampil.

Sasaran strategis Peningkatan Pengamanan Informasi di Ruang Kerja Pemerintah Provinsi Papua serta SDM Persandian yang terampil yang dilaksanakan melalui Progran Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi dan Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dengan 4 Indikator Kinerja tercapai 100 % dan ada beberapa peningkatan dari Tahun 2025 pada indikator banyaknya sosialisasi Kontra Pengindraan, Koordinasi dengan Lembaga pembina dan Kab/Kota khususnya pada penyiapan tanda tangan secara elektronik serta hasil assesment kematangan Pengelolaan Keamanan Informasi. Berikut beberapa dokumentesai pendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud:

Berikut perkembangan Indikator Sasaran Kinerja capaian implementasi e-Government terintegrasi dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :



Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 9 Indikator 2 untuk Tahun 2024-2025


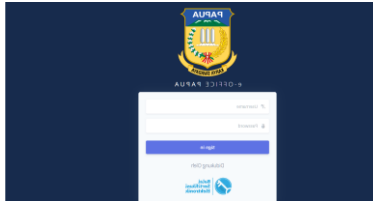
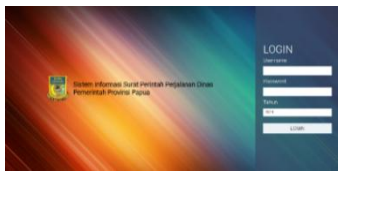

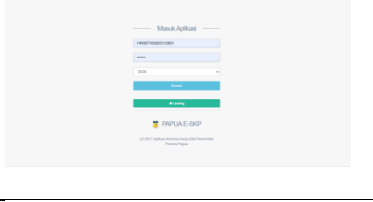
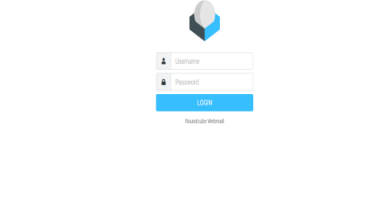
No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2024			2025		
			Tar get	Realisasi	Capaian	Tar get	Realisasi	Capaian
1.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi	Persen	95	90	94.73	95	95	100




Perkembangan capaian e-Government Pemerintah Provinsi Papua dari sisi capaian realisasi mengalami peningkatan juga capaian kinerja dari Tahun sebelumnya di Tahun 2024 hal ini dikarena Dinas Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2025 mengalami Perkembangan dalam implementasikan capaian e-Government Pemerintah Provinsi Papua dari sisi capaian realisasi mengalami kenaikan capaiannya dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, hal ini dikarenakan Dinas


Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mengalokasikan dana dalam tahun anggaran 2025, meningkatkan pelayanan internet dengan target semua OPD dan Layanan Umum lain sudah terkoneksi internet semuanya 100% dan bisa berjalan dan semua bisa terkoneksi cepat dan bisa memberi informasi yang jelas akurat kepada masyarakat, dengan meningkatkan pelayanan berbasis elektronik pelayanan dalam melayani masyarakat bisa dengan cepat, tepat sasaran, dan dengan begitu tahun 2025 Kominfo mempunyai target di tahun 2025 ini program semua OPD di Pemerintah Provinsi Papua telah terkoneksi internet sehingga dalam melakukan pekerjaan berbasis elektronik Aplikasi Umum dan Khusus Pemerintahan masing-masing bisa menjalankan aplikasi yang bisa digunakan oleh semua OPD yang saling terkoneksi sehingga dalam membuat laporan keuangan sampai data ASN, administrasi, semua sudah terintegrasi, dan juga didukung sistem keamanan dari Aplikasi Pemerintahan sehingga dijamin keamanan datanya, mendukung infrastruktur e-Government dan Optimalisasi PPID untuk meningkatkan pelayanan Publik dapat dijelaskan sebagai berikut:







I. Jumlah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua terhubung dengan Akses Intranet dalam Layanan Aplikasi Umum dan Khusus








NO.	IKK OUTCOME	URAIAN	SASARAN	PENCA PAIAN	KETERANGAN
1	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!)	40	40	<p>https://www.lapor.go.id</p> 
		Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	40	40	<p>https://lpse.lkpp.go.id/eproc4</p> 

		Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	40	40	https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ 
		Sistem Informasi Manajemen persuratan dan pengarsipan digital	40	40	
		Sistem Informasi Surat Perintah Perjalanan Dinas	40	40	
		Sistem Informasi Presensi dan TPP	40	40	
		Aplikasi Aktivitas Kerja ASN Pemerintah Provinsi Papua (PAPUA E-SKP)	40	40	
		Email Pemerintah Provinsi Papua	40	40	







2	<p>Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan Administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses Bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik.</p>	<p>Internet kampung yang di pasang di balai kampung, Puskesmas, Sekolah, serta tempat ibadah:</p> <p>a. Melalui V-sat Starlink Sebanyak 300 lokasi terbagi ke 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Terdiri dari 38 Puskesmas, 140 Sekolah, 38 Tempat Ibadah, dan 84 Kampung</p>	300	300	<p>Puskesmas Apombukor(Biak)</p>  <p>Kampung Aiwaranggani (Yapen)</p> 
		<p>Internet di beberapa tempat ibadah, meliputi Gereja Masjid, Panti Asuhan :</p> <p>a. Melalui Radio P to P 2 Tempat</p> <p>b. Melalui V-sat Starlink 1 Tempat</p> <p>c. Melalui Indibize 32 Tempat</p>	34	34	<p>GKI VIADOLOROSA Bukit Barisan</p> 
		<p>Internet di beberapa SKPD / OPD meliputi :</p> <p>- Melalui Indibize 71 Tempat</p>	71	71	<p>Pemasangan Internet di BPSDA</p>




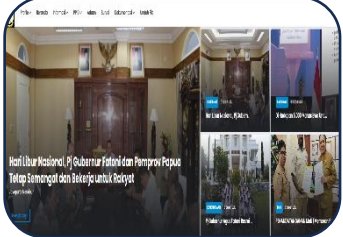
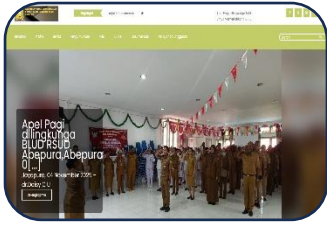


					
		Website SKPD	40	40	
		https://e-office.papua.go.id	40	40	
		https://sppd.papua.go.id	40	40	
		https://absensi.papua.go.id	40	40	
3	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan Administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	https://e-office.papua.go.id	40	40	

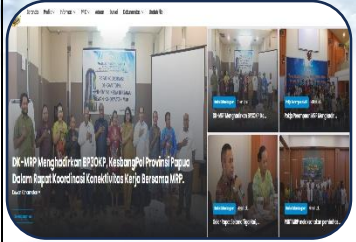






4	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	https://papua.go.id	1	1	
5	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan Kepala daerah terkait implementasi e-government	Pergub TPP	40	40	
6	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	https://bpbj.papua.go.id	1	1	
		https://hukum.papua.go.id	1	1	
		https://orpa.papua.go.id/	1	1	
		https://umum-adpim.papua.go.id/	1	1	


		https://dpmptsp.papua.go.id	1	1	
		https://dinkes.papua.go.id	1	1	
		https://dinsosdukcapil.papua.go.id	1	1	
		https://disdik.papua.go.id	1	1	
		https://dishutlh.papua.go.id	1	1	
		https://diskominfo.papua.go.id	1	1	
		https://disorda.papua.go.id	1	1	

		https://disperdagin.papua.go.id/	1	1	
		https://dislautkan.papua.go.id/	1	1	
		https://dpmka.papua.go.id/	1	1	
		https://disbudpar.papua.go.id/	1	1	
		https://dinasperhubungan.papua.go.id	1	1	
		https://pertanian.papua.go.id	1	1	
		https://pu.papua.go.id	1	1	

		https://bpkad.papua.go.id	1	1	
		https://bapperida.papua.go.id	1	1	
		https://bapenda.papua.go.id	1	1	
		https://bkd.papua.go.id	1	1	
		https://bpsdm.papua.go.id	1	1	
		https://kesbangpol.papua.go.id	1	1	
		https://penghubung.papua.go.id	1	1	

		https://perbatasan.papua.go.id	1	1	
		https://bpbpd.papua.go.id	1	1	
		https://rsud-jayapura.papua.go.id	1	1	
		https://rskabepura.papua.go.id/	1	1	
		https://blud-rsud-abepura.papua.go.id/	1	1	
		https://inspektoratdaerah.papua.go.id	1	1	
		https://setwan.papua.go.id/	1	1	

		https://mrp.papua.go.id	1	1	
		https://ekbang.papua.go.id	1	1	
		https://tapem-kesra.papua.go.id	1	1	
		https://disbunak.papua.go.id	1	1	
		https://nakerkopukm.papua.go.id	1	1	
		https://satpolpp.papua.go.id	1	1	
		https://dpppakb.papua.go.id	1	1	

		https://perpustakaan daerahprovinsipapua.id	1	1	
--	--	---	---	---	---

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Berdasarkan indikator kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian pada Tahun Anggaran berjalan, terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target, namun masih terdapat indikator yang memerlukan penguatan, antara lain:

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Kualitas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik;
3. Tingkat Kematangan Keamanan Informasi Daerah;
4. Ketersediaan dan Validitas Data Sektoral Daerah;
5. Cakupan Layanan Infrastruktur dan Akses Jaringan TIK Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan penajaman perencanaan program dan kegiatan berbasis indikator kinerja yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai SPBE dan indeks terkait lainnya;
- b. Meningkatkan integrasi aplikasi dan sistem informasi antar perangkat daerah untuk mendukung interoperabilitas data dan efisiensi layanan;
- c. Meningkatkan kualitas pengelolaan Komunikasi Publik dan Peran PPID pada setiap Badan Publik di Lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten / Kota
- d. Memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui penyusunan kebijakan internal, manajemen risiko siber, serta peningkatan kapasitas SDM persandian;
- e. Mendorong optimalisasi implementasi Satu Data Daerah guna menjamin konsistensi, akurasi, dan pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan.



B. Permasalahan dan Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian beberapa indikator meliputi:

Keterbatasan dukungan anggaran untuk program transformasi digital;

Belum meratanya kompetensi SDM teknis di bidang TIK, statistik sektoral, dan keamanan informasi;

Infrastruktur jaringan dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi;

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan:

1. Penguatan komitmen penganggaran berbasis prioritas pembangunan digital daerah;
2. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis yang terstruktur;
3. Percepatan pembangunan dan integrasi infrastruktur TIK;

C. Rekomendasi Strategis Tahun Berikutnya

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Papua Tahun 2025–2029, khususnya pada Misi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, direkomendasikan:

1. Penetapan kebijakan afirmatif daerah untuk percepatan transformasi digital;
2. Penyediaan dukungan pendanaan yang memadai untuk peningkatan indeks SPBE, Pengelolaan Komunikasi Publik keamanan informasi, tata kelola data yang merupakan satu ekosistem besar dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang modern, berwibawa, transparan dan akuntabel
3. Penguatan ekosistem tata kelola digital daerah yang mencakup infrastruktur, platform layanan, kapasitas SDM, serta regulasi pendukung;
4. Peningkatan sinergi lintas perangkat daerah dan lintas pemerintahan guna memastikan keterpaduan implementasi program.

Sasaran 10

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program, serta Kegiatan Pembangunan Daerah

Salah satu tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua 2024-2026 adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Sasaran Pembangunan Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Program serta Kegiatan Pembangunan Daerah”** sebesar **103.71** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”**. Pencapaian sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja asaran yaitu :

- 1). Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD/RPD;
- 2). Tingkat Konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD;
- 3). Tingkat Konsistensi RAP terhadap RKPD.

Berikut Target Indikator Kinerja, Realisasi dan Capaian Kinerja yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

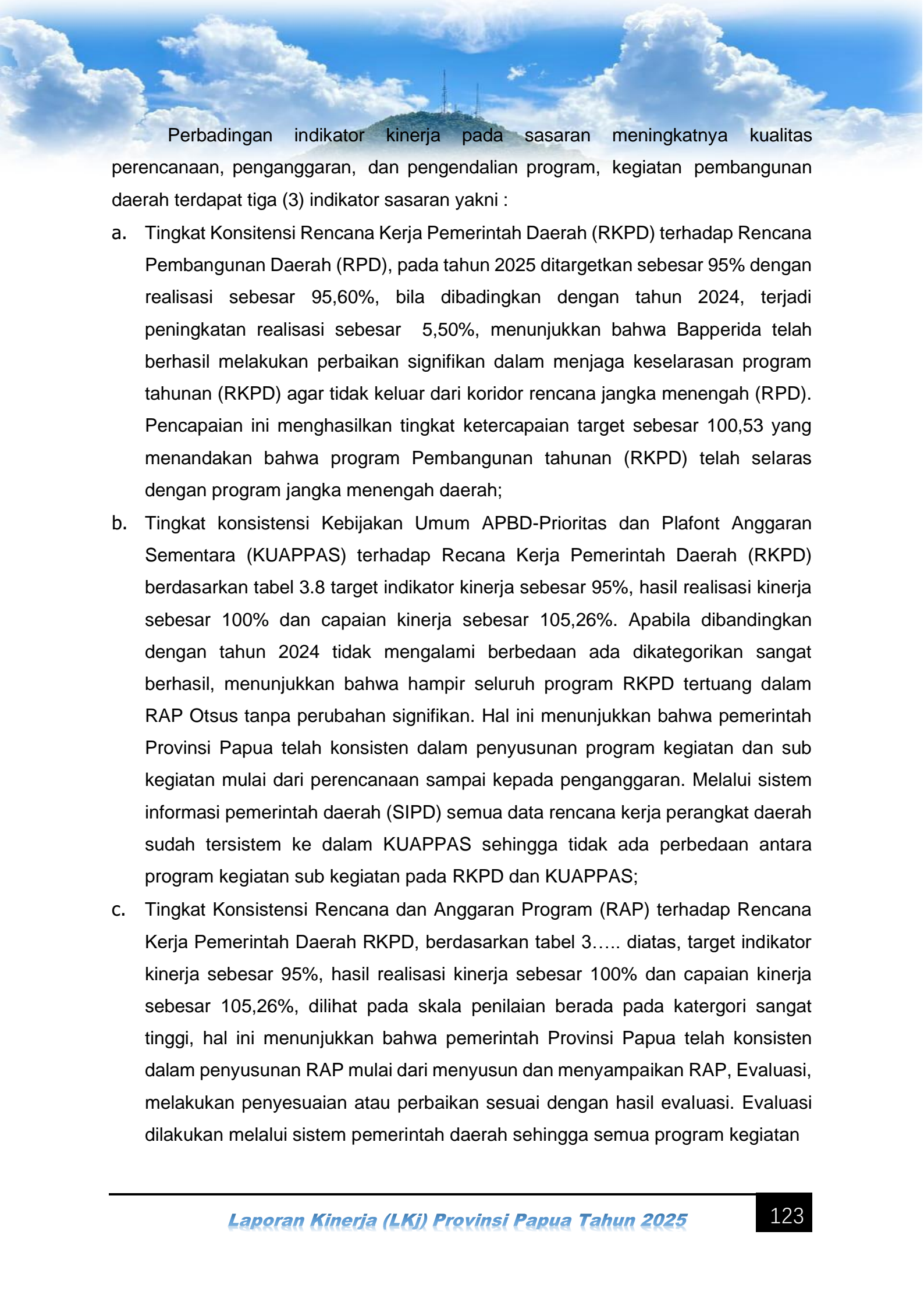
Tabel Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 10 Tahun 2025

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD/ RPD	Persen	95	95,60	100,63
2.	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD	Persen	95	100	105,26
3.	Tingkat Konsistensi RAP terhadap RKPD	Persen	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					103.71

Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran pada Tabel diatas, maka realisasi indikator kinerja Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPJMD/RPD, sebesar 95,60%, dari target yang direncanakan sebesar 95% dan capaian kinerja sebesar 100,63%. Jika dilihat dari capaian indikator maka dapat dikategorikan sangat tinggi, menunjukkan bahwa hampir seluruh program dan kegiatan tahunan yang direncanakan dalam RKPD telah selaras dengan tujuan dan sasaran serta program jangka menengah (RPJMD/RPD). Sedangkan untuk indikator konsistensi KUAPPAS terhadap RKPD dari target 95% terealisasi sebesar 95%, dan capaian kinerja sebesar 105,26. Seluruh program, kegiatan, dan indikator yang ada dalam RKPD telah terakomodasi sepenuhnya dalam dokumen penganggaran, sedangkan indikator Tingkat konsistensi RAP terhadap RKPD dengan target sebesar 95% terealisasi sebesar 95% dengan pencapaian kinerja sebesar 105,26%, menunjukkan bahwa indikator kinerja berada pada kategori sangat tinggi hampir seluruh program RKPD tertuang dalam RAP Otsus tanpa perubahan signifikan.


Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 10 Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat Konsistensi RKPD terhadap RPD	Per sen	95	90	94,74	95	95,60	100,53
Tingkat Konsistensi KUAPPAS Terhadap RKPD	Per sen	95	100	105,26	95	100	105,26
Tingkat konsistensi RAP terhadap RKPD	Per sen	95	100	105,26	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				101.75			103.71



Perbandingan indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, kegiatan pembangunan daerah terdapat tiga (3) indikator sasaran yakni :

- a. Tingkat Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD), pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 95% dengan realisasi sebesar 95,60%, bila dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan realisasi sebesar 5,50%, menunjukkan bahwa Bapperida telah berhasil melakukan perbaikan signifikan dalam menjaga keselarasan program tahunan (RKPD) agar tidak keluar dari koridor rencana jangka menengah (RPD). Pencapaian ini menghasilkan tingkat ketercapaian target sebesar 100,53 yang menandakan bahwa program Pembangunan tahunan (RKPD) telah selaras dengan program jangka menengah daerah;
- b. Tingkat konsistensi Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (KUAPPAS) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan tabel 3.8 target indikator kinerja sebesar 95%, hasil realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2024 tidak mengalami perbedaan ada dikategorikan sangat berhasil, menunjukkan bahwa hampir seluruh program RKPD tertuang dalam RAP Otsus tanpa perubahan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah konsisten dalam penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan mulai dari perencanaan sampai kepada penganggaran. Melalui sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) semua data rencana kerja perangkat daerah sudah tersistem ke dalam KUAPPAS sehingga tidak ada perbedaan antara program kegiatan sub kegiatan pada RKPD dan KUAPPAS;
- c. Tingkat Konsistensi Rencana dan Anggaran Program (RAP) terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD, berdasarkan tabel 3..... diatas, target indikator kinerja sebesar 95%, hasil realisasi kinerja sebesar 100% dan capaian kinerja sebesar 105,26%, dilihat pada skala penilaian berada pada kategori sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua telah konsisten dalam penyusunan RAP mulai dari menyusun dan menyampaikan RAP, Evaluasi, melakukan penyesuaian atau perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan melalui sistem pemerintah daerah sehingga semua program kegiatan



sub kegiatan pada dokumen RAP secara otomatis sudah ada pada RKPD. Perbandingan kinerja tahun 2005 dengan tahun lalu tidak ada perbedaan karena dalam pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan didukung ketersediaan regulasi dan kebijakan dana otonomi khusus yang semakin jelas memberikan kepastian hukum dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program Pembangunan daerah.

Sasaran 11

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya sistem akuntabilitas dan Pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah**” sebesar **135,253 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1		2	3	4	5
1.	Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LKPD) Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	100,00
2.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15.24	23,89	156,76
3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.2	98,66	149.00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					135, 253

Indikator **Opini BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD)** menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pemerintah Provinsi Papua menargetkan kembali untuk mempertahankan Opini WTP atas LKPD Provinsi Papua Tahun 2025 oleh BPK RI.

Adapun Indikator Opini oleh BPK RI adalah :

1. Kesesuaian dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Pengungkapan yang memadai;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas pengendalian intern; jika tidak ada permasalahan yang signifikan dan material berpengaruh terhadap penyajian Laporan Keuangan (LK) terkait 4 Indikator diatas, opini nya WTP.

Berikut Realisasi Perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua tergambar dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. Perkembangan LKPD Provinsi Papua
oleh BPK RI Tahun 2024-2025**

Tahun	2024	2025
Opini BKP RI Atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua	WTP	*WTP

(*) Pemerintah Provinsi Papua Menargetkan Opini BPK RI di Tahun 2025 adalah WTP Yang Hasilnya baru diketahui sekitar Triwuan II Tahun 2026

Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Papua dengan predikat WTP ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah semakin membaik artinya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual.

Adapun Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

Buku II



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2024
DI JAYAPURA**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
DI JAYAPURA**

Nomor : 07.B/T/LHP/DJPKN-VI.JYP/PPD.01/06/2025

Tanggal : 4 JUNI 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 07.A/T/LHP/DJPKN-VLJYP/PPD.01/06/2025 tanggal 4 Juni 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura menunjukkan terdapat kesalahan penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Pegawai, sehingga mengakibatkan anggaran Belanja Barang dan Jasa lebih saji serta anggaran Belanja Pegawai kurang saji masing-masing sebesar Rp39,00 miliar; dan
2. Hasil pemeriksaan atas realisasi Belanja Modal pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas 19 paket pekerjaan dan delapan paket pekerjaan yang terlambat belum dikenakan denda keterlambatan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,17 miliar dan kekurangan penerimaan sebesar Rp445,40 juta. Atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke rekening Kas Daerah seluruhnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Papua antara lain agar:

1. Menginstruksikan Direktur RSUD Jayapura untuk:
 - a. Lebih optimal dalam mengendalikan proses penganggaran Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Pegawai BLUD RSUD Jayapura dengan cara membuat laporan rutin kegiatan pengendalian; dan
 - b. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan meningkatkan pemahaman proses penganggaran atas Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa melalui kegiatan diklat.
2. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku Pengguna Anggaran dan PPK untuk:
 - a. Melaksanakan pengendalian atas realisasi Belanja Modal di satuan kerjanya dengan membuat laporan pengendalian secara tertulis; dan
 - b. Melaksanakan penerimaan dan pembayaran atas hasil pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Belanja Modal dengan membuat laporan secara tertulis.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jayapura, 4 Juni 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Papua

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Bhuono Agung Nugroho, S.F., M.Si., Ak., CA., ACPA., CertDA.
Reguler Negara Akuntan RNA-21793

Indikator Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dengan **Target** pada tahun 2025 sebesar **15,24%** **Realisasi** sebesar **23,89%** dan **Capaian Kinerja** sebesar **154,80%** kategori “**Sangat Baik**” dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11 Indikator 2

Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1		2	3	4	5
2.	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15,24	23,89	156,76
Capaian Kinerja Sasaran					156,76

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang didapat dari sumber ekonomi di dalam wilayah daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan mendanai otonomi daerah dan terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Secara rinci, sumber utama PAD meliputi:

- **Pajak Daerah:** Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan kendaraan bermotor.
- **Retribusi Daerah:** Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah.
- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :** Penerimaan dari badan usaha milik daerah (BUMD) atau lembaga lain yang dimiliki pemerintah daerah.
- **Lain – Lain PAD yang Sah :** Pendapatan asli daerah lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel. Target PAD Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD	515.406.169.254,00	563.565.353.526,64	109,34 %

Tabel. Target dan Realisasi PAD Tahun 2025

Target dan Realisasi PAD Tahun 2025			
Uraian	Target Murni	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD):	515.406.169.254.00	563.565.353.526,64	109,34
- Pajak Daerah	309.296.000.000.00	311.786.524.663,00	100,81
- Retribusi Daerah	136.666.617.000.00	18.543.517.943,36	13,67
- Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	55.664.802.254.00	66.116.045.417,04	118,78
- Lain-lain PAD Yang Sah	14.778.750.000.00	167.119.265.503,24	1.130,81

Tabel. Perbandingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2024 dan Tahun 2025**Tabel. Perbandingan Target PAD 2024 dan 2025**

URAIAN	TARGET MURNI		%
	2024	2025	
PAD :			
Triwulan I	141.345.462.500,00	128.851.542.313.50	(9,70)
Triwulan II	141.345.462.500,00	128.851.542.313.50	(9,70)
Triwulan III	141.345.462.500,00	128.851.542.313.50	(9,70)
Triwulan IV	141.345.462.500,00	128.851.542.313.50	(9,70)
Total	674.740.210.036,95	515.406.169.254.00	(9,70)

Tabel. Perbandingan Realisasi PAD 2024 dan 2025

URAIAN	TARGET MURNI		%
	2024	2025	
PAD :			
Triwulan I	158.152.446.190,54	83.219.543.515.72	(90,04)
Triwulan II	193.370.332.594,10	191.784.332.639.97	(0,83)
Triwulan III	160.767.389.481,38	151.535.140.251,02	(6,09)
Triwulan IV	162.450.041.770,93	137.026.337.119,93	(18,55)
Total	674.740.210.036,95	563.565.353.526.64	(19,73)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target dan realisasi PAD tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan target tahun 2024, hal ini disebabkan karena mulai tanggal 5 Januari 2025 diberlakukannya Opsen PKB dan BBN-KB sesuai Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Bahwa Target PAD dari sektor Pajak Daerah, Penerimaan Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Pendapatan yang sangat signifikan di peroleh dari sektor Lain-Lain PAD yang sah, yaitu sebesar 1,130,81%. Namun pada sektor Retribusi hanya terealisasi sebesar 13,67% artinya kurang 118.123.099.056,64 atau 86,33%, sangat jauh dari target yang ditetapkan yakni sebesar 136.666.617.000,00.

Tidak tercapainya target Retribusi Daerah disebabkan karena :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024 bahwa claim BPJS untuk penerimaan BLUD yang berasal dari claim BPJS harus dicatat pada rekening pendapatan BLUD pada jenis penerimaan Lain-lain PAD yang Sah bukan pada rekening retribusi daerah pada jenis Retribusi Jasa Umum. Oleh karena itu untuk penerimaan BLUD yang


semula dicatat pada rekening retribusi daerah pada APBD perubahan digeser ke rekening Lain-lain PAD yang Sah.

- Ada beberapa OPD seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, dimana pungutan potensi retribusi daerah yang direncanakan dipungut mulai awal tahun anggaran 2025 namun pelaksanaan pungutannya baru dilakukan pada pertengahan tahun 2025, sehingga berdampak pada capaian target yang ditetapkan.
- Kurangnya minat masyarakat menggunakan aset milik pemerintah daerah selain karena kondisi ekonomi yang belum stabil, sebagian besar aset milik pemerintah daerah dalam kondisi kurang representatif perlu dilakukan perbaikan dan pemenuhan kelengkapan sarana guna menambah kenyamanan masyarakat dalam menggunakan aset tersebut.

Meskipun demikian, Walaupun Target PAD dari sektor retribusi belum tercapai, namun Realisasinya PAD secara keseluruhan sangat positif bahkan melampaui dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 48.159.184.272,64 atau 109,34%

Tabel. Realisasi PAD selama 5 (lima) Tahun terakhir

URAIAN	REALISASI				
	2021	2022	2023	2024	2025
PAD :	2.139.689.476.134, 17	2.226.754.654.927, 00	1.381.950.105.040, 09	674.740.210.036, 95	563.565.353.526, 64
1. Pajak Daerah	1.627.366.516.469, 00	1.235.493.977.265, 00	518.641.672.099,0 0	410.863.356.228, 00	311.786.524.663, 00
2. Retribusi Daerah	38.776.532.961,25	17.713.806.139,00	16.979.004.454,00	118.912.410.760, 34	18.543.517.943,3 6
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di pisahkan	40.489.377.934,00	766.991.557.636,0 0	530.199.632.536,0 0	55.982.500.244,0 0	66.116.045.417,0 4
4. Lain-Lain PAD yang Sah	433.057.048.769,9 2	206.555.313.887,3 8	316.129.795.951,0 9	88.981.942.804,6 1	167.119.265.503, 24



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi PAD Provinsi Papua selama 5 tahun terakhir mengalami FLUKTUATIF dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena :

⇒ Realisasi PAD Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Realisasi PAD Tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan karena ada penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp722.223.405.759,00 yang bersumber dari penerimaan Deviden PT. Freeport Indonesia untuk Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang disetor di tahun 2022.

⇒ Realisasi PAD Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp 844.804.549.887,29.

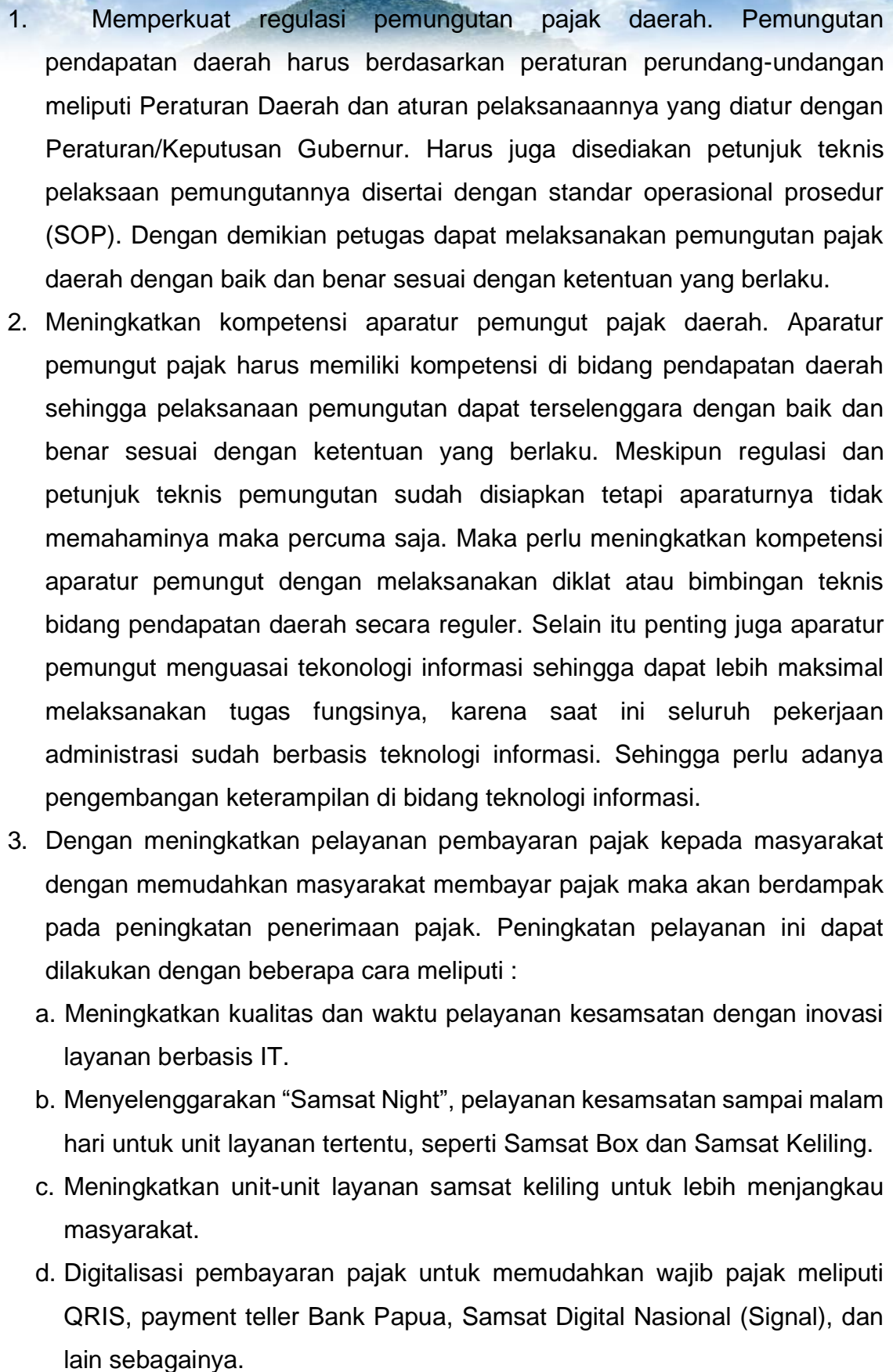
Adapun Penurunan pada pos pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp716.852.305.166,00, pos pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp 734.801.685,00 dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp239.201.496.368,00.

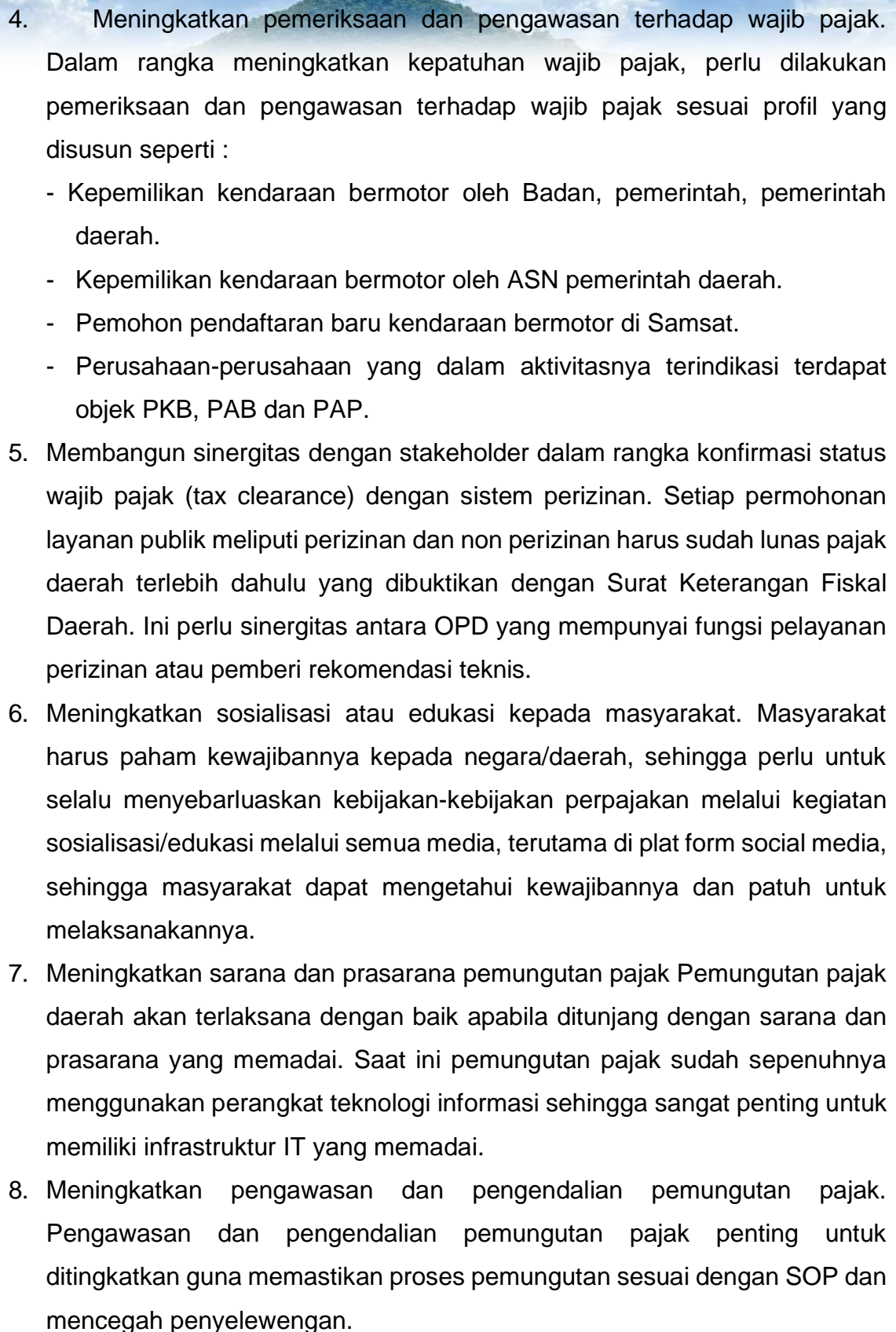
Penurunan ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14, 15 dan 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, Sehingga Potensi Pajak Daerah terbagi langsung ke Daerah Otonomi Baru (DOB).

⇒ Realisasi PAD Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ada penurunan pada objek penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dimana pada tahun 2023 terdapat penerimaan Deviden PT. Freeport Indonesia sebesar Rp. 485.024.909.391,00, namun dengan adanya Pemekaran Provinsi Papua, maka penerimaan deviden PT. Freeport Indonesia tidak lagi menjadi penerimaan Provinsi Papua tetapi beralih menjadi penerimaan Provinsi Papua Tengah.

⇒ Realisasi PAD tahun 2025 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan karena: Mulai tanggal 5 Januari 2025 berlakunya Opsen PKB dan BBN-KB sesuai Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendorong peningkatan Pajak Daerah pada tahun 2026 adalah :

- 
1. Memperkuat regulasi pemungutan pajak daerah. Pemungutan pendapatan daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur. Harus juga disediakan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutannya disertai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dengan demikian petugas dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Meningkatkan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah. Aparatur pemungut pajak harus memiliki kompetensi di bidang pendapatan daerah sehingga pelaksanaan pemungutan dapat terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun regulasi dan petunjuk teknis pemungutan sudah disiapkan tetapi aparturnya tidak memahaminya maka percuma saja. Maka perlu meningkatkan kompetensi aparatur pemungut dengan melaksanakan diklat atau bimbingan teknis bidang pendapatan daerah secara reguler. Selain itu penting juga aparatur pemungut menguasai teknologi informasi sehingga dapat lebih maksimal melaksanakan tugas fungsinya, karena saat ini seluruh pekerjaan administrasi sudah berbasis teknologi informasi. Sehingga perlu adanya pengembangan keterampilan di bidang teknologi informasi.
 3. Dengan meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat dengan memudahkan masyarakat membayar pajak maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan pelayanan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara meliputi :
 - a. Meningkatkan kualitas dan waktu pelayanan kesamsatan dengan inovasi layanan berbasis IT.
 - b. Menyelenggarakan “Samsat Night”, pelayanan kesamsatan sampai malam hari untuk unit layanan tertentu, seperti Samsat Box dan Samsat Keliling.
 - c. Meningkatkan unit-unit layanan samsat keliling untuk lebih menjangkau masyarakat.
 - d. Digitalisasi pembayaran pajak untuk memudahkan wajib pajak meliputi QRIS, payment teller Bank Papua, Samsat Digital Nasional (Signal), dan lain sebagainya.

- 
4. Meningkatkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu dilakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak sesuai profil yang disusun seperti :
 - Kepemilikan kendaraan bermotor oleh Badan, pemerintah, pemerintah daerah.
 - Kepemilikan kendaraan bermotor oleh ASN pemerintah daerah.
 - Pemohon pendaftaran baru kendaraan bermotor di Samsat.
 - Perusahaan-perusahaan yang dalam aktivitasnya terindikasi terdapat objek PKB, PAB dan PAP.
 5. Membangun sinergitas dengan stakeholder dalam rangka konfirmasi status wajib pajak (tax clearance) dengan sistem perizinan. Setiap permohonan layanan publik meliputi perizinan dan non perizinan harus sudah lunas pajak daerah terlebih dahulu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Fiskal Daerah. Ini perlu sinergitas antara OPD yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan atau pemberi rekomendasi teknis.
 6. Meningkatkan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat. Masyarakat harus paham kewajibannya kepada negara/daerah, sehingga perlu untuk selalu menyebarluaskan kebijakan-kebijakan perpajakan melalui kegiatan sosialisasi/edukasi melalui semua media, terutama di plat form social media, sehingga masyarakat dapat mengetahui kewajibannya dan patuh untuk melaksanakannya.
 7. Meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pajak Pemungutan pajak daerah akan terlaksana dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini pemungutan pajak sudah sepenuhnya menggunakan perangkat teknologi informasi sehingga sangat penting untuk memiliki infrastruktur IT yang memadai.
 8. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak. Pengawasan dan pengendalian pemungutan pajak penting untuk ditingkatkan guna memastikan proses pemungutan sesuai dengan SOP dan mencegah penyelewengan.

Indikator Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah (IPPD) dengan **Target** pada Tahun 2024 sebesar **66.2% Realisasi** sebesar **98.66%** dan **Capaian Kinerja** sebesar **149,00%** kategori **“Sangat Baik”** dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 11 Indikator 3 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1		2	3	4	5
3.	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Persen	66.2	98.66	149,00
Capaian Kinerja Sasaran					149,00

Berdasarkan Tabel diatas target kinerja sebesar 66,2% adapun realisasi sebesar 98,66% dan capaian kinerja sebesar 149 % dengan rumusan rata-rata realisasi indikator Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah IPPD terdiri dari pengukuran kinerja utama daerah, pengukuran yang menilai kualitas dokumen perencanaan, proses penyusunan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah, yang pengukuran ini berfokus pada keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, kepatuhan pada target nasional dan kualitas dokumen perencanaan (RPJMD/RPD/RKPD).

Tabel. Perbandingan Kinerja Capaian Sasaran 11 Indikator 3 Tahun 2024-2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	66,1	97,27	147,15	66,2	98,66	98,66

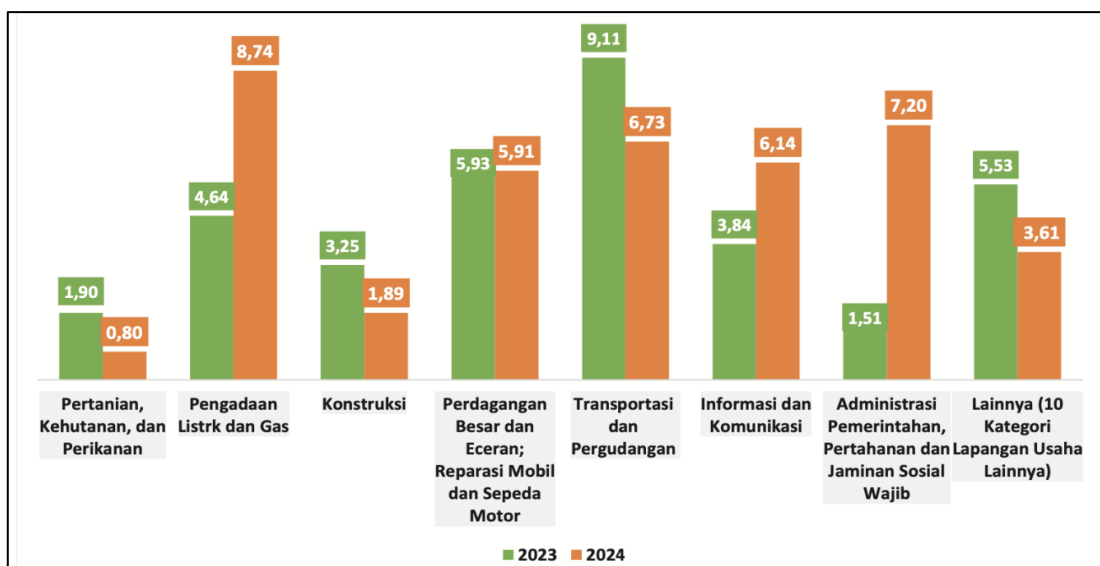
Berdasarkan tabel Perbandingan Kinerja Sasaran 11 Tahun 2024-2025 terlihat bahwa capaian kinerja antara tahun 2025 dengan tahun lalu 2024 mengalami kenaikan realisasi tahun 2025 sebesar 98,66 persen hal ini menunjukkan ada peningkatan kualitas tata Kelola perencanaan di daerah sebesar 1,43 persen.

Sasaran 12

Meningkatnya Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Alam untuk Penciptaan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas.

Ekonomi Papua di tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,11 persen (c-to-c) sedikit melambat jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,22 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh signifikan sebesar 8,74 persen, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya produksi listrik; diikuti Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,20 persen; Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,73 persen; Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,14 persen; serta Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,91 persen.

Gambar Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



Sumber : Berita Resmi Statistik, 6 Februari 2025

Struktur perekonomian Papua dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2025 menunjukkan komposisi yang sama dengan tahun 2023. Lapangan Usaha Konstruksi masih menjadi kontributor terbesar pada perekonomian Papua sebesar 20,09 persen diikuti Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,24 persen; serta Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 14,09 persen.

Dengan demikian berdampak pula pada pencapaian sasaran strategis pembangunan Provinsi Papua di tahun 2025 yaitu **meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** yang diukur melalui pencapaian 3 (tiga) sub sektor pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Perkebunan dan Kontribusi Sektor Peternakan.

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 12 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	%	6.0	1,29	21,05
2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	%	7.0	1,57	22,42
3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	%	7.0	0,88	12,57
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					18.68

Sumber : BPS, 2025, (diolah)

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sasaran **“meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Tahun 2025”** sebesar **18.68** persen dengan predikat **“Tidak Berhasil”**. Capaian kinerja 3 (tiga) indikator Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB hanya mencapai 21,05%, Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB hanya mencapai 22,42% dan Kontribusi Sektor Peternakan yang paling terendah hanya mencapai 12,57% sehingga secara keseluruhan predikat kinerja sangat rendah/tidak berhasil.

Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2025 untuk sasaran 12 : Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah 21,43 persen. Jika dibandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 yang sebesar 24,33 persen, maka capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan. Capaian

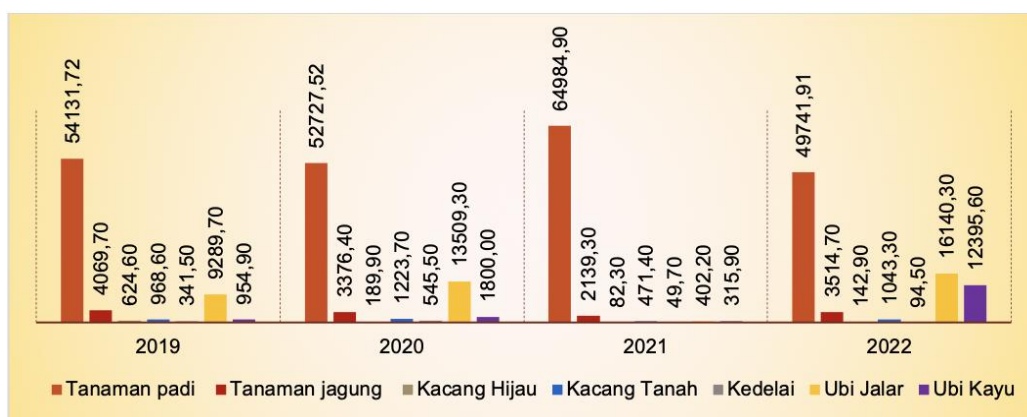
kinerja sasaran ini selama periode tahun 2021-2025 cenderung mengalami penurunan, di mana tahun 2021 capaian kinerja sasaran mencapai 43,40 persen, tahun 2022 turun menjadi 33,40 persen, selanjutnya tahun 2023 turun lagi menjadi 24,33 persen dan tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 18,68 persen. Diharapkan ini menjadi perhatian bagi SKPD khususnya urusan Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan serta peternakan dalam mendukung dan mendorong peningkatan produksi di sub sektor ini mengingat dari tahun ke tahun sumbangan sub sektor ini cenderung mengalami penurunan.

Jika melihat rata-rata kontribusi dari tahun 2021-2025 sebagai masa pelaksanaan RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026 untuk sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB sebesar 3,06 persen, selanjutnya kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 1,71 persen dan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sebesar 1,29 persen.

Namun kontribusi sub Sektor Perkebunan mengalami pertumbuhan kontribusi di Tahun 2025 dari tahun 2021-2025 yang mencapai 1,57 persen dan sub sektor peternakan yang mencapai 0,88 persen, diharapkan kedua sektor perkebunan dan peternakan semakin berkembang di Provinsi Papua seiring perubahan struktur perekonomian Provinsi Papua pasca pemekaran atau DOB.

Analisis luas panen sektor tanaman pangan di Provinsi Papua menunjukkan variasi yang signifikan antar komoditi selama periode 2019- 2022. Tanaman padi memiliki luas panen tertinggi dibandingkan komoditi lainnya, dengan rata-rata mencapai 55.396,51 hektar. Meskipun terjadi fluktuasi, luas panen padi pada tahun 2021 mencapai puncaknya menjadi 64.984,90 hektar, yang menunjukkan potensi yang baik dalam produksi padi di Provinsi Papua ini.

Gambar.....Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (dalam hektar)

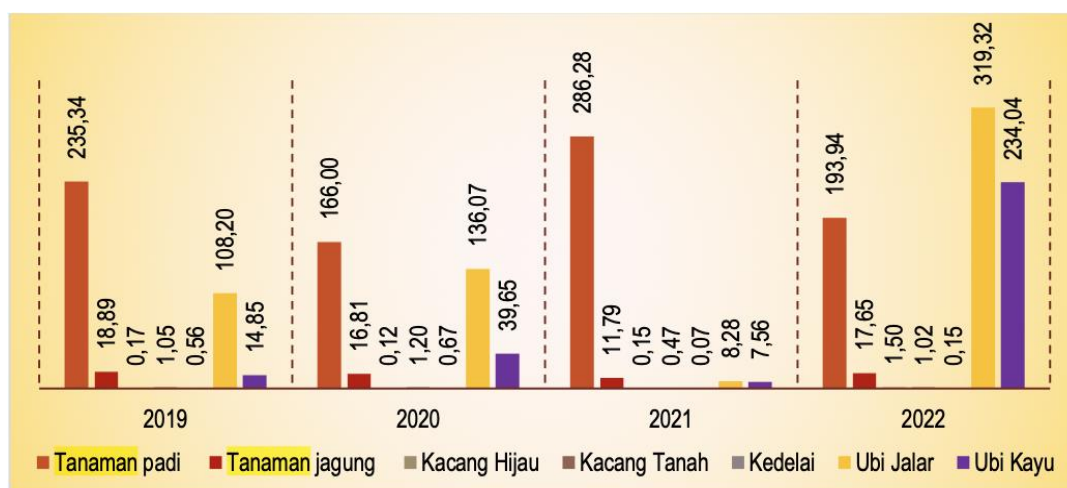


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)


Adapun tanaman jagung menunjukkan tren yang menurun, dengan rata-rata luas panen 3.275,03 hektar per tahun. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2019, tetapi menurun signifikan pada tahun 2021 menjadi hanya 2.139,30 hektar. Penurunan ini disebabkan oleh faktor cuaca dan masalah agronomi lainnya.

Berikutnya untuk kacang hijau memiliki luas panen yang sangat kecil, dengan rata-rata hanya 259,93 hektar per tahun. Jumlah ini menunjukkan ketidakstabilan yang ekstrem, dengan nilai terendah hanya 82,30 hektar pada tahun 2021. Hal ini menggambarkan kurangnya perhatian atau kondisi yang tidak mendukung untuk penanaman kacang hijau. Kacang tanah menunjukkan hasil yang lebih baik dengan rata-rata luas panen 926,75 hektar per tahun. Ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2020, tetapi kembali menurun di tahun 2021. Namun, tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik, mencerminkan pemulihan dalam produksi. Sementara itu untuk kacang kedelai memiliki rata-rata luas panen 257,80 hektar, dengan angka terendah pada tahun 2021. Ubi jalar memiliki rata-rata luas panen 9.835,38 hektar per tahun, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 mencapai 16.140,30 hektar. Hal ini menunjukkan peningkatan minat dan keberhasilan dalam menanam ubi jalar.

Gambar.....Produksi Komoditas Tanaman Pangan di Provinsi Papua Tahun 2019-2023 (dalam ribuan ton)



Produksi sektor tanaman pangan di Provinsi Papua menunjukkan variasi dan tingkat pertumbuhan yang berbeda-beda di antara komoditi dari tahun 2019 hingga 2022. Produksi padi fluktuatif dengan rata-rata 220,39 ribu ton dan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 6.81%. Puncak produksi terjadi pada tahun 2021 dengan angka mencapai 286,28 ribu ton. Sementara produksi jagung menunjukkan tren penurunan



yang konsisten, dengan rata-rata produksi 16,28 ribu ton dan tingkat pertumbuhan negatif -8,87% per tahun, mencapai titik terendah di tahun 2021 dengan jumlah produksi hanya mencapai 11,79 ribu ton. Selengkapnya, lihat Gambar 3.12 di bawah ini.

Untuk produksi kacang-kacangan, terlihat jelas kacang hijau mengalami peningkatan signifikan, dengan rata-rata produksi 0,48 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi 264.27% per tahun, yang mencapai puncaknya sebesar 1,50 ribu ton pada tahun 2022

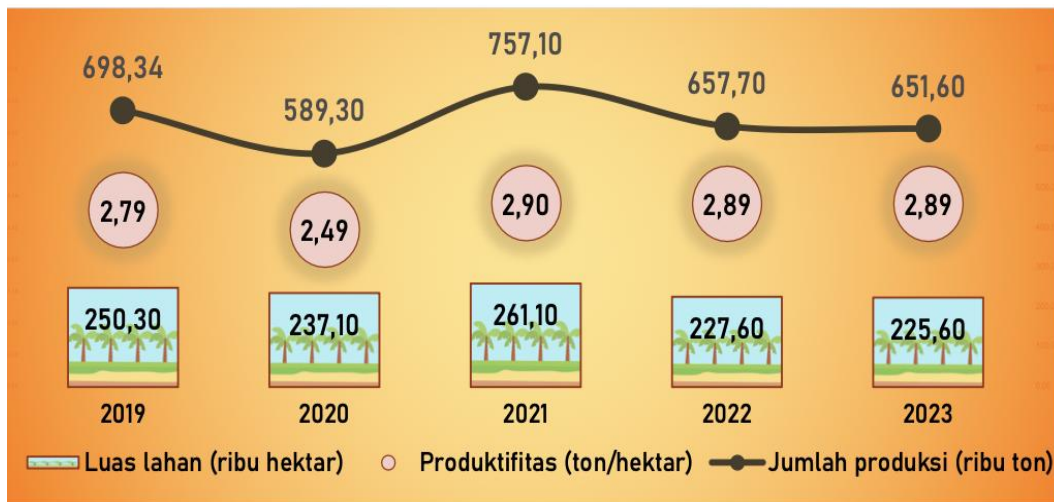
Sementara kacang tanah menunjukkan produksi yang lebih stabil, dengan rata-rata 0,93 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan positif 6,64% per tahun, dimana tertinggi pada tahun 2020 dengan produksi 1,20 ribu ton. Adapun kacang kedelai memiliki produksi yang bervariasi, dengan rata-rata 0,36 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan negatif -32,76% per tahun, terendah sebesar 0,070 ribu ton di tahun 2021.

Selanjutnya pada produk umbi-umbian, terlihat ubi jalar menunjukkan kinerja baik, dengan rata-rata 142,97 ribu ton per tahun dan tingkat pertumbuhan signifikan 48,72% per tahun, puncaknya pada 319,32 ribu ton di tahun 2022. Ubi kayu juga menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan rata-rata 74,02 ribu ton dan tingkat pertumbuhan positif 35,72% per tahun, tertinggi di tahun 2022 dengan 234,04 ribu ton.

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB** dapat dilihat dari produksifitas sektor Perkebunan. Papua memiliki berbagai komoditas unggulan sektor perkebunan yang sesuai dengan karakteristik lahan dan iklimnya. Beberapa komoditas yang memiliki potensi tinggi antara lain kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, sagu, dan sebagainya. Selama tahun 2019-2023 perkembangan kinerja sektor perkebunan di Provinsi Papua menunjukkan dinamika yang menarik dalam luas lahan, jumlah produksi, dan produktivitas. Pertama untuk luas lahan perkebunan, terlihat mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2022, yang menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan lahan seperti pergeseran penggunaan lahan atau kebijakan yang tidak mendukung ekspansi sektor perkebunan. Pada tahun 2019, luas lahan mencapai 250,30 ribu hektar, tetapi menurun drastis menjadi 227,60 ribu hektar pada tahun 2022. Penurunan ini bisa mengindikasikan adanya pengurangan area tanam atau konversi lahan untuk keperluan lain. Meskipun ada sedikit pemulihan pada

tahun 2023, luas lahan masih di bawah angka awal tahun 2019, dengan rata-rata luas lahan selama periode ini adalah 240,34 ribu hektar.

Gambar. Produktifitas Sektor Perkebunan di Provinsi Papua Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

Kinerja dari beberapa komoditi utama sektor perkebunan di Provinsi Papua pada tahun 2023 menunjukkan hasil yang menarik dalam hal luas lahan, produksi, dan produktivitas. Sebagaimana yang disajikan pada Tabel 3.17 berikut ini, luas lahan yang digunakan untuk kelapa sawit mencapai 143,60 hektar, menjadikannya komoditas dengan area terbesar. Diikuti oleh kelapa dengan 25,70 hektar, karet 8,70 hektar, kopi 14,70 hektar, dan kakao 32,90 hektar. Ini menunjukkan bahwa kelapa sawit merupakan komoditas dominan dalam sektor perkebunan di Papua.

Tabel. Luas Lahan dan Produksi Komoditi Utama Sektor Perkebunan Di Provinsi Papua Tahun 2023

Komoditi	Luas Lahan (ribu ha)	Produksi (ribu ton)	Produktifitas (ton/hektar)
Kelapa Sawit	143.60	619.50	4.31
Kelapa	25.70	15.30	0.60
Karet	8.70	4.80	0.55
Kopi	14.70	3.20	0.22
Kakao	32.90	8.80	0.27

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2024 (data diolah)

Selanjutnya dari segi jumlah produksi, kelapa sawit juga memimpin dengan total produksi 619,50 ton. Kelapa menyusul dengan 15,30 ton, karet 4,80 ton, kopi 3,20 ton, dan kakao 8,80 ton. Hal ini menegaskan posisi kelapa sawit sebagai komoditas utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi perkebunan di Papua.

Produktivitas per hektar menunjukkan performa yang bervariasi di antara komoditas. Kelapa sawit memiliki produktivitas tertinggi dengan 4,31 ton/hektar, yang mencerminkan efisiensi dan potensi produksi yang baik. Di sisi lain, kelapa, karet, kopi, dan kakao menunjukkan produktivitas yang lebih rendah, masing-masing dengan 0,60 ton/hektar, 0,55 ton/hektar, 0,22 ton/hektar, dan 0,27 ton/hektar. Rendahnya produktivitas pada komoditas selain kelapa sawit dapat mencerminkan tantangan dalam teknik budidaya, pengelolaan lahan, atau faktor lingkungan yang mempengaruhi hasil.

Secara umum produktivitas tanaman perkebunan yang ada di Provinsi Papua masih di bawah 60 persen, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

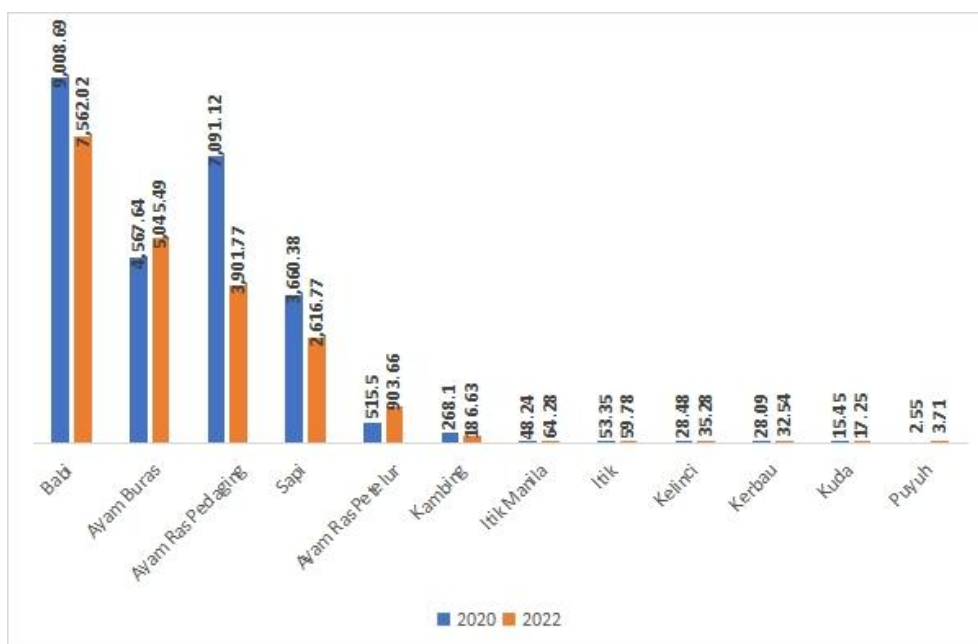
1. Penggunaan bibit/benih yang berasal dari benih asalan (tidak bersertifikat) menyebabkan produksi secara jangka panjang berkurang.
2. Tingginya intensitas serangan organisme pengganggu tanaman (OPT).
3. Rendahnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam penerapan sistem budidaya yang baik.
4. Usia tanaman yang melewati batas usia produktif.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah:

1. Melakukan penendalian secara terintegrasi dan terpadu melalui gerakan massal pengendalian hama dan penyakit.
2. Pelatihan dan pembinaan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), Bintek dan pelatihan.

Indikator kinerja **Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB** dapat dilihat dari produksi daging ternak besar, produksi daging ternak kecil dan produksi daging unggas. Untuk tahun 2022 produksi daging ternak besar mengalami peningkatan khususnya sapi potong sebesar 125.101 Kg dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 121.210 Kg.

Grafik..... Produksi Daging Ternak Tahun 2020-2023(Ton)



Sumber : Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2023 (diolah)

Dalam menunjang capaian output indikator kinerja tahun 2023 dilakukan kegiatan pasar murah, dan penguatan kelembagaan pelaku usaha peternakan. memang dilihat bahwa pada tahun 2023 investasi sub sektor peternakan masih sangat terbatas untuk itu perlu diambil langkah-langkah strategis dalam menumbuhkan investasi peternakan di Provinsi Papua juga melakukan pembinaan dan penerapan teknologi yang dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil produk peternakan.

Sasaran 13

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim**” sebesar **73,09 Persen** dengan predikat “**Cukup Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 13

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1		2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95	95.17	100.17
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	80	52,5	65,62
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85	100.00	117.64
4.	Intensitas Penurunan Emisi	Ton CO2 eq /juta Rp	3.350	0.299	8.925
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					73.09

Berikut dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023-2024 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 13
untuk Tahun 2024-2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,0	95,17	100.18	95	95.17	100.17
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80,0	52,5	65.63	80	52,5	65,62
3	Indeks Kualitas Tutupan	Indeks	85,0	100	117.65	85	100.00	117.64
4	Intensitas Penurunan Emisi	Ton Co2/ Rupiah	0.298	0.299	100.33	3.350	0.299	8.925
Rata - Rata Capaian Indikator Kinerja					95.94			73.09

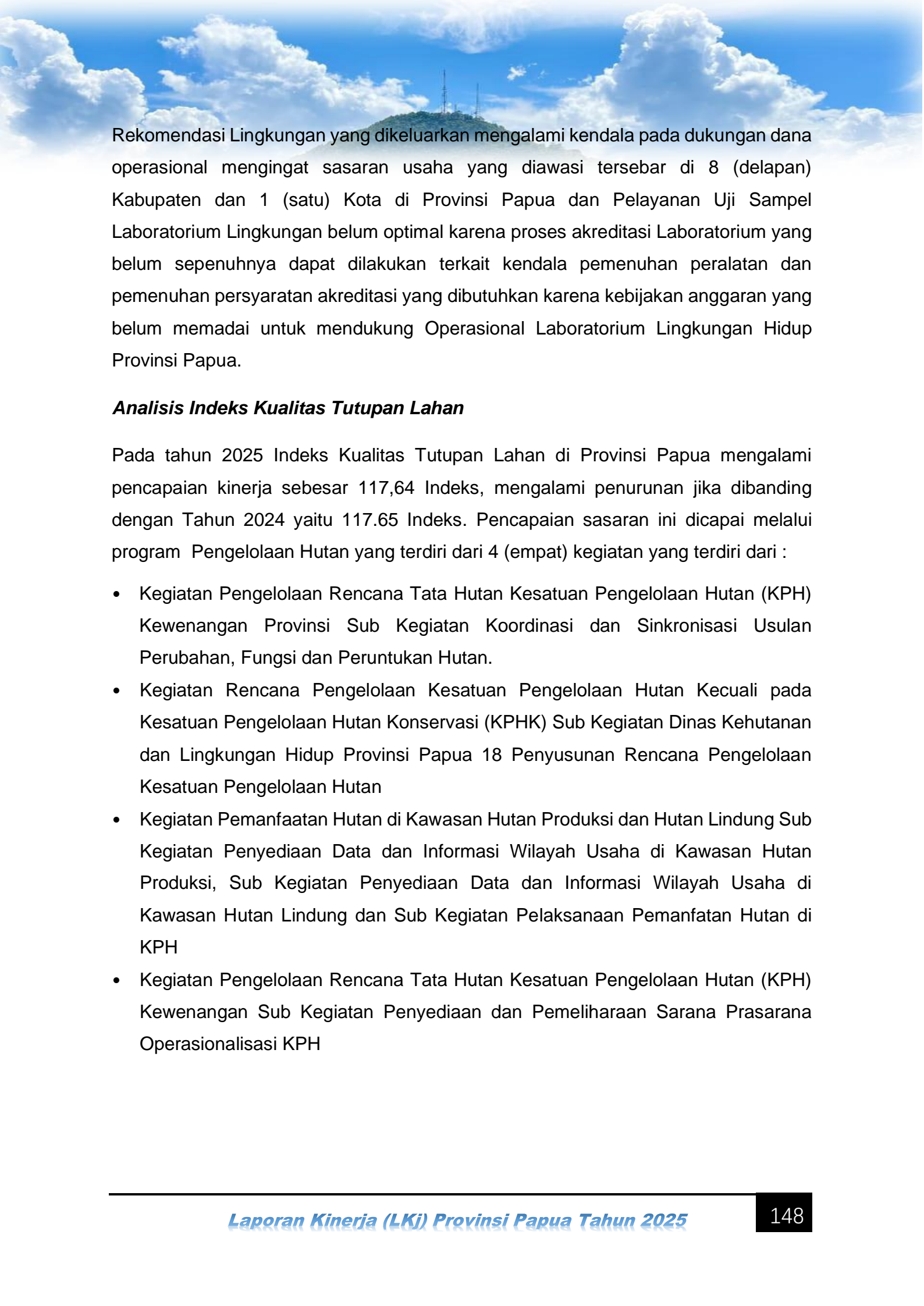
Sasaran “meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim” diukur dengan 4 (empat) Indikator yaitu :

Analisis Indeks Kualitas Udara

Pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian kinerja untuk Indeks Kualitas Udara yaitu 100.17 indeks dibanding Capaian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100.18 Indeks. Pencapaian ini dicapai karena Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah melaksanakan program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut, termasuk peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten/kota.

Analisis Indeks Indeks Kualitas Air

Pada tahun 2025 Indeks Kualitas Air mengalami penurunan dengan capaian kinerja sebesar 65,62 dibanding tahun 2024 dimana capaian kinerjanya 65.63 Indeks, hal ini karena kualitas air hanya mencapai 65,63 persen, lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2024. Kondisi ini disebabkan karena terjadinya penurunan kualitas air karena limbah domestik dan pengawasan yang kurang pada titik pantau kualitas air. Jumlah



Rekomendasi Lingkungan yang dikeluarkan mengalami kendala pada dukungan dana operasional mengingat sasaran usaha yang diawasi tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Papua dan Pelayanan Uji Sampel Laboratorium Lingkungan belum optimal karena proses akreditasi Laboratorium yang belum sepenuhnya dapat dilakukan terkait kendala pemenuhan peralatan dan pemenuhan persyaratan akreditasi yang dibutuhkan karena kebijakan anggaran yang belum memadai untuk mendukung Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Analisis Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Pada tahun 2025 Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Provinsi Papua mengalami pencapaian kinerja sebesar 117,64 Indeks, mengalami penurunan jika dibanding dengan Tahun 2024 yaitu 117.65 Indeks. Pencapaian sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Hutan yang terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari :

- Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan, Fungsi dan Peruntukan Hutan.
- Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Sub Kegiatan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua 18 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi, Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
- Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH



Analisis Intensitas Penurunan Emisi

Indikator Intensitas Penurunan emisi adalah indikator digunakan sebagai bentuk komitmen Provinsi Papua untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon, maka pemerintah Provinsi Papua menetapkan indikator intensitas penurunan emisi sebagai alat ukur utama untuk menjamin keberhasilan Provinsi Papua dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dan rendah karbon.

Di tahun 2025, Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Papua mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon mencapai 8.925 Ton Co₂/Rp dari target intensitas penurunan emisi yang direncanakan. Belum tercapainya target intensitas penurunan emisi, disebabkan karena masih kurangnya program/kegiatan untuk mendukung aksi mitigasi penurunan emisi di berbagai sektor, baik sektor lahan, energi, transportasi dan limbah. Selain itu juga dukungan kabupaten/kota untuk penganggaran program mitigasi penurunan emisi juga belum banyak dilaksanakan.

Sasaran 14

Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumber daya secara berkelanjutan

Sasaran Meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Tujuan Pembangunan daerah yaitu Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Indikator untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan dengan indikator **“Kontribusi Sub Sektor perikanan Terhadap PDRB”** dan **Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (STC) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)**, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja sebesar **156.27** persen dengan predikat **“Sangat Berhasil”** dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (Dua) indikator Kinerja Sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 14 Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	12.02	8,32	98,00
2.	Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM)	STC per tahun	20.00	42.91	214.55
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					156.27

Berdasarkan tabel diatas indikator sasaran Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB mencapai angka 98,00% meskipun realisasi 8,32% berada dibawah angka target 12,02% secara administrasi nilai capaian kinerjanya sangat tinggi karena mendekati 100%, Provinsi Papua tahun 2025 pada sektor non tambang seperti perikanan memang menjadi fokus utama guna menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk indikator Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM) Belum ada data yang disampaikan oleh Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Papua

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 14
untuk Tahun 2024-2025**

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	12,01	8,04	66,45	12,02	8,32	98,00
Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasi terhadap pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindakop, UMKM)	40,00	42,91	107,28	20,00	42,91	214,55
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja			86,86			156,27

Perbandingan antara kinerja sektor perikanan Provinsi Papua tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya strategis penyesuaian target yang signifikan untuk mencapai efektivitas kinerja yang lebih realistis. Tahun 2025 dengan target yang cukup tinggi sebesar 12,02% realisasi 8,32% kemungkinan dipicu oleh kendala infratraktur dan akses pasar yang belum optimal di wilayah Papua, sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2024 Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan rasionalisasi target menjadi 12,01%. Meskipun realisasi sebesar 8,04 % secara absolut hampir sama dengan tahun sebelumnya, nilai capaian kinerja melonjak dratis menjadi 98,00%, penurunan target dari 12,1% ke 8,04% menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Papua menerapkan perencanaan yang lebih terukur dan realistis sesuai kondisi di lapangan.

Sasaran 15

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Ketika kesempatan kerja tinggi, pengangguran akan rendah dan ini akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Lahan pekerjaan yang tersedia biasanya hanya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya relatif semakin sulit. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan antaran permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga berdampak pada pengangguran.

Berdasarkan pengolahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan BPS, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2025. Terdapat tambahan 3 juta orang angkatan kerja dari Februari 2025 ke Agustus 2025. Hal ini dibarengi dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja dari 69,8% menjadi 70,63%. Kedua data ini menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang masuk dan berkontribusi pada pasar kerja. Sementara itu, peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan bahwa Indonesia mendapat tambahan sumber daya manusia yang cukup banyak untuk membantu pergerakan ekonomi negara.

Akan tetapi, peningkatan jumlah angkatan kerja juga dapat menjadi tantangan bagi para pencari kerja itu sendiri. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan kerja dapat memunculkan persaingan yang semakin ketat bagi para pencari kerja. Data menunjukkan adanya penurunan tingkat kesempatan kerja pada Agustus 2025. Tingkat kesempatan kerja awalnya sebesar 95,18% pada bulan Februari turun menjadi 95,8%. Selain penurunan tingkat kesempatan kerja, terjadi juga peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT naik dari 4,82% pada bulan Februari menjadi 4,91% pada bulan Agustus.

Tidak tersedianya lapangan kerja membuat banyak masyarakat beralih ke pekerjaan sektor informal, seperti buruh lepas, pedagang kaki lima, atau pekerja sektor jasa lainnya yang tidak terikat kontrak formal. BPS mencatat bahwa pekerja di Indonesia lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Sebesar 57,95% pekerja bekerja di sektor informal.

Provinsi Papua pasca penetapan Daerah Otonomi Baru tahun 2022 juga tidak terlepas dari permasalahan ketenagakerjaan. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2025 terkait Tingkat Kesempatan Kerja :

Tabel . Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 15 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1.	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91,7	97.20	105,99
Capaian Kinerja Sasaran					105,99

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**” sebesar **105,99 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran.

Meskipun secara prosentase ada kenaikan yang cukup signifikan akan tetapi hal tersebut diakibatkan oleh karena adanya penurunan target capaian, yang mana pada tahun sebelumnya adalah target 98,34 persen menjadi hanya 91,62 persen.

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 2 (dua) tahun, yaitu Tahun 2023 sampai dengan 2024 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 15
Untu Tahun 2024 - 2025**


Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Tahun		
		2024			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Tingkat Kesempatan Kerja	%	91.62	97.20	106.09	91,7	97,20	105,99

Berdasarkan tabel di atas, Capaian Kinerja untuk Indikator Tingkat kesempatan kerja pada tahun 2024 sebesar 106.09 persen. Sedangkan tingkat kesempatan kerja pada tahun 2025 adalah 105.99 persen. Terjadi penurunan dari aspek capaian kinerjanya, hal ini terjadi oleh karena adanya faktor penurunan target capaian dimana target capaian pada tahun 2024 sebesar 91,62 persen, pada tahun 2025 diturunkan target capaiannya menjadi 91.7 persen. Sehingga meskipun secara fakta di lapangan ada terjadi PHK oleh karena kondisi perekonomian negara dan daerah mengalami beberapa kendala akan tetapi capaian kinerja tetap mengalami peningkatan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan penyebab rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia lantaran pemerintah fokus pada program padat modal (capital intensive), ketimbang menerapkan usaha padat karya (labor intensive).

Dalam Outlook Ekonomi 2025, tercatat ada penurunan serapan tenaga kerja selama sembilan tahun terakhir. Pada tahun 2013, setiap Rp1 triliun investasi yang masuk bisa menyerap 4.594 tenaga kerja. Jumlah itu berkurang drastis dengan hanya bisa menyerap 1.379 tenaga kerja per tiap Rp1 triliun investasi di 2022

Investasi padat modal memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi. Namun, kondisi pasar tenaga kerja Indonesia masih didominasi pencari kerja dengan skill atau keterampilan rendah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024 menunjukkan, penduduk usia kerja di Provinsi Papua Tahun 2023 sebanyak 3,26 juta



jiwa dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua pada Tahun 2023 sebanyak 2,52 juta jiwa (60,21) sedangkan jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua Tahun 2023 sebanyak 2,45 juta jiwa yang didominasi oleh laki-laki (60,12 persen). Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Papua. Penduduk usia kerja pada Tahun 2023 sebanyak 3,26 juta orang (data lama sebelum terbentuknya 3 Daerah Otonomi Baru). Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 3,26 juta orang penduduk yang bekerja dan 91.280 orang pengangguran.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2025 sebesar 2,67 persen, hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar dua sampai tiga orang penganggur.

TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Agustus 2025 mempunyai pola yang hampir sama dengan Agustus 2023, namun terdapat penurunan yang cukup tajam pada pendidikan diploma I/II/III. Dari Agustus 2023 hingga Agustus 2025 TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 6,62 persen pada Agustus tahun 2025. Sementara, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah, yaitu sebesar 1,16 persen.

Dengan peralihan dari program padat modal (*capital intensive*), ke usaha padat karya (*labor intensive*) akan mengakibatkan masifnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, menciptakan disrupsi pada transformasi tatanan pekerjaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk mengatasi persoalan semakin ketatnya persaingan didalam mendapatkan kesempatan kerja, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua :



1. Mengembangkan kemampuan para Pencari Kerja.

Menurut data BPS, hampir sepertiga tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh orang dengan pendidikan tamat SMA/SMK, yaitu sebesar 29,3%. Masalah ini dapat diatasi dengan meningkatkan keterampilan mereka dengan melakukan pelatihan yang bersertifikasi, yang sesuai dengan minat dan kebutuhan dunia kerja atau dunia industri. Di dalam pelatihan tersebut diberikan juga materi *softskill* (kemampuan *teamwork*, berbicara di depan umum, mengelola waktu dan pekerjaan dengan efektif, dan lain-lain) untuk menunjang kemampuannya bekerja.

2. Menjalin kerjasama dengan dunia industri

Agar pelatihan yang dilakukan tidak bias yang pada akhirnya tidak dapat diserap oleh pasar kerja maka sebelum melakukan pelatihan terlebih dahulu harus dilakukan Training Needs Analysis (TNA) ataupun Focus Discussion Group (FGD) dengan para stakeholder untuk dapat bersinergi link and match mengidentifikasi jenis keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

Sasaran 16

Meningkatnya Daya Saing dan Realisasi Investasi pada Sektor-Sektor Andalan Daerah

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah**” sebesar **16,07 persen** dengan predikat “**Tidak Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 16 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	64,93	10,44	16,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					16,07

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi dapat diukur, salah satunya dari pencapaian target kinerja. Target kinerja mencerminkan sejauh mana organisasi mampu mencapai sasaran yang diharapkan. Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 2 (dua) tahun, yaitu Tahun 2024 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian
Tahun 2024 - 2025**

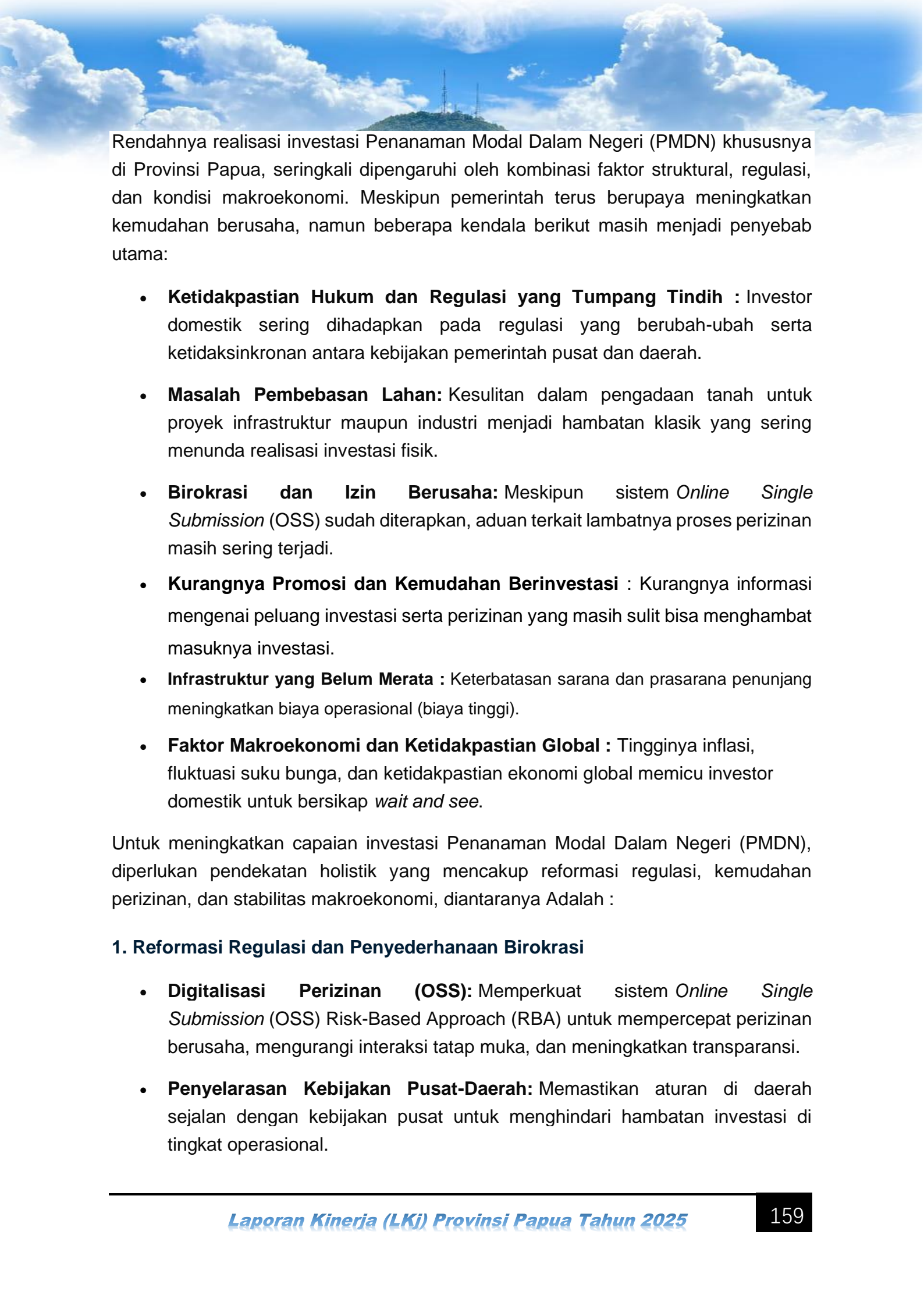
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun						
		2024			2025			
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang direalisasikan	Rupiah (Triliun)	64,93	10,44	16,07	64,93	10,44	16,07
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					16,07			16,07

Berdasarkan data yang disajikan, Indikator kinerja tahun 2025 dengan target sebesar **64,93 triliun**, realisasi sebesar **16,07 triliun** dan kinerja sebesar **16,07 persen** menunjukkan bahwa Capaian kinerja **yang stagnan atau tidak ada peningkatan** dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dengan target, realisasi dan capaian kinerja di angka yang sama. Capaian 16,07% tergolong angka yang sangat rendah untuk kinerja PMDN dalam setahun penuh.

Realisasi yang stagnan/tidak adanya peningkatan serta tidak mencapai target sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor internal manajemen, SDM, maupun eksternal dan secara umum, kondisi ini terjadi karena **tanpa adanya inovasi perbaikan proses atau perubahan strategi** dalam rangka peningkatan investasi PMDN.

Dalam dunia investasi, pertumbuhan (growth) adalah indikator utama keberhasilan. Nilai yang flat (stagnan) berarti tidak ada ekspansi volume investasi riil dari tahun sebelumnya.

Realisasi PMDN yang sama (flat) bisa dikatakan capaian yang positif selama angkanya melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun secara pertumbuhan belum menunjukkan peningkatan melainkan stabilitas. Namun, jika angkanya jauh dibawah target, maka realisasinya dikatakan capaian yang negatif.



Rendahnya realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) khususnya di Provinsi Papua, seringkali dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, regulasi, dan kondisi makroekonomi. Meskipun pemerintah terus berupaya meningkatkan kemudahan berusaha, namun beberapa kendala berikut masih menjadi penyebab utama:

- **Ketidakpastian Hukum dan Regulasi yang Tumpang Tindih** : Investor domestik sering dihadapkan pada regulasi yang berubah-ubah serta ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
- **Masalah Pembebasan Lahan**: Kesulitan dalam pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur maupun industri menjadi hambatan klasik yang sering menunda realisasi investasi fisik.
- **Birokrasi dan Izin Berusaha**: Meskipun sistem *Online Single Submission* (OSS) sudah diterapkan, aduan terkait lambatnya proses perizinan masih sering terjadi.
- **Kurangnya Promosi dan Kemudahan Berinvestasi** : Kurangnya informasi mengenai peluang investasi serta perizinan yang masih sulit bisa menghambat masuknya investasi.
- **Infrastruktur yang Belum Merata** : Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang meningkatkan biaya operasional (biaya tinggi).
- **Faktor Makroekonomi dan Ketidakpastian Global** : Tingginya inflasi, fluktuasi suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi global memicu investor domestik untuk bersikap *wait and see*.

Untuk meningkatkan capaian investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), diperlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi regulasi, kemudahan perizinan, dan stabilitas makroekonomi, diantaranya Adalah :

1. Reformasi Regulasi dan Penyederhanaan Birokrasi

- **Digitalisasi Perizinan (OSS)**: Memperkuat sistem *Online Single Submission* (OSS) Risk-Based Approach (RBA) untuk mempercepat perizinan berusaha, mengurangi interaksi tatap muka, dan meningkatkan transparansi.
- **Penyelarasan Kebijakan Pusat-Daerah**: Memastikan aturan di daerah sejalan dengan kebijakan pusat untuk menghindari hambatan investasi di tingkat operasional.



2. Peningkatan Insentif Investasi dan Daya Saing

- Menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investor, seperti pembebasan pajak atau kemudahan dalam penyediaan lahan

3. Promosi Investasi yang Proaktif dan Tertarget

- Pendekatan strategis di mana lembaga pemerintah daerah DPMPTSP tidak hanya menunggu investor, melainkan secara aktif mencari, mendekati, dan meyakinkan investor spesifik yang sesuai dengan potensi daerah.

4. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif

- **Stabilitas Politik dan Keamanan:** Menjaga stabilitas politik di daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.
- **Kepastian Hukum Agraria :** Menyelesaikan konflik pertanahan dan mempermudah pengadaan tanah untuk proyek strategis.
- **Pengembangan Infrastruktur :** Melanjutkan pembangunan konektivitas (jalan, pelabuhan, bandara) untuk menurunkan biaya logistik.

5. Peningkatan Kualitas SDM

- **Pendidikan Vokasi:** Menyelaraskan kurikulum pendidikan (vokasi/politeknik) dengan kebutuhan industri untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil.

Sasaran 17

Meningkatnya Akses Transportasi Berbasis Antar Moda Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Wilayah/Daerah Dan Akses Bagi Seluruh Wilayah.

Sasaran meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda ditujukan untuk mewujudkan system konektivitas wilayah yang terintegrasi, andal dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah serta menjamin keterjangkauan akses bagi seluruh wilayah. Konektivitas antarmoda menghubungkan jaringan transportasi darat, laut dan udara secara terpadu sehingga tercipta rantai distribusi yang efisien, waktu tempuh yang lebih singkat, serta biaya logistik yang lebih kompetitif.

Dengan system transportasi yang terintegrasi, pusat-pusat produksi dapat terhubung dengan kawasan distribusi dan pasar, mendorong peningkatan aktivitas perdagangan, investasi dan pengembangan potensi unggul daerah.

Peningkatan akses transportasi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan, khususnya dalam membuka keterisolasian wilayah terpencil, perbatasan dan kawasan strategis. Infrastruktur jalan provinsi berperan sebagai tulang punggung konektivitas darat yang menghubungkan simpul-simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, terminal dan kawasan industri.

Kondisi jalan yang baik akan memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya, serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi antar wilayah.

Keterbelakangan daerah kampung di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi. Daerah kampung di pedalaman sangat jauh berbeda dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas wilayah. Ratusan kampung di Provinsi Papua sangat timpang keadaannya dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang memiliki dukungan fasilitas lengkap.

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur jalan merupakan prasyarat kunci dalam mendukung aktivitas masyarakat untuk mendorong perkembangan ekonomi. Tanpa ketersediaan infrastruktur jalan, maka pertumbuhan ekonomi sangat sulit dicapai. Hal ini akan berakibat pada proses pembangunan ekonomi yang tidak berjalan dengan baik dan

masyarakat mengalami kesulitan untuk melakukan berbagai proses transaksi antar kampung ke kampung maupun kampung dengan kota.

Akses transportasi adalah salah satu penunjang perekonomian masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, baik itu jalan atau pun jembatan serta ruang lingkup pinggiran jalan yang dilakukan penganggaran oleh Kabupaten ataupun Provinsi serta Pemerintah Pusat.

Salah satu cara mewujudkan ekonomi inklusif adalah melalui pembangunan infrastruktur yang memudahkan pergerakan orang dan barang. Selanjutnya, akan memacu aktivitas ekonomi dan kegiatan lain, antara lain menarik investasi. Untuk itulah maka kondisi jalan menjadi salah satu faktor pemicu perkembangan ekonomi suatu daerah atau wilayah.

Berikut ini adalah tabel pengukuran Indikator kinerja persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 17 Tahun 2025

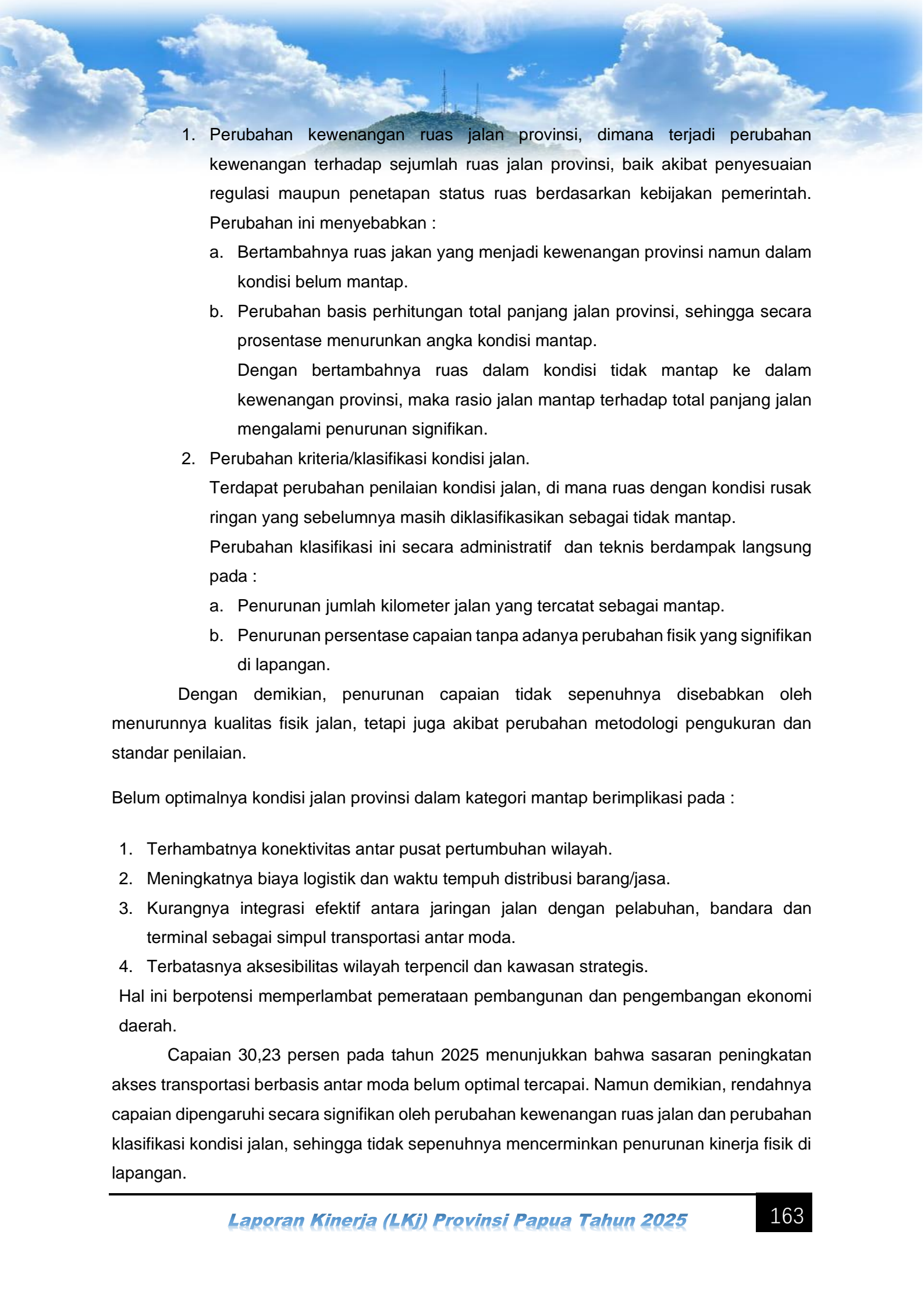
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1. Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap.	Persen	65,00	30,23	56,51
Capaian Kinerja Sasaran				56.51

Capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah**” dengan Indikator Kinerja **persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap** adalah **56,51** persen atau dalam skala ordinal adalah “**Kurang Berhasil**”.

Pencapaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2025 menunjukkan deviasi yang cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 65,00 persen, realisasi yang dicapai hanya sebesar 30,23 persen atau sekitar 46,51 persen dari target kinerja.

Kondisi ini berdampak langsung terhadap optimalisasi system transportasi berbasis antar moda, karena jalan provinsi berperan sebagai simpul penghubung utama antara transportasi darat dengan moda laut maupun udara dalam mendukung konektivitas wilayah serta distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya capaian indikator tersebut antara lain :



1. Perubahan kewenangan ruas jalan provinsi, dimana terjadi perubahan kewenangan terhadap sejumlah ruas jalan provinsi, baik akibat penyesuaian regulasi maupun penetapan status ruas berdasarkan kebijakan pemerintah. Perubahan ini menyebabkan :

- a. Bertambahnya ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi namun dalam kondisi belum mantap.
- b. Perubahan basis perhitungan total panjang jalan provinsi, sehingga secara prosentase menurunkan angka kondisi mantap.

Dengan bertambahnya ruas dalam kondisi tidak mantap ke dalam kewenangan provinsi, maka rasio jalan mantap terhadap total panjang jalan mengalami penurunan signifikan.

2. Perubahan kriteria/klasifikasi kondisi jalan.

Terdapat perubahan penilaian kondisi jalan, di mana ruas dengan kondisi rusak ringan yang sebelumnya masih diklasifikasikan sebagai tidak mantap.

Perubahan klasifikasi ini secara administratif dan teknis berdampak langsung pada :

- a. Penurunan jumlah kilometer jalan yang tercatat sebagai mantap.
- b. Penurunan persentase capaian tanpa adanya perubahan fisik yang signifikan di lapangan.

Dengan demikian, penurunan capaian tidak sepenuhnya disebabkan oleh menurunnya kualitas fisik jalan, tetapi juga akibat perubahan metodologi pengukuran dan standar penilaian.

Belum optimalnya kondisi jalan provinsi dalam kategori mantap berimplikasi pada :

1. Terhambatnya konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah.
2. Meningkatnya biaya logistik dan waktu tempuh distribusi barang/jasa.
3. Kurangnya integrasi efektif antara jaringan jalan dengan pelabuhan, bandara dan terminal sebagai simpul transportasi antar moda.
4. Terbatasnya aksesibilitas wilayah terpencil dan kawasan strategis.

Hal ini berpotensi memperlambat pemerataan pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah.

Capaian 30,23 persen pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran peningkatan akses transportasi berbasis antar moda belum optimal tercapai. Namun demikian, rendahnya capaian dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan kewenangan ruas jalan dan perubahan klasifikasi kondisi jalan, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja fisik di lapangan.

Perbandingan Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja, diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 17 Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Tahun		
		2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap.	Persen	60,00	41,61	69,35	65,00	30,23	56,51

Indikator kinerja persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap diperoleh dengan cara membandingkan antara panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dengan total panjang jalan provinsi. Panjang jalan provinsi sesuai SK Gubernur Papua Nomor 188.4/113/Tahun 2023 adalah 2.168,37 KM. Data dari Dinas PUPRKP untuk panjang jalan provinsi dalam kondisi baik tahun 2025 adalah 655,46 KM mengalami penurunan yang sangat signifikan sepanjang 205,69 KM yang mana panjang jalan kondisi baik tahun 2024 yaitu 902,35 KM.

Beberapa kendala penyebab turunnya capaian kinerja pada tahun 2025 adalah :

1. Perubahan kewenangan ruas jalan provinsi yang menambah panjang jalan dalam kondisi belum mantap.
2. Perubahan klasifikasi kondisi jalan, dimana ruas jalan yang sebelumnya dihitung sebagai mantap berubah menjadi tidak mantap.
3. Penyesuaian standar teknis yang berdampak langsung pada perhitungan persentase.
4. Kondisi curah hujan yang sangat tinggi pada bulan Oktober, November dan Desember. Sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan.
5. Pengurangan anggaran pemeliharaan.

Dengan demikian, penurunan kinerja tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kualitas fisik jalan, melainkan juga dipengaruhi faktor administratif dan metodologis.



Rekomendasi Perbaikan :

1. Melakukan penyesuaian target berbasis data terkini setelah perubahan kewenangan ruas jalan.
2. Menyusun baseline baru atas klasifikasi kondisi jalan sesuai standar baru.
3. Memprioritaskan penanganan ruas strategis yang mendukung konektivitas antar moda (akses ke pelabuhan, bandara dan kawasan ekonomi).
4. Memperkuat perencanaan multiyears untuk percepatan peningkatan status jalan tidak mantap menjadi mantap.
5. Meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara perencanaan teknis dan kebijakan klasifikasi kondisi jalan.

Sasaran 18

Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten**” sebesar **195,48 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Indikator dan Target serta Realisasi Capaian Sasaran 18 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	50,00	97,74	195,48

berdasarkan tabel 3.... diatas target kinerja sebesar **50%**, adapapun realisasi kinerja sebesar **97,74%** dan capaian kinerja sebesar **195,48%**, berdasarkan hasil perhitungan realisasi lebih tinggi dari target yang direncanakan, adapun skala penilaian berada pada kategory **sangat tinggi**. Kesesuaian pemanfaatan ruang dalam Program RTRW Provinsi Papua dengan Program RKPD Provinsi Papua Tahun 2025, untuk Indikasi Program dalam RTRW disesuaikan dalam Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang, sehingga ada perbedaan jumlah Program RKPD dengan RTRW.

**Tabel Perbandingan Indikator Kinerja Utama Capaian Sasaran 18
untuk Tahun 2024-2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun			Tahun		
		2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	50,00	97,39	194,78	50,00	97,74	195,48

Apabila dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, karena bila di lihat program-program yang ada di RKPD sudah sesuai dengan program yang ada di dokumen RTRW.

Sasaran 19

Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah

Sasaran meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Papua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan air secara berkelanjutan, baik untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri maupun kebutuhan dasar masyarakat.

Air sebagai sumber daya vital memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Provinsi Papua yang memiliki potensi sumber daya air melimpah namun belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan sistem pengairan harus diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung dan embung, pengendalian banjir, serta penguatan manajemen distribusi air agar pemanfaatannya lebih efektif dan merata.

Indikator Kinerja persentase Pemanfaatan sumber daya air adalah untuk mengukur sejauhmana potensi sumberdaya air yang tersedia di Provinsi Papua telah dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas produktif masyarakat. Persentase tersebut dihitung dengan membandingkan volume atau kapasitas sumber daya air yang telah dimanfaatkan terhadap total potensi sumber daya air yang dapat dikelola secara teknis dan berkelanjutan.

Semakin tinggi persentase pemanfaatan sumber daya air, menunjukkan bahwa :

1. Infrastruktur pengairan berfungsi dengan baik.
2. Akses air untuk lahan pertanian dan sektor produktif lainnya semakin luas.
3. Produktivitas pertanian dan ekonomi wilayah meningkat.
4. Ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat semakin terjamin.

Namun demikian, peningkatan pemanfaatan harus tetap memperhatikan prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan, agar eksploitasi sumber daya air tidak menimbulkan degradasi ekosistem atau konflik pemanfaatan antar sektor.


Dengan demikian, sasaran ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas pemanfaatan air, tetapi juga pada efektivitas distribusi, keadilan akses dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air guna mendukung pembangunan ekonomi wilayah Papua secara inklusif dan berkelanjutan.

Capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktifitas wilayah”** sebesar **91,46** persen dengan predikat **“sangat berhasil”**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran persentase pemanfaatan sumber daya air. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaian indikator kinerjanya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 19 Tahun 2025

Indikator kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1		2	3	4	5
1.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	82	75	91,46

Capaian kinerja sebesar **91,46 persen** menunjukkan kinerja yang **“sangat berhasil”** meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Masih terdapat gap 7 persen yang menunjukkan bahwa sebagian potensi sumber daya air belum dimanfaatkan secara optimal.



Beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi belum tercapainya target antara lain :

a. Faktor Infrastruktur

- Masih terdapat jaringan irigasi yang rusak atau belum terhubung optimal.
- Keterbatasan pembangunan embung, bendung dan saluran distribusi air.
- Keterlambatan pelaksanaan proyek fisik akibat kendala teknis lapangan.

b. Faktor Geografis dan Aksesibilitas.

- Kondisi topografi Papua yang menantang (wilayah pegunungan, terpencil dan sulit dijangkau).
- Distribusi air ke wilayah sentra produksi belum merata.

c. Faktor anggaran dan perencanaan.

- Keterbatasan alokasi anggaran.
- Penyesuaian refocusing anggaran pada program prioritas lain.
- Perencanaan teknis yang belum sepenuhnya berbasis pemetaan potensi sumber daya air.

d. Faktor Manajemen dan Kelembagaan.

- Pengelolaan sistem irigasi belum sepenuhnya berbasis partisipasi masyarakat.
- Kelembagaan pengelolaan air (P3A/kelompok tani) belum optimal dalam operasi dan pemeliharaan.

Dengan tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa sebagian wilayah masih belum memperoleh layanan air secara optimal, yang berdampak pada :

- Produktivitas pertanian belum maksimal.
- Pota tanam belum bisa dilakukan sepanjang tahun.
- Potensi peningkatan ekonomi wilayah belum sepenuhnya terealisasi.

Tabel Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 19 Tahun 2024 - 2025

Sasaran Strategis	Satuan	Tahun					
		2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	81	75	92,60	82	75	91.46

Dari target terjadi kenaikan 1 persen dari 81 persen menjadi 82 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan ekspektasi kinerja dan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air.

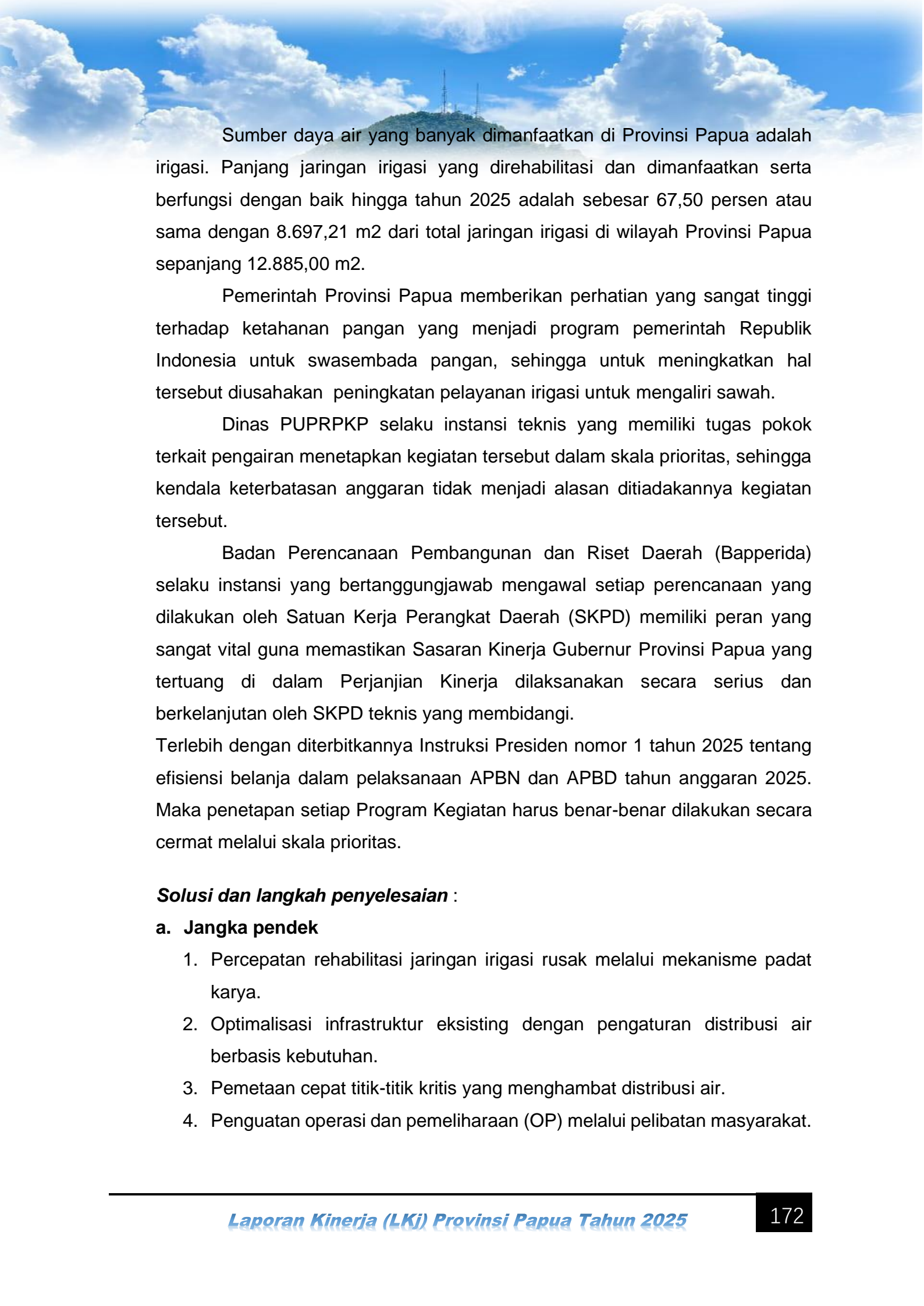
Realisasi pada kedua tahun stagnan di angka 75 persen, yang menunjukkan bahwa belum terdapat peningkatan signifikan dalam pemanfaatan sumber daya air selama dua tahun berturut-turut.

Dari aspek capaian kinerja terjadi penurunan sebesar 1,13 persen yang disebabkan oleh kenaikan target tanpa diikuti peningkatan realisasi.

Stagnasi realisasi ini mengindikasikan bahwa :

- Optimalisasi infrastruktur pengairan belum berkembang signifikan.
- Perlu evaluasi terhadap efektivitas program, anggaran dan manajemen distribusi air.
- Tantangan geografis dan teknis masih menjadi faktor pembatas utama di wilayah Papua.

Capaian kinerja tahun 2025 menurun dibanding tahun 2024, dimana pada tahun 2024 capaian kinerja 92,60 persen sedangkan tahun 2025 hanya mencapai 91,46 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan target kinerja di tahun 2025. Target kinerja tahun 2025 dinaikkan menjadi 82 persen dari target 2024 yaitu 81 persen atau naik 1 persen.



Sumber daya air yang banyak dimanfaatkan di Provinsi Papua adalah irigasi. Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan dimanfaatkan serta berfungsi dengan baik hingga tahun 2025 adalah sebesar 67,50 persen atau sama dengan 8.697,21 m² dari total jaringan irigasi di wilayah Provinsi Papua sepanjang 12.885,00 m².

Pemerintah Provinsi Papua memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap ketahanan pangan yang menjadi program pemerintah Republik Indonesia untuk swasembada pangan, sehingga untuk meningkatkan hal tersebut diusahakan peningkatan pelayanan irigasi untuk mengaliri sawah.

Dinas PUPRKP selaku instansi teknis yang memiliki tugas pokok terkait pengairan menetapkan kegiatan tersebut dalam skala prioritas, sehingga kendala keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan ditiadakannya kegiatan tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) selaku instansi yang bertanggungjawab mengawal setiap perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki peran yang sangat vital guna memastikan Sasaran Kinerja Gubernur Provinsi Papua yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dilaksanakan secara serius dan berkelanjutan oleh SKPD teknis yang membidangi.

Terlebih dengan diterbitkannya Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Maka penetapan setiap Program Kegiatan harus benar-benar dilakukan secara cermat melalui skala prioritas.

Solusi dan langkah penyelesaian :

a. Jangka pendek

1. Percepatan rehabilitasi jaringan irigasi rusak melalui mekanisme padat karya.
2. Optimalisasi infrastruktur eksisting dengan pengaturan distribusi air berbasis kebutuhan.
3. Pemetaan cepat titik-titik kritis yang menghambat distribusi air.
4. Penguatan operasi dan pemeliharaan (OP) melalui pelibatan masyarakat.



b. Jangka menengah

1. Pembangunan embung dan bending skala kecil-menengah di sentra produksi.
2. Digitalisasi monitoring debit air untuk efisiensi distribusi
3. Integrasi perencanaan pengairan dengan rencana tata ruang wilayah.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan air melalui pelatihan dan pendampingan.

c. Jangka panjang

1. Penyusunan masterplan pengelolaan sumber daya air Provinsi Papua berbasis potensi wilayah.
2. Penetapan sistem irigasi hemat air dan adaptif terhadap perubahan iklim.
3. Skema pembiayaan kolaboratif (APBD, APBN dan KPBU)
4. Penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air berbasis keberlanjutan.

Sasaran 20

Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman

Sasaran strategis Meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik dan Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman” adalah **177,095** persen dengan predikat “**Sangat Berhasil**”.

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 20

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik	Persen	42.00	64.00	152,38
2	Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih Layak	Persen	45.75	92.33	201,81
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					177,095

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman tahun 2025 sebesar 177.095 persen diperoleh dari capaian individu indikator kinerja Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan capaian kinerja sebesar 152.38 persen dan Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua.

Sebagai pembandingan kinerja Tahun 2025 dapat digambarkan pada table berikut dengan target dan capaian yang meningkat di dua tahun setelah terjadinya pemekaran wilayah;

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 20 Tahun 2024 - 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun						
		2024			2025			
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Cakupan Rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	41.00	64.00	156.09	42.00	64.00	152.38
2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	45.50	93.09	204.60	45.75	92.33	201.81
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					180.345			177.095

1. Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik

Secara individu Sanitasi adalah upaya untuk menciptakan dan memelihara kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dengan tujuan mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup, dimana sanitasi baik adalah kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, yang dicapai melalui berbagai upaya mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup.

Tingkat sanitasi yang baik mencerminkan kemajuan suatu daerah dalam hal infrastruktur, kesadaran masyarakat dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat oleh sebab itu Sanitasi baik menjadi salah satu indikator kinerja utama Gubernur Papua Indikator kinerja cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua.

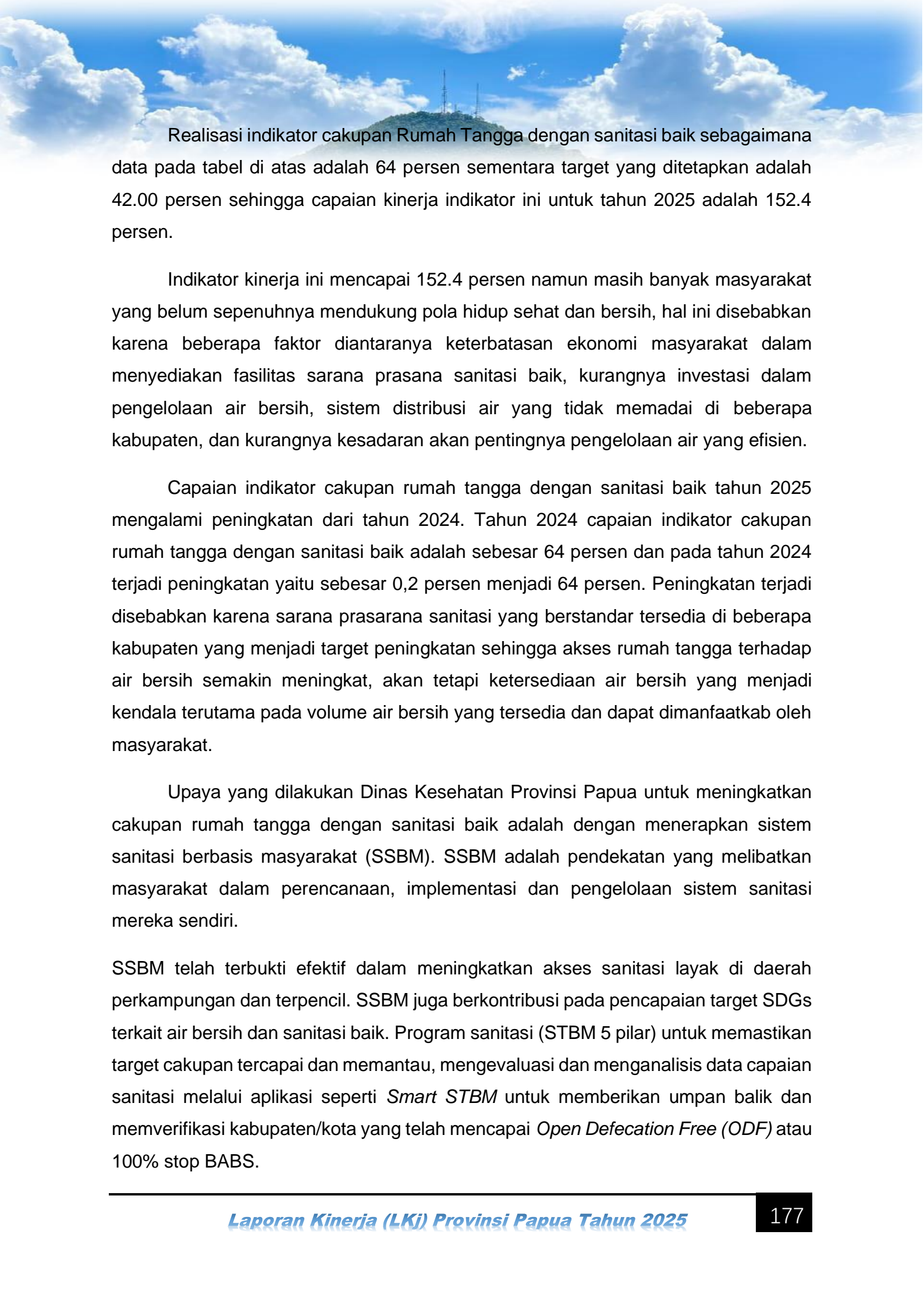
Capaian kinerja indikator Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik untuk tahun 2025 adalah 152,38 persen dengan predikat Sangat Baik diperoleh dari realisasi 64.00 persen dibagi dengan target yang ditetapkan yaitu 42.00 persen.

Kabupaten Jayapura sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang menunjukkan upaya peningkatan sanitasi baik dengan program untuk menjadikan wilayahnya bersih dan peduli lingkungan hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan sanitasi yang memiliki cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik mencapai 76 persen yaitu dari target yang ditetapkan sebanyak 45.841 rumah tangga dan terealisasi 35.025 rumah tangga. Capaian ini tertinggi dibanding wilayah lain di Provinsi Papua. Data realisasi cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik pada 9 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua dirincikan dalam tabel berikut:

Tabel. Jumlah Jamban yang memenuhi Syarat Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Pembilang	Pembagi	Satuan
		Jumlah Jamban yang memenuhi syarat Kesehatan	Jumlah masyarakat yang menjadi target	%
1.	Jayapura	35025	45841	76%
2.	Kepulauan Yapen	9070	20600	44%
3.	Biak Numfor	25916	37101	70%
4.	Sarmi	6254	10859	58%
5.	Keerom	10474	14297	73%
6.	Waropen	4266	8118	53%
7.	Supiori	1758	3736	47%
8.	Mamberamo Raya	1637	6171	27%
9	Kota Jayapura	42687	65834	65%
<i>Jumlah</i>		<i>137086</i>	<i>212557</i>	<i>64%</i>

Sumber data: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua TA 2025




Realisasi indikator cakupan Rumah Tangga dengan sanitasi baik sebagaimana data pada tabel di atas adalah 64 persen sementara target yang ditetapkan adalah 42.00 persen sehingga capaian kinerja indikator ini untuk tahun 2025 adalah 152.4 persen.

Indikator kinerja ini mencapai 152.4 persen namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pola hidup sehat dan bersih, hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya keterbatasan ekonomi masyarakat dalam menyediakan fasilitas sarana prasana sanitasi baik, kurangnya investasi dalam pengelolaan air bersih, sistem distribusi air yang tidak memadai di beberapa kabupaten, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan air yang efisien.

Capaian indikator cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik tahun 2025 mengalami peningkatan dari tahun 2024. Tahun 2024 capaian indikator cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik adalah sebesar 64 persen dan pada tahun 2024 terjadi peningkatan yaitu sebesar 0,2 persen menjadi 64 persen. Peningkatan terjadi disebabkan karena sarana prasarana sanitasi yang berstandar tersedia di beberapa kabupaten yang menjadi target peningkatan sehingga akses rumah tangga terhadap air bersih semakin meningkat, akan tetapi ketersediaan air bersih yang menjadi kendala terutama pada volume air bersih yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk meningkatkan cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik adalah dengan menerapkan sistem sanitasi berbasis masyarakat (SSBM). SSBM adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi dan pengelolaan sistem sanitasi mereka sendiri.

SSBM telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses sanitasi layak di daerah perkampungan dan terpencil. SSBM juga berkontribusi pada pencapaian target SDGs terkait air bersih dan sanitasi baik. Program sanitasi (STBM 5 pilar) untuk memastikan target cakupan tercapai dan memantau, mengevaluasi dan menganalisis data capaian sanitasi melalui aplikasi seperti *Smart STBM* untuk memberikan umpan balik dan memverifikasi kabupaten/kota yang telah mencapai *Open Defecation Free (ODF)* atau 100% stop BABS.



Meskipun realisasi kinerja pada tahun 2025 mencapai 152,4% dari target yang ditetapkan, terdapat catatan evaluasi berupa stagnansi pertumbuhan. Realisasi yang tertahan di angka 64% selama dua periode menunjukkan bahwa strategi intervensi saat ini telah mencapai kapasitas maksimal. Diperlukan inovasi baru atau penambahan sumber daya khusus untuk menyasar sisa target yang lebih kompleks agar tren positif dapat kembali meningkat di tahun mendatang, di mana alokasi dana untuk perluasan infrastruktur/layanan dialihkan untuk prioritas pembangunan lainnya. Namun, pemerintah melalui dinas Kesehatan berhasil melakukan efisiensi dengan tetap mempertahankan level layanan di angka 64 persen.

Melihat kondisi realisasi yang masih tetap sama di tahun 2025 ini solusi kedepan adalah dengan mendorong peran masyarakat atau sektor swasta (CSR) untuk pembangunan infrastruktur skala kecil di tingkat kampung, menyusun target yang relevan di RPJMD dan Renstra yang baru sesuai realisasi yang di capai tahun 2025 sebagai acuan.

Sasaran strategis **Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman** merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Perumahan yang layak tidak hanya diukur dari kondisi fisik bangunan semata, tetapi juga dari ketersediaan prasarana dan sarana dasar, salah satunya adalah akses terhadap air bersih yang layak dan aman untuk dikonsumsi.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan derajat kesehatan, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Cakupan Rumah Tangga dengan Sanitasi Baik serta **Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih Layak**. Indikator ini mencerminkan sejauhmana pemerintah daerah mampu menyediakan dan memperluas layanan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan.

Peningkatan cakupan rumah tangga dengan air bersih layak juga berkontribusi pada penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi serta mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang sehat dan tertata. Selain

itu pemerataan air bersih menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Dengan demikian sasaran ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik perumahan, tetapi juga pada penguatan sistem pelayanan dasar permukiman secara terpadu dan berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian indikator cakupan rumah tangga dengan air bersih layak akan menjadi tolok ukur nyata dalam mewujudkan permukiman yang layak, sehat dan berdaya saing.

Data yang dirilis oleh BPS terlihat adanya kenaikan yang signifikan terkait akses air minum layak dari tahun 2020 – 2024 untuk beberapa Kabupaten, namun ada juga yang mengalami fluktuatif sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Jayapura	29,95	74,87	72,99	75,70	81,58
Kepulauan Yapen	41,20	80,89	75,87	83,32	76,77
Sarmi	32,01	89,82	88,99	87,90	90,28
Keerom	22,71	75,64	79,27	29,50	60,69
Biak Numfor	35,56	97,67	87,71	81,21	87,17
Waropen	41,77	72,89	84,81	89,87	93,47
Supiori	15,06	45,56	59,92	63,31	68,84
Mamberamo Ray	92,60	66,10	85,06	69,31	62,23
Kota Jayapura	22,88	97,10	91,80	93,56	96,86
Provinsi Papua	-	-	65,39	66,49	85,84

Sumber data : BPS

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas Kabupaten menunjukkan peningkatan signifikan akses air minum layak, yang mana menggambarkan keberhasilan dalam penyediaan layanan dasar yang krusial bagi kualitas hidup masyarakat. Namun kabupaten Mamberamo Raya dan Kepulauan Yapen mengalami penurunan akses, yang menunjukkan perlunya perhatian dan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengatasi hambatan spesifik di wilayah tersebut.

Tabel. Indikator Kinerja Sasaran 20


Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Cakupan Rumah Tangga dengan Air Bersih Layak	Persen	45.75	92,33	201,81

Dari perhitungan seperti di atas, diperoleh nilai realisasi indikator cakupan rumah tangga dengan akses air bersih layak sebesar 92,33 persen sehingga diperoleh nilai **capaian kinerja indikator sebesar 201,81** persen dengan predikat **sangat berhasil**.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua bahwa total air bersih yang terdistribusi mencapai 75 ltr/dtk sementara total air bersih layak untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga adalah 1.025,00 Ltr/dtk.

Realisasi sebesar 92,33 persen menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga telah memperoleh akses terhadap air bersih layak. Dengan capaian kinerja sebesar 201,81 persen, indikator ini melampaui target lebih dari dua kali lipat. Hal ini menunjukkan keberhasilan yang sangat signifikan dalam pelaksanaan program penyediaan air bersih dan penataan pemukiman.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sasaran pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman, khususnya dalam aspek pelayanan dasar air bersih, telah menunjukkan hasil yang optimal bahkan melampaui ekspektasi perencanaan.



Beberapa faktor yang dapat menjelaskan capaian yang sangat tinggi antara lain :

1. Optimalisasi Program Penyediaan Air Bersih.
2. Sinergi Pendanaan dan Program.
3. Pendataan dan Validasi yang lebih Akurat.
4. Fokus pada Wilayah Prioritas.
5. Partisipasi Masyarakat.

Meskipun capaian sangat tinggi, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati :

- Kemungkinan Target Terlalu Rendah (Underestimated Target)
- Perlu Validasi Kualitas Layanan.
- Keberlanjutan Sistem, tingginya cakupan harus diimbangi dengan keberlanjutan operasional dan pemeliharaan infrastruktur agar tidak terjadi penurunan kualitas layanan di masa mendatang.

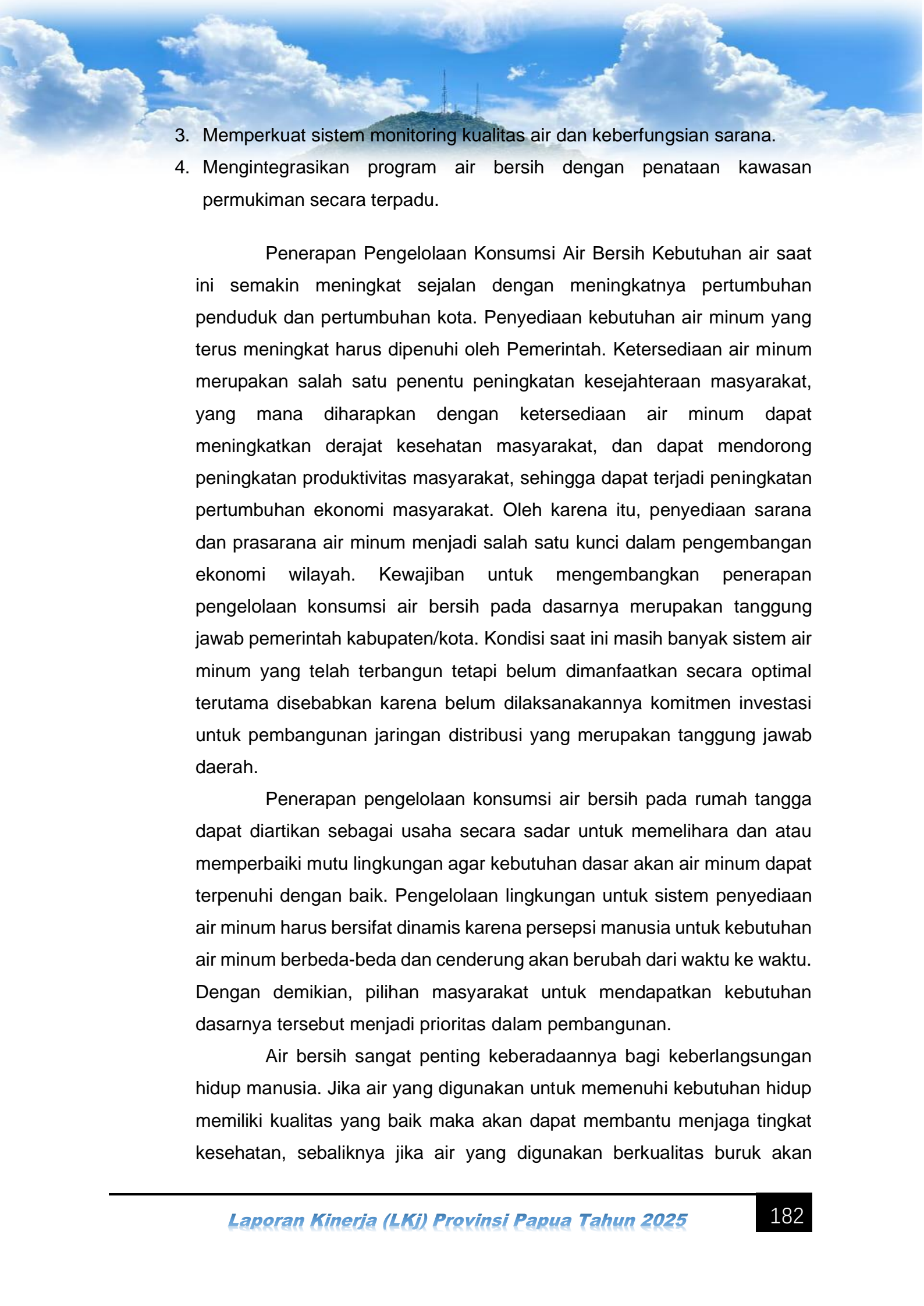
Capaian ini berdampak positif terhadap :

- Peningkatan Kualitas hidup masyarakat.
- Penurunan resiko penyakit berbasis lingkungan.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).
- Mendukung percepatan pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas perumahan layak huni.

Dengan cakupan 92,33 persen, sasaran peningkatan pemenuhan perumahan layak huni tidak hanya tercapai, tetapi telah memberikan fondasi kuat bagi peningkatan kualitas permukiman secara menyeluruh.

Ada beberapa rekomendasi kebijakan terkait capaian kinerja tersebut :

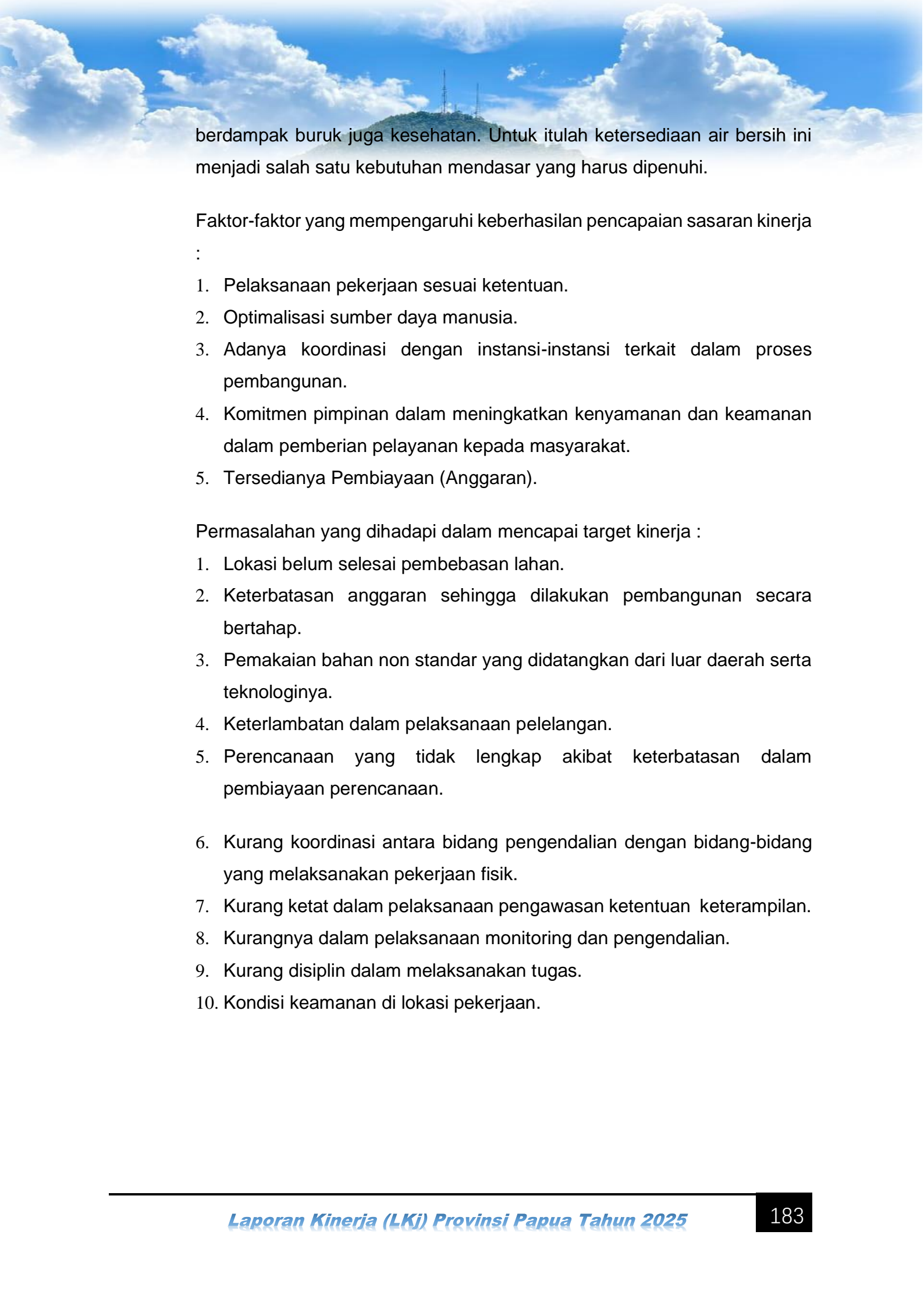
1. Melakukan evaluasi penetapan target agar lebih realistis dan berbasis data terkini.
2. Menggeser fokus kebijakan dari ekspansi cakupan ke peningkatan kualitas dan keberlanjutan layanan.

- 
3. Memperkuat sistem monitoring kualitas air dan keberfungsian sarana.
 4. Mengintegrasikan program air bersih dengan penataan kawasan permukiman secara terpadu.

Penerapan Pengelolaan Konsumsi Air Bersih Kebutuhan air saat ini semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kota. Penyediaan kebutuhan air minum yang terus meningkat harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang mana diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga dapat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Kewajiban untuk mengembangkan penerapan pengelolaan konsumsi air bersih pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Kondisi saat ini masih banyak sistem air minum yang telah terbangun tetapi belum dimanfaatkan secara optimal terutama disebabkan karena belum dilaksanakannya komitmen investasi untuk pembangunan jaringan distribusi yang merupakan tanggung jawab daerah.

Penerapan pengelolaan konsumsi air bersih pada rumah tangga dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara dan atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar akan air minum dapat terpenuhi dengan baik. Pengelolaan lingkungan untuk sistem penyediaan air minum harus bersifat dinamis karena persepsi manusia untuk kebutuhan air minum berbeda-beda dan cenderung akan berubah dari waktu ke waktu. Dengan demikian, pilihan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut menjadi prioritas dalam pembangunan.

Air bersih sangat penting keberadaannya bagi keberlangsungan hidup manusia. Jika air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup memiliki kualitas yang baik maka akan dapat membantu menjaga tingkat kesehatan, sebaliknya jika air yang digunakan berkualitas buruk akan




berdampak buruk juga kesehatan. Untuk itulah ketersediaan air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja :

1. Pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
2. Optimalisasi sumber daya manusia.
3. Adanya koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam proses pembangunan.
4. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
5. Tersedianya Pembiayaan (Anggaran).

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja :

1. Lokasi belum selesai pembebasan lahan.
2. Keterbatasan anggaran sehingga dilakukan pembangunan secara bertahap.
3. Pemakaian bahan non standar yang didatangkan dari luar daerah serta teknologinya.
4. Keterlambatan dalam pelaksanaan pelelangan.
5. Perencanaan yang tidak lengkap akibat keterbatasan dalam pembiayaan perencanaan.
6. Kurang koordinasi antara bidang pengendalian dengan bidang-bidang yang melaksanakan pekerjaan fisik.
7. Kurang ketat dalam pelaksanaan pengawasan ketentuan keterampilan.
8. Kurangnya dalam pelaksanaan monitoring dan pengendalian.
9. Kurang disiplin dalam melaksanakan tugas.
10. Kondisi keamanan di lokasi pekerjaan.



Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala:

1. Menertibkan tata guna lahan, peruntukan serta hak kepemilikannya.
2. Mengalokasi rencana anggaran sesuai usulannya.
3. Memaksimalkan material serta teknologi setempat.
4. Mengefisien dan mengefektifkan waktu lelang sedini mungkin.
5. Mengalokasikan biaya perencanaan secara tuntas.
6. Perlu dilakukan koordinasi antar bidang sehingga tupoksi masing-masing bidang difungsikan.
7. Dalam pelaksanaan pengawasan perlu diperketat.
8. Perlu disiapkan dana yang cukup agar pengendalian berjalan dengan baik.
9. Perlu peningkatan disiplin terhadap ASN.

Sasaran 21

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung

Capaian kinerja untuk sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung**” dengan capaian kinerja tahun 2025 sebesar **72,52** dengan predikat “**Cukup Berhasil**”. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 21 Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kampung Membangun	Indeks	52,5	38,60	72,52
Capaian Indikator Kinerja					72,52

Capaian kinerja Indeks Kampung membangun dengan Target 52,5 Realisasi 38,60 sehingga capaian kinerja adalah 72.52. Menurunnya realisasi Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung ini berdasarkan Indikator kinerja yakni : Indek Kampung Membangun atau dalam Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia disebut Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa serta adanya perubahan regulasi dipertengahan tahun 2025, yang tertuang dalam Keputusan Meteri Desa dan Daerah Tertinggal RI, nomor 343 Tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025. Terdapat penambahan indicator yang tidak relevan dengan kondisi di provinsi Papua terutama kondisi geografis di Provinsi Papua.

Tabel. Perbandingan

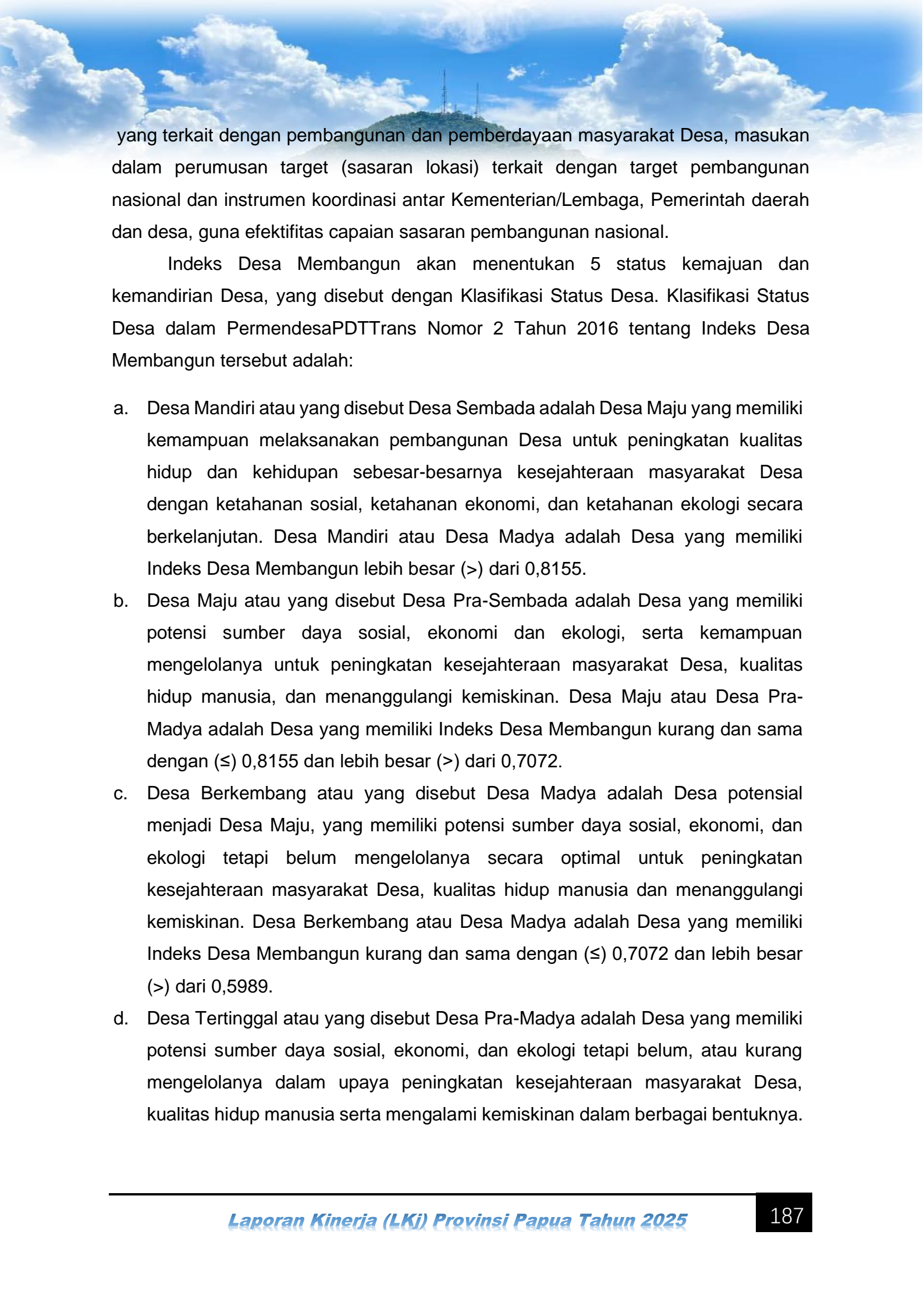
Indikator Kinerja Capaian Sasaran 21 untuk Tahun 2024 - 2025

Sasaran Strategis	Satuan	Tahun					
		2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Indeks Kampung Membangun	Indeks	52.00	42.29	81.32	52,5	38,60	72,52

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa Capaian Kinerja dari Indeks Kampung Membangun mengalami penurunan di Tahun 2025 yaitu 72,52 dari tahun sebelumnya di Tahun 2024 yaitu 81,32 atau menurun sebesar 8,94 persen hal ini dikarenakan adanya perubahan Peraturan Keputusan Meteri Desa dan Daerah Tertinggal RI, nomor 343 Tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2025, adapun program yang telah dilaksanakan adalah pembinaan, penguatan kapasitas serta pendampingan dan monitoring kepada Kampung-Kampung termasuk Kampung Berkembang dalam bentuk program kegiatan. Beberapa program yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung antara lain, program penataan kampung, program peningkatan kerja sama kampung, program administrasi pemerintahan kampung, program pemberdayaan lembaga masyarakat adat dan masyarakat hukum adat, program pemberdayaan orang asli Papua.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah dan desa (di Provinsi Papua disebut Kampung) dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

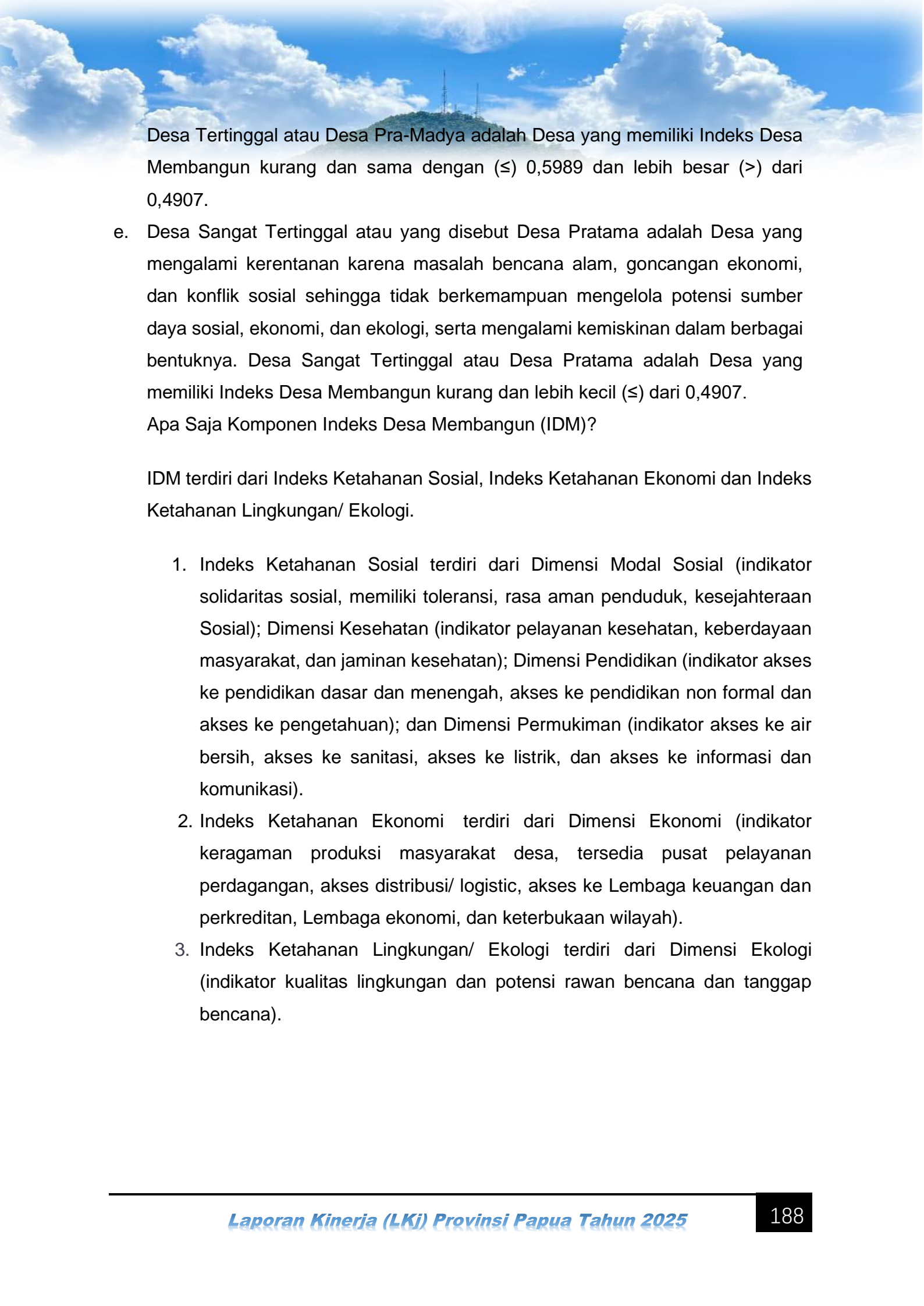
Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama



yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan target (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Indeks Desa Membangun akan menentukan 5 status kemajuan dan kemandirian Desa, yang disebut dengan Klasifikasi Status Desa. Klasifikasi Status Desa dalam PermendesaPDTTtrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun tersebut adalah:

- a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.



Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (\leq) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.

- e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (\leq) dari 0,4907.

Apa Saja Komponen Indeks Desa Membangun (IDM)?

IDM terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).


Dalam hal klasifikasi status Desa sebagaimana tersebut di atas dimana kriteria penentuan status desa disamaratakan untuk seluruh Indonesia, maka atas pertimbangan letak geografis, ketersediaan infrastruktur, adat budaya lokal dan rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Provinsi sampai Kampung, maka ditetapkan target kampung membangun adalah Kampung Berkembang menjadi titik fokus pembangunan ke arah Kampung Maju dan Kampung Mandiri, Sudah barang tentu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga mengupayakan secara maksimal kemajuan Kampung Sangat Tertinggal dan Tertinggal ke tingkat yang lebih tinggi.

Berdasarkan 3 (tiga) Indeks tersebut di atas, maka jumlah Desa/Kampung Berkembang di Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun 2023-2024 tergambar sebagaimana tabel berikut ini

**Tabel. Jumlah Kampung Berkembang Tahun 2023-2025
di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

NO.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung	Kamp. sangat tertinggal / tertinggal		Kampung Berkembang		Kampung Maju		Kampung Mandiri	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	kab jayapura	139	68	16	62	64	9	15	-	-
2	Kepulauan Yapen	160	22	4	133	145	5	10	-	-
3	Biak Numfor	254	143	77	109	88	2	2	-	-
4	Sarmi	92	81	54	9	14	2	1	-	-
5	Keerom	91	64	25	21	22	5	6	1	2
6	Waropen	100	63	75	34	8	3	-	-	-
7	Supiori	38	10	5	22	20	6	5	-	-
8	Mamberamo Raya	60	55	10	5	-	-	5	-	-
9	Kota Jayapura	14	-	-	6	5	7	6	1	3
Jumlah		948	506	266	401	366	39	50	2	5

Sumber Data : LKj DPMK Tahun 2025



Dari tabel tersebut diketahui bahwa hasil penginputan dan verifikasi terhadap **948** kampung yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Papua, terdapat **Kampung Berkembang sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam)**, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan capaian kinerja **72,52** dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu **81,32** yang tinggi pada sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kampung**”. Menurunnya capaian sasaran tersebut disebabkan karena terdapat perubahan regulasi permendes nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun menjadi menjadi permendes nomor 9 tahun 2024 tentang indeks desa, dalam indeks desa membangun hanya terdapat 3 dimensi atau indikator saja yaitu social, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan dalam indeks desa membangun menggunakan 6 indikator yang wajib terpenuhi suatu desa, yaitu social, ekonomi, lingkungan, layanan dasar, aksesibilitas, dan tatakelola pemerintahan. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut target kinerja Gubernur persentasi kampung berkembang sebesar 52,5 tidak dapat terpenuhi.

Sasaran 22

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Orang Asli Papua (OAP)

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Orang Asli Papua**” sebesar **132.08 persen** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 22 Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	74	97,74	132.08

Berdasarkan Tabel diatas Indikator Kinerja Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP ditargetkan sebesar 74%, terealisasi sebesar 99,45% dan capaian kinerja sebesar 134,09%, berdasarkan hasil perhitungan realisasi lebih tinggi dari target yang direncanakan, adapun skala penilaian berada pada kategory sangat tinggi, hal ini menunjukkan bahwa anggaran digunakan untuk kebutuhan dasar bagi orang asli Papua yang bersumber dari dana Otonomi Khusus sebesar 2,25% dari dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, 1% DAU bersifat umum (Blockgrant) untuk pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik; Peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; hal lain sesuai kebutuhan dan prioritas. 1,25% (DAU) ditentukan penggunaan (Sprsific grand) untuk membiayai Pendidikan minimal 30%, kesehatan (minimal 20%), pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan; dana tambahan infrastruktur untuk Infrastruktur perhubungan, air bersih, enegri listrik, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan.

Adapun tujuan dari penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk mengurangi ketimpangan dengan daerah lain; meningkatnya kesejahteraan masyarakat (khususnya OAP). Penerimaan dalam rangka Otsus digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua terutama OAP

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 22 Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja sesuai dengan Tupoksi	2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	73,50	91,57	124,60	74	97,74	132,08

Dilihat dari capaian indikator kinerja diatas bila dibandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun 2025 dengan 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,61%, tahun 2025 sebesar 132,08% sedangkan tahun 2024 sebesar 124,60%. Hal ini menunjukkan bahwa apabila dilihat dari pengalokasian Dana Otsus dan DTI untuk kebutuhan orang asli Papua sudah diarahkan kepada program-program yang berdampak kepada masyarakat dengan memperhatikan prioritas kebutuhan, pembagian kewenangan dan kinerja pelaksanaan dana Otsus. Berikut Tabel rekapitulasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus :

Tabel. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dana Otsus Tahun Anggaran 2025

No	Klasifikasi Belanja	Perencanaan Pagu (Rp)	Realisasi			Ket.
			Rp.	%	Capaian Output	
a. Dana Otsus yang Bersifat Umum						
1.	Belanja Administrasi Pemerintahan	151.998.512.528,00	150.843.454.086,00	99,24	99,93	
2.	Belanja Infrastruktur Sanitasi Lingkungan	199.985.900,00	199.985.900,00	100,00	100,00	
3.	Belanja Kebudayaan	2.329.765.000,00	2.329.765.000,00	100,00	100,00	
4.	Belanja Kepemudaan dan Olah Raga	6.960.423.760,00	6.921.021.470,00	99,43	99,99	
5.	Belanja Kesehatan	407.794.000,00	403.700.418,00	99,00	99,80	
6.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	8.803.753.420,00	8.775.448.750,00	99,68	99,95	
7.	Belanja Pemeberdayaan Masyarakat Adat	31.126.480.000,00	31.126.380.206,00	100,00	100,00	

8.	Belanja Pemeliharaan dan Pelestarian lingkungan	2.893.500.095,00	2.834.291.625,00	97,95	98.90	
9.	Belanja Pendidikan	11.187.834.000,00	11.187.834.000,00	100,00	100.00	
10.	Belanja Penguatan Kelembagaan	1.103.292.090,00	1.103.206.820,00	99,99	100.00	
11.	Belanja Sosial	17.437.427.207,00	17.311.679.725,00	99,28	99.50	
Total		234.448.768.000,00	233.036.768.000,00	99,40	99.82	
b. Dana Otsus yang telah Ditentukan Penggunaannya						
1.	Belanja Pendidikan	88.512.677.816,00	88.390.520.172,00	99,86	99.97	
2.	Belanja Kesehatan	179.610.567.918,00	176.583.073.313,00	98,31	99.97	
3.	Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	25.336.952.266,00	25.121.259.897,68	99,15	99.99	
Total		293.460.198.000,00	290.094.853.382,68	98,85	99.98	
c. Dana Tambahan Infrastruktur						
1.	Perhubungan	204.151.736.100,00	183.488.718.503,21	89,88	97.40	
2.	Air Bersih	16.139.500.000,00	11.451.525.830,73	70,95	95.09	
3.	Energi Listrik	14.855.648.900,00	14.364.608.163,88	96,69	100.00	
4.	Telekomunikasi	77.992.148.000,00	77.982.918.000,00	99,99	100.00	
5.	Sanitasi Lingkungan	57.250.000.000,00	54.815.515.692,79	95,75	100.00	
6.	Administrasi Pemerintahan	1.002.195.000,00	794.503.826,00	79,28	98.89	
Total		371.391.228.000,00	342.897.790.016,61	92,33	98.56	
Jumlah Total (a+b+c)		899.300.194.000,00	866.029.411.399,29	96,30	99,45	

Adapun Kegiatan fisik strategis yang berdampak langsung kepada Orang Asli Papua (OAP) Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Sumber Dana Otonomi Khusus yang bersifat Umum

- 1) Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, berlokasi di Kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, dengan pagu anggaran sebesar 2.067.053.000

Dalam rangka Mendukung Afirmasi Kebijakan Pemerintah sebagai bentuk implementasi keberpihakan pemerintah dalam memperkuat peran serta Orang Asli Papua dalam pembangunan ekonomi daerah melalui peluang pengadaan barang/ jasa pemerintah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Risiko Pengadaan dengan Membekali peserta dengan pengetahuan mengenai potensi risiko yang dapat muncul dalam proses pengadaan

barang/jasa pemerintah, baik dari aspek hukum, administrasi, teknis, maupun keuangan. Deskripsi Singkat Peningkatan kapasitas SDM Pelaku Usaha OAP dengan dilaksanakannya kegiatan Bimtek Dan Sosialisasi bagi pelaku usaha Papua yaitu : Pelaksanaan Bimtek Mitigasi Resiko proses pengadaan Barang/Jasa bagi Pelaku Usaha OAP di 2 wilayah adat Saireri (Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen dan Waropen) yang dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor dengan jumlah peserta 200 orang Pelaku Usaha OAP, Wilayah Mamta (Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura) yang dilaksanakan di Kota Jayapura dengan jumlah pelaku usaha OAP 200 orang serta Kabupaten Sarmi sebanyak 100 orang pelaku usaha OAP, sehingga total sasaran pelaku usaha OAP sebanyak 500 orang.

Kegiatan Bimtek Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa bagi OAP



- 2) Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa, Lokasi kegiatan di Kabupaten Jayapura dan Sarmi, dengan anggaran sebesar Rp. 1.157.287.000.

Dalam rangka Mendukung Afirmasi Kebijakan Pemerintah sebagai bentuk implementasi keberpihakan pemerintah dalam memperkuat peran serta Orang Asli Papua dalam pembangunan ekonomi daerah melalui peluang pengadaan barang/jasa pemerintah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Risiko Pengadaan dengan Membekali peserta dengan pengetahuan mengenai potensi risiko yang dapat muncul dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dari aspek hukum, administrasi, teknis, maupun keuangan, Peningkatan kapasitas SDM Pelaku Usaha OAP dengan dilaksanakannya kegiatan BIMTEK Dan SOSIALISASI bagi pelaku usaha Papua yaitu Pelaksanaan Bimtek Katalog elektronik bagi pelaku usaha OAP

sebanyak 200 orang yang dilaksanakan di Kota Jayapur

**Sosialisasi Katalog Elektronik)
Kegiatan Bimtek Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pelaku Usaha OAP**



- 3) Kegiatan Pelatihan Aplikasi SPSE versi 4.5 bagi Pelaku Usaha OAP, Lokasi Kota Jayapura dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.322.488.000, sasaran kelompok adalah Pelaku Usaha OAP sebanyak 200 orang
Pelatihan Aplikasi SPSE versi 4.5 bagi Pelaku Usaha OAP ini bertujuan agar melatih Pelaku Usaha OAP agar memahami pengadaan barang/jasa Pemerintah secara online/berbasis aplikasi SPSE sesuai dengan amanat Peraturan Presiden nomor 46 Tahun 2025

Pelatihan Pengadaan secara Elektronik (SPSE Versi 4.5)



- 4) Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, berlokasi di Kampung Maruway Distrik Yokari Kabupaten Jayapura, Kampung Armopa Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi, Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kab. Jayapura, Kampung Sewan Distrik Sarmi Timur Kab. Sarmi & Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kab. Jayapura, dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 1.130.893.990, sasaran kelompok Masyarakat : Kelompok Tani Hutan (KTH) / Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Kampung Maruway Distrik Yokari Kabupaten Jayapura, Kampung Armopa Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi, Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kab. Jayapura, Kampung Sewan Distrik Sarmi Timur Kab. Sarmi & Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kab. Jayapura, sebanyak 123 orang

Pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial tahun 2025 di Provinsi Papua meliputi pelatihan pengolahan minyak kayu putih, pelatihan peningkatan kapasitas pengelolaan hutan sagu, pelatihan pengolahan HHBK buah mangrove, serta pembagian bibit produktif siap salur yang secara keseluruhan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, mentransfer teknologi sederhana, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, memperkuat potensi ekonomi lokal, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial



- 5) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, Lokasi di Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 317.033.520, sasaran kelompok Masyarakat adalah kelompok Tani Hutan (KTH) Kampung Doyo Lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, sebanyak 30 orang
Pelatihan pembuatan minyak kayu putih dilaksanakan di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, disertai dengan penyerahan bantuan alat penyulingan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) setempat

sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat kampung dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu guna mendorong kemandirian dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS



- 6) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, Lokasi kegiatan Kampung Niwerawar Distrik Pantai Barat Kab. Sarmi, dengan pagu anggaran sebesar 239.796.325, sasaran kelompok Masyarakat adalah KTH Fasi di Kampung Niwerawar Distrik Pantai Barat Kab. Sarmi, sebanyak 30 orang OAP

Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan di Kampung Niwerawar, Distrik Pantai Barat, dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2025 dan difokuskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kampung Niwerawar melalui penguatan kelembagaan KTH Fasi serta pemulihan fungsi kawasan hutan sagu dengan penyediaan sarana pendukung, penanaman, dan pemeliharaan tanaman, serta pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS



- 7) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pengelolaan DAS, Lokasi kegiatan di Kampung Niwerawar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Mamberamo Raya, dengan pagu anggaran sebesar 150.000.000, Sasaran kelompok Masyarakat adalah Kelompok Tani Hutan Kampung Niwerawar, Distrik Pantai Barat, Kabupaten Mamberamo Raya, sebanyak 25 orang OAP Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (CDKLH) Mamberamo Raya melaksanakan kegiatan penanaman dan pengelolaan hutan sagu melalui pendampingan Kelompok Tani Hutan, penanaman pohon sagu, serta pemberian bantuan alat pengolahan sagu berupa mesin parut sagu guna mendukung keberhasilan tumbuh tanaman, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kampung.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS



b. Sumber Dana Otonomi Khusus yang tidak di tentukan penggunaannya

- 1) Pengiriman obat PKD dan Obat Program (AIDS, TB, Malaria, Kusta,dll) ke 9 kabupaten/kota untuk didistribusikan ke Puskesmas di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori. Kepada yang melakukan pemeriksaan dan mendapatkan obat dari Puskesmas, pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 331.200.000

Pengiriman Obat PKD dan Obat program



- 2) Pengadaan Obat Buffer Stock dan Program yang didistribusikan ke Dinkes Kab/kota serta dikirim ke Puskesmas untuk melayani masyarakat termasuk Masyarakat Papua dan non Papua yang berobat ke Puskemas di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Waropen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori. Dengan katergori 1 paket obat program, 2 paket buffer stock, 1 paket obat gizi, 1 paket obat anak, 1 paket obat kesehatan ibu dan 1 paket obat program, pagu anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan obat sebesar Rp. 1.393.172.500

Pengiriman Obat Buffer Stock dan program



Penyediaan Paket Persalinan Untuk Ibu Hamil Dan Bayi Baru Lahir ini merupakan salah satu kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dengan Menyediakan paket persalinan untuk ibu hamil dan bayi baru lahir untuk Kesehatan Ibu dan Bayi selama masa persalinan dan kehamilan. di distribusikan ke puskesmas, yang tersebar di 8 Kabupaten dan 1 Kota, jumlah OAP, paket persalinan sebanyak 200 orang ibu Hamil dan Bayi baru lahir, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.000.000,-

Paket persalinan dan baju bayi baru lahir



- 3) Kegiatan Pengadaan Makanan Tambahan untuk anak usia 1 sampai 5 Tahun keatas dalam kategori Stunting. Tujuan Pemberian makanan tambahan (PMT) adalah untuk memperbaiki status gizi anak dan mencegah risiko stunting secara berkelanjutan, pemberian PMT dilakukan oleh dinas Kesehatan melalui Puskemas sebanyak 12.500 Dus Susu yang dibagikan ke pada 12.500 anak Papua yang tersebar di tersebar di 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan pagu anggaran sebesar 1.500.000.00

Paket Pengadaan Makanan Tambahan



- 4) Pengadaan Obat-Obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura, dengan pagu anggaran sebesar 14.282.574.473, kelompok sasaran Masyarakat bagi pasien masyarakat OAP dan Non OAP. Tujuan pengadaan obat-obatan di RSUD Jayapura adalah ****menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan****, sehingga pelayanan medis kepada pasien dapat berjalan ****efektif, tepat waktu, dan berkesinambungan****, serta mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pengadaan Obat-Obatan di RSUD Jayapura



- 5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, Lokasi Kampung Kiren, Kampung Armopa, dan Kampung Rotea yang berada di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, sasaran kelompok masyarakat adalah KTH Bwontut Makur di Kampung Kiren, KTH Armopa Lestari di Kampung Armopa, dan KTH Rotea Namenah di Kampung Rotea, sebanyak 45 orang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 256.695.875. Kegiatan dilaksanakan pada tiga lokasi di Distrik Bonggo, yaitu Kampung Kiren berupa pemeliharaan tahap II demplot tanaman gaharu (*Aquilaria filaria*) seluas 1 ha melalui penyulaman, penyiangan, dan pendangiran sebanyak 350 bibit oleh KTH Bwontut Makur, Kampung Armopa berupa penanaman mangrove jenis *Rhizophora* sp seluas 1 ha oleh KTH Armopa Lestari, serta Kampung Rotea berupa pengembangan demplot tanaman matoa seluas 1 ha oleh KTH Rotea Namenah.

Pemberdayaan Masyarakat penanaman bibit pohon



- 6) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, Lokasi di Kampung Marawi Distrik Kepulauan Ambai, Kampung Menawi Distrik Angkaisera, dan Kampung Mantembu Distrik Anotauerei, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebanyak 75 orang kelompok Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 360.175.000. Kegiatan yang dilaksanakan KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen dengan sumber dana Otonomi Khusus meliputi pengadaan berbagai jenis bibit tanaman kehutanan dan mangrove, penyediaan papan nama dan peralatan pertanian, penyerahan sarana pendukung rehabilitasi hutan pantai kepada masyarakat, Pembangunan

- 7) gazebo dan toilet jasa lingkungan wisata, jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan arsitektur, serta pelaksanaan rehabilitasi hutan pantai/mangrove seluas 1 hektare di Kampung Marawi, Menawi, dan Mantembu.



Pengadaan Jenis Bibit dan Pembangunan gazebo

- 8) Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS, Lokasi Kampung Mosso, Distrik Muara Tami; Kampung Skouw Mabo, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura; dan wilayah lain di Kabupaten Jayapura. Sebanyak 150 orang Kelompok Tani Hutan Papepa dan Kelompok masyarakat kampung, dengan alokasi pagu sebesar Rp. 286.475.200

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan kelompok tani hutan di Distrik Muara Tami, dilanjutkan dengan penanaman agroforestry seluas ±6 Ha menggunakan tanaman kayu kayuan dan MPTS. Kegiatan meliputi pengadaan sarana prasarana, pembersihan lahan, pembuatan lubang tanam, penanaman, serta pemeliharaan tanaman tahun berjalan. Selain itu, dilakukan koordinasi dan konsultasi pengelolaan hutan adat dengan Pemerintah Kota Jayapura dan Balai Perhutanan Sosial, pembinaan Kelompok Masyarakat Mitra Polhut, survei calon lokasi hutan adat, serta pendokumentasian dan pelaporan kegiatan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.



- 9) Pengadaan Ternak Babi di Kabupaten Waropen, kepada 2 kelompok peternak, OAP (Kelompok Soma Raiwa dan Kelompok Rodo Fabo) jumlah penerima manfaat 11 OAP (Kelompok Soma Raiwa) dan 13 OAP (Kelompok Rado Fabo). Ternak babi sejumlah 48 ekor (8 ekor jantan dan 40 ekor betina) telah didistribusikan ke 2 kelompok peternak di Kabupaten Waropen masing-masing kelompok memperoleh 22 ekor ternak babi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.920.000

Penyerahan Ternak Babi



- 10) Pengadaan Pakan Ternak Babi Fase Grower di Kabupaten Waropen, kepada 2 kelompok peternak OAP (Kelompok Soma Raiwa dan Kelompok Rodo Fabo). Pakan Ternak Babi Fase Grower sejumlah 1.300 Kg telah didistribusikan/diserahkan kepada 2 (dua) kelompok peternak di Kabupaten Waropen masing-masing kelompok memperoleh 650 kg pakan ternak babi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 25.090.000

Penyerahan Pakan Babi



- 11) Pengadaan Ternak Babi di Kabupaten Jayapura Kampung Ayapo dan Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur kepada 2 kelompok peternak OAP (Kelompok Ayapo dan Kelompok Nolakla). Ternak babi sejumlah 48 ekor (8 ekor jantan dan 40 ekor betina) telah didistribusikan ke 2 kelompok peternak di Kabupaten Jayapura masing-masing kelompok memperoleh 24 ekor ternak babi , dengan pagu anggaran sebesar Rp. 205.920.000

Penyerahan Ternak Babi



Pengadaan Pakan Ternak Babi Fase Grower di Kabupaten Jayapura Kampung Ayapo dan Kampung Nolakla Distrik Sentani Timur, kepada 2 kelompok peternak OAP (Kelompok Ayapo dan Kelompok Nolakla). Pakan Ternak Babi sejumlah 1.300 Kg telah didistribusikan ke 2 kelompok peternak di Kabupaten Jayapura masing-masing kelompok memperoleh 650 kg, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.090.000

Penyerahan Pakan Babi



- 12) Pengadaan Ternak Sapi (ABT), Lokasi Kabupaten Keerom, sasaran kelompok Masyarakat 3 (tiga) kelompok peternak di Kabupaten Keerom yaitu : 1) Kelompok Tani Workwana di Distrik Arso; 2) Kelompok Tani Suka Maju di Distrik Arso Barat; 3) Kelompok Tani Nusantara di Distrik Arso Barat. Ternak Sapi sejumlah 40 ekor (4 ekor jantan berumur 1,5 - 2 tahun dan 36 ekor betina umur 1 - 1,5 tahun) telah didistribusi/diserahkan kepada 3 (tiga) kelompok peternak sapi di Kabupaten Keerom. Jumlah ternak sapi yang diterima per masing-masing kelompok sebagai berikut : 1) Kelompok Tani Workwana = 10 ekor (1 ekor jantan dan 9 ekor betina); 2) Kel Tani Suka Maju menerima = 15 ekor (2 ekor jantan dan 13 ekor betina); 3) Kel Tani Nusantara menerima 15 ekor (1 ekor Jantan dan 14 ekor betina), dengan aloasi anggaran sebesar Rp. 474.000.000

Penyerahan Tenak Sapi



- 13) Pengadaan Pupuk NPK Plus, Lokasi Kabupaten Jayapura dan Biak Numfor, Sasaran kelompok Masyarakat : Kelompok Nayuda (Kamp. Distrik Brink Kabupaten Jayapura; kelompok Ibe Usu (kamp. demoikati Kabupaten Jayapura); kelompok Saribi (kampung Saribi Distrik Orkeri Biak Numfor); kelompok Insar Dori Kamp Pomdori Distrik Numfor Barat), dan Kelompok Bakibo (kamp Asaryendi distrik Numfor Timur), jumlah OPD penerima manfaat sebanyak 377 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 80.000.000. Kegiatan ini adalah Kegiatan Pemberian bantuan berupa Pupuk Phonska NPK Plus kepada kelompok Masyarakat untuk membantu pertumbuhan tanaman kelompok tani.

Pemberian Bantuan Pupuk kepada masyarakat



- 14) Pengadaan parang dan Sekop, Lokasi Kabupaten Jayapura dan Biak Numfor Sasaran kelompok Masyarakat : Kelompok Nayuda (Kamp. Distrik Brink Kabupaten Jayapura; kelompok Ibe Usu (kamp. demoikati Kabupaten Jayapura); kelompok Saribi (kampung Saribi Distrik Orkeri Biak Numfor); kelompok Insar Dori Kamp Pomdori Distrik Numfor Barat), dan Kelompok Bakibo (kamp Asaryendi distrik Numfor Timur), jumlah OPD penerima manfaat sebanyak 377 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.320.000,-

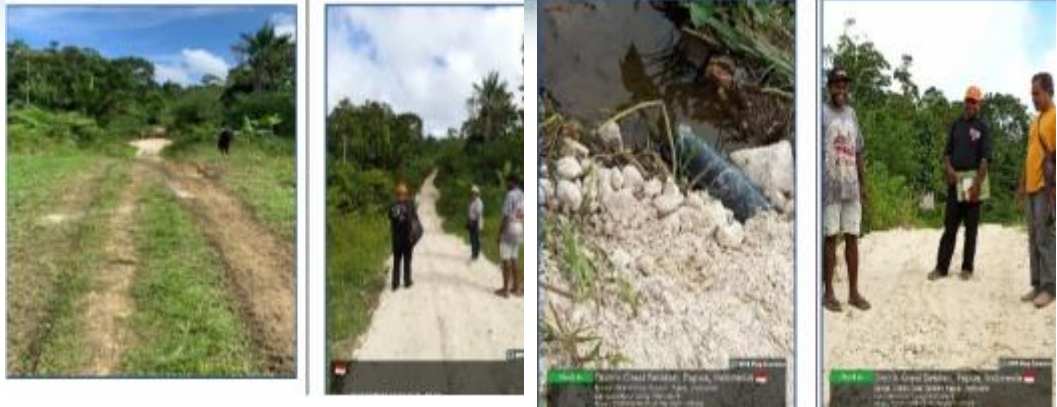
15)

Penyerahan Parang dan Sekop



- 16) Pembangunan Jalan produksi, Lokasi/koordinat 2°38'07"S 140°11'23"E, sasaran Kelompok Masyarakat Ibi Kballi, berjumlah 25 orang, dengan Lokasi sebesar Rp. 150.000.000. Kegiatan ini pembuatan Jalan produksi kakao untuk mempermudah akses petani ke lokasi dan juga pengangkutan hasil panen

Pembangunan Jalan Produksi



- 17) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (SLPHT/Sekolah Lapang Pengendalian Hama terpadu Kakao di Kampung Soimminga Distrik Ingerus Kab. Waropen), Lokasi Kampung soimminga Distrik inggerus, jumlah penerima manfaat 90 orang petani kakao, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 620.926.000. Bantuan kotak Fermentasi Kakao kepada petani kakao yang terbagi menjadi tiga kelompok , masing- masing kelompok mendapatkan dua (2) Unit Kotak Fermentasi Kakao, Kampung Soimminga Distrik inggerus Kab.Waropen. Bantuan APK kepada petani kakao yaitu parang biasa dengan jumlah 90 unit, di berikan kepada petani yang terbagi menjadi 3 kelompok .Masing - masing kelompok mendapatkan 30 APK/ Parang . Kampung Soimminga Distrik inggerus Kab.Waropen .





Bantuan Kotak Fermentasi kakao kepada petani

- 18) Pengembangan Kelapa Dalam 50 Ha (Pengadaan Bibit Kelapa siap Salur (batang). Dengan pagu anggaran sebesar 202.500.000. Pengembangan Kepala seluas 50 Ha kepada kelompok tani di kabupaten Biak Numfor melalu paket bibit kelapa sebanyak 5,000 Batang untuk 3 (tiga) kelompok tani

Pengembangan kelapa dalam



- 19) Pengembangan Kelapa Dalam 50 Ha (Bantuan Bibit Kakao 10.000 Batang di Kabupaten Jayapura) kepada kelompok tani WASI NANDAY dan Kelompok Tani SNGINKU, sebanyak 50 KK, dengan pagu sebesar Rp. 254.000.000. Pengembangan Kakao seluas 10 Ha di Kabupaten Jayapura, Kelompok Tani di Kampung Sabron Yaru menerima paket Bibit Kakao siap tanam sebanyak 10.000 Batang dan 60 Paket peralatan Kerja berupa Parang dan Sekop, serta Pupuk NPK untuk Tanaman Kakao sebanyak 1.500 Kg.

Pengembangan Kakao dan Penyerahan paket alat Kerja



- 20) Bantuan Solar Dryer sebanyak 5 unit kelompok masyarakat OAP sebanyak 50 petani kelapa di Kabupaten Biak Numfor dengan pagu anggaran sebesar 100.000.000.

Bantuan Solar Dryer rumah pengering



- 21) Pengadaan Saprodi Pakan dan Benih Ikan Laut, Lokasi Kabupaten Yapen, Kampung Tobati, Enggros, Nafri, Kayo Pulau - Kota Jayapura, sasaran kepada kelompok Masyarakat pembudidaya OAP sebanyak 18 orang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 450.000.000. Kegiatan ini berupa Penyerahan sarana produksi perikanan budidaya untuk pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam peningkatan nilai produksi perikanan budidaya ikan di laut

Pengadaan Saprodi Pakan dan Benih Ikan Laut



- 22) Pengadaan Saprodi Rumput Laut kepada pembudidaya OAP sebanyak 35 orang yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten kepulauan Yapen. Pengadaan Saprodi Rumput Laut, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 700.000.000

Pengadaan Saprodi Rumput Laut



c. Sumber Dana Tambahan Infrastruktur

- 1) Peningkatan Jalan Wardo – Duber, Lokasi Kampung Wardo- Duber Distrik Biak Barat Kabupaten Biak Numfor dengan Pagu anggaran sebesar 8.980.000.000

Peningkatan Jalan Wardo–Duber sepanjang 3 Km bukan sekadar pembaruan fisik, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas sosial-ekonomi, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di distrik Biak Barat. Secara umum, proyek ini bertujuan memperlancar mobilitas, mengurangi hambatan logistik, dan membuka peluang ekonomi baru

Kondisi Fisik Sebelum Pembangunan



Kondisi Fisik setelah Pembangunan



- 2) Pengendalian Banjir Lanjutan Tahapan III, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000, Lokasi Distrik Sentani Barat Dosai Kabupaten Jayapura. royek Pengendalian Banjir Lanjutan Tahapan III di Sentani Barat diarahkan untuk mengendalikan aliran air, memperbaiki drainase, melindungi permukiman, mengurangi risiko banjir, serta mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat setempat terhadap bencana banjir yang berulang setiap musim hujan

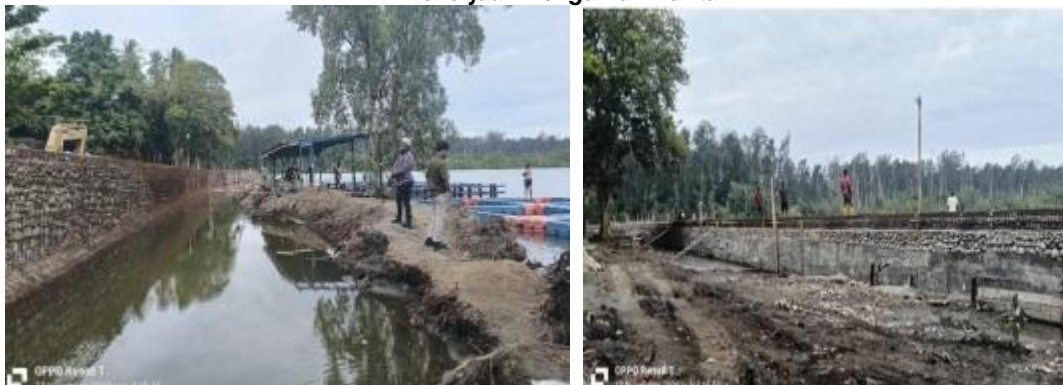
Pekerjaan Pengendalian Banjir Tahap III





- 3) Pekerjaan Pengamanan Pantai, dengan pagu anggaran sebesar 988.000.0000, Lokasi Kampung Armopa Distrik Bonggo. Pekerjaan Pengamanan Pantai di Kampung Armopa diarahkan untuk melindungi garis pantai dari abrasi dan erosi akibat gelombang laut, menjaga permukiman dan infrastruktur di pesisir, serta meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan struktur pengendali daya rusak air laut

Pekerjaan Pengaman Pantai



Sasaran 23

Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea dan Indonesia-Palau merupakan salah satu prioritas strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Papua. Wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea dan Indonesia-Palau yang berada di wilayah Provinsi Papua memiliki karakteristik geografis yang relatif terpencil, aksesibilitas yang terbatas, serta keterbatasan infrastruktur dan layanan dasar. Oleh karena itu, percepatan pembangunan di wilayah perbatasan di Provinsi Papua, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat integrasi wilayah dalam kerangka pembangunan di Provinsi Papua.

Untuk mengetahui tingkat kehidupan masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan di Provinsi Papua, dilakukan pengukuran terhadap capaian sasaran **Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan**. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sasaran tersebut memperoleh **capaian sebesar 93,47 persen** dengan predikat **Sangat Berhasil**. Penilaian capaian ini didasarkan pada tiga indikator utama yang mencerminkan dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi Papua, yaitu:

1. **Rata-Rata Lama Sekolah di Wilayah Perbatasan;**
2. **Angka Harapan Hidup di Wilayah Perbatasan; dan**
3. **Pengeluaran Per Kapita masyarakat di Wilayah Perbatasan.**

Target Indikator Kinerja, Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dirinci lebih lanjut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Rata-Rata Lama Sekolah di Wilayah	Tahun	12,1	10,43	86,19%
2.	Angka Harapan Hidup di Wilayah Perbatasan	Tahun	68,6	71,32	103,96%
3.	Pengeluaran Per Kapita di Wilayah Perbatasan	Rp Juta/ Kapita	14,2	12,816	90,25%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					93,47%

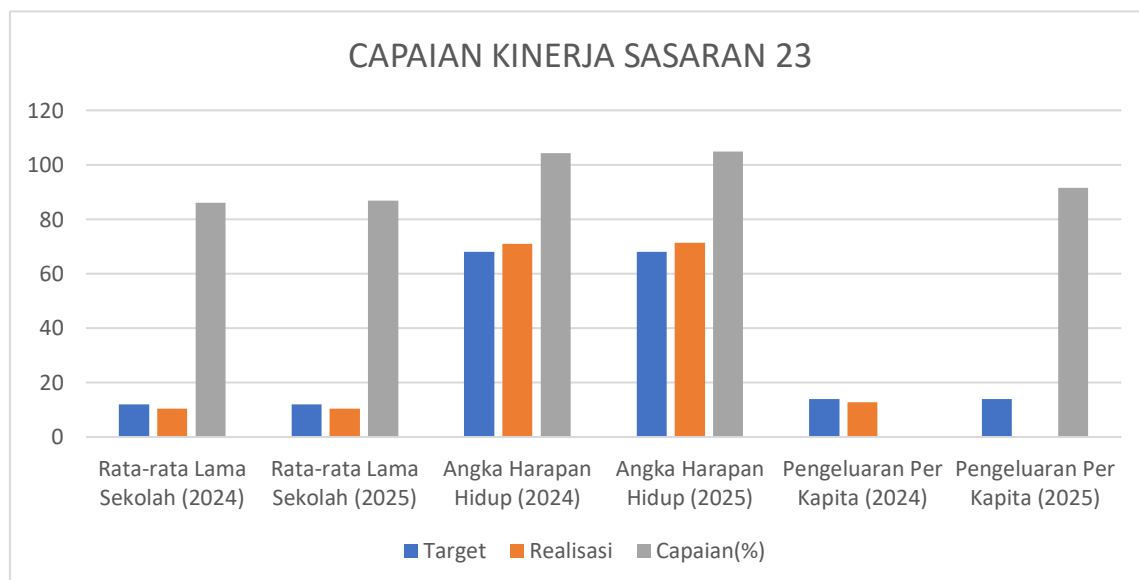
Capaian Kinerja Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan tahun 2025 sebesar **93,47 persen** lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar **91,93 persen**. Untuk lebih jelas dapat dilihat perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024-2025 sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran Tahun 2025 Untuk Tahun 2024 - 2025

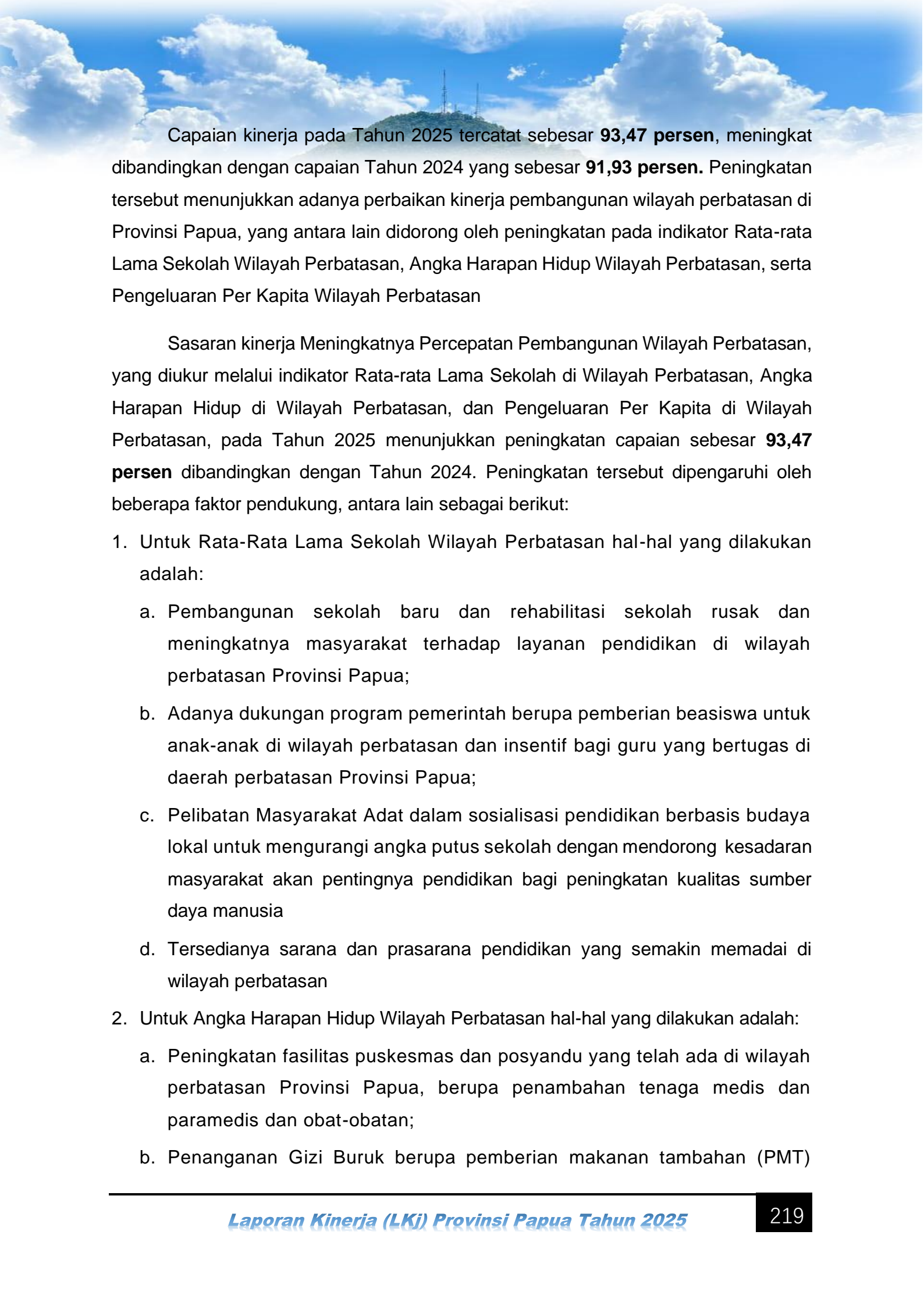
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					
			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan	Tahun	12.5	10,33	82,64%	12,1	10,43	86,19%
2.	Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan	Tahun	68.8	70,97	103,15 %	68,6	71,32	103,96%

3.	Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan	Rp Juta/Kapita	14.1	12,69	90%	14,2	12,816	90,25%
Capaian Indikator Kinerja					91,93%			93,47%

Berdasarkan tabel di atas, capaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024, sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut yang menggambarkan tren peningkatan capaian kinerja seperti terlihat di bawah ini:



INDIKATOR KINERJA	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
Rata-rata Lama Sekolah (2024)	2024	12	10.33	86.08
Rata-rata Lama Sekolah (2025)	2025	12	10.43	86.91
Angka Harapan Hidup (2024)	2024	68	70.97	104.36
Angka Harapan Hidup (2025)	2025	68	71.32	104.88
Pengeluaran Per Kapita (2024)	2024	14	12.69	90.828
Pengeluaran Per Kapita (2025)	2025	14	12.81	91.542



Capaian kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar **93,47 persen**, meningkat dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar **91,93 persen**. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja pembangunan wilayah perbatasan di Provinsi Papua, yang antara lain didorong oleh peningkatan pada indikator Rata-rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan, Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan, serta Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan

Sasaran kinerja Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan, yang diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah di Wilayah Perbatasan, Angka Harapan Hidup di Wilayah Perbatasan, dan Pengeluaran Per Kapita di Wilayah Perbatasan, pada Tahun 2025 menunjukkan peningkatan capaian sebesar **93,47 persen** dibandingkan dengan Tahun 2024. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Rata-Rata Lama Sekolah Wilayah Perbatasan hal-hal yang dilakukan adalah:
 - a. Pembangunan sekolah baru dan rehabilitasi sekolah rusak dan meningkatnya masyarakat terhadap layanan pendidikan di wilayah perbatasan Provinsi Papua;
 - b. Adanya dukungan program pemerintah berupa pemberian beasiswa untuk anak-anak di wilayah perbatasan dan insentif bagi guru yang bertugas di daerah perbatasan Provinsi Papua;
 - c. Pelibatan Masyarakat Adat dalam sosialisasi pendidikan berbasis budaya lokal untuk mengurangi angka putus sekolah dengan mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang semakin memadai di wilayah perbatasan
2. Untuk Angka Harapan Hidup Wilayah Perbatasan hal-hal yang dilakukan adalah:
 - a. Peningkatan fasilitas puskesmas dan posyandu yang telah ada di wilayah perbatasan Provinsi Papua, berupa penambahan tenaga medis dan paramedis dan obat-obatan;
 - b. Penanganan Gizi Buruk berupa pemberian makanan tambahan (PMT)

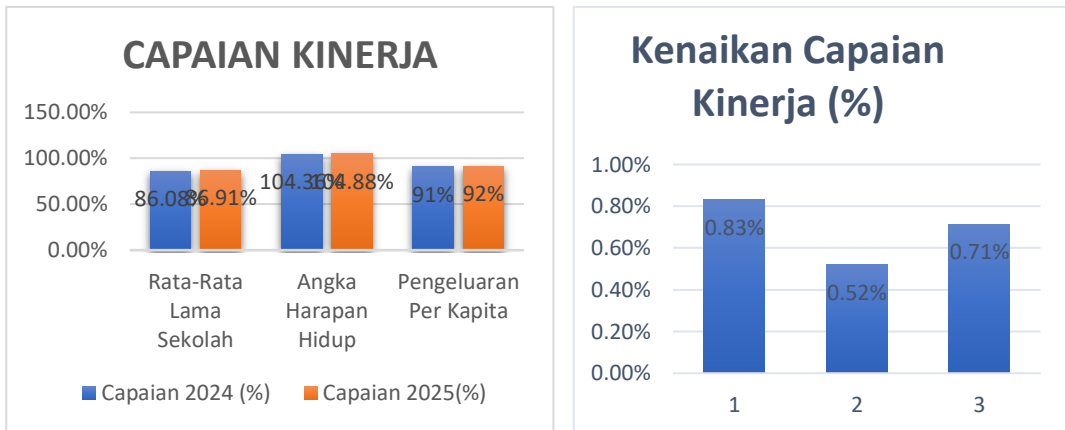


bagi balita dan ibu hamil;

- c. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pelayanan ibu dan anak serta program imunisasi
 - d. Pencegahan Penyakit Endemik berupa Vaksinasi massal dan penyediaan kelambu anti-nyamuk untuk menekan malaria
 - e. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di wilayah perbatasan
3. Untuk Pengeluaran Per Kapita Wilayah Perbatasan yang dilakukan adalah berupa:
- a. Pengembangan usaha mikro berbasis potensi lokal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbatasan;
 - b. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran kepada keluarga miskin di perbatasan;
 - c. Pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan.

NO.	U R A I A N	KETERANGAN
I.	Provinsi Papua	
1.	Kabupaten Jayapura	
2.	Kabupaten Keerom	Memiliki wilayah perbatasan
3.	Kabupaten Sarmi	
4.	Kabupaten Biak Numfor	
5.	Kabupaten Supiori	Memiliki wilayah perbatasan
6.	Kabupaten Mamberamo Raya	
7.	Kabupaten Waropen	
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	
9.	Kota Jayapura	Memiliki wilayah perbatasan

Lebih lanjut ditampilkan capaian setiap indikator kinerja tersebut sebagaimana pada grafik berikut ini:



Grafik Perbandingan Capaian Sasaran Meningkatnya Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan Tahun 2024 - 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024 (%)	Capaian 2025 (%)	Kenaikan (%)
1	Rata-Rata Lama Sekolah	12.1	10.43	86,64%	86,19%	0.83%
2	Angka Harapan Hidup	68.6	71.32	103,15%	103,96%	0.52%
3	Pengeluaran Per Kapita	14.2	12.816	90,%	90,25%	0.714%

Sasaran 24

Meningkatnya Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya bantuan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**” sebesar **74.03%** persen dengan predikat “**Cukup Berhasil**”, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui 2 (Dua) Indikator dengan Target Indikator kinerja, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 24 Tahun 2025

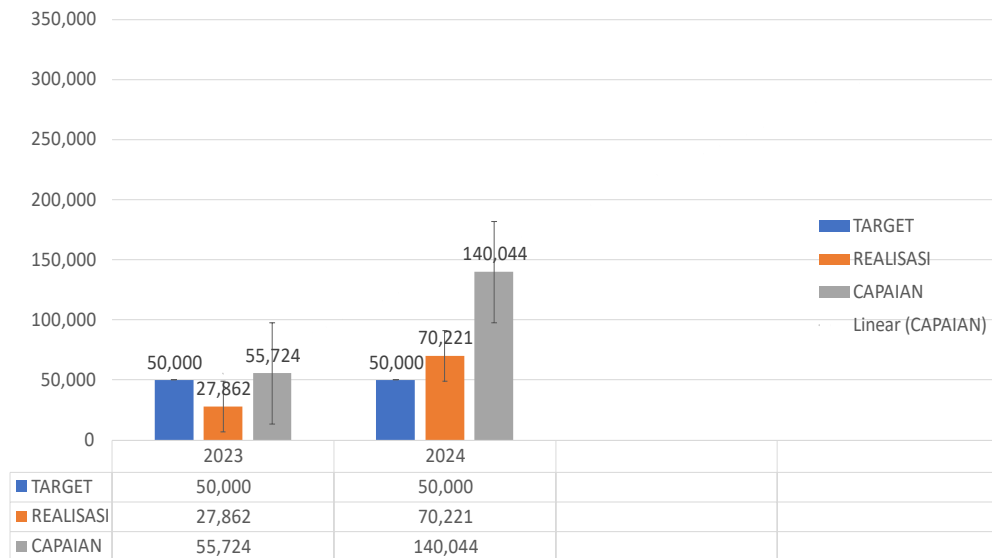
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Cakupan Warga KAT yang menerima kesejahteraannya (diberdayakan)	Ribu Orang Per Tahun	70	33.43	47,75%
2.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu Orang Per Tahun	70	70.22	100,31%
Capaian Kinerja Sasaran					74,03%

Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja yaitu Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 24 untuk Tahun 2024-2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Cakupan Warga KAT yang menerima kesejahteraan (diberdayakan)	Ribu orang per Thn	60	33.43	55,71	70	33.43	47,75
2.	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Ribu orang per Thn	60	70.22	117,04	70	70.22	100,31
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					86,37 %			74,03%

Grafik 3.14 Capaian Indikator Meningkatnya Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

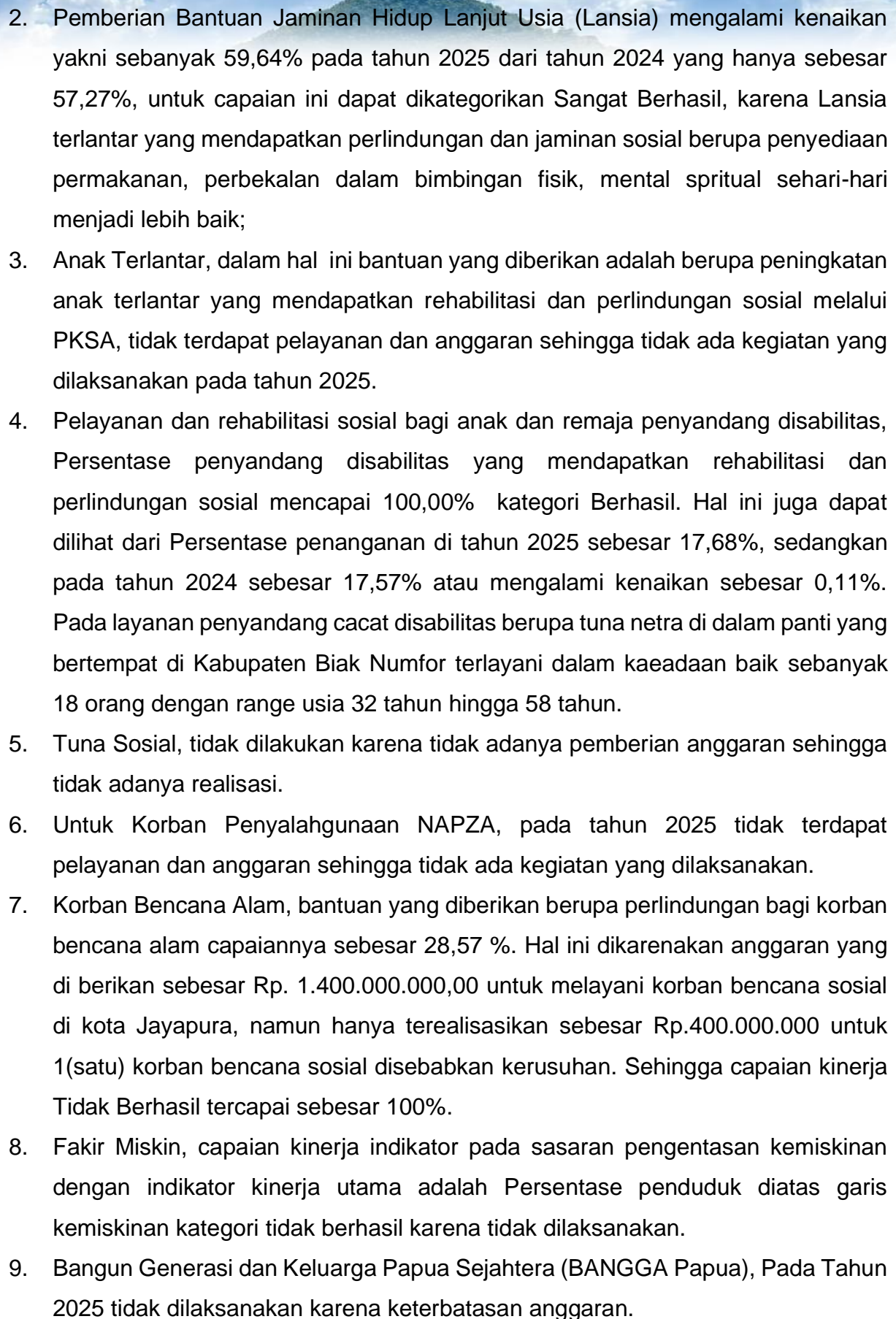



Sumber : Dinas Sosial, Kependudukan dan P3A, Tahun 2025 (diolah)

Indikator Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial dengan target sebanyak 70.000 orang yang direncanakan untuk menerima bantuan, terealisasi sebanyak 33.43 orang pada tahun 2025 atau sekitar 117,04% (persen). Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2025 mengalami Kenaikan sekitar 84,716% (persen) dari tahun 2024 yakni sebanyak 42.359 orang. Kenaikan indikator sebesar 117,04% (persen) ini terjadi karena Jumlah orang yang memperoleh bantuan sosial bertambah dan hal ini juga merupakan dampak dari perubahan kebijakan anggaran oleh pemerintah pusat dan dukungan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota serta *stakeholders* lainnya seperti para pendamping yang tersebar di Kabupaten/Kota.

PMKS yang memperoleh bantuan sosial ini didapat dari delapan (8) Kelompok PMKS yang tertangani di Provinsi Papua yakni:

1. Komunitas Adat Terpencil (KAT), untuk KAT target sebanyak 33,43% pada tahun 2025 yang diberikan melalui kegiatan pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial diberikan kepada 1.428 Kepala Keluarga pada Kabupaten yang merupakan lokasi daerah KAT dikategorikan Sangat Berhasil karena target tercapai 100% (persen).

- 
2. Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Lanjut Usia (Lansia) mengalami kenaikan yakni sebanyak 59,64% pada tahun 2025 dari tahun 2024 yang hanya sebesar 57,27%, untuk capaian ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil, karena Lansia terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berupa penyediaan permakanan, perbekalan dalam bimbingan fisik, mental spritual sehari-hari menjadi lebih baik;
 3. Anak Terlantar, dalam hal ini bantuan yang diberikan adalah berupa peningkatan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial melalui PKSA, tidak terdapat pelayanan dan anggaran sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.
 4. Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja penyandang disabilitas, Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial mencapai 100,00% kategori Berhasil. Hal ini juga dapat dilihat dari Persentase penanganan di tahun 2025 sebesar 17,68%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 17,57% atau mengalami kenaikan sebesar 0,11%. Pada layanan penyandang cacat disabilitas berupa tuna netra di dalam panti yang bertempat di Kabupaten Biak Numfor terlayani dalam kaeadaan baik sebanyak 18 orang dengan range usia 32 tahun hingga 58 tahun.
 5. Tuna Sosial, tidak dilakukan karena tidak adanya pemberian anggaran sehingga tidak adanya realisasi.
 6. Untuk Korban Penyalahgunaan NAPZA, pada tahun 2025 tidak terdapat pelayanan dan anggaran sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan.
 7. Korban Bencana Alam, bantuan yang diberikan berupa perlindungan bagi korban bencana alam capaiannya sebesar 28,57 %. Hal ini dikarenakan anggaran yang di berikan sebesar Rp. 1.400.000.000,00 untuk melayani korban bencana sosial di kota Jayapura, namun hanya terealisasikan sebesar Rp.400.000.000 untuk 1(satu) korban bencana sosial disebabkan kerusakan. Sehingga capaian kinerja Tidak Berhasil tercapai sebesar 100%.
 8. Fakir Miskin, capaian kinerja indikator pada sasaran pengentasan kemiskinan dengan indikator kinerja utama adalah Persentase penduduk diatas garis kemiskinan kategori tidak berhasil karena tidak dilaksanakan.
 9. Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua), Pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.



Faktor yang menyebabkan meningkatnya indikator kinerja Cakupan PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial pada tahun 2025 ini adalah:

1. Adanya perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua.
2. Adanya Program dari Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Provinsi Papua
3. Indikator Target Pencapaian dapat dipenuhi sebesar 140,44% (persen).

Sasaran 25

Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Secara keseluruhan capaian kinerja untuk sasaran “Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana Melalui Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana” termasuk kategori **Sedang** dengan predikat “**Sangat Berhasil**”. Pencapaian sasaran ini, diukur melalui indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 25 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2	3	4	5
1.	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Rendah	Sedang	Sedang
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					Sedang

Dimana penentuan kategori tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut :

Rendah = 0 - 13 (tidak rawan bencana)

Sedang = 13,01 - 144,0 (cukup rawan bencana)

Tinggi = 144,01 - dst (rawan bencana)

$$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$$

Adapun nilai skoring IRBI Provinsi Papua untuk tahun 2025 belum dikeluarkan hasilnya dari BNPB RI. Sehingga nilai skoring IRBI Provinsi Papua untuk tahun 2025 ini masih menggunakan nilai skoring pada tahun 2024 yaitu sebesar 50 sehingga masih dikategorikan sedang atau cukup rawan bencana. Dengan rumusan penentuan skor IRBI adalah sebagai berikut :

Di bawah ini adalah data perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dengan capaian realisasi “Sedang” sebagaimana tabel berikut ini :


Tabel Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 25 untuk Tahun 2024 sd 2025

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
25	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang

untuk tahun 2025 belum dikeluarkan hasilnya dari BNPB RI sehingga nilai skoring IRBI Provinsi Papua untuk tahun 2025 ini masih menggunakan nilai skoring pada tahun 2024 yaitu sebesar 50 sehingga masih dikategorikan sedang atau cukup rawan bencana

Tabel Indeks Risiko Bencana Indonesia Khusus Provinsi Papua.

		RANKING	
NO	WILAYAH	2024	2025
1.	Jayapura	203.20	203.20
2.	Sarmi	172.50	172.50
3.	Mamberamo Raya	165.60	165.60
4.	Waropen	140.00	140.00
5.	Biak Numfor	138.40	138.40
6.	Keerom	127.20	127.20
7.	Kota Jayapura	103.94	103.94
8.	Kepulauan Yapen	93.60	93.60
9.	Supiori	92.40	92.40



Dari 9 Kabupaten/Kota yang memiliki skor IRB tinggi yang dapat dinyatakan rawan bencana di Provinsi Papua adalah

1. Kabupaten Jayapura (skor IRB = 203,20)
2. Kabupaten Sarmi (skor IRB = 172,50),
3. Kabupaten Mamberamo Raya (skor IRB = 165,60)

4. Sedangkan 7 Kab/Kota lainnya masuk dalam skor IRB sedang atau dapat dinyatakan cukup rawan bencana.

Untuk tahun 2025 jumlah kasus bencana yang terjadi ada 21 kasus yg terjadi di 8 Kab/Kota yg ada di Prov Papua, yaitu :

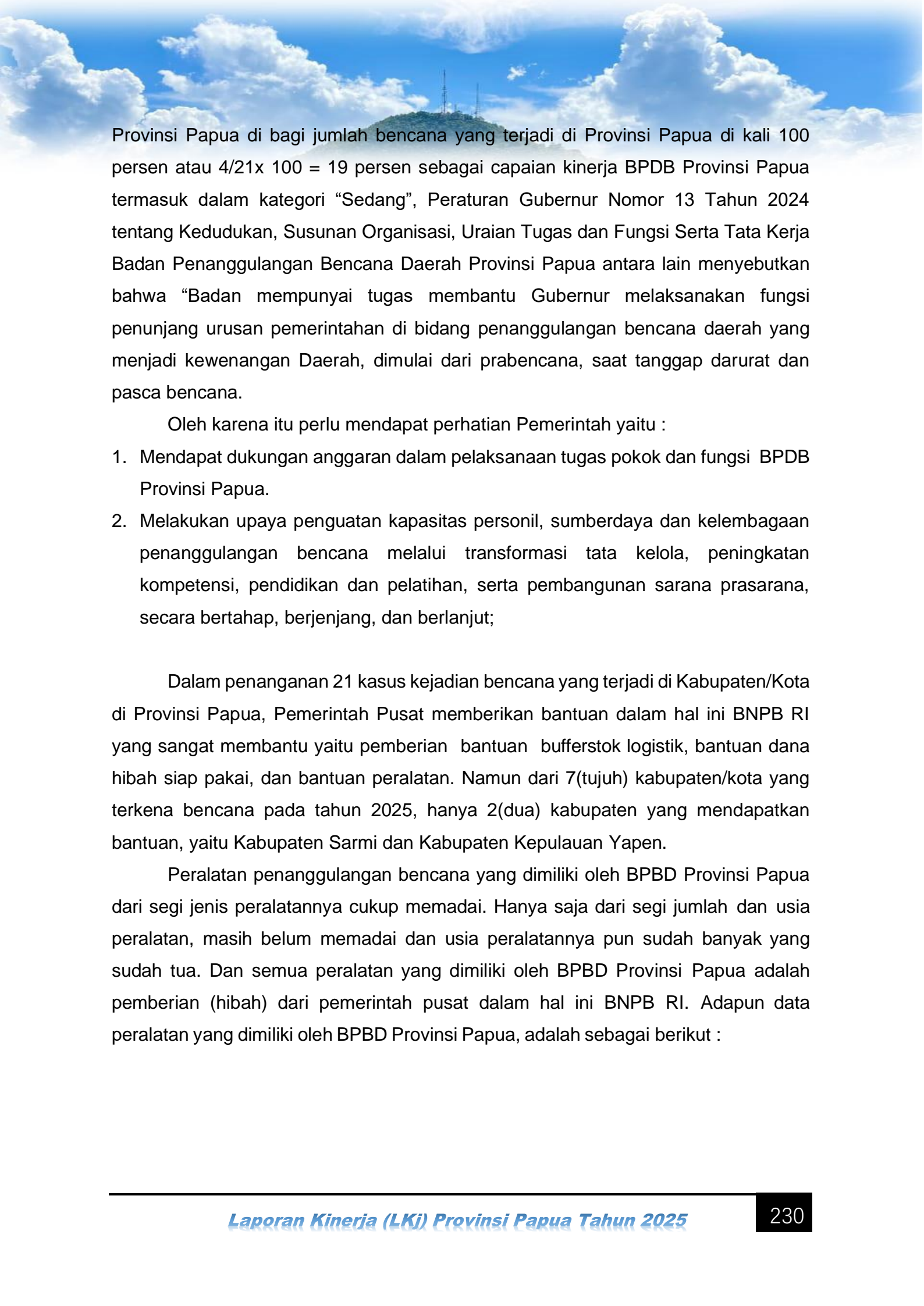
1. Kota Jypr;
2. Kab. Jypr;
3. Kab. Supiori;
4. Kab. Kep. Yapen;
5. Kab. Sarmi;
6. Kab. Keerom;
7. Kab. Waropen; dan
8. Kab. Mambromo Raya.

Jenis bencana yg terjadi adalah banjir, angin puting beliung, tanah longsor, banjir rob, dan gempa bumi.

Dari 21 kasus bencana yang terjadi, yang di tangani hanya 4 kasus yang di tangani BPBD Provinsi Papua. Dan dari 8 kab/kota yang terkena bencana, cuma 3 kab yg ditangani yaitu :

1. Kab. Sarmi;
2. Kab. Supiori; dan
3. Kab. Mamberamo Raya.

Hal ini disebabkan kemampuan anggaran yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua masih minim, Selain itu juga jarak yang menyulitkan untuk ditempuh. Bantuan yang diberikan berupa bantuan logistik dan juga peminjaman peralatan penanggulangan bencana antara lain : tenda, mobil toilet, dan matras. Bila dihitung kinerja BPDB Provinsi Papua diukur melalui jumlah bencana yang tertangani di



Provinsi Papua di bagi jumlah bencana yang terjadi di Provinsi Papua di kali 100 persen atau $\frac{4}{21} \times 100 = 19$ persen sebagai capaian kinerja BPDB Provinsi Papua termasuk dalam kategori “Sedang”, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua antara lain menyebutkan bahwa “Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dimulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Oleh karena itu perlu mendapat perhatian Pemerintah yaitu :

1. Mendapat dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPDB Provinsi Papua.
2. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumberdaya dan kelembagaan penanggulangan bencana melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut;

Dalam penanganan 21 kasus kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam hal ini BNPB RI yang sangat membantu yaitu pemberian bantuan bufferstok logistik, bantuan dana hibah siap pakai, dan bantuan peralatan. Namun dari 7(tujuh) kabupaten/kota yang terkena bencana pada tahun 2025, hanya 2(dua) kabupaten yang mendapatkan bantuan, yaitu Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Peralatan penanggulangan bencana yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua dari segi jenis peralatannya cukup memadai. Hanya saja dari segi jumlah dan usia peralatan, masih belum memadai dan usia peralatannya pun sudah banyak yang sudah tua. Dan semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua adalah pemberian (hibah) dari pemerintah pusat dalam hal ini BNPB RI. Adapun data peralatan yang dimiliki oleh BPBD Provinsi Papua, adalah sebagai berikut :

Pada tabel dibawah ini dapat menggambarkan asset BPBD Provinsi Papua untuk tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel Sarana dan Pasarana Aset Mobilitas
Operasional Penunjang Kegiatan BPBD Provinsi
Papua 2025**

No	Golongan	Jumlah Sarana dan prasarana BPBD
A	GEDUNG	
1	Gedung kantor permanen	3
2	Gedung / Gudang	2
3	Gedung Pos jaga	1
B	SARANA MOBILITAS	
	1. Roda 4	-
	2. Roda 2	9
	3. Mobil resque Komando	2
	4. Mobil water threatment	1
	5. Mobil dapur Umum lapangan	3
	6. Mobil Truk serbaguna	2
	7. Mobil ambulance	1
	8. Perahu Speed boat/Fiber 9 Inc	5
	9. Perahu karet	3
	10. Mesin Motor temple 15 dan 60 PK	1
	11. Mesin motor temple 80 PK	3
	12. Mesin motor temple 40 PK	1
	13. Mesin motor temple 25 PK	4
	14. Mobil Komunikasi	1
	15. Mobil toilet	1
	16. Light tower portable	5
	17. Water treatmen Portabel	3
	18. Genset 2990watt/dll	4

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian BPBD Prov. Papua, 2025

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa, fase tanggap darurat akan lebih efektif jika didukung oleh ketersediaan logistik dan peralatan yang cukup, agar transisi darurat dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi bisa diakselerasi.

Provinsi Papua dengan kondisi geografisnya dan juga merupakan daerah yang memiliki banyak pulau – pulau kecil, dengan luas yang berbeda-beda serta termasuk dalam daerah yang cukup rawan bencana karena Papua secara geograpy terletak

pada Pacific Rim of fire yaitu kawasan di sekitar Lautan Pasifik yang berisiko mengalami kejadian bencana alam seperti erupsi gunung berapi dan gempa bumi, sehingga mengakibatkan sering terjadinya gempa bumi. Melihat akan kondisi tersebut BPBD Provinsi Papua sering melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan BMKG dan juga RRI melalui program talkshow kentongan yang biasanya disiarkan oleh RRI Jayapura – Papua.

BPBD Provinsi Papua bekerja sama dengan BMKG juga memiliki alat deteksi dini tsunami yang ada di 2 (dua) titik di Kota Jayapura yang dihubungkan dengan sirine peringatan tsunami, yang setiap tanggal 26 tiap bulannya sering dilakukan simulasi sirine peringatan tsunami, sebagai bagian dari pemeliharaan peralatan peringatan dini bencana tsunami.

Dibawah ini adalah data potensi bencana yang terjadi di Provinsi Papua, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Papua ini meliputi 11 (sebelas) jenis bencana yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Jenis Bencana di Provinsi Papua

No.	Jenis Bencana
1	Banjir
2	Banjir Bandang
3	Cuaca Ekstrim
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
5	Gempa Bumi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan
7	Kekeringan
8	Tanah Longsor
9	Tsunami
10	Epidemi dan Wabah Penyakit
11	Likuefaksi

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia, BNPB dan Hasil Analisis, 2020

Dengan penanganan cepat diperlukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana terkait pengurangan risiko terhadap dampak terjadinya bencana maupun terhadap potensi kejadian setiap bencana karena akan memberikan dampak berupa korban jiwa serta kerugian dan kerusakan.

Sasaran 26

Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.


Pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan daerah dan Upaya perlindungan Perempuan dan anak di Papua.

Pengarusutamaan Gender (PUG) di Papua bukan sekedar program pelengkap melainkan *strategi inti untuk menciptakan Pembangunan yang inklusif, adil dan berkelanjutan*. Di Wilayah Papua, Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi instrument krusial untuk memastikan bahwa laki-laki dan Perempuan memiliki akses manfaat yang setara terhadap hasil Pembangunan, sekaligus mengatasi tingginya angka kekerasan dan Ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di daerah tersebut.

PUG adalah Pengarusutamaan Gender, yaitu strategi Pembangunan untuk mengintegrasikan perspektif ke seluruh tahap perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta anggaran Pembangunan, sebagaimana diamanatkan Inpres No. 9 Tahun 2000 dan RPJMN 2025-2029.

Tujuannya adalah memastikan kesetaraan dalam akses, partisipasi, control, dan manfaat bagi semua kelompok Masyarakat, termasuk Perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, serta mengurangi kesenjangan gender di berbagai sektor seperti Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi. Implementasinya meliputi penyusunan regulasi terkait, pengumpulan data terpilah gender, serta penyusunan anggaran responsif gender.

Pada Sasaran ***Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak*** Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sudah tidak digunakan lagi dan ada beberapa Indikator pendukung lainnya.



Adapun faktor yang mempengaruhi Pemerintahan di Provinsi Papua pada Tahun 2023 Mengalami Restrukturisasi yaitu :

Berdasarkan Perangkat Daerah PERDA Nomor : 2 Tahun 2019 Dalam hal ini Dinas Sosial, kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami perubahan Struktur ke Perangkat Daerah yang baru Berdasarkan PERDA Nomor : 18 Tahun 2023 di lebur menjadi 2 (dua) SKPD yaitu :

1. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua

Dan pada Bulan Januari Tahun 2024 SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua sudah mulai Berkantor Sendiri.

berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua masih menggunakan data lama.

Dengan adanya Kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang baru Tahun 2024 dan terbentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Sudah ditetapkan didalam RPJMN berbagai Indeks. Indeks dari Pusat sudah tidak menggunakan perhitungan *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)* lagi, Indeks pengganti adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Pemerintah Provinsi Papua menjalankan roda Pemerintahan dengan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan menengah daerah dimasa transisi. Pada Tahun 2025 bulan..... Provinsi Papua sudah mempunyai Kepala Daerah, Gubernur terpilih yang baru. Pada Tahun 2025 juga Provinsi Papua sudah Mempunyai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang baru di bentuk adalah Unit yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan TPPO.

Secara keseluruhan capaian kinerja sasaran “Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak” sebesar **106,86** Persen dengan predikat **Sangat Berhasil**, dan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 2 (dua) indikator.

Target indikator kinerja realisasi dan capaiannya diuraikan dalam table berikut :

Tabel. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 26 Tahun 2025

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	80,3	90,03	112,11
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,3	65,70	101,61
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					106.86

Target Pengukuran Kinerja, Realisasi Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender Papua sampai dengan Tahun 2025, dipengaruhi oleh dimensi kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi terlihat meningkat dari tahun ke tahun walaupun sedikit. Namun demikian masih terdapat permasalahan di berbagai sector pembangunan, dimenesi IPM dan IPG Provinsi Papua masih berada di bawah rata-rata Nasional. Situasi ini berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia maupun di Provinsi Papua. Selanjutnya ditampilkan perbandingan antara, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja selama 2 (dua) tahun, yaitu Tahun 2023 sampai dengan 2024 . Dikarenakan Data Tahun 2024 baru keluar di Tahun 2025 dan Data Tahun 2025 belum keluar, sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel. Perbandingan Indikator Kinerja Capaian Sasaran 26
untuk Tahun 2024-2025**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	80,01	81,64	102.03	80,3	90,03	112,11
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,01	65,70	101.06	65,3	65,70	101,61
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja					101.54			106.86

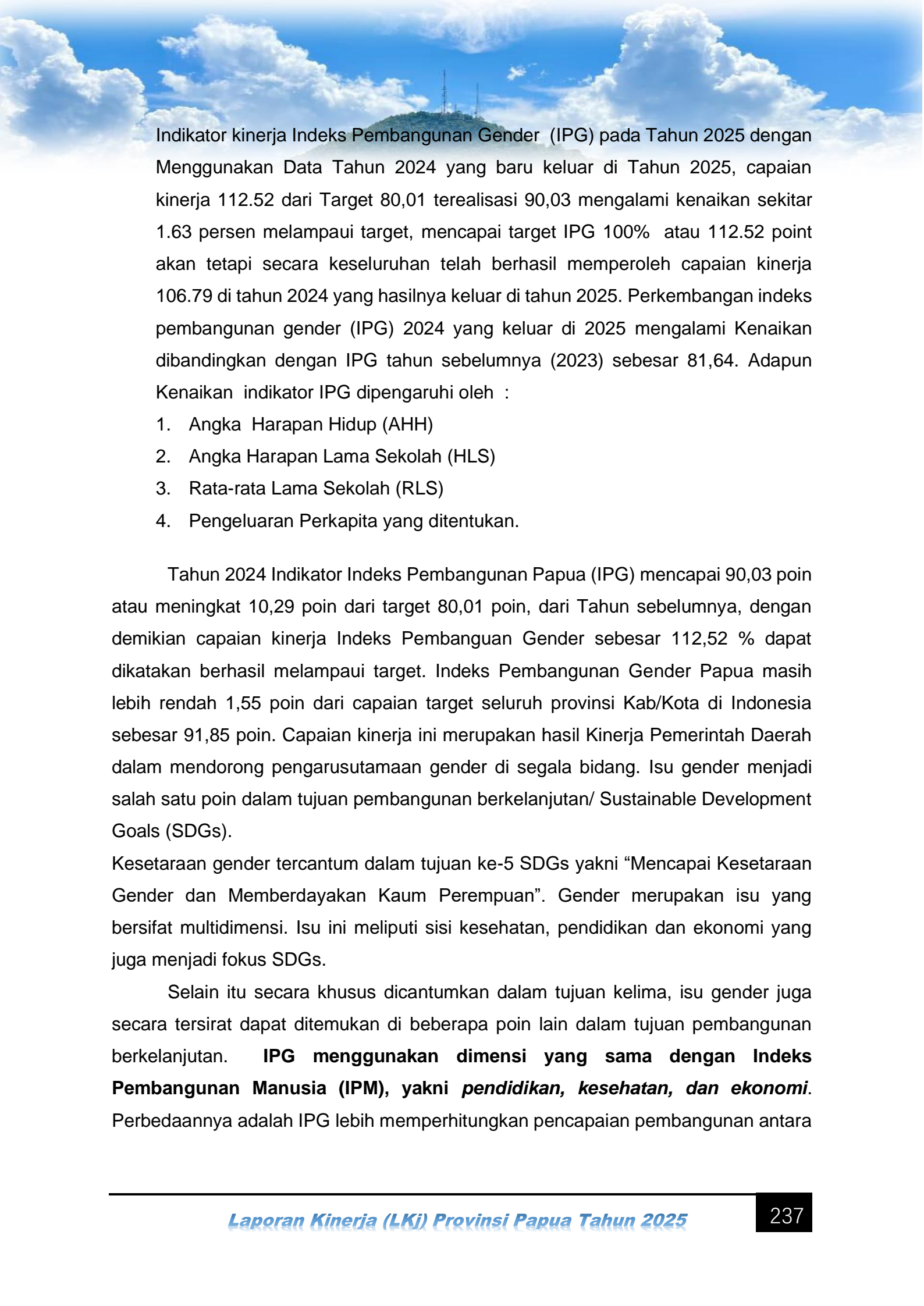
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sebelum dilakukan evaluasi target kinerja IPG 2025, perlu penjelasan/data pembuka wawasan terkait Indeks Pembangunan Gender, bahwa pengukuran realisasi IPG menggunakan data tahun 2024 dikarenakan data tahun 2025 belum keluar.

**Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Mengukur Partipasi Laki-Laki & Perempuan Dalam
Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi**

NO	Nama Kabupaten/Kota	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Kota Jayapura	94.65	94.79	94.74	94,72
2	Kabupaten Jayapura	91.19	91.73	91.61	91,63
3	Kabupaten Biak Numfor	90.25	90.79	90.96	91,36
4	Kabupaten Kepulauan Yapen	89.15	90.25	89.90	89,94
5	Kabupaten Keerom	86.32	87.46	87.92	88,13
6	Kabupaten Sarmi	82.56	83.37	83.72	84,28
7	Kabupaten Mamberamo Raya	82.11	82.81	83.31	83,53
8	Kabupaten Supiori	76.78	77.88	78.27	78,85
9	Kabupaten Waropen	70.35	70.97	71.52	72,28
10	Provinsi Papua	80.16	81.04	81.64	90,03
	Indonesia	91.27	91.63	91.85	91,85

Sumber : PMBG tahun 2024.



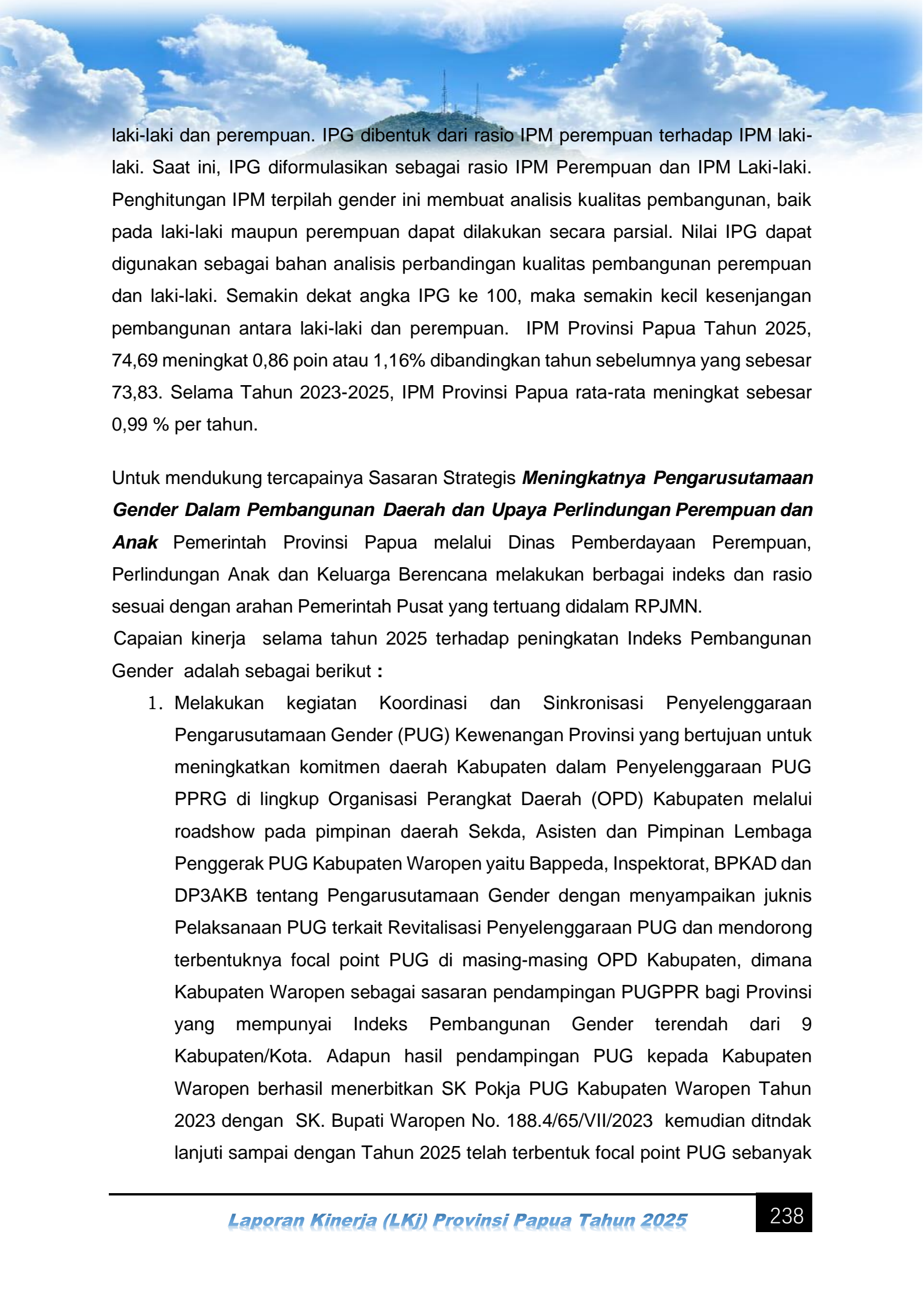
Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada Tahun 2025 dengan Menggunakan Data Tahun 2024 yang baru keluar di Tahun 2025, capaian kinerja 112.52 dari Target 80,01 terealisasi 90,03 mengalami kenaikan sekitar 1.63 persen melampaui target, mencapai target IPG 100% atau 112.52 point akan tetapi secara keseluruhan telah berhasil memperoleh capaian kinerja 106.79 di tahun 2024 yang hasilnya keluar di tahun 2025. Perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) 2024 yang keluar di 2025 mengalami Kenaikan dibandingkan dengan IPG tahun sebelumnya (2023) sebesar 81,64. Adapun Kenaikan indikator IPG dipengaruhi oleh :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)
2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
4. Pengeluaran Perkapita yang ditentukan.

Tahun 2024 Indikator Indeks Pembangunan Papua (IPG) mencapai 90,03 poin atau meningkat 10,29 poin dari target 80,01 poin, dari Tahun sebelumnya, dengan demikian capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender sebesar 112,52 % dapat dikatakan berhasil melampaui target. Indeks Pembangunan Gender Papua masih lebih rendah 1,55 poin dari capaian target seluruh provinsi Kab/Kota di Indonesia sebesar 91,85 poin. Capaian kinerja ini merupakan hasil Kinerja Pemerintah Daerah dalam mendorong pengarusutamaan gender di segala bidang. Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs).

Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs.

Selain itu secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga secara tersirat dapat ditemukan di beberapa poin lain dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. **IPG menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.** Perbedaannya adalah IPG lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara

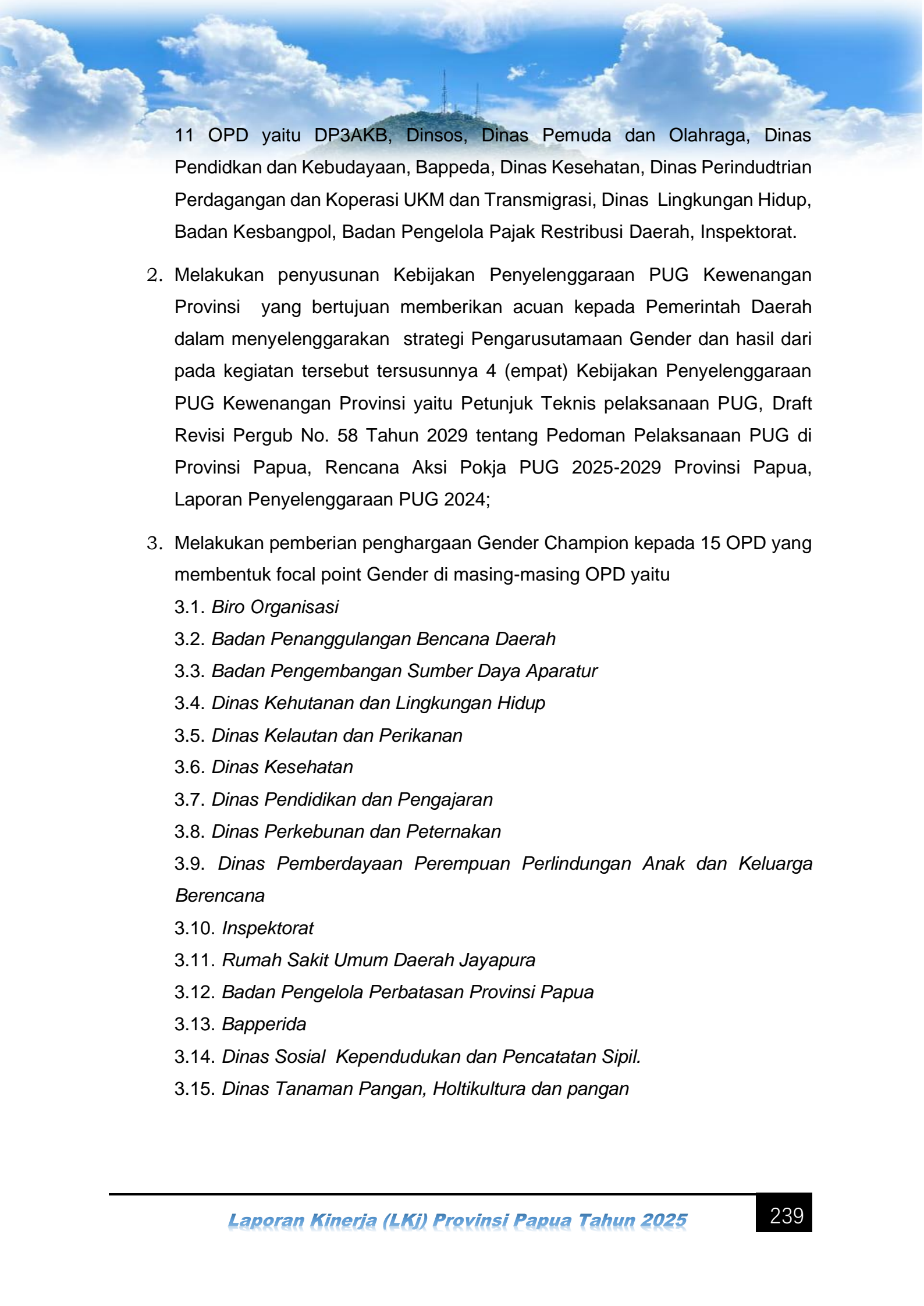


laki-laki dan perempuan. IPG dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. Saat ini, IPG diformulasikan sebagai rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki. Penghitungan IPM terpilah gender ini membuat analisis kualitas pembangunan, baik pada laki-laki maupun perempuan dapat dilakukan secara parsial. Nilai IPG dapat digunakan sebagai bahan analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. IPM Provinsi Papua Tahun 2025, 74,69 meningkat 0,86 poin atau 1,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73,83. Selama Tahun 2023-2025, IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,99 % per tahun.

Untuk mendukung tercapainya Sasaran Strategis ***Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak*** Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melakukan berbagai indeks dan rasio sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat yang tertuang didalam RPJMN.

Capaian kinerja selama tahun 2025 terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Gender adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan PUG PPRG di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten melalui roadshow pada pimpinan daerah Sekda, Asisten dan Pimpinan Lembaga Penggerak PUG Kabupaten Waropen yaitu Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan DP3AKB tentang Pengarusutamaan Gender dengan menyampaikan juknis Pelaksanaan PUG terkait Revitalisasi Penyelenggaraan PUG dan mendorong terbentuknya focal point PUG di masing-masing OPD Kabupaten, dimana Kabupaten Waropen sebagai sasaran pendampingan PUGPPR bagi Provinsi yang mempunyai Indeks Pembangunan Gender terendah dari 9 Kabupaten/Kota. Adapun hasil pendampingan PUG kepada Kabupaten Waropen berhasil menerbitkan SK Pokja PUG Kabupaten Waropen Tahun 2023 dengan SK. Bupati Waropen No. 188.4/65/VII/2023 kemudian ditindak lanjuti sampai dengan Tahun 2025 telah terbentuk focal point PUG sebanyak



11 OPD yaitu DP3AKB, Dinsos, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM dan Transmigrasi, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Kesbangpol, Badan Pengelola Pajak Restribusi Daerah, Inspektorat.

2. Melakukan penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi yang bertujuan memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan strategi Pengarusutamaan Gender dan hasil dari pada kegiatan tersebut tersusunnya 4 (empat) Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi yaitu Petunjuk Teknis pelaksanaan PUG, Draft Revisi Pergub No. 58 Tahun 2029 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG di Provinsi Papua, Rencana Aksi Pokja PUG 2025-2029 Provinsi Papua, Laporan Penyelenggaraan PUG 2024;
3. Melakukan pemberian penghargaan Gender Champion kepada 15 OPD yang membentuk focal point Gender di masing-masing OPD yaitu
 - 3.1. *Biro Organisasi*
 - 3.2. *Badan Penanggulangan Bencana Daerah*
 - 3.3. *Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur*
 - 3.4. *Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
 - 3.5. *Dinas Kelautan dan Perikanan*
 - 3.6. *Dinas Kesehatan*
 - 3.7. *Dinas Pendidikan dan Pengajaran*
 - 3.8. *Dinas Perkebunan dan Peternakan*
 - 3.9. *Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana*
 - 3.10. *Inspektorat*
 - 3.11. *Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura*
 - 3.12. *Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Papua*
 - 3.13. *Bapperida*
 - 3.14. *Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*
 - 3.15. *Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan pangan*



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat: Gedung Wanita Sarinah. Jln. Berdikari Nomor 01, Jayapura

NAMA-NAMA PENERIMA GENDER CHAMPION PROVINSI PAPUA

TAHUN 2025

	<p align="center">NAMA SKPD PENERIMA PIAGAM GENDER CHAMPION PROVINSI PAPUA TAHUN 2025</p>
<p>1</p>	<p>KEPALA BAPPERIDA PROVINSI PAPUA</p> 
<p>2</p>	<p>INSPEKTUR PROVINSI PAPUA</p> 
<p>3</p>	<p>KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA</p> 

4 KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA






5 KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA






6 KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA



7	<p>KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA</p>  <p>PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION</p> <p>Diberikan Kepada :</p> <p>Dr. dr. ARRY PONGTIKU, MHM</p> <p>KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA</p> <p>Sebagai Apresiasi</p> <p>Atas Perwujudan Peran Aktif dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Meningkatkan Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelaksanaan Kebijakan Gender di Provinsi Papua</p> <p>Jayapura, 10 November 2025</p> <p>GUBERNUR PAPUA <i>[Signature]</i> MATUS D. FANSHIES RUMAM KOMJEN POL (Purn)</p>
8	<p>DIREKTUR RSUD JAYAPURA</p>  <p>PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION</p> <p>Diberikan Kepada :</p> <p>dr. AARON RUMAINUM, M.Kes</p> <p>DIREKTUR RSUD JAYAPURA</p> <p>Sebagai Apresiasi</p> <p>Atas Perwujudan Peran Aktif dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Meningkatkan Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelaksanaan Kebijakan Gender di Provinsi Papua</p> <p>Jayapura, 10 November 2025</p> <p>GUBERNUR PAPUA <i>[Signature]</i> MATUS D. FANSHIES RUMAM KOMJEN POL (Purn)</p>
9	<p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI PAPUA</p>  <p>PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION</p> <p>Diberikan Kepada :</p> <p>L. CHRISTIAN SOHILAIT., ST, M.Si</p> <p>KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI PAPUA</p> <p>Sebagai Apresiasi</p> <p>Atas Perwujudan Peran Aktif dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Meningkatkan Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pelaksanaan Kebijakan Gender di Provinsi Papua</p> <p>Jayapura, 10 November 2025</p> <p>GUBERNUR PAPUA <i>[Signature]</i> MATUS D. FANSHIES RUMAM KOMJEN POL (Purn)</p>

10	<p>KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA</p>  <p> PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION Diberikan Kepada: Ir. IMAN DJUNIAWAL, M.Si KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA Sebagai Apresiasi Atas Kepedulian Peran Aktif dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Mendukung Keterlibatan berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pencapaian Kesetaraan Gender di Provinsi Papua Jayapura, 10 November 2025 GUBERNUR PAPUA MATUS D. FAKSIRIS, K.M.H. KOMJENPOL (Purn) </p>
11	<p>KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA</p>  <p> PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION Diberikan Kepada: MATHEUS P KOIBUR, S.Pt, MM KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA Sebagai Apresiasi Atas Kepedulian Peran Aktif dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Mendukung Keterlibatan berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pencapaian Kesetaraan Gender di Provinsi Papua Jayapura, 10 November 2025 GUBERNUR PAPUA MATUS D. FAKSIRIS, K.M.H. KOMJENPOL (Purn) </p>
12	<p>KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI PAPUA</p>  <p> PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION Diberikan Kepada: LINDA S. ONIBALA, S.Sos., MM KEPALA BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI PAPUA Sebagai Apresiasi Atas Kepedulian Peran Aktif dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Mendukung Keterlibatan berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pencapaian Kesetaraan Gender di Provinsi Papua Jayapura, 10 November 2025 GUBERNUR PAPUA MATUS D. FAKSIRIS, K.M.H. KOMJENPOL (Purn) </p>

13	<p>KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA</p>  <p>PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION Diberikan Kepada JOSEFINTJE B. WANDOSA, SE, M.Si KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA Sebagai Apresiasi Atas Kepedulian Pem. Asst dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Mendukung Keterlibatan berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemisahan Kesetaraan Gender di Provinsi Papua Jayapura, 10 November 2025 GUBERNUR PAPUA MATUS D. FANJILES, S.H., M.H. KOMJENPOL (Purn.)</p>
14	<p>KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PROVINSI PAPUA</p>  <p>PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION Diberikan Kepada Dr. Drs BLÄSIUS WALUYO SEJATI, MM KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PROVINSI PAPUA Sebagai Apresiasi Atas Kepedulian Pem. Asst dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Mendukung Keterlibatan berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemisahan Kesetaraan Gender di Provinsi Papua Jayapura, 10 November 2025 GUBERNUR PAPUA MATUS D. FANJILES, S.H., M.H. KOMJENPOL (Purn.)</p>
15	<p>KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA</p>  <p>PIAGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION Diberikan Kepada BARKAH WISNU RADTYA, ST, M.Si KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA Sebagai Apresiasi Atas Kepedulian Pem. Asst dan Kontribusinya dalam Mempromosikan serta Mendukung Keterlibatan berbagai Pihak dalam Mendukung Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemisahan Kesetaraan Gender di Provinsi Papua Jayapura, 10 November 2025 GUBERNUR PAPUA MATUS D. FANJILES, S.H., M.H. KOMJENPOL (Purn.)</p>

Jayapura, 10 November 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua


JOSEFINTJE B. WANDOSA, SE, M.Si
 PEMBINA TK.I
 NIP. 497003122001122002



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
PROVINSI PAPUA



GENDER CHAMPION

ARTI GENDER CHAMPION

individu atau organisasi yang berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan laki-laki di berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan masyarakat.

II. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah Provinsi Papua terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan upaya pemberian apresiasi kepada individu atau pimpinan perangkat daerah yang telah menunjukkan kepemimpinan, komitmen, dan tindakan nyata dalam mendukung implementasi strategi PUG di lingkungan kerjanya.

TUJUAN

1. Memberikan apresiasi kepada pimpinan perangkat daerah yang memiliki komitmen dan kinerja dalam pelaksanaan PUG.
2. Meningkatkan motivasi dan partisipasi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.
3. Memperkuat kelembagaan PUG melalui pembentukan dan penguatan Focal Point PUG di masing-masing SKPD.
4. Menumbuhkan budaya kerja yang berperspektif gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

SASARAN

15 (lima belas) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah menindaklanjuti implementasi strategi PUG dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Focal Point PUG di masing-masing SKPD.

KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

1. Memiliki komitmen dan kepedulian tinggi terhadap pelaksanaan PUG di Instansinya.
2. Telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Focal Point PUG di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
3. Aktif mendorong integrasi isu gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan SKPD.
4. Berperan sebagai teladan (role model) dalam mempromosikan kesetaraan gender di lingkungan kerja.
5. Mendukung kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Papua.

BENTUK PENGHARGAAN

Plagam Penghargaan "Gender Champion" yang ditandatangani oleh Gubernur Papua, dilaksanakan hari/tgl Senin, 10 NOVEMBER 2025

DAFTAR NAMA INDIVIDU/ SKPD
PENERIMA PENGHARGAAN GENDER CHAMPION PROVINSI PAPUA
TAHUN 2025

NO	NAMA SKPD
1	KEPALABAPPERIDAPROVINSI PAPUA
2	INSPEKTUR PROVINSI PAPUA
3	KEPALA DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PROVINSI PAPUA
4	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PANGAN PROVINSI PAPUA
5	KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA
6	KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA
7	KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA
8	DIREKTUR RSUD JAYAPURA
9	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN PROVINSI PAPUA
10	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA
11	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI PAPUA
12	KEPALA BIRO ORGANISASI PROVINSI PAPUA
13	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI PAPUA
14	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PROVINSI PAPUA
15	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA

Jayapura, 10November 2025

GENDER
Equality



Pemberian penghargaan *Gender Champion* kepada pimpinan OPD bertujuan untuk memberikan apresiasi sekaligus pengakuan atas komitmen dan kepemimpinan mereka dalam mendorong pengarusutamaan gender di lingkungan kerja dan program pembangunan. Penghargaan ini juga menjadi bentuk motivasi agar para pimpinan OPD terus mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan dan kegiatan.

Hasil dari pemberian penghargaan ini diharapkan dapat memperkuat budaya kerja yang responsif gender, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih adil dan inklusif, serta mendorong OPD lain untuk mencontoh praktik-praktik baik yang telah dilakukan. Selain itu, penghargaan ini juga menjadi indikator keberhasilan daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara berkelanjutan.

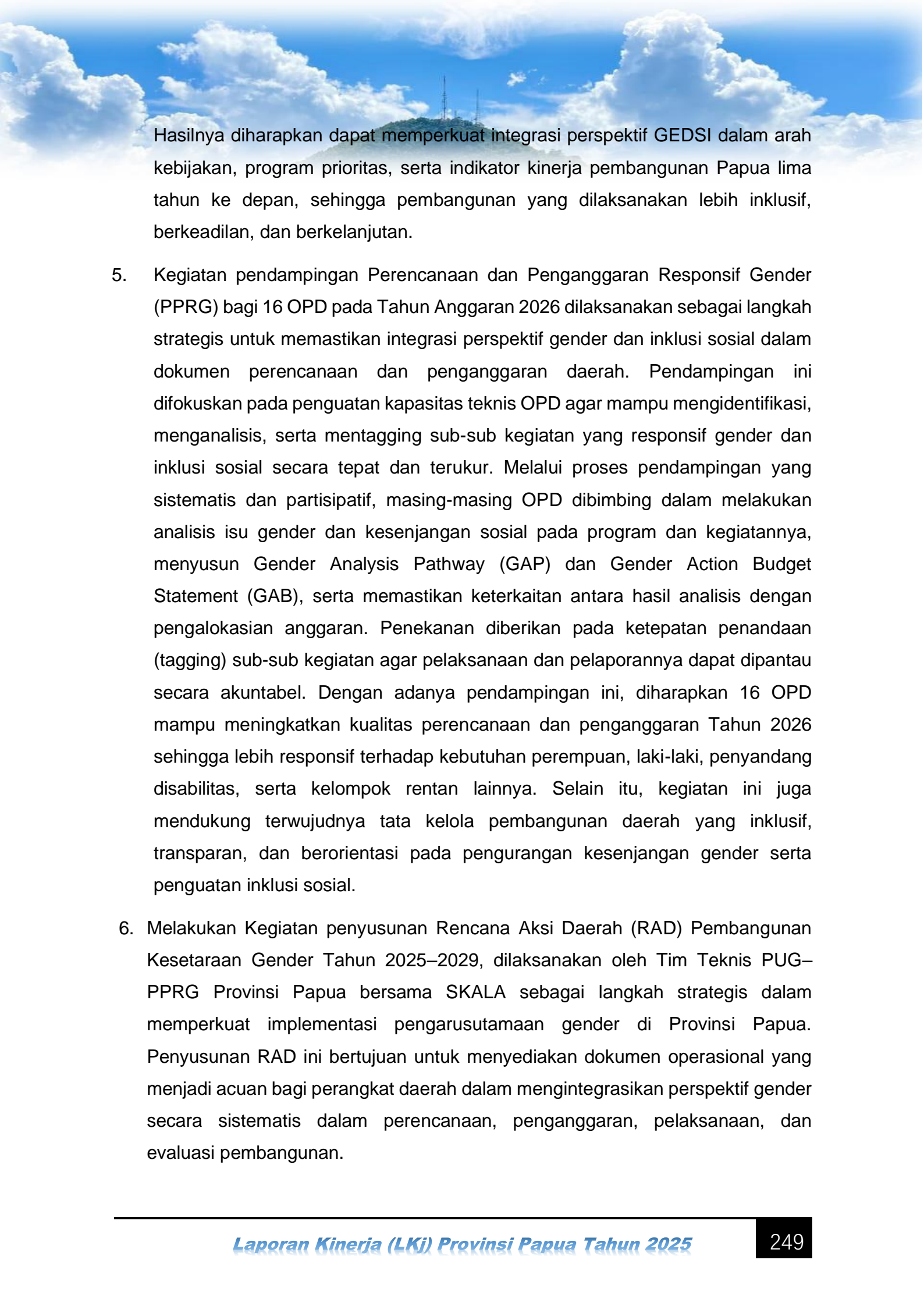
DOKUMENTASI PENYERAHAN PIGAM PENGHARGAAN GENDER CHAMPION
KEPADA 15 INDIVIDU/SKPD PROVINSI PAPUA, SENIN, 10 NOVEMBER 2025



-----8888-----

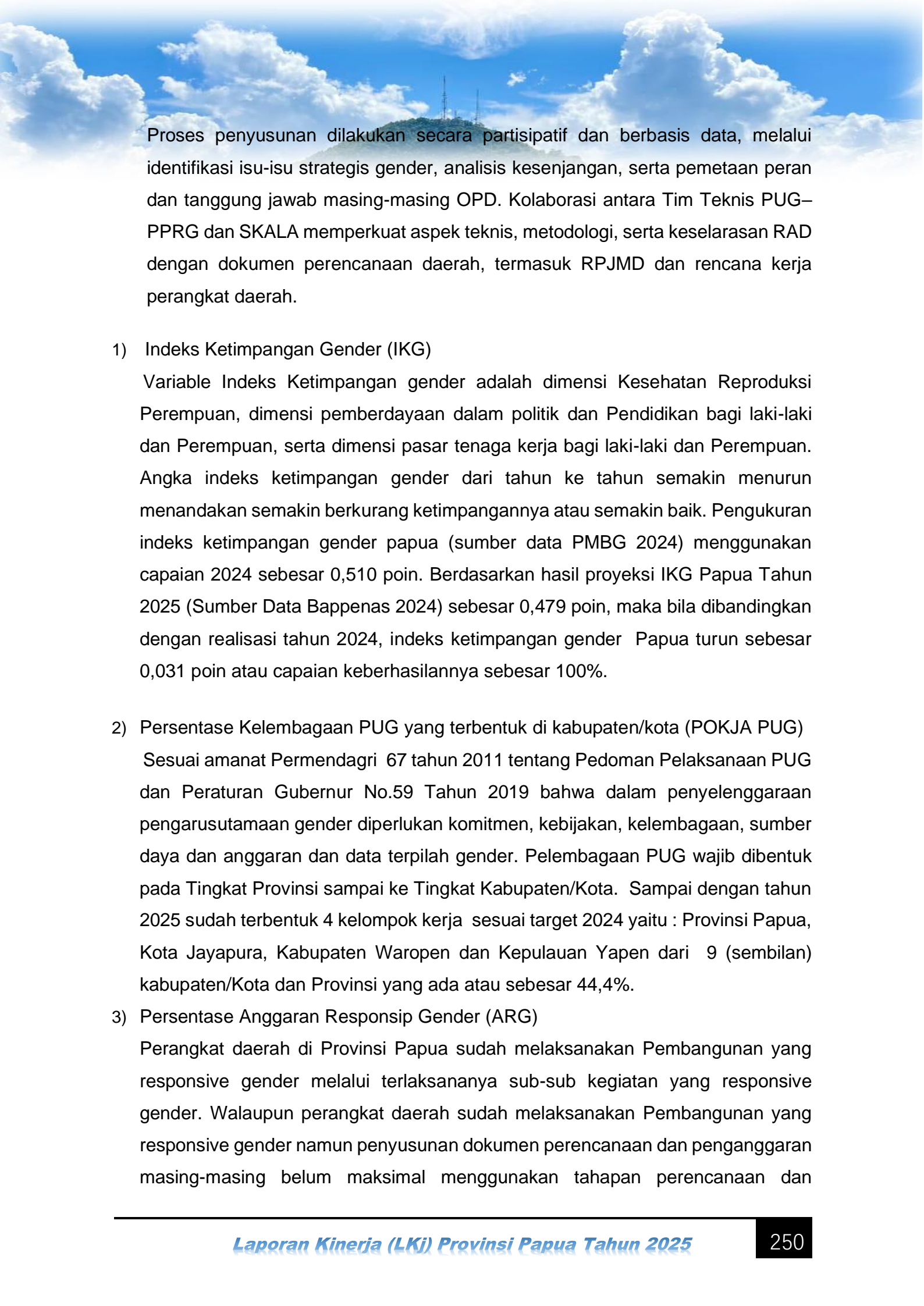
4. Pemerintah Provinsi Papua melalui DP3AKB berkolaborasi dengan SKALA dalam menyusun isu-isu strategis GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 Papua. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

Melalui kerja sama ini, identifikasi tantangan, kesenjangan layanan, serta peluang kebijakan dilakukan secara lebih komprehensif dan berbasis data.



Hasilnya diharapkan dapat memperkuat integrasi perspektif GEDSI dalam arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan Papua lima tahun ke depan, sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. Kegiatan pendampingan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi 16 OPD pada Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk memastikan integrasi perspektif gender dan inklusi sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Pendampingan ini difokuskan pada penguatan kapasitas teknis OPD agar mampu mengidentifikasi, menganalisis, serta tagging sub-sub kegiatan yang responsif gender dan inklusi sosial secara tepat dan terukur. Melalui proses pendampingan yang sistematis dan partisipatif, masing-masing OPD dibimbing dalam melakukan analisis isu gender dan kesenjangan sosial pada program dan kegiatannya, menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Action Budget Statement (GAB), serta memastikan keterkaitan antara hasil analisis dengan pengalokasian anggaran. Penekanan diberikan pada ketepatan penandaan (tagging) sub-sub kegiatan agar pelaksanaan dan pelaporannya dapat dipantau secara akuntabel. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan 16 OPD mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Tahun 2026 sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan daerah yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada pengurangan kesenjangan gender serta penguatan inklusi sosial.
6. Melakukan Kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2025–2029, dilaksanakan oleh Tim Teknis PUG–PPRG Provinsi Papua bersama SKALA sebagai langkah strategis dalam memperkuat implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Papua. Penyusunan RAD ini bertujuan untuk menyediakan dokumen operasional yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender secara sistematis dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.



Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, melalui identifikasi isu-isu strategis gender, analisis kesenjangan, serta pemetaan peran dan tanggung jawab masing-masing OPD. Kolaborasi antara Tim Teknis PUG–PPRG dan SKALA memperkuat aspek teknis, metodologi, serta keselarasan RAD dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan rencana kerja perangkat daerah.

1) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

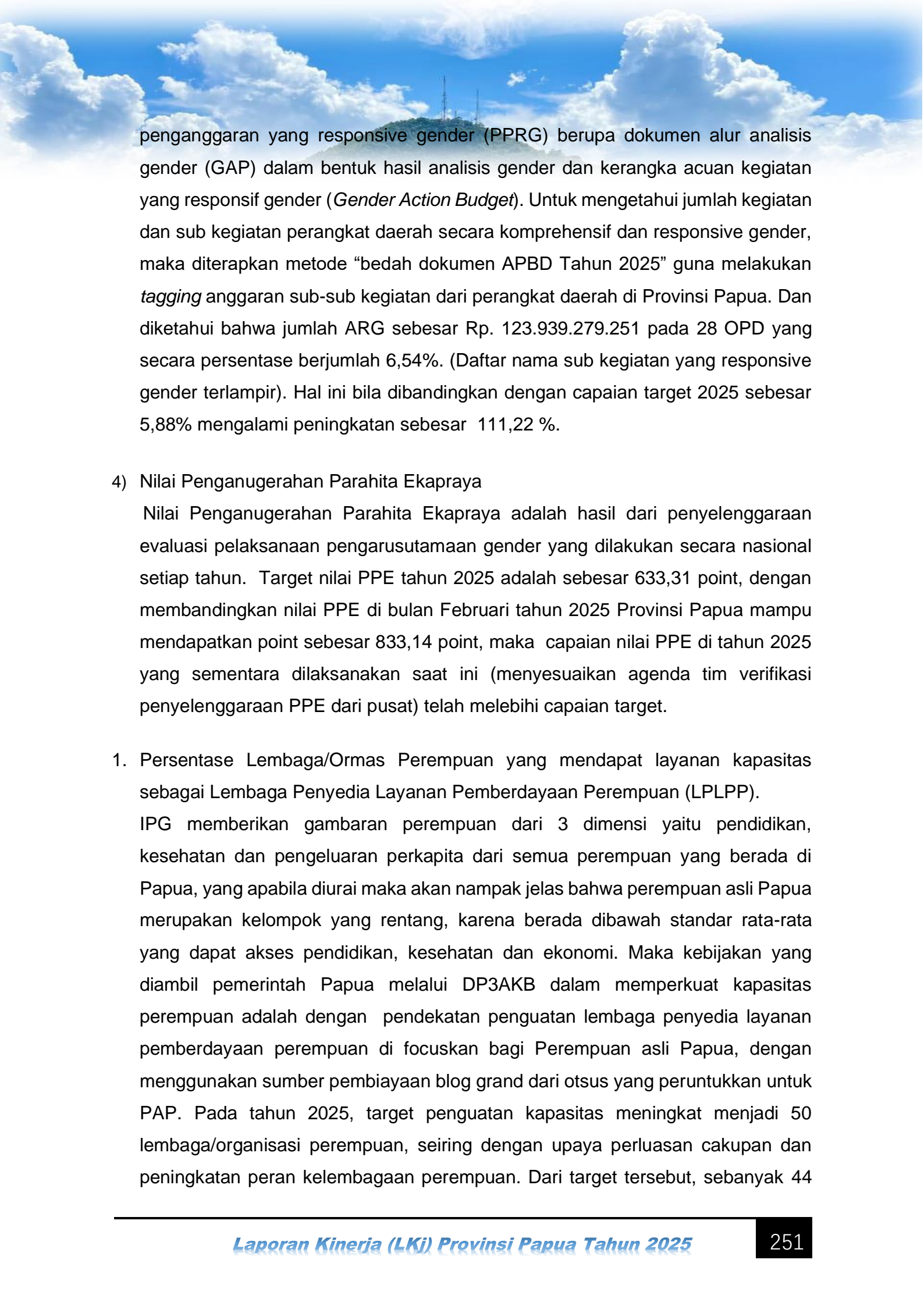
Variable Indeks Ketimpangan gender adalah dimensi Kesehatan Reproduksi Perempuan, dimensi pemberdayaan dalam politik dan Pendidikan bagi laki-laki dan Perempuan, serta dimensi pasar tenaga kerja bagi laki-laki dan Perempuan. Angka indeks ketimpangan gender dari tahun ke tahun semakin menurun menandakan semakin berkurang ketimpangannya atau semakin baik. Pengukuran indeks ketimpangan gender papua (sumber data PMBG 2024) menggunakan capaian 2024 sebesar 0,510 poin. Berdasarkan hasil proyeksi IKG Papua Tahun 2025 (Sumber Data Bappenas 2024) sebesar 0,479 poin, maka bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, indeks ketimpangan gender Papua turun sebesar 0,031 poin atau capaian keberhasilannya sebesar 100%.

2) Persentase Kelembagaan PUG yang terbentuk di kabupaten/kota (POKJA PUG)

Sesuai amanat Permendagri 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dan Peraturan Gubernur No.59 Tahun 2019 bahwa dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender diperlukan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya dan anggaran dan data terpilah gender. Pelembagaan PUG wajib dibentuk pada Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2025 sudah terbentuk 4 kelompok kerja sesuai target 2024 yaitu : Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Waropen dan Kepulauan Yapen dari 9 (sembilan) kabupaten/Kota dan Provinsi yang ada atau sebesar 44,4%.

3) Persentase Anggaran Responsip Gender (ARG)

Perangkat daerah di Provinsi Papua sudah melaksanakan Pembangunan yang responsive gender melalui terlaksananya sub-sub kegiatan yang responsive gender. Walaupun perangkat daerah sudah melaksanakan Pembangunan yang responsive gender namun penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing belum maksimal menggunakan tahapan perencanaan dan



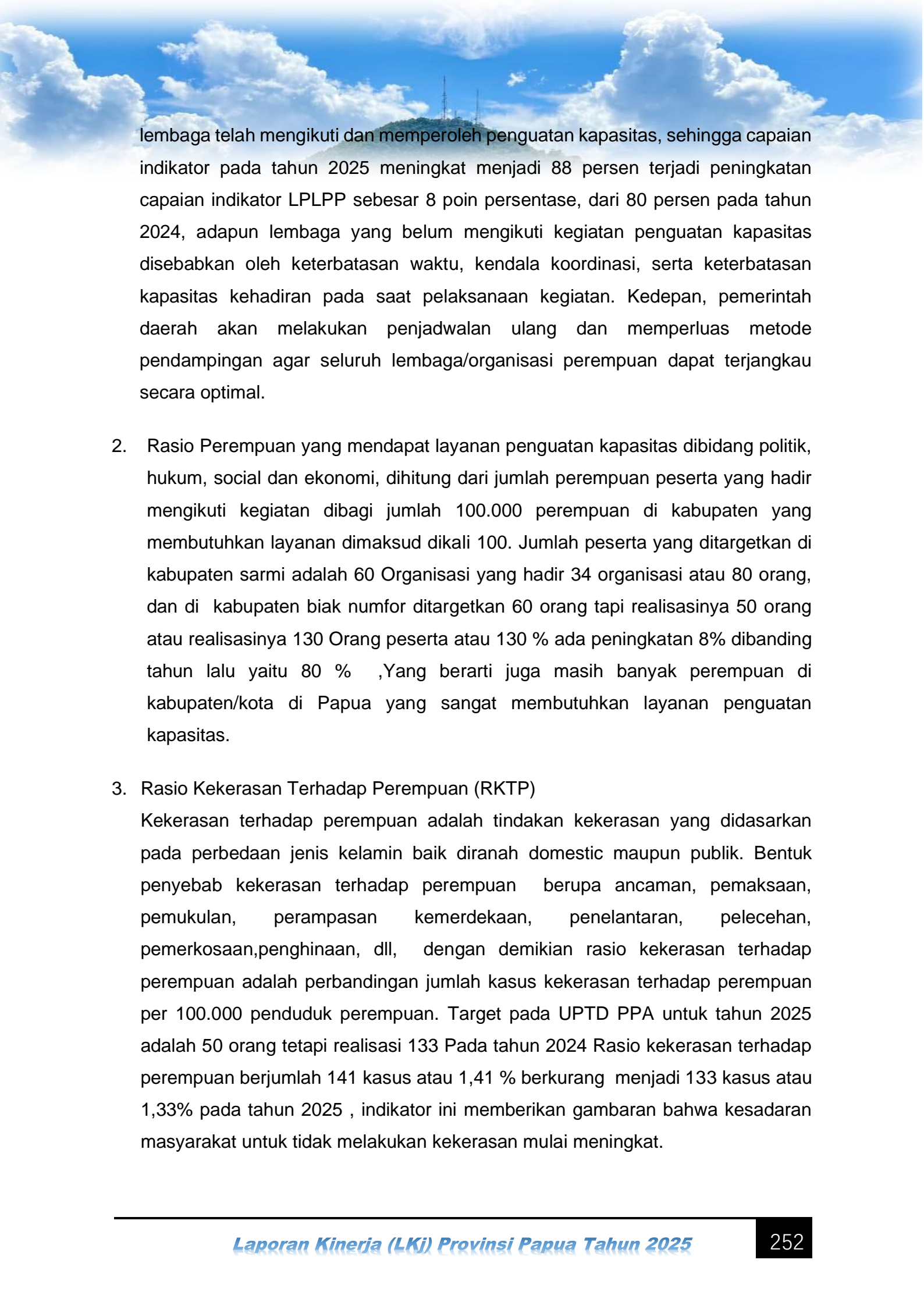
penganggaran yang responsive gender (PPRG) berupa dokumen alur analisis gender (GAP) dalam bentuk hasil analisis gender dan kerangka acuan kegiatan yang responsif gender (*Gender Action Budget*). Untuk mengetahui jumlah kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah secara komprehensif dan responsive gender, maka diterapkan metode “bedah dokumen APBD Tahun 2025” guna melakukan *tagging* anggaran sub-sub kegiatan dari perangkat daerah di Provinsi Papua. Dan diketahui bahwa jumlah ARG sebesar Rp. 123.939.279.251 pada 28 OPD yang secara persentase berjumlah 6,54%. (Daftar nama sub kegiatan yang responsive gender terlampir). Hal ini bila dibandingkan dengan capaian target 2025 sebesar 5,88% mengalami peningkatan sebesar 111,22 %.

4) Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya

Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya adalah hasil dari penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender yang dilakukan secara nasional setiap tahun. Target nilai PPE tahun 2025 adalah sebesar 633,31 point, dengan membandingkan nilai PPE di bulan Februari tahun 2025 Provinsi Papua mampu mendapatkan point sebesar 833,14 point, maka capaian nilai PPE di tahun 2025 yang sementara dilaksanakan saat ini (menyesuaikan agenda tim verifikasi penyelenggaraan PPE dari pusat) telah melebihi capaian target.

1. Persentase Lembaga/Ormas Perempuan yang mendapat layanan kapasitas sebagai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP).

IPG memberikan gambaran perempuan dari 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran perkapita dari semua perempuan yang berada di Papua, yang apabila diurai maka akan nampak jelas bahwa perempuan asli Papua merupakan kelompok yang rentang, karena berada dibawah standar rata-rata yang dapat akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Maka kebijakan yang diambil pemerintah Papua melalui DP3AKB dalam memperkuat kapasitas perempuan adalah dengan pendekatan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di fokuskan bagi Perempuan asli Papua, dengan menggunakan sumber pembiayaan blog grand dari otsus yang peruntukkan untuk PAP. Pada tahun 2025, target penguatan kapasitas meningkat menjadi 50 lembaga/organisasi perempuan, seiring dengan upaya perluasan cakupan dan peningkatan peran kelembagaan perempuan. Dari target tersebut, sebanyak 44



lembaga telah mengikuti dan memperoleh penguatan kapasitas, sehingga capaian indikator pada tahun 2025 meningkat menjadi 88 persen terjadi peningkatan capaian indikator LPLPP sebesar 8 poin persentase, dari 80 persen pada tahun 2024, adapun lembaga yang belum mengikuti kegiatan penguatan kapasitas disebabkan oleh keterbatasan waktu, kendala koordinasi, serta keterbatasan kapasitas kehadiran pada saat pelaksanaan kegiatan. Kedepan, pemerintah daerah akan melakukan penjadwalan ulang dan memperluas metode pendampingan agar seluruh lembaga/organisasi perempuan dapat terjangkau secara optimal.

2. Rasio Perempuan yang mendapat layanan penguatan kapasitas dibidang politik, hukum, social dan ekonomi, dihitung dari jumlah perempuan peserta yang hadir mengikuti kegiatan dibagi jumlah 100.000 perempuan di kabupaten yang membutuhkan layanan dimaksud dikali 100. Jumlah peserta yang ditargetkan di kabupaten sarmi adalah 60 Organisasi yang hadir 34 organisasi atau 80 orang, dan di kabupaten biak numfor ditargetkan 60 orang tapi realisasinya 50 orang atau realisasinya 130 Orang peserta atau 130 % ada peningkatan 8% dibanding tahun lalu yaitu 80 % ,Yang berarti juga masih banyak perempuan di kabupaten/kota di Papua yang sangat membutuhkan layanan penguatan kapasitas.

3. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (RKTP)

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin baik dirumah domestic maupun publik. Bentuk penyebab kekerasan terhadap perempuan berupa ancaman, pemaksaan, pemukulan, perampasan kemerdekaan, penelantaran, pelecehan, pemerkosaan, penghinaan, dll, dengan demikian rasio kekerasan terhadap perempuan adalah perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan. Target pada UPTD PPA untuk tahun 2025 adalah 50 orang tetapi realisasi 133 Pada tahun 2024 Rasio kekerasan terhadap perempuan berjumlah 141 kasus atau 1,41 % berkurang menjadi 133 kasus atau 1,33% pada tahun 2025 , indikator ini memberikan gambaran bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan mulai meningkat.



1. Persentase Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

UPTD PPA adalah Unit yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan TPPO, dibentuk berdasarkan Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014, tentang pembentukan UPTD PPA, dengan 6 fungsi Layanan antara lain ; (1). Pengaduan Masyarakat,(2). Penjangkauan Korban, (3). Pengelolaan Kasus, (4). Penampungan sementara, (5). Pendampingan korban, (6). Mediasi. UPTD PPA Provinsi Papua di bentuk dengan Peraturan Gubernur nomor 50 Tahun 2020. Dalam melakukan tugas dan fungsinya bekerja secara jejaring dengan lembaga penyedia layanan yang berada di lingkup pemerintah provinsi Papua seperti LBH Apik, LP3AP, YP2MP, HIMPSI, Unit PPA Polda, RSUD Dok.II, RSUD Abepura, RSK Abepura, dll. UPTD PPA Provinsi Papua sebelumnya merupakan lembaga layanan di bawah bidang PPA dengan nama Pusat Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak (P2TPA) telah menjadi pusat pembelajaran bagi Kabupaten/Kota yang kini telah memiliki UPTD PPA, juga menjadi tempat magang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang berada di Jayapura. Persentase UPTD PPA dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki UPTD PPA dibagi Total Kab/Kota yang membutuhkan layanan UPTD PPA di kali 100. Dari 9 Kab/kota di Papua. Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua melalui DP3AKB menargetkan untuk memberi penguatan di 2 Kabupaten yaitu kabupaten supiori dan yapen yang sudah membentuk UPTD PPA atau 88,8% artinya ada peningkatan 22,2% dari tahun 2024 yaitu 66,6% ,Pemerintah Provinsi Papua melalui DP3AKB berhasil mengadvokasi dan mendampingi 8 Kabupaten/Kota untuk membentuk UPTD PPA tersisa satu kab/kota yaitu Mamberamo raya

Jumlah UPTD PPA di Provinsi Papua

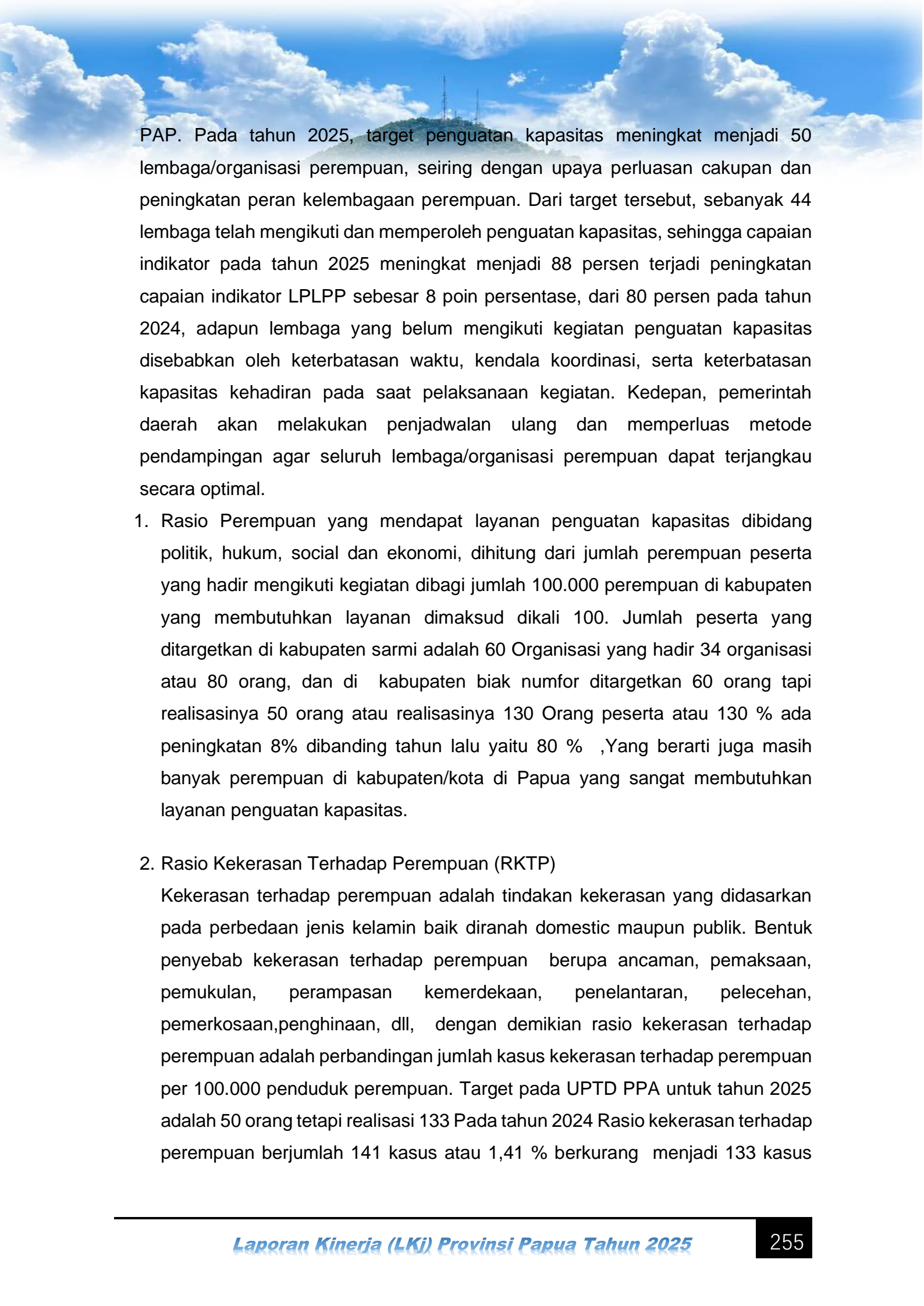
No.	Provinsi/Kab/Kota	UPTD PPA	P2TPA	Inisiasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Jayapura	√		
2.	Kabupaten Jayapura	√		
3.	Kabupaten Keerom	√		
4.	Kabupaten Sarmi	√		
5.	Kabupaten Mamberamo Raya			√
6.	Kabupaten Biak Numfor	√		
7.	Kabupaten Supiori	√		
8.	Kabupaten Kep. Yapen	√		
9.	Kabupaten Waropen	√		
10.	Provinsi Papua	√		

Pemerintah Provinsi Papua melalui DP3AKB Papua pada tahun 2024 telah berhasil mengadvokasi dan mendampingi 4 Kabupaten untuk mengubah Pusat Layanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, kegiatan ini dapat dikatakan sangat berhasil karena pada tahun-tahun sebelumnya sangat sulit mengadvokasi pimpinan daerah, dan kurang ada keseriusan pimpinan OPD pemangku.

Pada tahun 2025 juga DP3AKB melalui bidang PPA berhasil melakukan Penguatan kepada 2 UPTD PPA yang ada di kab. Kep Yapen dan Kab. supiori, sedangkan kabupaten yang belum di inisiasi untuk pembentukan UPTD PPA adalah Kabupaten Mamberamo Raya.

2. Persentase Lembaga/Ormas Perempuan yang mendapat layanan kapasitas sebagai Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP).

IPG memberikan gambaran perempuan dari 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan pengeluaran perkapita dari semua perempuan yang berada di Papua, yang apabila diurai maka akan nampak jelas bahwa perempuan asli Papua merupakan kelompok yang rentang, karena berada dibawah standar rata-rata yang dapat akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Maka kebijakan yang diambil pemerintah Papua melalui DP3AKB dalam memperkuat kapasitas perempuan adalah dengan pendekatan penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di fokuskan bagi Perempuan asli Papua, dengan menggunakan sumber pembiayaan blog grand dari otsus yang peruntukkan untuk




PAP. Pada tahun 2025, target penguatan kapasitas meningkat menjadi 50 lembaga/organisasi perempuan, seiring dengan upaya perluasan cakupan dan peningkatan peran kelembagaan perempuan. Dari target tersebut, sebanyak 44 lembaga telah mengikuti dan memperoleh penguatan kapasitas, sehingga capaian indikator pada tahun 2025 meningkat menjadi 88 persen terjadi peningkatan capaian indikator LPLPP sebesar 8 poin persentase, dari 80 persen pada tahun 2024, adapun lembaga yang belum mengikuti kegiatan penguatan kapasitas disebabkan oleh keterbatasan waktu, kendala koordinasi, serta keterbatasan kapasitas kehadiran pada saat pelaksanaan kegiatan. Kedepan, pemerintah daerah akan melakukan penjadwalan ulang dan memperluas metode pendampingan agar seluruh lembaga/organisasi perempuan dapat terjangkau secara optimal.

1. Rasio Perempuan yang mendapat layanan penguatan kapasitas dibidang politik, hukum, social dan ekonomi, dihitung dari jumlah perempuan peserta yang hadir mengikuti kegiatan dibagi jumlah 100.000 perempuan di kabupaten yang membutuhkan layanan dimaksud dikali 100. Jumlah peserta yang ditargetkan di kabupaten sarmi adalah 60 Organisasi yang hadir 34 organisasi atau 80 orang, dan di kabupaten biak numfor ditargetkan 60 orang tapi realisasinya 50 orang atau realisasinya 130 Orang peserta atau 130 % ada peningkatan 8% dibanding tahun lalu yaitu 80 % ,Yang berarti juga masih banyak perempuan di kabupaten/kota di Papua yang sangat membutuhkan layanan penguatan kapasitas.

2. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (RKTP)

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin baik dirumah domestic maupun publik. Bentuk penyebab kekerasan terhadap perempuan berupa ancaman, pemaksaan, pemukulan, perampasan kemerdekaan, penelantaran, pelecehan, pemerkosaan, penghinaan, dll, dengan demikian rasio kekerasan terhadap perempuan adalah perbandingan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan. Target pada UPTD PPA untuk tahun 2025 adalah 50 orang tetapi realisasi 133 Pada tahun 2024 Rasio kekerasan terhadap perempuan berjumlah 141 kasus atau 1,41 % berkurang menjadi 133 kasus



atau 1,33% pada tahun 2025 , indikator ini memberikan gambaran bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan kekerasan mulai meningkat.

3. Persentase Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

UPTD PPA adalah Unit yang menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan TPPO, dibentuk berdasarkan Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 8 tahun 2014, tentang pembentukan UPTD PPA, dengan 6 fungsi Layanan antara lain ; (1). Pengaduan Masyarakat,(2). Penjangkauan Korban, (3). Pengelolaan Kasus, (4). Penampungan sementara, (5). Pendampingan korban, (6). Mediasi. UPTD PPA Provinsi Papua di bentuk dengan Peraturan Gubernur nomor 50 Tahun 2020. Dalam melakukan tugas dan fungsinya bekerja secara jejaring dengan lembaga penyedia layanan yang berada di lingkup pemerintah provinsi Papua seperti LBH Apik, LP3AP, YP2MP, HIMPSI, Unit PPA Polda, RSU Dok.II, RSU Abepura, RSK Abepura, dll. UPTD PPA Provinsi Papua sebelumnya merupakan lembaga layanan di bawah bidang PPA dengan nama Pusat Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak (P2TPA) telah menjadi pusat pembelajaran bagi Kabupaten/Kota yang kini telah memiliki UPTD PPA, juga menjadi tempat magang mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang berada di Jayapura. Persentase UPTD PPA dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah memiliki UPTD PPA dibagi Total Kab/Kota yang membutuhkan layanan UPTD PPA di kali 100. Dari 9 Kab/kota di Papua. Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Papua melalui DP3AKB menargetkan untuk memberi penguatan di 2 Kabupaten yaitu kabupaten supiori dan yapen yang sudah membentuk UPTD PPA atau 88,8% artinya ada peningkatan 22,2% dari tahun 2024 yaitu 66,6% Pemerintah Provinsi Papua melalui DP3AKB berhasil mengadvokasi dan mendampingi 8 Kabupaten/Kota untuk membentuk UPTD PPA tersisa satu kab/kota yaitu Mamberamo raya.

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN
MENURUT JENIS KELAMIN**

No	TAHUN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	2022	7	124	131
2	2023	19	72	91
3	2024	32	145	177
4	2025	22	133	155

Sumber Data : UPTD PPA 2025

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN
MENURUT USIA**

No	TAHUN	USIA						
		0-6	7-12	13-17	18-24	25-44	45-59	60+
1	2022	15	10	16	22	56	12	0
2	2023	15	9	21	10	37	0	0
3	2024	16	23	61	19	42	9	3
4	2025	9	18	48	25	46	8	1

Sumber Data :

UPTD PPA 2025

**JUMLAH KORBAN BERDASARKAN
BENTUK KEKERASAN**

No	BENTUK KEKERASAN	2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Fisik	2	65	5	32	9	60	11	49
2	Psikis	5	47	8	36	15	68	2	31
3	Seksual	0	21	1	22	6	59	5	46
4	Eksplorasi	0	1	0	1	0	0	1	2
6	Trafiking	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Penelantaran	1	34	9	20	6	14	4	28
8	Lainnya	0	7	8	11	11	25	7	32
Total									

Sumber : UPTD PPA 2025

UPTD PPA 2025

**JUMLAH KORBAN BERDASARKAN
JENIS PELAYANAN**

No	JENIS PELAYANAN	2022		2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Pengaduan	7	89	7	32	32	141	22	135
2	Kesehatan	0	17	0	15	3	22	0	16
3	Bantuan Hukum	1	5	5	11	5	26	5	23
4	Rehabilitas Sosial	0	0	0	1	5	14	2	15
5	Pemulangan	0	0	0	4	0	1	0	0
6	Pendampingan Tokoh Agama	0	0	0	0	0	0	0	4
Total									

Sumber Data :

JUMLAH KORBAN KEKERASAN BERDASARKAN PENDIDIKAN													
No	JENIS PENDIDIKAN	2022			2023			2024			2025		
		L	P	T	L	P	T	L	P	T	L	P	T
1	Tidak /Belum sekolah	1	18	19	4	10	14	3	24	27	2	12	14
2	SD	3	6	9	2	6	8	6	16	22	1	12	13
3	SLTP	1	19	20	1	7	8	5	37	42	10	25	35
4	SLTA	0	58	58	10	31	41	12	49	61	7	56	62
6	PERGURUAN TINGGI	0	20	20	1	12	13	1	12	13	1	21	22
7	PAUD/TK	1	3	4	2	6	8	5	3	8	1	7	8

Sumber Data : UPTD PPA 2025

JUMLAH KASUS BERDASARKAN TEMPAT KEJADIAN							
No	TAHUN	JENIS TEMPAT KEJADIAN					
		RUMAH TANGGA	TEMPAT KERJA	SEKOLAH	FASILITAS UMUM	LEMBAGA PENDIDIKAN KILAT	FASILITAS LAINNYA
1	2022	107	1	1	11	0	0
2	2023	71	1	0	8	0	12
3	2024	103	2	10	20	0	38
4	2025	83	1	13	23	0	35

Sumber Data :

JUMLAH KORBAN BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN									
No	TAHUN	JENIS PEKERJAAN							
		TIDAK BEKERJA	BEKERJA	PELAJAR	MENGURUS RUMAH TANGGA	SWASTA/BURUH	TNI/POLRI	PEDAGANG/TANI/NELAYAN	N/A
1	2022	33	8	32	37	8	6	1	6
2	2023	26	1	25	21	8	9	0	2
3	2024	42	0	78	23	15	10	0	5
4	2025	26	0	72	26	6	14	7	4

Sumber Data : UPTD PPA 2025

JUMLAH KORBAN BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN					
No	TAHUN	JENIS STATUS			
		BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI	N/A
1	2022	70	49	4	8
2	2023	52	36	0	4
3	2024	116	54	1	2
4	2025				

Sumber Data : UPTD PPA 2025

4. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan Adalah jumlah perempuan korban kekerasan, diskriminasi dan tindak pidana perdagangan orang yang berhasil mendapat layanan pada UPTD PPA. Mulai dari pengaduan, pendampingan, rujukan, penampungan sementara dan mediasi. Perempuan yang menjadi korban kekerasan lebih banyak berada di lingkungan domestic, oleh orang-orang terdekat atau orang yang secara fisik, moral dan hukum wajib melindungi perempuan, seperti suami, dan orang yang masih ada hubungan darah atau persusuan dengan korban. Bahkan cenderung perempuan mengalami beberapa tindak kekerasan sekaligus. Satu perempuan korban dalam waktu bersamaan menjadi korban kekerasan fisik, seksual, penelantaran, verbal, dll, dan kondisi ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang atau seumur hidup. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan dihitung dengan membagi jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan dibagi jumlah penduduk perempuan pada daerah sasaran di kali 100 Pada tahun 2025, jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif melalui UPTD PPA tercatat sebanyak 145 kasus pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah tersebut menurun menjadi 133 kasus. Penurunan jumlah kasus yang ditangani menunjukkan adanya peningkatan efektivitas upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan, baik melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, maupun penguatan koordinasi lintas sektor.

Seluruh korban yang melapor pada tahun 2025 tetap memperoleh layanan komprehensif sesuai produk layanan yang disediakan oleh UPTD PPA, kinerja layanan UPTD PPA tetap optimal dan responsif terhadap kebutuhan korban.

1. Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi anak yang meliputi hak sipil, kesehatan, pendidikan, dll, yang dilakukan melalui berbagai tindakan legislative, administrative dan hukum, yang tertuang dalam 24 indikator dengan tujuan 1). menjamin perkembangan fisik, mental dan social anak, 2). Menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, 3). Menjamin anak mendapat lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 4). Menjamin anak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, 5). Menjamin anak mendapatkan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, 6). Menjamin anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Contoh hak anak;

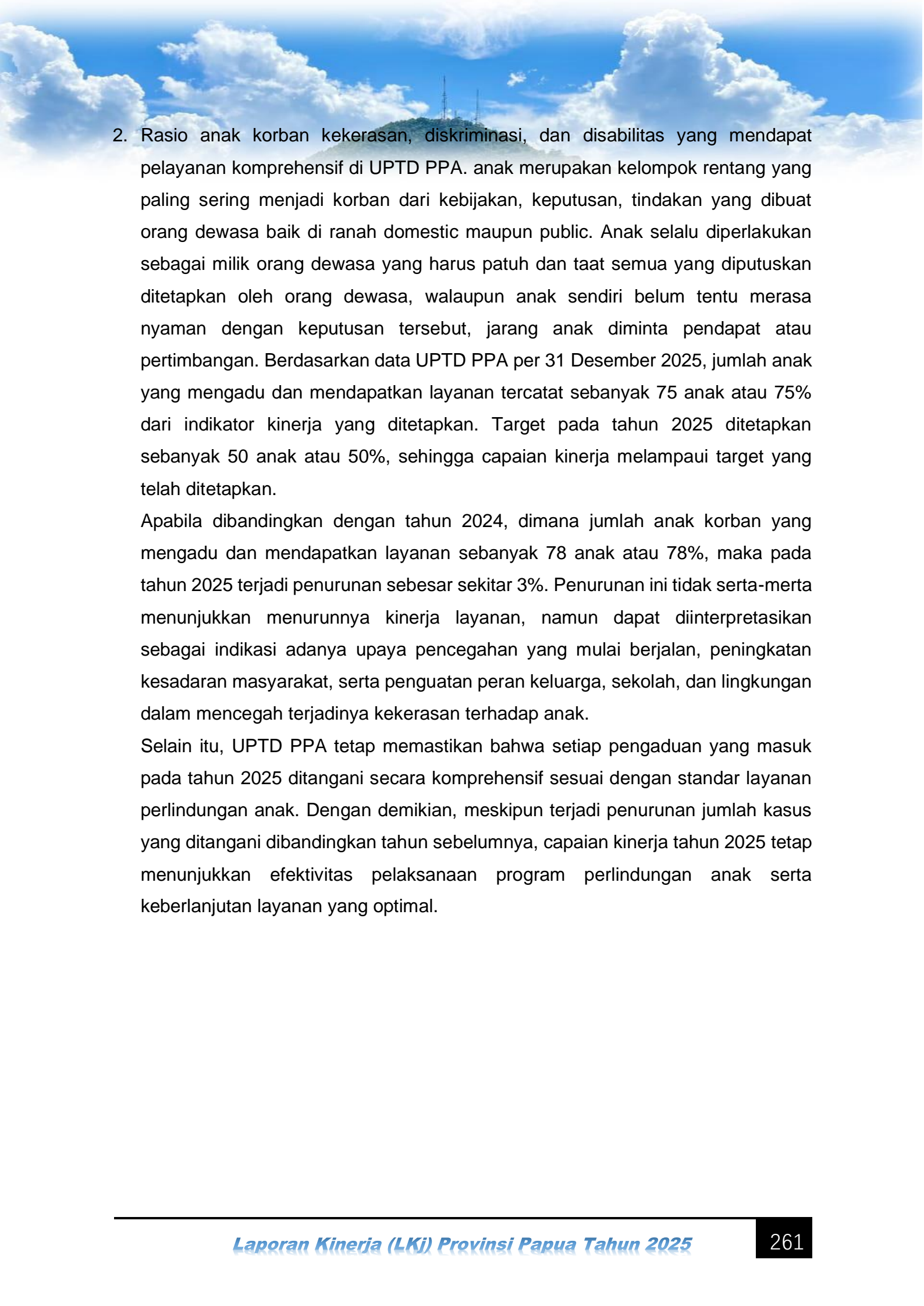
hak untuk bermain, sekolah dari PAUD, dapat identitas (KTA) status kebangsaan, makan sehat, akses kesehatan, dll. Agar hak-hak anak tersebut diatas dapat dipenuhi, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan secara komprehensif pada tahun 2025 ada kegiatan penting yang dibuat dalam rangka percepatan pemenuhan hak anak, yaitu ;

1.1. Verifikasi administrasi terhadap dokumen – dokumen yang di input oleh kandidat kabupaten/kota layak anak di Papua. Tahun 2024 DP3AKB menargetkan untuk advokasi 3 tetapi realisasi 4 Kabupaten/Kota untuk menjadi KLA, atau 44,4%, Pada tahun 2025 DP3AKB menargetkan 4 kab/kota dan berhasil mengadvokasi 4 Kabupaten/Kota atau 44,4% antara lain dua kabupaten kota didorong untuk naik ke jenjang berikut yaitu kota jayapura dan kabupaten jayapura sedangkan 2 kab/kota yaitu kab biak dan keerom di dorong untuk verifikasi data awal menuju KLA sehingga apa yang ditergetkan dapat dikatakan tercapai. Dalam mendukung terlaksananya Kabupaten/Kota Layak Anak di Papua (KLA). Tim verifikasi KLA terdiri dari para pihak yang representative dari lembaga/OPD teknis pengampuh 24 Indikator KLA, antara lain; Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bapperida, Dinas Perindakop dan Naker, DP3AKB, Unicef, WVI, LBH Apik, LP3AP, YP2MP, Uncen, Balai Sosial

1.2. Data Kabupaten/Kota yang diadvokasi dan didampingi untuk KLA

No.	Kabupaten/Kota	KLA	Inisiasi	Tingkatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Jayapura	V		Pratama
2	Kabupaten Jayapura	V		Pratama
3	Kabupaten Keerom		V	
4	Kabupaten Sarmi			
5	Kabupaten Mamberamo Raya			
6	Kabupaten Biak		V	
7	Kabupaten Kep.Yapen		V	
8	Kabupaten Supiori		V	
9	Kabupaten Waropen		V	

(sumber data : Bidang PPA pada DP3AKB)



2. Rasio anak korban kekerasan, diskriminasi, dan disabilitas yang mendapat pelayanan komprehensif di UPTD PPA. anak merupakan kelompok rentang yang paling sering menjadi korban dari kebijakan, keputusan, tindakan yang dibuat orang dewasa baik di ranah domestic maupun public. Anak selalu diperlakukan sebagai milik orang dewasa yang harus patuh dan taat semua yang diputuskan ditetapkan oleh orang dewasa, walaupun anak sendiri belum tentu merasa nyaman dengan keputusan tersebut, jarang anak diminta pendapat atau pertimbangan. Berdasarkan data UPTD PPA per 31 Desember 2025, jumlah anak yang mengadu dan mendapatkan layanan tercatat sebanyak 75 anak atau 75% dari indikator kinerja yang ditetapkan. Target pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 50 anak atau 50%, sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, dimana jumlah anak korban yang mengadu dan mendapatkan layanan sebanyak 78 anak atau 78%, maka pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar sekitar 3%. Penurunan ini tidak serta-merta menunjukkan menurunnya kinerja layanan, namun dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya upaya pencegahan yang mulai berjalan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan peran keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Selain itu, UPTD PPA tetap memastikan bahwa setiap pengaduan yang masuk pada tahun 2025 ditangani secara komprehensif sesuai dengan standar layanan perlindungan anak. Dengan demikian, meskipun terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2025 tetap menunjukkan efektivitas pelaksanaan program perlindungan anak serta keberlanjutan layanan yang optimal.

**JUMLAH KORBAN KEKERASAN
MENURUT USIA**

No	TAHUN	USIA						
		0-6	7-12	13-17	18-24	25-44	45-59	60+
1	2022	15	10	16	22	56	12	0
2	2023	15	9	21	10	37	0	0
3	2024	16	23	61	19	42	9	3
4	2025	9	18	48	25	46	8	1

Sumber Data: *UPTD PPA DP3AKB 2025*

3. Persentase Anak yang di latih sebagai pelopor dan pelapor bagi teman sebaya di satuan pendidikan.

Salah satu kewajiban Negara dalam memberikan pemenuhan hak anak adalah dengan memberikan ruang aktualisasi diri bagi anak melalui Forum Anak Daerah (FAD). Dengan ruang ini anak dapat berinovasi, kreatif dalam mengembangkan diri, mengeluarkan pendapat, pikiran, menyampaikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi anak sendiri dan komunitasnya. Pada tahun 2025. Pada kegiatan ini pengurus FAD Papua tampil sebagai narasumber/ fasilitator bagi teman sebayanya memberikan materi tentang 1. Kesehatan Reproduksi, 2. Anak sebagai Pelapor dan Pelopor, 3. Trik melindungi diri, 4. Mengenal ancaman disekitar lingkungan sekolah dan rumah. Bidang PPA menargetkan peserta pada kegiatan tersebut sebanyak 90 orang yang terdiri dari 60 Peserta FAD dan 30 Orang peserta PUSPAGA , dan realisasinya 90 orang/Peserta atau 60% dari FAD dan 30% orang peserta Puspaga yang terdiri dari Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah. Yang dihitung dengan cara jumlah peserta yang hadir mengikuti di bagi 100.000 penduduk anak dikali 100.

1. Persentase anak yang mendapat layanan perlindungan khusus

UPTD PPA menargetkan jumlah anak yang akan di layani pada tahun 2025 adalah 50 anak korban, realisasinya 75 anak korban atau 75 % mengalami penurunan 3% dari 2024 yaitu 78 anak korban atau 78%. Artinya kesadaran keluarga korban tentang pentingnya melindungi anak korban kekerasan secara khusus, sesuai dengan kebutuhan anak.

2. Persentase SDM Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak yang mendapat penguatan kapasitas.

Pada tahun 2025 Pemerintah Papua melalui DP3AKB melalui bidang PPA menargetkan akan melakukan penguatan kapasitas kepada 60 Orang yang 30 orang kab. Supiori dan 30 orang kab.Kep. Yapen yang terlibat didalamnya ormas Perempuan, tokoh adat, Lembaga pemerintah dan non pemerintah dari. Realisasinya peserta yang hadir 60 Orang atau 60%. Realisasi persentase peserta yang mengikuti kegiatan penguatan pada tahun berjalan 6 poin persentase ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah peserta yang dapat difasilitasi dalam kegiatan penguatan pada tahun berjalan.

3. Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak.

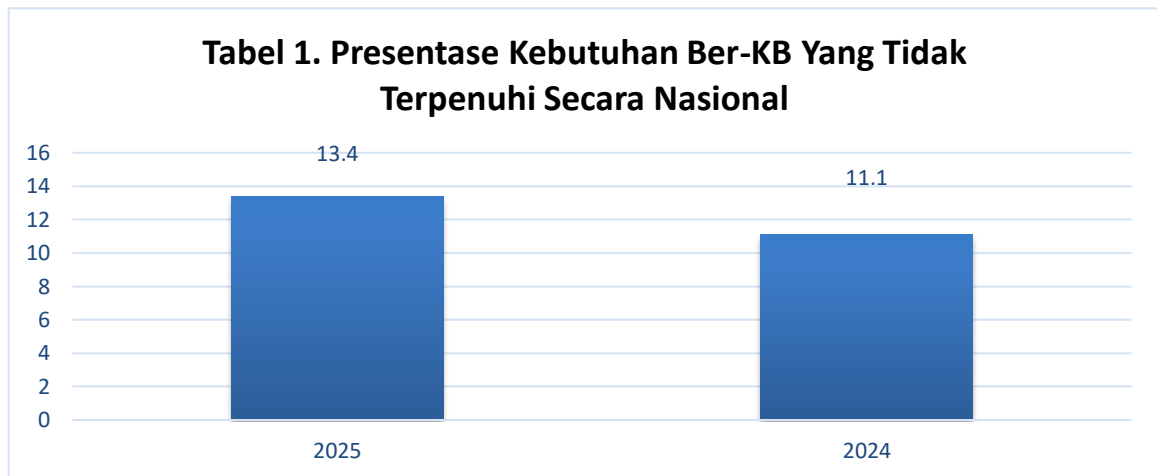
Tahun 2025 Pemerintah Papua melalui DP3AKB menargetkan melakukan penguatan kapasitas kepada lembaga penyedia layanan perlindungan khusus bagi 50 orang yang terdiri dari ormas Perempuan, tokoh adat, organisasi, Lembaga pemerintah dan non pemerintah kegiatan yang dilakukan di kabupaten sarmi dengan realisasi 50 orang atau 50% , pada tahun 2024 43,3% berarti mengalami kenaikan 6,7%. Persentase dihitung dengan membagi jumlah peserta yang hadir dengan total yang ditargetkan dikali 100.

JUMLAH KORBAN KEKERASAN MENURUT USIA								
No	TAHUN	USIA						
		0-6	7-12	13-17	18-24	25-44	45-59	60+
1	2022	15	10	16	22	56	12	0
2	2023	15	9	21	10	37	0	0
3	2024	16	23	61	19	42	9	3
4	2025	9	18	48	25	46	8	1

Sumber Data : UPTD PPA 2025

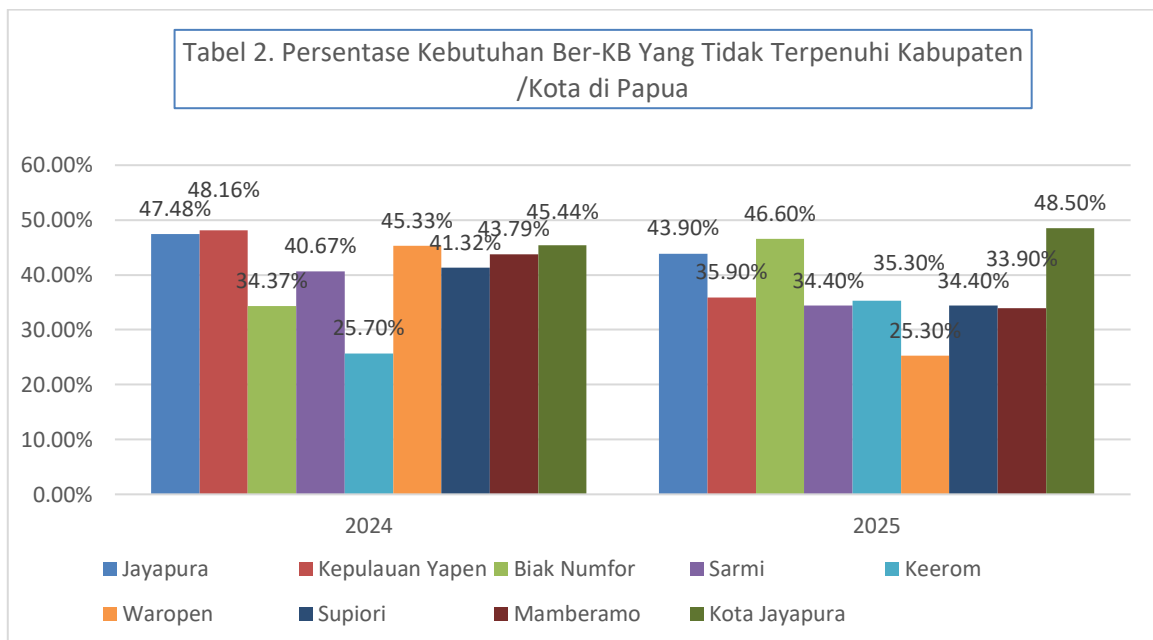
1. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (UnmetNeed)

Pada Tabel 1 di tahun 2025, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi secara Nasional mencapai 13,4%, angka ini naik 2,3% dibandingkan tahun 2024 sebesar 11,1%.



Sumber : Pendataan Keluarga 2025.

Tabel 2 berdasarkan kondisi Presentase kebutuhan ber-KB Sesuai Baseline data BKKBN Unmet Need Kabupaten/Kota di Papua tahun 2024 s/d tahun 2025



Berdasarkan tabel 2 di atas terlihat bahwa Pada tahun 2024 Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Waropen, Mamberamo, dan Supiori berhasil menurunkan angka unmet need. Sementara Kabupaten Biak Numfor, Sarmi dan Kota Jayapura berbanding terbalik naik cukup signifikan. Target unmet need Kabupaten Biak Numfor di tahun 2024 sebesar 34,37% naik sekitar 12,23 dari target 2025 sebesar 46,60% demikian seterusnya sama halnya dengan kabupaten lainnya. Turun naiknya unmet need di daerah dipengaruhi oleh kombinasi faktor **demand** (keinginan) dan **supply** (akses). Determinan utamanya meliputi rendahnya pengetahuan tentang kontrasepsi, kekhawatiran efek samping, penolakan suami/keluarga, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan. Faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi angka *unmet need* antara lain:

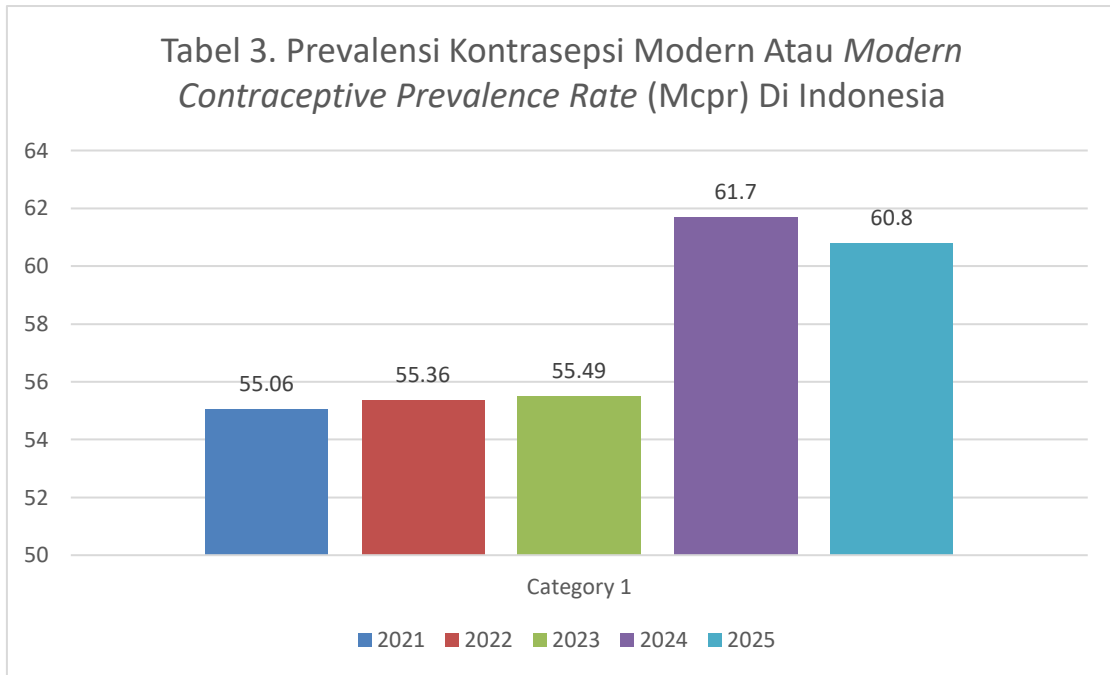
- **Sosial-Demografi:** Usia (terutama kelompok 15-19 tahun dan >35 tahun), tingkat pendidikan yang rendah, tempat tinggal di pedesaan, dan kemiskinan.
- **Dukungan Sosial:** Kurangnya dukungan suami, keluarga, atau mertua dalam penggunaan metode kontrasepsi.
- **Pengetahuan & Sikap:** Kurangnya informasi tentang KB, mitos, dan ketakutan akan efek samping atau kegagalan metode yang pernah digunakan sebelumnya.
- **Akses Layanan:** Terbatasnya jangkauan fasilitas kesehatan dan kurangnya KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dari tenaga kesehatan.
- **Budaya & Agama:** Kepercayaan yang melarang penggunaan alat kontrasepsi termasuk melindungi Ras Papua.

kehamilan sudah menyadari pentingnya ber-KB dengan mengatur dan menjarangkan kehamilan. Sehingga ibu sehat anak terjaga.

2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)

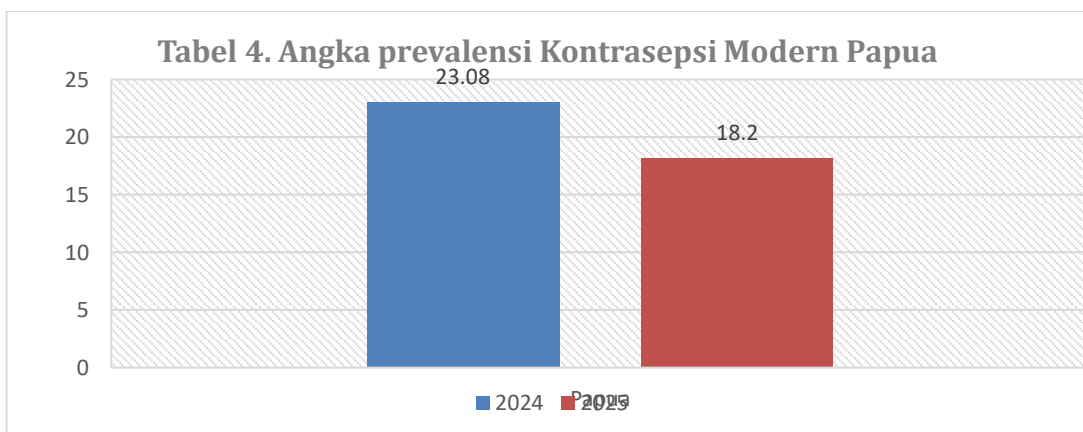
Tren Pertumbuhan Angka prevalensi kontrasepsi modern atau *Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) di Indonesia menunjukkan kenaikan bertahap dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2021 prevalensi berada di angka 55,06%, meningkat menjadi 55,36% atau dapat dikatakan tumbuh sekitar 0,3% pada 2022, dan kemudian naik 0,13% di tahun 2023 sebesar 55,49% pada 2023 dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 61,7%, tahun 2025 turun sekitar 0,9% berdasarkan Sumber Pendataan Keluarga 2024. Berikut adalah rincian data

terkait prevalensi kontrasepsi modern di Indonesia seperti tergambar dalam Tabel 3 :



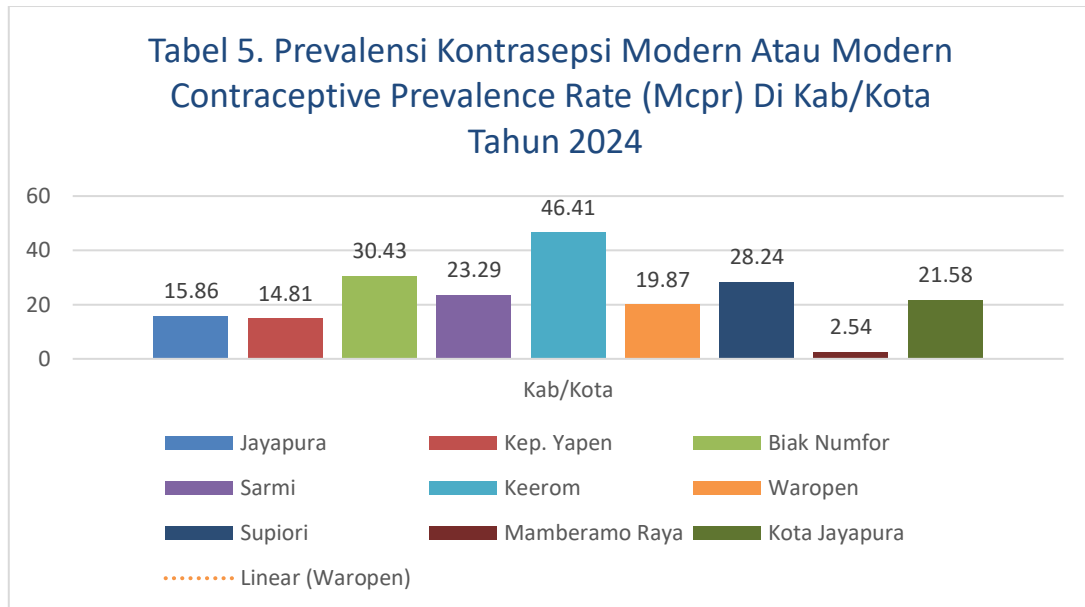
Sumber : Pendataan Keluarga 2025.
Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan KB

- Angka prevalensi kontrasepsi modern di tunjukan dengan metode dominan yang di gunakan PUS (pasangan usia subur) Adalah : Suntikan masih menjadi metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif (sekitar Angka prevalensi Kontrasepsi Modern 0,6%), diikuti oleh pil (21,1%) dan IUD (8,5%).Angka Prevalensi Kontrasepi di Papua tahun 2024-2025 sebagaimana tergambar dalam Table 4 berikut :



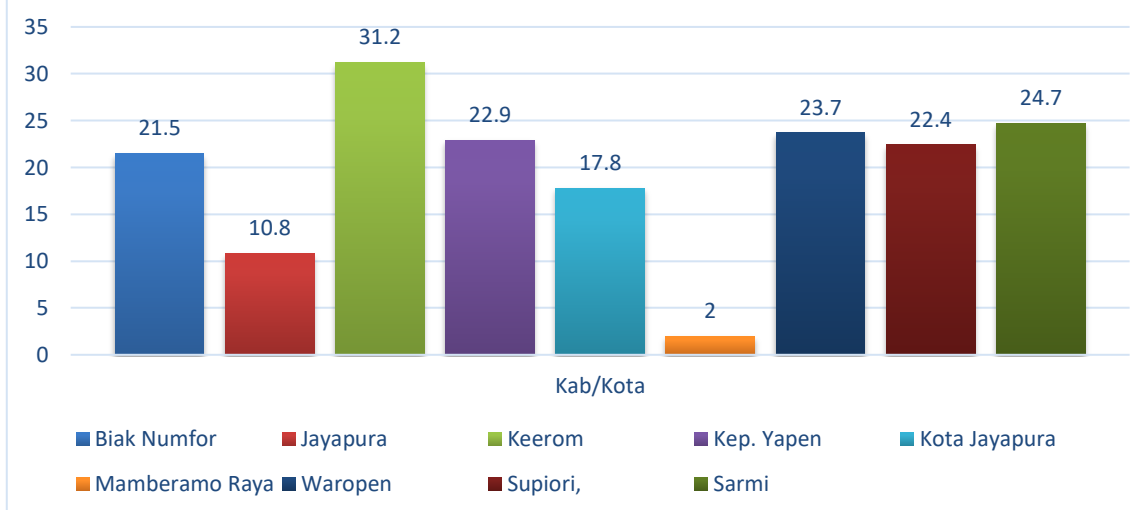
Sumber : Pendataan Keluarga 2025. (DP3AKB)

Berdasarkan table 4. diatas dapat disimpulkan bahwa tahun 2025 persentase pemakaian kontrasepsi modern menurun cukup signifikan 4,88 jika dibandingkan dengan presentasi pemakaian kontrasepsi modern tahun 2024. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern Kabupaten/Kota di Papua tahun 2025 menurun disebabkan karena situasi kondisi daerah yang kurang mendukung. Prevalensi kontrasepsi modern Kabupaten Kota sebagaimana tersirat dalam Table 5 berikut :



Sumber : Pendataan Keluarga 2024. (DP3AKB)

**Tabel 6. Prevalensi Kontrasepsi Modern Atau Modern
Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di Kab/
Kota Tahun 2025**



Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

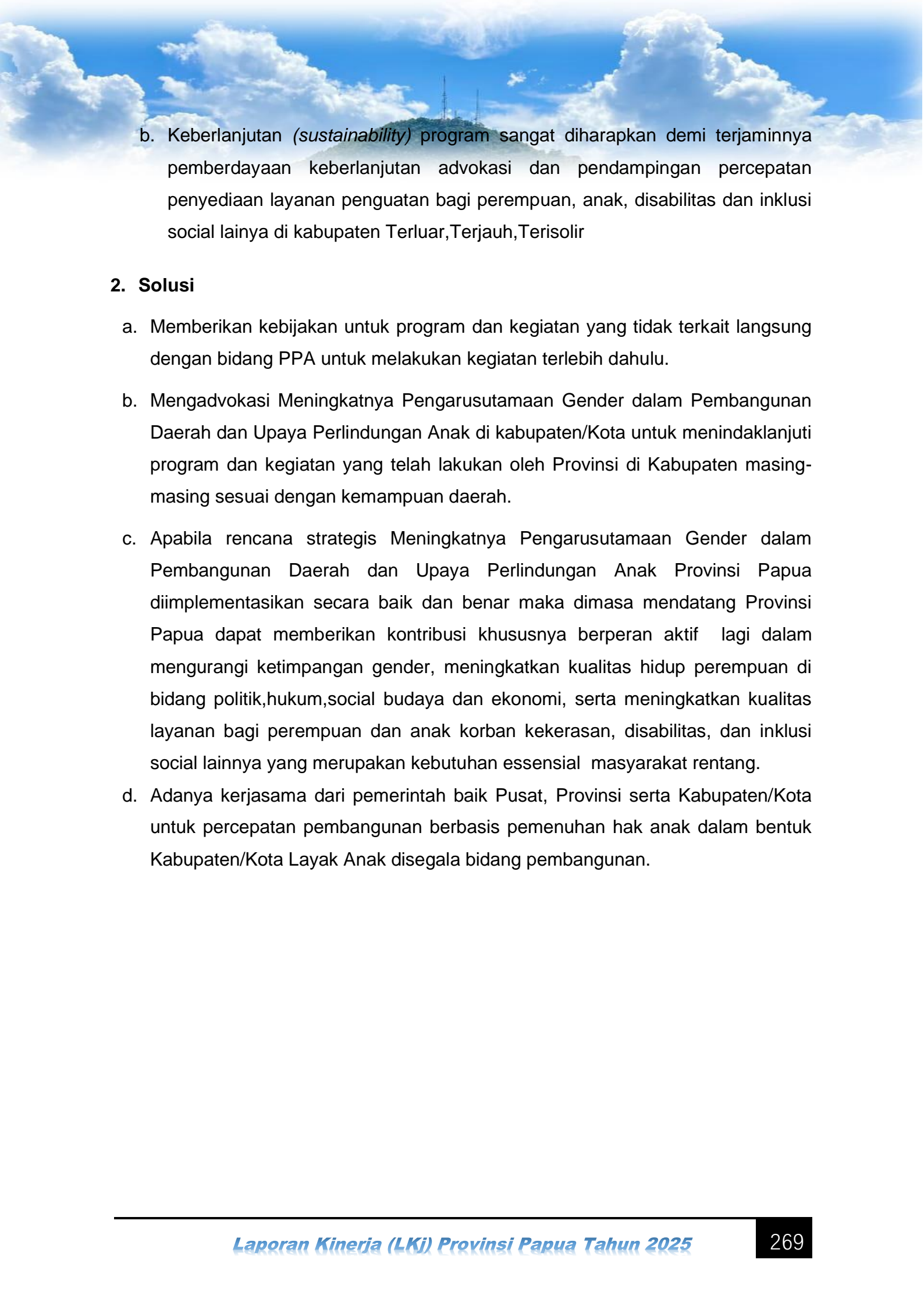
3. Presentase Pasangan Calon Pengantin Yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Stunting

Berdasarkan Data EPPGM 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Presentase Pasangan Calon Pengantin Yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Stunting dilakukan pada saat pemeriksaan Kesehatan calon pengantin di Puskesmas terdekat, biasanya 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan deteksi dini penyakit (HIV, sifilis, hepatitis B, anemia, dan lain lain) untk mencegah penyakit menurun/menular kepada pasangan dan keturunannya, berupa konsultasi Kesehatan/pemberian informasi, pemeriksaan fisik laboratorium dan imunisasi (TT) jika diperlukan. Tujuan adalah untuk mencegah bayi lahir stunting, Adalah dengan mengenal Riwayat pasangan masing-masing.

disimpulkan ada beberapa masalah umum dan sekaligus merumuskan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, sebagai berikut :

1. Kendala

- a. Capaian realisasi program dan anggaran belum proposional pada setiap triwulannya, realisasi cenderung meningkat pada triwulan III dan IV. Karena keterlambatan penyaluran dana otsus tahun 2025, sehingga beberapa kegiatan dipending.

- 
- b. Keberlanjutan (*sustainability*) program sangat diharapkan demi terjaminnya pemberdayaan keberlanjutan advokasi dan pendampingan percepatan penyediaan layanan penguatan bagi perempuan, anak, disabilitas dan inklusi social lainnya di kabupaten Terluar, Terjau, Terisolir

2. Solusi

- a. Memberikan kebijakan untuk program dan kegiatan yang tidak terkait langsung dengan bidang PPA untuk melakukan kegiatan terlebih dahulu.
- b. Mengadvokasi Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Anak di kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah lakukan oleh Provinsi di Kabupaten masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.
- c. Apabila rencana strategis Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dan Upaya Perlindungan Anak Provinsi Papua diimplementasikan secara baik dan benar maka dimasa mendatang Provinsi Papua dapat memberikan kontribusi khususnya berperan aktif lagi dalam mengurangi ketimpangan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang politik, hukum, social budaya dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, disabilitas, dan inklusi social lainnya yang merupakan kebutuhan essensial masyarakat rentang.
- d. Adanya kerjasama dari pemerintah baik Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota untuk percepatan pembangunan berbasis pemenuhan hak anak dalam bentuk Kabupaten/Kota Layak Anak disegala bidang pembangunan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2025

NO	SASARAN	ANGGARAN	REALISASI	%	PROGRAM-PROGRAM
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	37,477,281,909.37	34,163,191,473.90	91.16	
		6,499,196,820.00	6,448,039,781.00	99.21	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
		1,625,336,000.00	1,574,714,560.00	96.89	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
		25,720,125,995.17	22,551,463,876.90	87.68	Pengelolaan Pendidikan Khusus
		3,632,623,094.20	3,588,973,256.00	98.80	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	53,077,012,298.00	51,279,698,996.44	96.61	
		39,577,185,723.00	38,010,776,411.44	96.04	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		207,794,000.00	203,700,418.00	98.03	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
		863,272,200.00	812,968,096.00	94.17	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		4,797,861,800.00	4,673,561,627.00	97.41	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
		6,402,143,575.00	6,350,939,137.00	99.20	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
		898,755,000.00	898,224,717.00	99.94	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
		330,000,000.00	329,528,590.00	99.86	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi

3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	5,783,323,400.00	5,727,554,139.00	99.04	
		1,079,381,000.00	1,061,214,650.00	98.32	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
		4,453,906,400.00	4,417,374,969.00	99.18	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
		250,036,000.00	248,964,520.00	99.57	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	11,936,373,686.00	11,530,244,264.46	96.60	
		238,927,000.00	235,356,490.00	98.51	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	11,697,446,686.00	11,294,887,774.46	96.56	
		5,091,299,385.00	4,752,037,443.00	93.34	Penataan Prasarana Pertanian
		496,196,000.00	493,788,550.00	99.51	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		882,886,505.00	879,091,549.46	99.57	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
		927,994,746.00	927,066,334.00	99.90	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
		3,123,981,175.00	3,070,341,300.00	98.28	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
		1,175,088,875.00	1,172,562,598.00	99.79	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	9,101,934,740.00	9,021,044,264.00	99.11	
		4,122,412,740.00	4,056,603,344.00	98.40	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		4,979,522,000.00	4,964,440,920.00	99.70	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	121,797,638,709.00	121,626,702,940.00	99.86	
		6,371,309,295.00	6,351,466,841.00	99.69	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
		113,819,465,814.00	113,681,768,959.00	99.88	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		159,231,720.00	152,638,810.00	95.86	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		558,631,880.00	554,189,000.00	99.20	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		889,000,000.00	886,639,330.00	99.73	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	9,133,526,275.00	6,761,962,502.00	74.03	
		1,258,352,000.00	1,257,546,950.00	99.94	Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus
		4,401,020,000.00	2,177,036,932.00	49.47	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
		3,474,154,275.00	3,327,378,620.00	95.78	Pelaksanaan Otonomi Daerah

9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	8,918,059,000.00	7,596,621,995.00	85.18	
		1,540,053,000.00	1,464,800,590.00	95.11	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
		2,322,185,000.00	1,556,124,449.00	67.01	Mutasi dan Promosi ASN
		3,746,438,000.00	3,293,202,530.00	87.90	Pengembangan Kompetensi ASN
		1,309,383,000.00	1,282,494,426.00	97.95	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	65,039,884,218.00	62,448,814,528.00	96.02	
		750,000,000.00	747,440,480.00	99.66	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
		4,449,999,000.00	4,380,314,555.00	98.43	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
		900,000,000.00	899,469,330.00	99.94	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
		3,959,973,650.00	3,897,927,288.00	98.43	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		500,000,000.00	492,045,920.00	98.41	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
		9,271,643,600.00	9,129,004,187.00	98.46	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		3,650,000,000.00	3,474,673,300.00	95.20	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		7,851,389,000.00	7,571,827,227.00	96.44	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		4,879,599,968.00	4,727,595,263.00	96.88	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		7,340,279,000.00	6,826,890,244.00	93.01	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

		8,248,912,000.00	7,366,920,955.00	89.31	Pengelolaan Barang Milik Daerah
		6,207,088,000.00	5,970,888,907.00	96.19	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		7,031,000,000.00	6,963,816,872.00	99.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	48,224,873,000.00	46,008,232,970.00	95.40	
		12,900,522,000.00	12,255,161,113.00	95.00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		1,311,680,000.00	1,193,830,426.00	91.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
		1,156,479,000.00	1,146,278,635.00	99.12	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
		4,870,613,000.00	4,383,806,162.00	90.01	Pendampingan dan Asistensi
		183,000,000.00	182,860,000.00	99.92	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
		480,940,000.00	480,940,000.00	100.00	Pengawasan Penggunaan Anggaran
		123,000,000.00	123,000,000.00	100.00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
		21,894,541,000.00	20,953,834,222.00	95.70	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
		5,304,098,000.00	5,288,522,412.00	99.71	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	8,761,128,805.00	8,252,674,412.94	94.20	
		1,773,135,641.00	1,555,007,488.94	87.70	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

		1,019,588,900.00	1,004,888,454.30	98.56	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
		899,752,000.00	793,522,755.00	88.19	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
		1,466,361,110.00	1,413,243,274.70	96.38	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
		2,445,474,484.00	2,379,945,195.00	97.32	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
		1,156,816,670.00	1,106,067,245.00	95.61	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	9,791,651,992.00	8,991,354,577.65	91.83	
		5,752,603,780.00	5,530,947,329.65	96.15	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
		2,189,766,000.00	2,008,070,534.00	91.70	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
		1,849,282,212.00	1,452,336,714.00	78.54	Perbenihan Tanaman Hutan
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	11,368,913,200.00	11,344,305,041.45	99.78	
		454,450,000.00	453,749,593.25	99.85	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
		3,642,936,000.00	3,639,368,035.00	99.90	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
		2,072,975,600.00	2,064,264,508.89	99.58	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
		2,123,232,600.00	2,114,714,627.53	99.60	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
		580,000,000.00	579,396,003.68	99.90	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat

		2,170,847,000.00	2,168,340,273.10	99.88	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
		324,472,000.00	324,472,000.00	100.00	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	5,298,890,285.00	5,218,888,485.00	98.49	
		200,725,050.00	200,725,050.00	100.00	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		209,199,985.00	209,199,985.00	100.00	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
		413,175,120.00	409,575,120.00	99.13	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		487,481,000.00	486,171,000.00	99.73	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		431,219,600.00	398,921,950.00	92.51	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
		392,787,185.00	392,787,185.00	100.00	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		321,362,000.00	282,962,000.00	88.05	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
		338,650,000.00	338,650,000.00	100.00	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)
		546,928,450.00	546,928,450.00	100.00	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
		1,093,795,745.00	1,093,131,745.00	99.94	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		863,566,150.00	859,836,000.00	99.57	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	2,475,215,030.00	2,462,337,282.00	99.48	
		307,999,900.00	302,133,500.00	98.10	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
		1,179,540,845.00	1,174,337,565.00	99.56	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
		987,674,285.00	985,866,217.00	99.82	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	78,941,910,476.00	75,559,266,642.00	95.72	
		30,990,135,423.00	30,030,220,825.00	96.90	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
		7,511,143,053.00	7,085,990,409.00	94.34	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
		40,440,632,000.00	38,443,055,408.00	95.06	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	0.00	0.00	#DIV/0!	
		0.00	0.00	0.00	
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	6,021,592,900.00	5,917,887,721.70	98.28	
		6,021,592,900.00	5,917,887,721.70	98.28	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota

20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	5,313,565,000.00	5,312,343,884.00	99.98	
		881,075,000.00	880,851,764.00	99.97	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		4,432,490,000.00	4,431,492,120.00	99.98	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1,155,585,000.00	1,119,614,700.00	96.89	
		1,043,585,000.00	1,008,414,700.00	96.63	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
		112,000,000.00	111,200,000.00	99.29	Penyediaan Profil Kependudukan
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	11,588,018,079.00	11,355,171,745.00	97.99	
		3,147,880,259.00	3,047,756,259.00	96.82	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama
		3,672,405,420.00	3,580,583,038.00	97.50	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan
		286,561,400.00	284,160,845.00	99.16	Fasilitas Keprotokolan
		4,481,171,000.00	4,442,671,603.00	99.14	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	2,949,294,098.00	2,931,298,365.00	99.39	
		1,156,773,853.00	1,148,968,745.00	99.33	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
		1,792,520,245.00	1,782,329,620.00	99.43	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	85,808,387,143.00	82,845,111,023.76	96.55	
		77,604,299,389.00	74,759,364,029.76	96.33	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		247,262,500.00	185,211,775.00	74.90	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
		460,902,950.00	460,587,950.00	99.93	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
		1,391,626,290.00	1,390,279,312.00	99.90	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		1,400,000,000.00	1,391,625,997.00	99.40	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
		3,359,296,014.00	3,314,426,070.00	98.66	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
		1,345,000,000.00	1,343,615,890.00	99.90	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	3,078,963,449.00	2,141,222,519.00	69.54	
		517,447,769.00	517,447,769.00	100.00	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
		57,785,900.00	-	-	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
		1,391,897,780.00	515,578,000.00	37.04	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

		225,973,000.00	225,973,000.00	100.00	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		885,859,000.00	882,223,750.00	99.59	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
	ANGGARAN PRIORITAS IKU	614,740,469,378.37	590,910,432,246.76	96.12	
	BELANJA LANGSUNG	2,000,847,324,387.94	1,933,710,770,421.34	96.64	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	932,559,162,794.29	910,909,120,708.00	97.68	
	TOTAL BL + BTL	2,933,406,487,182.23	2,844,619,891,129.34	96.97	

Jumlah total anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua untuk tahun 2025 adalah Rp2.933.406.487.182,23 yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak langsung Rp932.559.162.794,29 dan Belanja Langsung Rp2.000.847.324.387,94. Dari anggaran belanja langsung tersebut, jumlah anggaran untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp614.740.469.378,37 atau 30,72% dari anggaran belanja langsung. Realisasi dari anggaran yang digunakan untuk mencapai prioritas IKU adalah sebesar Rp590.910.432.246,76 dari realisasi belanja langsung atau 30,56%. Persentase realisasi anggaran untuk mencapai prioritas IKU dibandingkan dengan anggaran APBD untuk melaksanakan prioritas IKU adalah 20,14%. Penyerapan anggaran untuk melaksanakan prioritas IKU sebesar 20,14% tersebut terjadi karena tidak semua anggaran yang disiapkan untuk melaksanakan program prioritas IKU dapat terserap seluruhnya.

Sumber Data : LRA 2025-BPKAD Prov.Papua



BAB IV



A. KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Provinsi Papua telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan selaku penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Papua.

Tugas-tugas tersebut secara operasional telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Biro, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua melalui kegiatan masing-masing satuan kerja dalam rangka pencapaian Sasaran dan Tujuan Strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaksanakan dan dicapai dalam Tahun 2025 adalah :

Tabel 4.1 Rekapitulasi 26 Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025

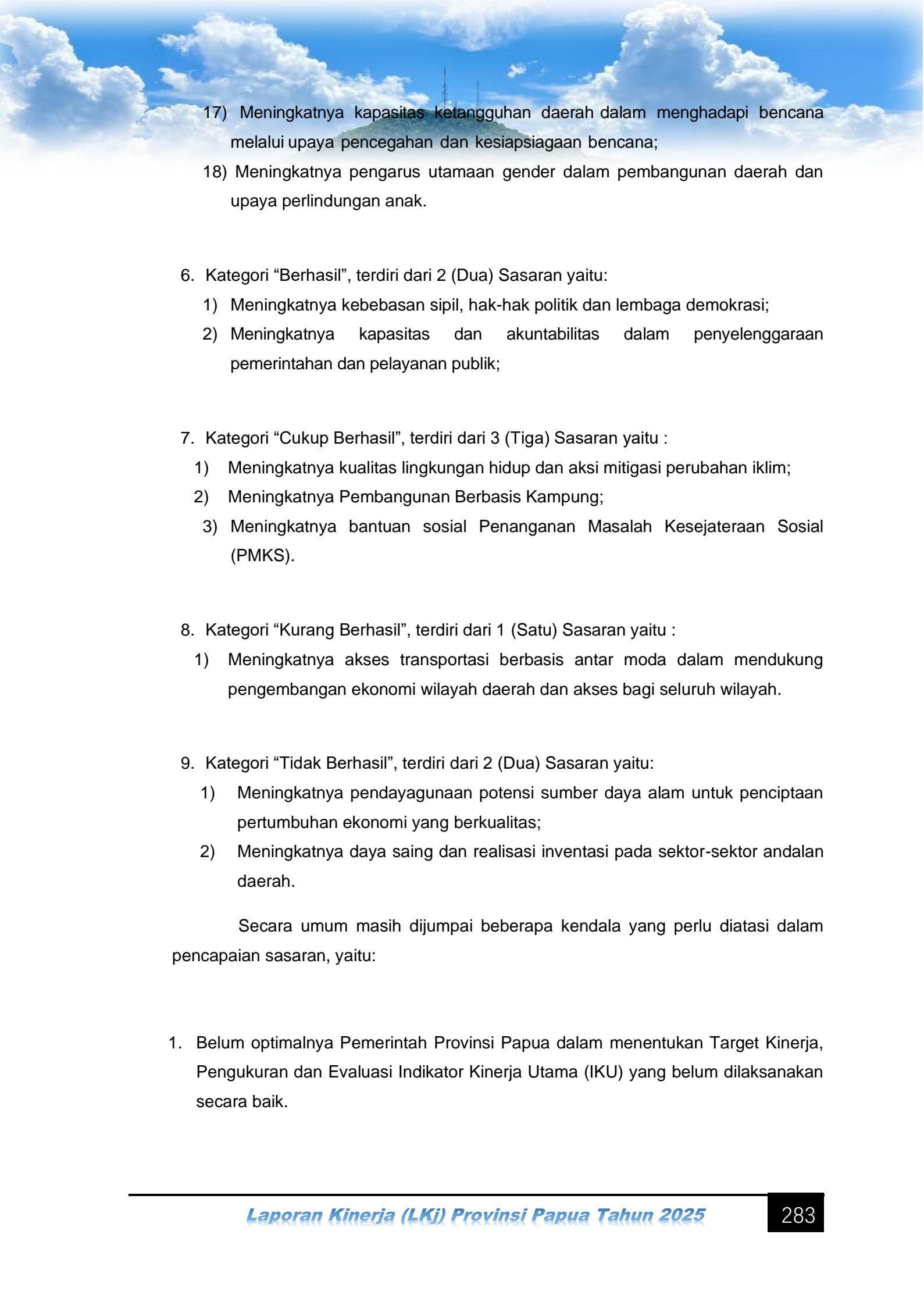
Keterangan	Jumlah
➤ Sasaran Strategis yang dilaksanakan dengan kategori :	26 Sasaran
>Kategori "Sangat Berhasil"	18 Sasaran
>Kategori "Berhasil"	2 Sasaran
>Kategori "Cukup Berhasil"	3 Sasaran
>Kategori "Kurang Berhasil"	1 Sasaran
>Kategori "Tidak Berhasil"	2 Sasaran

➤ Realisasi belanja pelaksanaan IKU	Rp 590.910.432.246,76
>Prosentase realisasi belanja IKU terhadap anggaran IKU	30,56%
➤ Realisasi Belanja Langsung	Rp 1.933.710.770.421.34
> Prosentase realisasi belanja langsung terhadap anggaran belanja langsung	96.64%

Realisasi keuangan tahun 2025 yang digunakan untuk melaksanakan 26 (Dua Puluh Enam) sasaran tersebut adalah sebesar Rp590.910.432.246,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp614.740.469.378,37

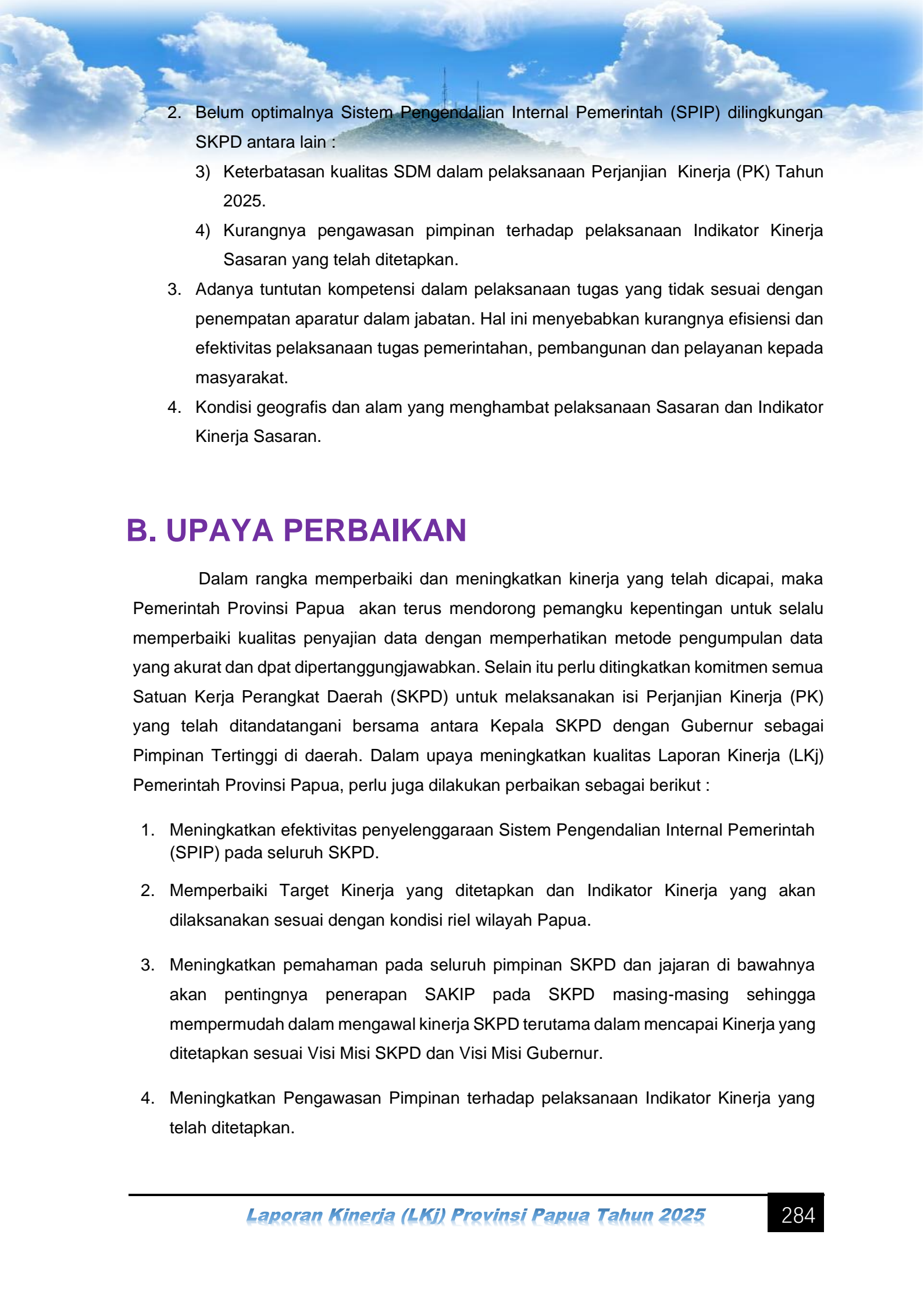
Penjelasan sasaran sesuai kategori adalah sebagai berikut :

5. Kategori "Sangat Berhasil", terdiri dari 18 (Delapan Belas) Sasaran yaitu:
 - 1) Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan;
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - 3) Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga;
 - 4) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah;
 - 5) Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan;
 - 6) Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat;
 - 7) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua;
 - 8) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan daerah;
 - 9) Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah;
 - 10) Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan;
 - 11) Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - 12) Implementasi rencana tata ruang secara konsisten;
 - 13) Meningkatnya ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah;
 - 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman;
 - 15) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP;
 - 16) Meningkatnya percepatan pembagunan wilayah perbatasan;

- 
- 17) Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - 18) Meningkatnya pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak.
6. Kategori “Berhasil”, terdiri dari 2 (Dua) Sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi;
 - 2) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
7. Kategori “Cukup Berhasil”, terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran yaitu :
- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim;
 - 2) Meningkatnya Pembangunan Berbasis Kampung;
 - 3) Meningkatnya bantuan sosial Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
8. Kategori “Kurang Berhasil”, terdiri dari 1 (Satu) Sasaran yaitu :
- 1) Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah daerah dan akses bagi seluruh wilayah.
9. Kategori “Tidak Berhasil”, terdiri dari 2 (Dua) Sasaran yaitu:
- 1) Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
 - 2) Meningkatnya daya saing dan realisasi inventasi pada sektor-sektor andalan daerah.

Secara umum masih dijumpai beberapa kendala yang perlu diatasi dalam pencapaian sasaran, yaitu:


1. Belum optimalnya Pemerintah Provinsi Papua dalam menentukan Target Kinerja, Pengukuran dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dilaksanakan secara baik.

- 
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dilingkungan SKPD antara lain :
 - 3) Keterbatasan kualitas SDM dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.
 - 4) Kurangnya pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan.
 3. Adanya tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
 4. Kondisi geografis dan alam yang menghambat pelaksanaan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

B. UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, maka Pemerintah Provinsi Papua akan terus mendorong pemangku kepentingan untuk selalu memperbaiki kualitas penyajian data dengan memperhatikan metode pengumpulan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu perlu ditingkatkan komitmen semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan isi Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani bersama antara Kepala SKPD dengan Gubernur sebagai Pimpinan Tertinggi di daerah. Dalam upaya meningkatkan kualitas Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua, perlu juga dilakukan perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada seluruh SKPD.
2. Memperbaiki Target Kinerja yang ditetapkan dan Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil wilayah Papua.
3. Meningkatkan pemahaman pada seluruh pimpinan SKPD dan jajaran di bawahnya akan pentingnya penerapan SAKIP pada SKPD masing-masing sehingga mempermudah dalam mengawal kinerja SKPD terutama dalam mencapai Kinerja yang ditetapkan sesuai Visi Misi SKPD dan Visi Misi Gubernur.
4. Meningkatkan Pengawasan Pimpinan terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

- 
5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan antar instansi yang terkait.
 6. Mengutamakan penganggaran untuk melaksanakan Program Kerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan
 7. Mendorong Kepala SKPD untuk memanfaatkan Hasil pengukuran Capaian Kinerja sebagai Dasar pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*).



LAMPIRAN - LAMPIRAN





GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menentukan arah dan ukuran keberhasilan pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Papua, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;
12. Peraturan...../3

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Papua.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode transisi 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

BAB/4

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024-2026.

Pasal 3

- (1) IKU Provinsi merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh SKPD untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 - b. penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
 - c. menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK);
 - d. menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan;
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026.
- (2) IKU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

BAPPERIDA, Inspektorat dan Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, berkewajiban melakukan :

- a. monitoring atas penerapan IKU Provinsi dan SKPD; dan
- b. monitoring dan evaluasi atas capaian IKU Provinsi dan SKPD untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Papua Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...../5

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 7 Februari 2025
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD
YOHANES WALILO, S.Sos., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,



Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 7 Tahun 2025
 Tanggal : 6 Februari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PROVINSI PAPUA
 PERIODE 2024 - 2026**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	SUMBER DATA
Misi 1:Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM			
1. Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk } i$ <p>Keterangan : RLS : Rata-rata Lama Sekolah pada umur a ditahun t Lama sekolah penduduk i ke-i pada suatu wilayah n : Jumlah penduduk ($i = 1,2,3, \dots, n$)</p>	Dinas Pendidikan
	2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan : HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a ditahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i : Usia ($a, a + 1, \dots, n$) FK : Faktor koreksi Sekolah</p>	Dinas Pendidikan

			$FK = \frac{\text{jumlah Siswa sekolah dan mukim}}{\text{jumlah penduduk usia 7 tahun keatas}} + 1$ $\text{Rasio Siswa mukim} = \frac{\text{jumlah bermukim}}{\text{jumlah siswa seluruhnya}}$ $\text{jumlah Siswa sekolah dan mukim} = \text{rasio Siswa mukim} \times \text{jumlah Siswa sekolah}$	
		3. Penduduk yang berusia > 15 Tahun melek huruf	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia >15 Tahun yang melek huruf}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan.
2.		Angka Harapan Hidup	$\text{rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur } x, \text{ pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua}$	Dinas Kesehatan
3.		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	$\frac{\text{Jumlah atlet yang menerima penghargaan tingkat nasional}}{\text{Jumlah seluruh Atlet dalam pembinaan}} \times 100 \%$	Dinas Olahraga dan Pemuda
4.		Persentase organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}} \times 100 \%$	Dinas Olahraga dan Pemuda
5.	1.	Cakupan daerah rawan pangan	$\text{Jumlah Kabupaten/Kota yg rawan pangan}$	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pangan

		2.	Pengeluaran PerKapita yang Discusuaikan	<u>Indeks harga yang dibayar petani</u> Indeks harga yang diterima petani		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan
Misi 2 : Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI						
1.	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama	<u>Konflik yang tertangani</u> Jumlah konflik	X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1.	Nilai skor aspek kebebasan sipil	<u>Permohonan Ijin yang diberikan</u> Jumlah Permohonan Ijin yang masuk	X 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2.	Nilai skor aspek hak-hak politik	Realisasi Hak-Hak Politik dalam UU OTSUS Papua		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Jumlah Lembaga Demokrasi yangmendapat Ijin / Jumlah Lembaga Demokrasi yang terdaftar.		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 3 : Penguatan Tata Kelola Pemerintahan						
1.	Meningkatnya kinerja Otonomi Khusus Papua		Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	Rata-Rata Realisasi Program OTSUS (Fisik dan Keuangan) Rata-Rata Target Pencapaian Program OTSUS	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.	Capaian Nilai SAKIP	Sesuai rumusan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh KEMENPAN dan RB RI		Biro Organisasi
		2.	Capaian Implementasi e-Government terintegrasi (masuk e-planning dll ke program)	<u>Target Sistem yang terintegrasi</u> Realisasi Sistem yang terimplementasi	X 100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program,serta kegiatan pembangunan daerah.	1.	Tingkat konsistensi RKPd terhadap RPJMD	Jumlah program RKPd yang sesuai RPJMD Tahun berkenaan Jumlah program RPJMD yg hrs dilaksanakan Tahun berkenaan	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		2.	Tingkat konsistensi KUAPPS terhadap RKPd	Jumlah program keg sub keg RKPd Tahun berkenaan Jumlah program keg sub keg KUPPAS Tahun berkenaan	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		3.	Tingkat konsistensi RKPd terhadap RAP	<u>Jumlah Sub Keg Tahun berkenaan</u> Jumlah Sub Keg RKPd Tahun Berkenaan	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
4.	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Sesuai rumusan penilaian evaluasi LKPD oleh BPK RI		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		2.	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	<u>Jumlah Realisasi PAD</u> Jumlah Realisasi Total Pendapatan Daerah	X100 %	Badan Pendapatan Daerah
		3.	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah (IPPD)	<u>Jumlah Realisasi IPPD</u> Target IPPD	X 100 %	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Misi 4 : Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural dan Berkelanjutan					
1.	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1.	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	PDRB sektor Tanaman Pangan tahun ybs Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan
		2.	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	PDRB sub sektor perkebunan dan hasilnya tahun ybs Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3.	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	PDRB sub sektor peternakan tahun ybs Jumlah (Rp) PDRB Papua tahun ybs X 100 %	Dinas Perkebunan dan Peternakan
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksimtifigasi perubahan iklim	1.	Indeks Kualitas Udara	IKU = $100 - [50/0,9 \times (Ieu - 0,1)]$ Keterangan: IKU = indeks kualitas udara Ieu = indeks European union 0 - 50 = Baik 51 - 100 = Sedang 101 - 199 = Tidak sehat 200 - 299 = Sangat tidak Sehat ≥ 300 = Berbahaya	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
		2.	Indeks Kualitas Air	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 \text{ rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2 \text{ maksimum}}{2}}$	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

				Keterangan : Nilai relative = $\frac{C_i}{L_{ij}}$ C _i = konsentrasi parameter air L _{ij} = konsentrasi 0 ≤ P _{ij} ≤ 1,0 → baik (memenuhi baku mutu) 1,0 ≤ P _{ij} ≤ 5,0 → cemar ringan 5,0 ≤ P _{ij} ≤ 10,0 → cemar sedang P _{ij} > 10,0 → cemar berat			
				3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = $100 - [(84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}]$ Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				4.	Intensitas penurunan emisi	Jumlah Emisi CO2 tahun ybs PDRB thn ybs X 100 %	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
				3.	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan.	1.	Kontribusi sub Sektor perikanan terhadap PDRB
			2.	Kontribusi (STC) SIL Teluk Cenderawasih terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM.	Realisasi Jumlah Even Kegiatan Target Jumlah Even Kegiatan X 100 %	Dinas Kelautan dan Perikanan	

4.	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5.	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor dalam daerah.	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	$\frac{\text{Nilai investasi PMDN tahun ybs-Nilai investasi PMDN tahun lalu}}{\text{Nilai investasi PMDN tahun lalu}} \times 100\%$	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah.	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi baik/Total Panjang Jalan Provinsi}}{\text{Total Panjang Jalan Provinsi}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	$\frac{\text{Jumlah Program RKPD}}{\text{Jumlah Program Rencana Tata Ruang (RT)/ Rencana Wilayah (RW)}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
8.	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah.	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	$\frac{\text{Jumlah sumber daya air yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah sumber daya air yang tersedia}} \times 100\%$	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

9.	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman.	1.	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik.	$\frac{\text{Penduduk yang menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan}}{\text{Jumlah Penduduk yang ada}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		2.	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	$\frac{\text{Jumlah RT/KK yang mendapatkan layanan air bersih}}{\text{Jumlah RT/KK di Provinsi Papua}} \times 100\%$	DinasPekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu					
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung.	Indeks Kampung Membangun	$\frac{\text{Jumlah Kampung Berkembang}}{\text{Total Jumlah Kampung}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat	

2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Orang Asli Papua (OAP)	Rata-Rata Pemenuhan Kebutuhan Dasar OAP yaitu pada Empat (4) Sektor Utama dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Infrastruktur).	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
3.	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan.	1.	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	(jumlah siswa SD X 6 tahun) + (jumlah Siswa SMP X 9 tahun) + (jumlah Siswa SMA/SMK/SLB X 12 tahun) / jumlah Penduduk usia 9 tahun ke atas wilayah perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
		2.	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua di wilayah perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
		3.	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Y = p/q Y = Pengeluaran Perkapita Wilayah Perbatasan p = Pengeluaran Rumah Tangga sebulan Wilayah Perbatasan q = Jumlah anggota Rumah Tangga Wilayah Perbatasan	Badan Perbatasan dan Kerjasama
4.	Meningkatnya bantuan sosial PMKS.	1.	Cakupan Warga KAT (komunitas Adat Terpencil) yang menerima kesejahteraannya (diberdayakan)	$\frac{\text{Jumlah KAT yang mendapat Pembinaan}}{\text{Jumlah KAT yang belum tertangani}} \times 100 \%$	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Cacatan Sipil

		2.	Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Dinas Sosial, Kependudukan, dan Cacatan Sipil
5.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$ <p>Risk = Indeks Resiko Bencana Hazard = Bahaya Vulnerability = Kerentanan Capacity = Kapasitas</p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p>IPG diukur dengan menggunakan rasio $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-Laki}}$</p> <p>Hasil IPG semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki (angka 100 merupakan nilai rasio paling sempurna dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG)</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

	2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{(I(par) + I(DM) + I(inc-dis))}{3}$ <p>Menjumlahkan Indeks keterwakilan perempuan dalam parlemen, indeks pengambilan keputusan dan indeks distribusi pendapatan dibagi 3</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
--	----	----------------------------------	--	--

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TID
RAMSES LIMBONG, S.IP., M.Si
MAYJEN (Purn)

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



Nelwan Sagrim
NELWAN SAGRIM, SH., M. Hum
NIP. 19741205 200212 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H
KOMJEN POL (Purn)

Jabatan : GUBERNUR PAPUA

Pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jayapura, November 2025

GUBERNUR PAPUA

MATIUS D. FAKHIRI, S.I.K., M.H

KOMJEN POL (Purn)

PERJANJIAN KINERJA (PK) PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8.63
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.48
		3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	81.6
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	Tahun	71.2
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah		Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	77.4
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	7.0
		2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	7620
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	79.68
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	Skor	95.96
		2	Nilai skor aspek hak-hak politik	Skor	50.0
		3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	Skor	60.0

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua		Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	%	100
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1	Capaian Nilai SAKIP	Predikat	BB
		2	Capaian implementasi e- government	%	95.00
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	1	Tingkat konsistensi RKPd terhadap RPD	Persen	95.0
		2	Tingkat konsistensi KUAPPAS terhadap RKPd	Persen	95.0
		3	Tingkat konsistensi RKPd terhadap RAP	Persen	95.0
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP
		2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persen	15.24
		3	Indeks Pengelolaan Pembangunan Daerah	Persen	66.2
12	Meningkatnya penda yagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	Persen	6.0
		2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	Persen	7.0
		3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	Persen	7.0

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1		2		3	4
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	95.0
		2	Indeks Kualitas Air	Indeks	80.0
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	85.0
		4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO ₂ /Rupiah	33.50
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	1	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	12.2
		2	Kontribusi Sail Teluk Cenderawasih (SIL) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Pariwisata, Perikanan, Perdagangan, Perindagkop, UMKM)	STC/Tahun	20
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja		Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	91.7
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah		Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	64.93
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah		Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	Persen	65.00

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten		Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	Persen	50.00
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah		Persentase pemanfaatan sumberdaya air	Persen	82.00
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	Persen	42.00
		2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	Persen	45.75
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung		Indeks Desa Membangun	Indeks	52.5
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	Persen	74
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	Tahun	12.1
		2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	Tahun	68.6
		3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	14.2
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	1	Cakupan Warga KAT yang meningkat Kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per Tahun	70
		2	Cakupan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	ribu orang per tahun	70

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
<u>1</u>		<u>2</u>		<u>3</u>	<u>4</u>
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	Rendah
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	80.3
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65.3

Jayapura, November 2025

GUBERNUR PAPUA


 MATIUS D. FAKHRI, S.I.K., M.H
 KOMJEN POL (Purn)



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Soa Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura- Papua, 99115

Email : papuaitprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com

Website: <http://www.inspektorat.papua.go.id/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Papua.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat kondisi atau hal-hal yang perlu diperbaiki guna memberikan informasi yang akan disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jayapura, 13 Maret 2026

INSPEKTUR
F.DANNY M.K.KORWA, STP., MH., CPFI
PEMBINA TK.I
NIP. 19750511 200312 1 007



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soe-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua 99115,
Email: papualprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
<http://www.inspektorat.papua.go.id/>

SURAT PERINTAH

Nomor : X.700.1/2/ **116** /SP-ITPROV/2026

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Auntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;;
 7. Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua;
 8. Nota Dinas Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua Nomor 000.8.6.3/91/Ro.Orgs tanggal 10 Maret 2026;
 9. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Prov. Papua Tahun 2026.

MEMERINTAHKAN

- Kepada :
- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. F. Danny M.K. Korwa, STP, MH., CPF | : Penanggung Jawab |
| 2. Kamaruddin, S.IP | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Erma G. Listiyanti, SH | : Pengendali Teknis |
| 4. Novelia Pugu, SE, M.Si, CFrA | : Ketua Tim |
| 5. Wira Sutria, SE, Ak, M.Si | : Anggota Tim |
| 6. Diana Pabanyo, S.Pt | : Anggota Tim |
| 7. Titis Ambar Widyaningrum, S.STP | : Anggota Tim |
- Untuk :
1. Seterimanya Surat Perintah ini segera melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 dengan ketentuan :
 - a. Lamanya Review : 10 ((sepuluh) hari
 - b. Beban Biaya : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Provinsi Papua Tahun 2026 (SILPA)
 2. Segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur Papua;
 3. Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Papua dilarang menerima gratifikasi;

4. Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Jayapura, ~~06~~ Maret 2026



F. DANNY M.K.: KORWA, STP, MH., CPFI
PEMBINA TK. I
NIP. 19750115 200312 1 007

Tembusan :

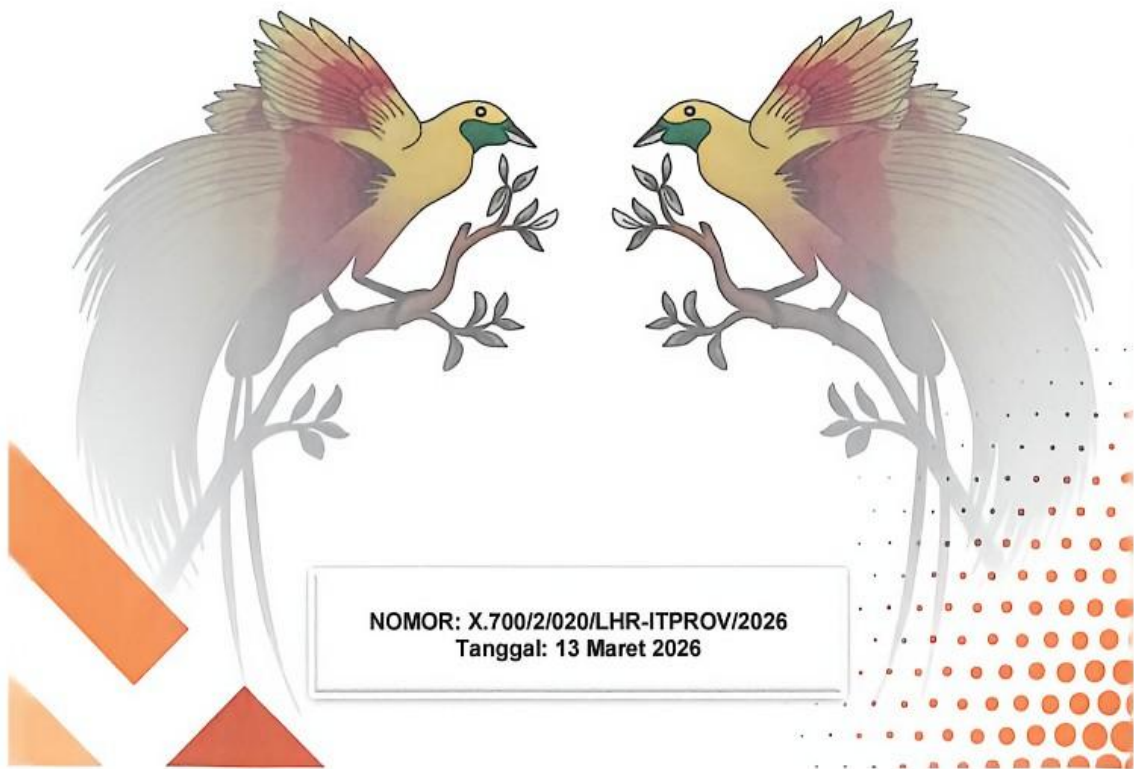
1. Gubernur Papua di Jayapura;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua di Jayapura.



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Soa-Siu Dok II Bawah, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura-Papua 99115,
Email: papualtprov@gmail.com/inspektorat.prov.papua@gmail.com
<http://www.inspektorat.papua.go.id/>

Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi (LKJ) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025



NOMOR: X.700/2/020/LHR-ITPROV/2026
Tanggal: 13 Maret 2026



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA INSPEKTORAT

Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua
Tlp : 0967 537523, Email : info@papua.go.id, laman://papua.go.id//

Jayapura, 13 Maret 2026

Nomor : X.700.1/2/ /LHR-ITPROV/2025
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth. Gubernur Papua
di –
Jayapura

Bersama ini kami sampaikan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Provinsi Papua Nomor 700.1/2/116/SP-ITPROV/2026 tanggal 09 Maret 2026 tentang Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025, kami telah melakukan reviu dengan hasil sebagai berikut :

1. DASAR REVIU

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 5) Peraturan Gubernur Papua Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Papua;
- 6) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Papua Tahun Anggaran 2026.
- 7) Surat Perintah Inspektur Daerah Provinsi Papua Nomor 700.1/2/116/SP-ITPROV/2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang Reviu Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025.

2. TUJUAN REVIU

Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan tujuan adalah :

- 1) Membantu penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

3. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu mencakup format, mekanisme penyusunan dan substansi laporan.

4. URAIAN HASIL REVIU

1) Format

Terhadap format Laporan Kinerja Pemerintah (Laporan Kinerja/LKj) Provinsi Papua Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- (1) Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua telah menampilkan data penting IP namun terdapat perbedaan penulisan antara IKU berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dengan Laporan Kinerja yang telah disusun meliputi :

- a) Sasaran 1 pada indikator kinerja nomor 3 tertulis angka melek huruf. seharusnya penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf;
 - b) Sasaran 16 tertulis meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah. Seharusnya sesuai dengan yakni meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor dalam daerah;
 - c) Sasaran 21 pada indikator kinerja tertulis indeks desa membangun. seharusnya indeks kampung membangun;
 - d) Sasaran 24 pada indikator kinerja tertulis cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan). Seharusnya cakupan warga KAT yang menerima kesejahteraannya (diberdayakan);
 - e) Sasaran 26 tertulis meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak. Seharusnya meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan perempuan dan anak;
- (2) LKj telah menyajikan informasi target kinerja;
 - (3) LKj telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
 - (4) Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan;
 - (5) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.

2) Mekanisme Penyusunan

Terhadap Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- (1) LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
- (2) Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai;
- (3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj;
- (4) Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja;
- (5) Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyaniki keandalannya;
- (6) Analisa/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait;

(7) Lkj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.

3) Substansi

- (1) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
- (2) Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis;
- (3) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja;
- (4) Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama;
- (5) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat;
- (6) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
- (7) IKU dan IK telah SMART.

5. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian hasil reviu, maka kami rekomendasikan kepada Tim Penyusun LKj Provinsi Papua untuk melakukan perbaikan penulisan pada Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Papua yang telah menampilkan data penting IP namun terdapat perbedaan penulisan antara IKU berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2024 – 2026 dengan Laporan Kinerja yang telah disusun meliputi :

- a) Sasaran 1 pada indikator kinerja nomor 3 tertulis angka melek huruf. seharusnya penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf;
- b) Sasaran 16 tertulis meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah. Seharusnya sesuai dengan yakni meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor dalam daerah;
- c) Sasaran 21 pada indikator kinerja tertulis indeks desa membangun. seharusnya indeks kampung membangun;

- d) Sasaran 24 pada indikator kinerja tertulis cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan). Seharusnya cakupan warga KAT yang menerima kesejahteraannya (diberdayakan);
- e) Sasaran 26 tertulis meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak. Seharusnya meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan perempuan dan anak.

6. HAL-HAL YANG PERLU DI PERHATIKAN

- 1) Agar menuliskan nomor halaman pada Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua;
- 2) Menyeragamkan format penulisan (layout portairt) pada Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua.

Demikian disampaikan hasil reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2025. Atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



F. DANNY M.K. KORWA, STP, MH., CPFI
PEMBINA TK. I
NIP. 19750415 200312 1 007

Tembusan :

- 1. Wakil Gubernur Papua di Jayapura;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua di Jayapura.

**NILAI
REFORMASI BIROKRASI (RB)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2016-2025**

TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2016	39,82	C	BURUK
2017	58,03	CC	CUKUP
2018	60,83	B	CUKUP BAIK
2019	61,64	B	CUKUP BAIK
2020	56,51	CC	CUKUP
2021	56,96	CC	CUKUP
2022	59,49	CC	CUKUP
2023	39,09	C	KURANG
2024	55,87	CC	CUKUP
2025	52,38	CC	CUKUP

Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

Sumber : KEMENPANRB RI

**NILAI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

TAHUN	NILAI	PREDIKAT	KET
2015	46,03	C	KURANG
2016	51,18	CC	CUKUP
2017	60,04	B	BAIK
2018	62,59	B	BAIK
2019	64,05	B	BAIK
2020	64,53	B	BAIK
2021	64,57	B	BAIK
2022	66,05	B	BAIK
2023	66,26	B	BAIK
2024	66,85	B	BAIK
2025	66,95	B	BAIK

Pendataan oleh : Biro Organisasi Setda Provinsi Papua

Sumber : KEMENPANRB RI





**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/8/AA.05/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025.**

07 Januari 2026

Yth.
**Sekretaris Daerah
Provinsi Papua**
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Papua dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Papua. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260104MCTK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan nilai **66,95** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"Baik"**, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Papua dapat diakses melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Tembusan

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Yth. Menteri Dalam Negeri
3. Yth. Gubernur Papua

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260104MCTK
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.





MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66); dan
6. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN DAERAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah melalui proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Evaluator.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 9 Januari 2026

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Pudjanti
RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
 BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI
 KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH
 TAHUN 2025

HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Badan Pusat Statistik	4.92	A
2	Kementerian Keuangan	4.87	A
3	Kementerian Kesehatan	4.87	A
4	Kejaksaan Agung	4.85	A
5	Kementerian Komunikasi dan Digital	4.80	A
6	Tentara Nasional Indonesia	4.80	A
7	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	4.80	A
8	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	4.80	A
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	4.80	A
10	Badan Riset Dan Inovasi Nasional	4.77	A
11	Badan Narkotika Nasional	4.77	A
12	Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	4.77	A
13	Badan Kepegawaian Negara	4.76	A
14	Kementerian Dalam Negeri	4.76	A
15	Kementerian Pertanian	4.75	A
16	Ombudsman Republik Indonesia	4.72	A
17	Kementerian Pekerjaan Umum	4.68	A
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga	4.67	A
19	Kementerian Sosial	4.66	A
20	Komisi Pemilihan Umum	4.66	A
21	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	4.62	A
22	Kementerian Pariwisata	4.61	A
23	Kementerian Agama	4.61	A
24	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	4.61	A
25	Lembaga Administrasi Negara	4.59	A

No	Instansi	Indeks	Kategori
26	Kementerian Luar Negeri	4.58	A
27	Kementerian Hukum	4.58	A
28	Kementerian Perindustrian	4.58	A
29	Kementerian Ketenagakerjaan	4.57	A
30	Kepolisian Negara RI	4.57	A
31	Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung RI	4.52	A
32	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	4.51	A
33	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	4.51	A
34	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	4.51	A
35	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	4.51	A
36	Badan Standardisasi Nasional	4.47	A-
37	Badan Informasi Geospasial	4.45	A-
38	Kementerian Perhubungan	4.44	A-
39	Arsip Nasional Republik Indonesia	4.44	A-
40	Kementerian Perdagangan	4.43	A-
41	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	4.41	A-
42	Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif	4.41	A-
43	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	4.40	A-
44	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.39	A-
45	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	4.37	A-
46	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	4.36	A-
47	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	4.36	A-
48	Kementerian Koperasi	4.34	A-
49	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	4.34	A-
50	Kementerian Kehutanan	4.33	A-
51	Perpustakaan Nasional	4.30	A-
52	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia	4.26	A-
53	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	4.25	A-
54	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	4.25	A-
55	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	4.22	A-
56	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4.11	A-
57	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	4.05	A-
58	Kementerian Sekretariat Negara	4.05	A-
59	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	4.04	A-
60	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	4.03	A-
61	Badan Siber dan Sandi Negara	4.02	A-
62	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4.00	B

No	Instansi	Indeks	Kategori
63	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	3.99	B
64	Kementerian Kebudayaan	3.96	B
65	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.93	B
66	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	3.93	B
67	Badan Pengawas Pemilihan Umum	3.90	B
68	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	3.85	B
69	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	3.85	B
70	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	3.85	B
71	Badan Intelijen Negara	3.85	B
72	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	3.83	B
73	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3.82	B
74	Kementerian Transmigrasi	3.81	B
75	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	3.78	B
76	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	3.62	B
77	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	3.62	B
78	Badan Pangan Nasional	3.53	B
79	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	3.48	B-
80	Lembaga Ketahanan Nasional	3.32	B-
81	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	3.32	B-
82	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	3.18	B-
83	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.15	B-
84	Kementerian Hak Asasi Manusia	3.11	B-
85	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	3.09	B-
86	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.03	B-
87	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3.03	B-
88	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3.02	B-
89	Kementerian Pertahanan	3.02	B-
90	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	3.01	B-
91	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	2.93	C
92	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan	N/A	N/A
93	Badan Gizi Nasional	N/A	N/A

B. PROVINSI

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	4.75	A
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	4.73	A
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	4.72	A
4	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	4.71	A
5	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	4.69	A
6	Pemerintah Provinsi Bali	4.68	A
7	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	4.63	A
8	Pemerintah Provinsi Aceh	4.56	A
9	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	4.56	A
10	Pemerintah Provinsi Gorontalo	4.48	A-
11	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	4.48	A-
12	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.41	A-
13	Pemerintah Provinsi Banten	4.35	A-
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	4.35	A-
15	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	4.34	A-
16	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.27	A-
17	Pemerintah Provinsi Riau	4.27	A-
18	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.21	A-
19	Pemerintah Provinsi Lampung	4.19	A-
20	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	4.18	A-
21	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	4.17	A-
22	Pemerintah Provinsi Bengkulu	4.11	A-
23	Pemerintah Provinsi Jambi	4.03	A-
24	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4.01	A-
25	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	3.97	B
26	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	3.96	B
27	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	3.89	B
28	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	3.86	B
29	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3.70	B
30	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	3.44	B-
31	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	3.17	B-
32	Pemerintah Provinsi Maluku	2.91	C
33	Pemerintah Provinsi Papua	2.79	C
34	Pemerintah Provinsi Papua Barat	N/A	N/A
35	Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya	N/A	N/A
36	Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan	N/A	N/A
37	Pemerintah Provinsi Papua Selatan	N/A	N/A
38	Pemerintah Provinsi Papua Tengah	N/A	N/A

C. KOTA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Kota Surabaya	4.84	A
2	Pemerintah Kota Surakarta	4.80	A
3	Pemerintah Kota Denpasar	4.80	A
4	Pemerintah Kota Depok	4.76	A
5	Pemerintah Kota Bandung	4.73	A
6	Pemerintah Kota Bekasi	4.73	A
7	Pemerintah Kota Pontianak	4.71	A
8	Pemerintah Kota Pasuruan	4.71	A
9	Pemerintah Kota Madiun	4.71	A
10	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	4.70	A
11	Pemerintah Kota Balikpapan	4.70	A
12	Pemerintah Kota Cirebon	4.70	A
13	Pemerintah Kota Pekalongan	4.70	A
14	Pemerintah Kota Blitar	4.69	A
15	Pemerintah Kota Batam	4.69	A
16	Pemerintah Kota Bogor	4.69	A
17	Pemerintah Kota Yogyakarta	4.69	A
18	Pemerintah Kota Mojokerto	4.67	A
19	Pemerintah Kota Prabumulih	4.67	A
20	Pemerintah Kota Samarinda	4.67	A
21	Pemerintah Kota Kediri	4.66	A
22	Pemerintah Kota Malang	4.64	A
23	Pemerintah Kota Singkawang	4.63	A
24	Pemerintah Kota Batu	4.62	A
25	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	4.62	A
26	Pemerintah Kota Cimahi	4.61	A
27	Pemerintah Kota Pagar Alam	4.59	A
28	Pemerintah Kota Banjar	4.59	A
29	Pemerintah Kota Medan	4.54	A
30	Pemerintah Kota Bontang	4.53	A
31	Pemerintah Kota Tasikmalaya	4.50	A-
32	Pemerintah Kota Sukabumi	4.50	A-
33	Pemerintah Kota Palembang	4.48	A-
34	Pemerintah Kota Semarang	4.48	A-
35	Pemerintah Kota Padang Panjang	4.47	A-
36	Pemerintah Kota Probolinggo	4.47	A-
37	Pemerintah Kota Banjarmasin	4.45	A-
38	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	4.44	A-
39	Pemerintah Kota Mataram	4.42	A-
40	Pemerintah Kota Salatiga	4.42	A-
41	Pemerintah Kota Pematangsiantar	4.40	A-
42	Pemerintah Kota Tarakan	4.36	A-
43	Pemerintah Kota Payakumbuh	4.35	A-
44	Pemerintah Kota Palangkaraya	4.35	A-
45	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	4.32	A-
46	Pemerintah Kota Lhokseumawe	4.31	A-
47	Pemerintah Kota Metro	4.31	A-

No	Instansi	Indeks	Kategori
48	Pemerintah Kota Bandar Lampung	4.31	A-
49	Pemerintah Kota Tegal	4.28	A-
50	Pemerintah Kota Magelang	4.28	A-
51	Pemerintah Kota Palu	4.23	A-
52	Pemerintah Kota Banda Aceh	4.21	A-
53	Pemerintah Kota Cilegon	4.21	A-
54	Pemerintah Kota Tomohon	4.20	A-
55	Pemerintah Kota Pekanbaru	4.18	A-
56	Pemerintah Kota Bengkulu	4.17	A-
57	Pemerintah Kota Serang	4.16	A-
58	Pemerintah Kota Sabang	4.12	A-
59	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.10	A-
60	Pemerintah Kota Bitung	4.08	A-
61	Pemerintah Kota Ambon	4.06	A-
62	Pemerintah Kota Kupang	4.02	A-
63	Pemerintah Kota Jambi	4.00	B
64	Pemerintah Kota Sibolga	4.00	B
65	Pemerintah Kota Dumai	3.92	B
66	Pemerintah Kota Tangerang	3.90	B
67	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3.90	B
68	Pemerintah Kota Bima	3.84	B
69	Pemerintah Kota Bau Bau	3.83	B
70	Pemerintah Kota Langsa	3.76	B
71	Pemerintah Kota Banjarbaru	3.75	B
72	Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.72	B
73	Pemerintah Kota Kotamobagu	3.71	B
74	Pemerintah Kota Manado	3.67	B
75	Pemerintah Kota Gunungsitoli	3.66	B
76	Pemerintah Kota Makassar	3.44	B-
77	Pemerintah Kota Subulussalam	3.39	B-
78	Pemerintah Kota Padang	3.38	B-
79	Pemerintah Kota Parepare	3.33	B-
80	Pemerintah Kota Binjai	3.32	B-
81	Pemerintah Kota Gorontalo	3.19	B-
82	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	3.11	B-
83	Pemerintah Kota Pariaman	3.10	B-
84	Pemerintah Kota Bukittinggi	3.05	B-
85	Pemerintah Kota Kendari	3.04	B-
86	Pemerintah Kota Sawahlunto	3.04	B-
87	Pemerintah Kota Jayapura	2.97	C
88	Pemerintah Kota Solok	2.93	C
89	Pemerintah Kota Ternate	2.72	C
90	Pemerintah Kota Sungai Penuh	2.66	C
91	Pemerintah Kota Tual	2.45	C-
92	Pemerintah Kota Palopo	N/A	N/A
93	Pemerintah Kota Sorong	N/A	N/A

D. KABUPATEN

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Kabupaten Sumedang	4.72	A
2	Pemerintah Kabupaten Sleman	4.70	A
3	Pemerintah Kabupaten Batang	4.69	A
4	Pemerintah Kabupaten Jombang	4.69	A
5	Pemerintah Kabupaten Bantul	4.68	A
6	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	4.68	A
7	Pemerintah Kabupaten Jember	4.68	A
8	Pemerintah Kabupaten Garut	4.68	A
9	Pemerintah Kabupaten Kediri	4.67	A
10	Pemerintah Kabupaten Magetan	4.67	A
11	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	4.66	A
12	Pemerintah Kabupaten Pemalang	4.66	A
13	Pemerintah Kabupaten Cilacap	4.66	A
14	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	4.66	A
15	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	4.66	A
16	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	4.66	A
17	Pemerintah Kabupaten Banjar	4.66	A
18	Pemerintah Kabupaten Bekasi	4.65	A
19	Pemerintah Kabupaten Majalengka	4.65	A
20	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	4.64	A
21	Pemerintah Kabupaten Ciamis	4.63	A
22	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	4.63	A
23	Pemerintah Kabupaten Bintan	4.63	A
24	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	4.62	A
25	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	4.62	A
26	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	4.61	A
27	Pemerintah Kabupaten Karawang	4.61	A
28	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4.61	A
29	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	4.61	A
30	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	4.60	A
31	Pemerintah Kabupaten Bandung	4.60	A
32	Pemerintah Kabupaten Cirebon	4.60	A
33	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	4.60	A
34	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	4.59	A
35	Pemerintah Kabupaten Banyumas	4.59	A
36	Pemerintah Kabupaten Badung	4.59	A
37	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	4.59	A
38	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	4.59	A
39	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	4.58	A
40	Pemerintah Kabupaten Pinrang	4.58	A
41	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	4.58	A
42	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	4.58	A
43	Pemerintah Kabupaten Balangan	4.57	A
44	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	4.57	A
45	Pemerintah Kabupaten Tegal	4.57	A
46	Pemerintah Kabupaten Sragen	4.56	A

No	Instansi	Indeks	Kategori
47	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	4.56	A
48	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	4.55	A
49	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	4.55	A
50	Pemerintah Kabupaten Klaten	4.54	A
51	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	4.54	A
52	Pemerintah Kabupaten Pacitan	4.52	A
53	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	4.52	A
54	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	4.51	A
55	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	4.51	A
56	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	4.51	A
57	Pemerintah Kabupaten Madiun	4.50	A-
58	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	4.50	A-
59	Pemerintah Kabupaten Blora	4.49	A-
60	Pemerintah Kabupaten Sampang	4.49	A-
61	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	4.49	A-
62	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	4.48	A-
63	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	4.47	A-
64	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	4.47	A-
65	Pemerintah Kabupaten Lumajang	4.47	A-
66	Pemerintah Kabupaten Pasaman	4.47	A-
67	Pemerintah Kabupaten Tabalong	4.46	A-
68	Pemerintah Kabupaten Bogor	4.46	A-
69	Pemerintah Kabupaten Ngawi	4.46	A-
70	Pemerintah Kabupaten Kendal	4.45	A-
71	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	4.45	A-
72	Pemerintah Kabupaten Solok	4.44	A-
73	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	4.44	A-
74	Pemerintah Kabupaten Sumenep	4.44	A-
75	Pemerintah Kabupaten Kuningan	4.43	A-
76	Pemerintah Kabupaten Langkat	4.43	A-
77	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	4.43	A-
78	Pemerintah Kabupaten Purworejo	4.41	A-
79	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	4.41	A-
80	Pemerintah Kabupaten Indramayu	4.41	A-
81	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	4.41	A-
82	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	4.40	A-
83	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	4.39	A-
84	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	4.39	A-
85	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	4.38	A-
86	Pemerintah Kabupaten Lingga	4.38	A-
87	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	4.37	A-
88	Pemerintah Kabupaten Paser	4.37	A-
89	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	4.37	A-
90	Pemerintah Kabupaten Semarang	4.36	A-
91	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	4.36	A-
92	Pemerintah Kabupaten Gresik	4.35	A-
93	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	4.35	A-

No	Instansi	Indeks	Kategori
94	Pemerintah Kabupaten Ketapang	4.34	A-
95	Pemerintah Kabupaten Klungkung	4.33	A-
96	Pemerintah Kabupaten Kebumen	4.33	A-
97	Pemerintah Kabupaten Sambas	4.33	A-
98	Pemerintah Kabupaten Nunukan	4.32	A-
99	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	4.32	A-
100	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	4.32	A-
101	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	4.32	A-
102	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	4.32	A-
103	Pemerintah Kabupaten Lamongan	4.32	A-
104	Pemerintah Kabupaten Batanghari	4.32	A-
105	Pemerintah Kabupaten Mesuji	4.31	A-
106	Pemerintah Kabupaten Katingan	4.31	A-
107	Pemerintah Kabupaten Berau	4.30	A-
108	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	4.30	A-
109	Pemerintah Kabupaten Kapuas	4.29	A-
110	Pemerintah Kabupaten Asahan	4.28	A-
111	Pemerintah Kabupaten Karimun	4.28	A-
112	Pemerintah Kabupaten Kampar	4.27	A-
113	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	4.27	A-
114	Pemerintah Kabupaten Lahat	4.26	A-
115	Pemerintah Kabupaten Subang	4.26	A-
116	Pemerintah Kabupaten Tapin	4.26	A-
117	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	4.25	A-
118	Pemerintah Kabupaten Magelang	4.25	A-
119	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	4.25	A-
120	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	4.25	A-
121	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	4.24	A-
122	Pemerintah Kabupaten Bangka	4.24	A-
123	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	4.23	A-
124	Pemerintah Kabupaten Bombana	4.23	A-
125	Pemerintah Kabupaten Tangerang	4.22	A-
126	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	4.22	A-
127	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	4.21	A-
128	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	4.20	A-
129	Pemerintah Kabupaten Buleleng	4.20	A-
130	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	4.19	A-
131	Pemerintah Kabupaten Grobogan	4.18	A-
132	Pemerintah Kabupaten Bulungan	4.18	A-
133	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	4.17	A-
134	Pemerintah Kabupaten Malang	4.16	A-
135	Pemerintah Kabupaten Demak	4.15	A-
136	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	4.15	A-
137	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	4.15	A-
138	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	4.15	A-
139	Pemerintah Kabupaten Tuban	4.14	A-
140	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	4.13	A-
141	Pemerintah Kabupaten Blitar	4.12	A-

No	Instansi	Indeks	Kategori
142	Pemerintah Kabupaten Dairi	4.10	A-
143	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	4.10	A-
144	Pemerintah Kabupaten Minahasa	4.09	A-
145	Pemerintah Kabupaten Kudus	4.08	A-
146	Pemerintah Kabupaten Bireuen	4.08	A-
147	Pemerintah Kabupaten Kerinci	4.08	A-
148	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	4.07	A-
149	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	4.07	A-
150	Pemerintah Kabupaten Belitung	4.06	A-
151	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	4.06	A-
152	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	4.05	A-
153	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	4.05	A-
154	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	4.04	A-
155	Pemerintah Kabupaten Temanggung	4.04	A-
156	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	4.03	A-
157	Pemerintah Kabupaten Tabanan	4.02	A-
158	Pemerintah Kabupaten Cianjur	4.02	A-
159	Pemerintah Kabupaten Situbondo	4.02	A-
160	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	4.01	A-
161	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	4.00	B
162	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	3.99	B
163	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	3.99	B
164	Pemerintah Kabupaten Karangasem	3.98	B
165	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	3.97	B
166	Pemerintah Kabupaten Simalungun	3.97	B
167	Pemerintah Kabupaten Majene	3.97	B
168	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	3.97	B
169	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	3.96	B
170	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	3.95	B
171	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	3.95	B
172	Pemerintah Kabupaten Sukamara	3.94	B
173	Pemerintah Kabupaten Simeulue	3.93	B
174	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	3.93	B
175	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	3.92	B
176	Pemerintah Kabupaten Sintang	3.91	B
177	Pemerintah Kabupaten Natuna	3.90	B
178	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	3.89	B
179	Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	3.88	B
180	Pemerintah Kabupaten Lebong	3.87	B
181	Pemerintah Kabupaten Gianyar	3.85	B
182	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	3.84	B
183	Pemerintah Kabupaten Konawe	3.83	B
184	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	3.83	B
185	Pemerintah Kabupaten Kaur	3.81	B
186	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	3.81	B
187	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	3.79	B
188	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	3.79	B
189	Pemerintah Kabupaten Agam	3.78	B

No	Instansi	Indeks	Kategori
190	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	3.78	B
191	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	3.78	B
192	Pemerintah Kabupaten Lamandau	3.77	B
193	Pemerintah Kabupaten Bangli	3.76	B
194	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	3.76	B
195	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	3.74	B
196	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	3.74	B
197	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	3.74	B
198	Pemerintah Kabupaten Jepara	3.74	B
199	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	3.74	B
200	Pemerintah Kabupaten Boyolali	3.74	B
201	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	3.74	B
202	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	3.73	B
203	Pemerintah Kabupaten Samosir	3.73	B
204	Pemerintah Kabupaten Nias	3.72	B
205	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	3.72	B
206	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	3.71	B
207	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	3.71	B
208	Pemerintah Kabupaten Serang	3.70	B
209	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	3.69	B
210	Pemerintah Kabupaten Seruyan	3.69	B
211	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	3.68	B
212	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	3.68	B
213	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	3.67	B
214	Pemerintah Kabupaten Karo	3.67	B
215	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	3.66	B
216	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	3.66	B
217	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	3.66	B
218	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	3.65	B
219	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	3.64	B
220	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	3.64	B
221	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	3.63	B
222	Pemerintah Kabupaten Bone	3.63	B
223	Pemerintah Kabupaten Brebes	3.62	B
224	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	3.61	B
225	Pemerintah Kabupaten Soppeng	3.58	B
226	Pemerintah Kabupaten Lembata	3.57	B
227	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	3.56	B
228	Pemerintah Kabupaten Kolaka	3.56	B
229	Pemerintah Kabupaten Mempawah	3.55	B
230	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	3.55	B
231	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	3.55	B
232	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	3.54	B
233	Pemerintah Kabupaten Muko Muko	3.54	B
234	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	3.51	B
235	Pemerintah Kabupaten Dompu	3.50	B-
236	Pemerintah Kabupaten Melawi	3.50	B-
237	Pemerintah Kabupaten Gowa	3.50	B-
238	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	3.49	B-

No	Instansi	Indeks	Kategori
239	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	3.48	B-
240	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	3.48	B-
241	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	3.46	B-
242	Pemerintah Kabupaten Seluma	3.46	B-
243	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	3.46	B-
244	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.45	B-
245	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.45	B-
246	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	3.45	B-
247	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	3.43	B-
248	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	3.43	B-
249	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	3.42	B-
250	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	3.41	B-
251	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	3.41	B-
252	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	3.41	B-
253	Pemerintah Kabupaten Sekadau	3.41	B-
254	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	3.41	B-
255	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	3.40	B-
256	Pemerintah Kabupaten Lebak	3.40	B-
257	Pemerintah Kabupaten Pidie	3.38	B-
258	Pemerintah Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro	3.38	B-
259	Pemerintah Kabupaten Landak	3.37	B-
260	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	3.37	B-
261	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	3.37	B-
262	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	3.36	B-
263	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	3.36	B-
264	Pemerintah Kabupaten Toba	3.34	B-
265	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	3.34	B-
266	Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una	3.33	B-
267	Pemerintah Kabupaten Sigi	3.31	B-
268	Pemerintah Kabupaten Sanggau	3.31	B-
269	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	3.30	B-
270	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	3.27	B-
271	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	3.27	B-
272	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	3.27	B-
273	Pemerintah Kabupaten Malinau	3.27	B-
274	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	3.24	B-
275	Pemerintah Kabupaten Manokwari	3.23	B-
276	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	3.22	B-
277	Pemerintah Kabupaten Muna	3.21	B-
278	Pemerintah Kabupaten Buton	3.21	B-
279	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	3.21	B-
280	Pemerintah Kabupaten Rembang	3.20	B-
281	Pemerintah Kabupaten Siak	3.19	B-
282	Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	3.18	B-
283	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	3.16	B-
284	Pemerintah Kabupaten Bima	3.16	B-
285	Pemerintah Kabupaten Ende	3.15	B-
286	Pemerintah Kabupaten Merangin	3.15	B-

No	Instansi	Indeks	Kategori
287	Pemerintah Kabupaten Tolikara	3.15	B-
288	Pemerintah Kabupaten Buru	3.14	B-
289	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	3.13	B-
290	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.13	B-
291	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	3.08	B-
292	Pemerintah Kabupaten Manggarai	3.08	B-
293	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	3.06	B-
294	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.04	B-
295	Pemerintah Kabupaten Barru	3.02	B-
296	Pemerintah Kabupaten Sinjai	3.01	B-
297	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	3.00	C
298	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	2.96	C
299	Pemerintah Kabupaten Pati	2.96	C
300	Pemerintah Kabupaten Boalemo	2.95	C
301	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	2.95	C
302	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	2.94	C
303	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	2.94	C
304	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	2.92	C
305	Pemerintah Kabupaten Tebo	2.91	C
306	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	2.90	C
307	Pemerintah Kabupaten Fak Fak	2.90	C
308	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	2.90	C
309	Pemerintah Kabupaten Mamasa	2.89	C
310	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	2.88	C
311	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	2.85	C
312	Pemerintah Kabupaten Poso	2.84	C
313	Pemerintah Kabupaten Morowali	2.83	C
314	Pemerintah Kabupaten Alor	2.81	C
315	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	2.81	C
316	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	2.79	C
317	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	2.79	C
318	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	2.79	C
319	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	2.78	C
320	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	2.77	C
321	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	2.77	C
322	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	2.76	C
323	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	C
324	Pemerintah Kabupaten Mamuju	2.74	C
325	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	2.73	C
326	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	2.72	C
327	Pemerintah Kabupaten Banggai	2.71	C
328	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	2.69	C
329	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	2.69	C
330	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	2.67	C
331	Pemerintah Kabupaten Belu	2.65	C
332	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	2.64	C
333	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	2.62	C
334	Pemerintah Kabupaten Maros	2.60	C
335	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	2.59	C

No	Instansi	Indeks	Kategori
336	Pemerintah Kabupaten Wajo	2.59	C
337	Pemerintah Kabupaten Ngada	2.59	C
338	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.57	C
339	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	2.56	C
340	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	2.56	C
341	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	2.55	C
342	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	2.54	C
343	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	2.54	C
344	Pemerintah Kabupaten Jembrana	2.53	C
345	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	2.52	C
346	Pemerintah Kabupaten Buol	2.50	C-
347	Pemerintah Kabupaten Sikka	2.49	C-
348	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	2.47	C-
349	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	2.44	C-
350	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	2.43	C-
351	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	2.42	C-
352	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	2.41	C-
353	Pemerintah Kabupaten Jayapura	2.41	C-
354	Pemerintah Kabupaten Kaimana	2.40	C-
355	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	2.35	C-
356	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2.31	C-
357	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	2.30	C-
358	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	2.28	C-
359	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	2.27	C-
360	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	2.26	C-
361	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	2.25	C-
362	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	2.19	C-
363	Pemerintah Kabupaten Bungo	2.18	C-
364	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	2.18	C-
365	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	2.18	C-
366	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	2.14	C-
367	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	2.13	C-
368	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	2.10	C-
369	Pemerintah Kabupaten Donggala	2.06	C-
370	Pemerintah Kabupaten Merauke	2.06	C-
371	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	2.03	C-
372	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	2.01	C-
373	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	1.99	D
374	Pemerintah Kabupaten Kupang	1.97	D
375	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	1.96	D
376	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	1.96	D
377	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	1.84	D
378	Pemerintah Kabupaten Sorong	1.83	D
379	Pemerintah Kabupaten Takalar	1.76	D
380	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	1.54	D
381	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	1.38	E
382	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	1.16	E

No	Instansi	Indeks	Kategori
383	Pemerintah Kabupaten Mappi	1.13	E
384	Pemerintah Kabupaten Nduga	N/A	N/A
385	Pemerintah Kabupaten Malaka	N/A	N/A
386	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	N/A	N/A
387	Pemerintah Kabupaten Supiori	N/A	N/A
388	Pemerintah Kabupaten Asmat	N/A	N/A
389	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	N/A	N/A
390	Pemerintah Kabupaten Deiyai	N/A	N/A
391	Pemerintah Kabupaten Dogiyai	N/A	N/A
392	Pemerintah Kabupaten Enrekang	N/A	N/A
393	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	N/A	N/A
394	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	N/A	N/A
395	Pemerintah Kabupaten Keerom	N/A	N/A
396	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	N/A	N/A
397	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	N/A	N/A
398	Pemerintah Kabupaten Luwu	N/A	N/A
399	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	N/A	N/A
400	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	N/A	N/A
401	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	N/A	N/A
402	Pemerintah Kabupaten Maybrat	N/A	N/A
403	Pemerintah Kabupaten Mimika	N/A	N/A
404	Pemerintah Kabupaten Nabire	N/A	N/A
405	Pemerintah Kabupaten Paniai	N/A	N/A
406	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	N/A	N/A
407	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	N/A	N/A
408	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	N/A	N/A
409	Pemerintah Kabupaten Puncak	N/A	N/A
410	Pemerintah Kabupaten Sarmi	N/A	N/A
411	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	N/A	N/A
412	Pemerintah Kabupaten Tambrauw	N/A	N/A
413	Pemerintah Kabupaten Toli Toli	N/A	N/A
414	Pemerintah Kabupaten Waropen	N/A	N/A
415	Pemerintah Kabupaten Yalimo	N/A	N/A

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI
KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN
DAERAH TAHUN 2025

KATEGORI PENILAIAN HASIL
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2025

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

Keterangan:

N/A adalah singkatan dari *Not Available*, yaitu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dievaluasi tidak memenuhi syarat untuk dilakukan kalkulasi nilai sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan evaluasi, sehingga tidak menadapatkan nilai indeks dan tidak masuk dalam kategori yang ada.

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA





Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menerima penghargaan bergengsi **The 2nd Regional Champion Index 2025** yang diselenggarakan oleh **InfoBank Media Group**, Penyerahannya diwakili Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan di Jakarta 16 Mei 2025.

Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kinerja Pj Gubernur Papua dalam memperkuat aspek sosial, membangun sinergi antarlembaga, serta dukungan aktif terhadap kemajuan Bank Papua sebagai BUMD sektor keuangan di wilayah Papua.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen Pj. Gubernur Papua dalam membangun kerja sama yang kuat dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di Tanah Papua.

Dalam penyampainya, Ramses Limbong mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan. Ia menegaskan pentingnya peran Bank Papua dalam mendorong pembangunan daerah dan menekankan agar semua pihak terus bersinergi untuk kemajuan bersama, "Saya mengucapkan terima kasih kepada InfoBank Media Group atas penghargaan ini. Ini merupakan penghargaan bagi seluruh rakyat Papua. Saya berharap Bank Papua semakin meningkatkan kinerjanya sebagai BUMD sektor keuangan dan terus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di tanah Papua, di tengah dinamika dan tantangan yang kita hadapi," ujar Ramses.

Lebih lanjut, Pj. Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan, tidak hanya Bank Papua, untuk terus bersatu dan bergandengan tangan dalam membangun Tanah Papua demi mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Papua meraih penghargaan **Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Awards** yang diselenggarakan oleh **Bank Indonesia (BI)**. Adapun **Provinsi Papua dinilai berkinerja terbaik Tahun 2025**.

Adapun lima TPID Provinsi berkinerja terbaik tahun 2025 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua.

Terkait dengan penghargaan tersebut, Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengaku bahwa apa yang diraih tak terlepas dari kerja keras tim.

“Ini yang sudah dikerjakan oleh Penjabat Gubernur Papua sebelumnya, ketika saya sudah menjadi gubernur maka mendapatkan manfaatnya,” ucap Fakhiri, Selasa (2/12).

Ia pun mengapresiasi para pihak yang bekerja di Tim Pengendalian Inflasi Daerah Papua, karena telah melakukan langkah-langkah yang luar biasa untuk akselerasi pembangunan Provinsi Papua.

“Dengan mendapat penghargaan ini, ke depannya TPID menjadi tantangan tersendiri untuk kita pertahankan di tahun depan,” ujarnya. ***



TPID Papua Raih Penghargaan Peserta Teraktif dalam Capacity Building TPID 2025

Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua 2025-07-25 1183 x
Dilihat Jakarta, 25 Juli 2025 — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua meraih penghargaan sebagai **Peserta Teraktif** dalam kegiatan Capacity Building TPID Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada Kamis–Jumat, 24–25 Juli di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta.

Kegiatan ini mengangkat tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilisasi Harga melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Efisiensi Rantai Pasok, dan Optimalisasi Sinergi Pusat–Daerah” dan diikuti oleh seluruh TPID Provinsi se-Indonesia.

Tujuannya adalah memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi, khususnya sektor pangan.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. ANDRY, S.IP., M.Si, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya bersama Bank Indonesia Perwakilan Papua akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan TPID Provinsi Papua.

"Pasca kegiatan ini, kami akan memperkuat strategi 4K—Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif—dengan sentuhan inovasi.

Yang utama, kami juga tengah mempersiapkan High Level Meeting (HLM) TPID berikutnya, yang akan diawali dengan rapat koordinasi teknis untuk evaluasi semester I pengendalian inflasi 2025 serta tindak lanjut hasil HLM sebelumnya yang telah dilaksanakan pada Februari 2025," ujar Dr. Andry.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas partisipasi aktif TPID Papua dalam memperkuat peran dan strategi pengendalian inflasi secara nasional.



JAKARTA - Provinsi Papua meraih Penghargaan Pelayanan Kepemudaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) atas keberhasilan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara signifikan dalam dua tahun terakhir.

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen yang menerima langsung penghargaan tersebut **di Jakarta, Selasa (28/10/2025)**, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah kerja bersama seluruh elemen masyarakat Papua.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa anak muda Papua mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Papua akan terus membuka ruang bagi generasi muda untuk tumbuh, berinovasi, dan memimpin di berbagai bidang,” ujar Aryoko.

Ia menegaskan, peningkatan IPP Papua mencerminkan arah pembangunan yang tepat, dengan fokus pada penguatan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kepemimpinan pemuda.

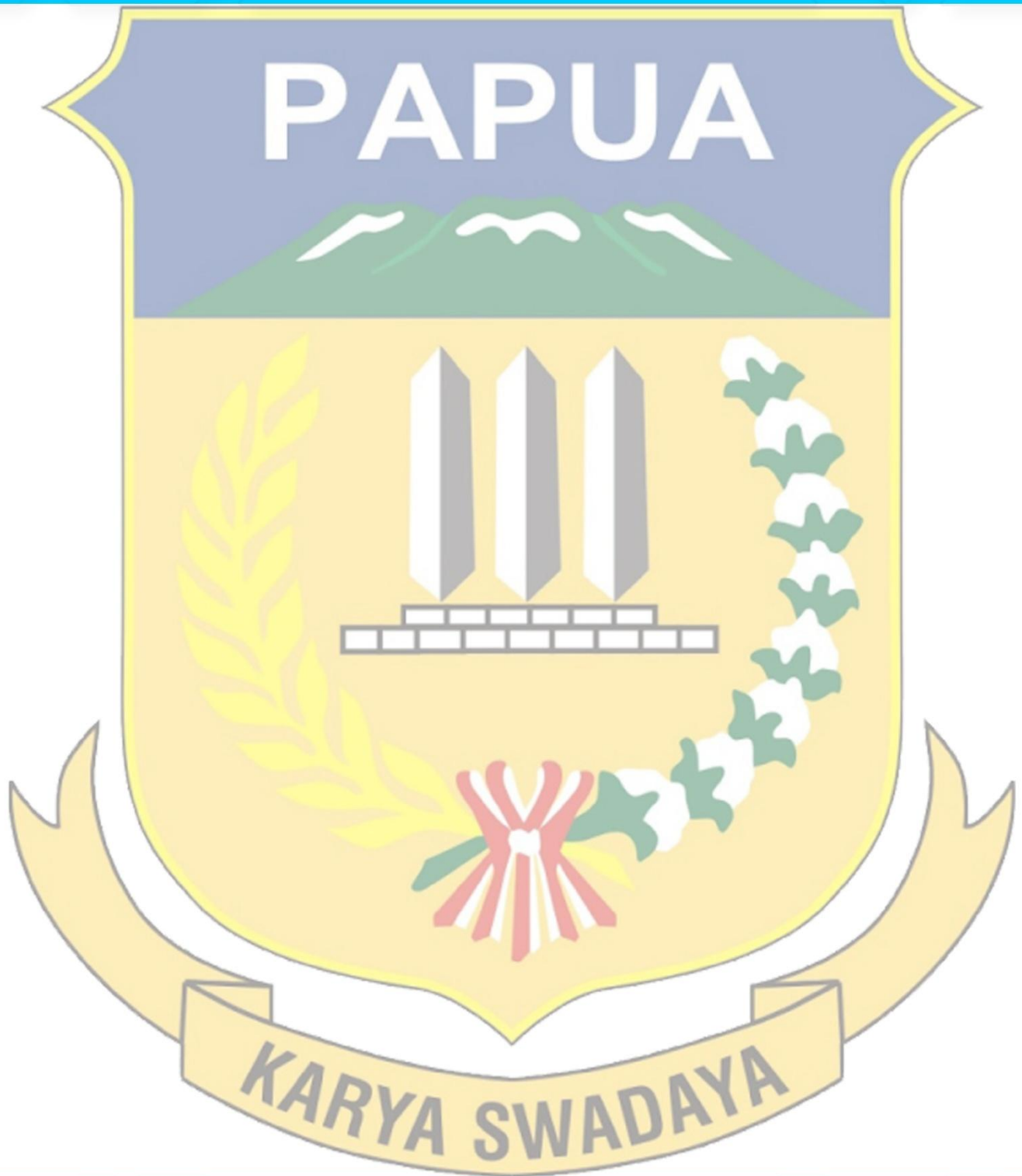
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Sonya Monim, menjelaskan bahwa IPP Papua tahun 2022 tercatat sebesar 57,50, di atas rata-rata nasional 55,33. Pada tahun 2024, IPP Papua meningkat menjadi 56,33, dengan capaian 70% di bidang pendidikan, 65% pada kesehatan dan kesejahteraan, serta 53,33% pada gender dan inklusi sosial.

“Capaian ini hasil sinergi lintas sektor dan pelibatan aktif organisasi kepemudaan serta lembaga pendidikan melalui Rencana Aksi Daerah Pembangunan Pemuda,” jelas Sonya.

Pemerintah Provinsi Papua menilai peningkatan IPP memberikan manfaat strategis, antara lain meningkatkan kepercayaan publik dan investor, mendorong partisipasi aktif pemuda, serta membuka peluang dukungan afirmatif dari pemerintah pusat.

“Peningkatan IPP berarti peningkatan kualitas sumber daya manusia muda Papua — investasi jangka panjang untuk masa depan daerah dan bangsa,” tutup Sonya Monim.

LAPORAN KINERJA



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA